

Laporan Tahunan
Annual Report

2023

Mengoptimalkan Peluang, Memaksimalkan Pertumbuhan

Optimizing Opportunities,
Maximizing Growth







Mengoptimalkan Peluang, Memaksimalkan Pertumbuhan

Optimizing Opportunities,
Maximizing Growth

Tahun 2023 adalah tahun yang sangat penting bagi Perseroan, dengan keberhasilannya memantapkan *platform* bisnis di bidang jalan tol. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan sektor jalan tol sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, yang tentunya akan membuka banyak peluang bagi Perseroan sebagai salah satu pemain utama di sektor ini. Dalam upaya memperkuat posisinya tersebut, Perseroan melakukan serangkaian aksi korporasi pada tahun 2023, salah satunya yaitu peningkatan modal pada salah satu sektor usahanya di pengelolaan jalan tol, yaitu PT Margautama Nusantara (MUN). Kemudian, menjelang akhir tahun 2023, sebuah keputusan penting lainnya telah diambil, yaitu untuk *Go Private*. Langkah ini akan memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi Perseroan untuk memanfaatkan modal dari perputaran kas internal untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ke depan, terutama di sektor jalan tol.

2023 is a milestone year for the Company, with its success in establishing a business platform in the toll road sector. As is known, the government has designated the toll road sector as one of the national development priorities, which of course will open up many opportunities for the Company as one of the main players in this sector. To further strengthen its position, The Company to conduct a series of corporate actions in 2023, one of which is a capital increase in one of its business sectors in toll road management, PT Margautama Nusantara (MUN). Then, towards the end of 2023, another important decision was taken, namely to Go Private. This strategy will provide more flexibility for the Company to utilize capital from internal cash flows to maximize its growth potential going forward, especially in the toll road sector.

Daftar Isi

Table of Contents

01

Ikhtisar Kinerja Performance Highlights

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	8
Ikhtisar Saham Stock Highlights	11
Aksi Korporasi Corporate Action	13
Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham Information on Trading Suspension	16
Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi Bonds, Sukuk, or Conversion Bonds Highlights	16
Informasi Sumber Pendanaan Lainnya Information on Other Sources of Funding	16
Peristiwa Penting 2023 2023 Event Highlights	18
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	23

02

Laporan Manajemen Management Report

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Reports	28
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35
Laporan Direksi Board of Directors Reports	36
Direksi Board of Directors	48

03

Profil Perusahaan Company Profile

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan General Information and Corporate Identity	52
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	54
Rekam Jejak Pencapaian Milestones	56
Visi dan Misi Vision and Mission	60
Nilai Perusahaan Corporate Value	60
Kegiatan Usaha Business Activities	61
Produk dan Jasa Products and Services	62
Keanggotaan pada Asosiasi Association Membership	65
Struktur Organisasi Organization Structure	66
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	68
Profil Direksi Board of Directors Profile	72
Profil Pejabat Eksekutif Executive Officers' Profile	80
Demografi Karyawan Employee Demography	86
Informasi Pemegang Saham Shareholders Information	88
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	89
Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology	91
Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure	92
Entitas Anak dan Asosiasi Subsidiaries and Associate Entities	93
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	101
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and Professions	101

04

Analisis & Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha Business Segment Overview	105
Strategi Usaha Tahun 2023 Business Strategy in 2023	105
Profitabilitas Per Segmen Usaha Profitability by Business Segment	112
Tinjauan Keuangan Financial Overview	115
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	115
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Statements of Consolidated Financial Position	118
Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flow Statements	119
Rasio - Rasio Keuangan Financial Ratios	120
Kemampuan Membayar Utang Ability to Repay Debts	120
Kolektibilitas Piutang Collectability of Receivables	120
Struktur Modal Capital Structure	121
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Expenditures	121
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Expenditures	121
Informasi Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan Information on Material Facts Subsequent to the Accountant's Reporting Date	122
Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing Impact on Movement on Foreign Exchange Rates	122

Perbandingan Target dan Realisasi Comparison of Targets and Realization	122
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	123
Prospek Usaha Business Prospects	125
Dividen Dividen	127
Kompensasi Jangka Panjang Melalui Program Kepemilikan Saham Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)	127
Long-Term Compensation through the Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)	
Kompensasi Jangka Pendek Manajemen Kunci Key Management Short-Term Compensation	127
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Use of Proceeds from the Public Offering	127
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau dengan Pihak Afiliasi Information on Material Transactions with Conflicts of Interest or Transactions with Affiliated Parties	128
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Changes in Laws and Regulations	130
Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan pada Tahun Buku Changes in Accounting Policies Applied in the Fiscal Year	130

05

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Komitmen dan Prinsip Penerapan GCG Commitment and Principles of GCG Implementation	136
Struktur dan Kebijakan Tata Kelola Structure and Policy of Governance	141
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	142
Dewan Komisaris Board of Commissioners	160
Direksi Board of Directors	169
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors	180
Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership Reporting Policy	182
Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors	182
Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi Affiliate Relationships of the Board of Commissioners and Board of Directors	184
Organ Pendukung Dewan Komisaris Organs Supporting the Board of Commissioners	185
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	197
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	200
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	203
Manajemen Risiko Risk Management	205
Perkara Penting dan Sanksi Administratif yang Dihadapi Important Cases and Administrative Sanctions Faced	207
Etika dan Norma Perilaku Ethical and Behavioural Norms	208
Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Provision of Performance-Based Long-Term Compensation	209
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	210
Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi Anti-Corruption and Gratification Policy	211

06

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Corporate Social and Environmental Responsibility

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk Statement Letter Board of Commissioners and the Board of Directors about the Responsibility of Annual Report 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk	214
--	-----

Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statement	215
---	-----

Sekilas tentang Kami

About Us

Sektor Usaha
Business Sector

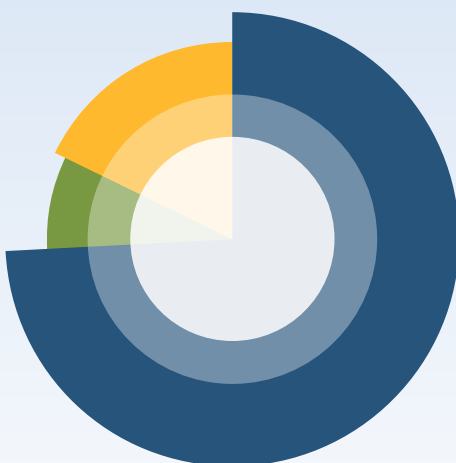


Pengelolaan Air
Water Management

Jalan Tol
Toll Road



Pemegang Saham
Shareholders



74,65% PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS)

8,19% PT Indonesia Infrastructure Finance

17,16% Masyarakat dan Lainnya
Public and Other



03 **Energi Terbarukan**
Renewable Energy

04 **Periklanan dan Pengelolaan Parkir**
Advertising and Parking
Management

Kilas Kinerja 2023

2023 Performance Highlights



4,46%

Perseroan berhasil meningkatkan *EBITDA* tahun 2023 menjadi Rp489,35 juta dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp468,47 juta.

The company managed to increase *EBITDA* in 2023 to Rp489.35 million from Rp468.47 million in the previous year.



41,33%

Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan kenaikan laba usaha sebesar 41,33%, dari Rp278.188 juta pada tahun 2022 menjadi Rp393.163 di tahun 2023.

In 2023, the Company recorded a 41.33% increase in operating profit, from Rp278.188 million in 2022 to Rp393.163 in 2023.



Rp917.625

Juta | Million

Seiring dengan meningkatnya volume *traffic*, peningkatan tarif penjualan air bersih dan volume penjualan serta tarif penjualan energi listrik, pendapatan Perseroan di luar konstruksi tumbuh 9,45% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp838.375 juta.

Along with the increase in traffic volume, increase in clean water sales rates and sales volume, as well as electricity sales rates, the Company's revenue excluding construction grew by 9.45% compared to 2022, which amounted to Rp838.375 million.



Rp4.319.243

Juta | Million

Aset Perseroan tahun 2023 mengalami penurunan 61,27%, dari Rp11.153.502 juta menjadi Rp4.319.243 juta. Hal itu disebabkan terjadinya dekonsolidasi PT Margautama Nusantara (MUN), sehingga aset MUN tidak dicatatkan lagi dalam laporan keuangan Perseroan.

In 2023, the Company's assets decreased by 61.27%, from Rp11.153.502 million to Rp4.319.243 million. This was due to the deconsolidation of PT Margautama Nusantara (MUN), subsequently MUN's assets were no longer listed in the Company's financial statements.



Rp627.741

Juta | Million

Penurunan liabilitas Perseroan sebesar 91,82% dibandingkan tahun lalu disebabkan oleh terjadinya dekonsolidasi MUN, sehingga pada posisi keuangan per 31 Desember 2023, Perseroan tidak lagi mencatat liabilitas yang dimiliki oleh MUN.

The 91.82% decrease in the Company's liabilities compared to the previous year was due to the deconsolidation of MUN, subsequently in the financial position as of December 31, 2023, the Company is no longer posting MUN's liabilities.



Rp3.691.502

Juta | Million

Kenaikan ekuitas Perseroan yang sebesar 6,00% sehingga menjadi Rp3.691.502 juta pada tahun 2023 karena peningkatan tambahan modal disetor yang berasal dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dari MUN.

The increase in the Company's equity, which was by 6.00% to Rp3.691.502 million in 2023 was due to the increase in additional paid-in capital originating from the restructuring transaction of entities under common control of MUN.



01



Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
Pendapatan Usaha dan Penjualan (di luar pendapatan konstruksi) Operating and Sales Revenue (excluding construction revenue)	917.625	838.375	675.110	538.403	649.077	9,45
Laba Bruto Gross Profit	651.278	581.293	406.284	337.418	434.487	12,03
Laba Usaha Operating Profit	393.163	278.188	150.783	132.764	261.148	37,74
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	(235.873)	122.465	25.761	112.622	205.367	(292,60)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit (Loss) for the Year	(238.314)	121.083	16.698	95.518	205.991	(296,82)
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan Direct Costs and Cost of Sales	(266.347)	(257.082)	(268.827)	(200.986)	(214.591)	3,60
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan kepada: Profit (Loss) Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parents	(233.745)	72.439	5.989	69.392	143.814	(422,68)
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	(2.128)	50.026	19.772	43.230	61.553	(104,25)
Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Profit (Loss) Attributable to:						
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parents	(236.200)	72.899	136	57.939	144.019	(424,01)
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	(2.115)	48.185	16.562	37.579	61.972	(104,39)
EBITDA	489,35	468,47	341,57	241,23	351,96	4,46
Jumlah Saham (dalam jutaan lembar) Number of Shares (in million shares)	17.711	17.711	17.711	17.711	17.711	-
Laba (Rugi) per Saham (dalam rupiah penuh) Earnings (Loss) per Share (in full amount Rupiah)	(13,20)	4,09	0,34	3,92	8,12	(422,74)

POSISI KEUANGAN

Financial Position

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)
Aset Asset						
Aset Lancar Current Assets	442.624	946.739	1.264.942	643.801	813.662	(53,25)
Aset Tidak Lancar Non- Current Assets	3.876.618	10.206.763	5.322.387	5.202.882	4.263.737	(62,02)
Jumlah Aset Total Asset	4.319.243	11.153.502	6.587.329	5.846.683	5.077.400	(61,27)
Liabilitas Liabilities						
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	117.355	1.933.170	599.501	499.998	481.639	(93,93)
Liabilitas Jangka Panjang Non- Current Liabilities	510.386	5.737.785	2.626.365	1.991.578	1.401.974	(91,10)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	627.741	7.670.955	3.225.865	2.491.576	1.883.613	(91,82)
Ekuitas Equity						
Ekuitas Equity	3.691.502	3.482.547	3.361.463	3.355.108	3.193.787	6,00

RASIO KEUANGAN

Financial Ratio

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022- 2023 (%)
Modal Kerja Bersih (dalam jutaan rupiah) Net Working Capital (in million rupiah)	Rp	325.270	(986.602)	666.440	143.803	332.023	132,97
Rasio Lancar Current Ratio	%	377,17	48,97	211,00	128,76	168,94	670,15
Margin Kotor Gross Margin	%	70,97	69,34	48,09	21,49	27,28	2,09
Margin Bersih Net Margin	%	(25,70)	14,61	3,05	7,17	12,90	(195,68)
Margin EBITDA EBITDA Margin	%	53,33	55,88	40,43	15,36	22,10	(4,56)
Tingkat Pengembalian Aset Return-on-Assets	%	(5,41)	0,65	0,09	1,19	2,83	(932,31)
Tingkat Pengembalian Ekuitas Return-on-Equity	%	(6,33)	2,08	0,18	2,07	4,50	(404,32)
Rasio Utang berbunga terhadap Ekuitas (DER) ^{*)} Interest-bearing debt to Equity Ratio	%	13,87	190,85	85,18	59,96	42,58	(92,72)
Rasio Utang berbunga terhadap Aset (DAR) ^{*)} Interest-bearing debt to Assets Ratio	%	11,86	59,59	43,46	34,41	26,78	(80,06)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas Profit (Loss) to Equity Ratio	%	(6,39)	3,52	0,77	3,36	6,43	(281,70)
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan dan Penjualan Profit (Loss) to Revenue and Sales Ratio	%	(25,70)	14,61	3,05	7,17	12,9	(195,68)
Rasio Total Liabilitas terhadap Ekuitas Total Liabilities to Equity Ratio	%	17,01	220,27	95,97	74,26	58,98	(92,28)
Rasio Total Liabilitas terhadap Aset Total Liabilities to Assets Ratio	%	14,53	68,78	48,97	42,62	37,1	(78,87)

^{*)} Utang berbunga Perseroan terdiri atas utang bank dan utang pembiayaan konsumen.
The Company's interest-bearing debt consist of bank loans and consumer financing debt.

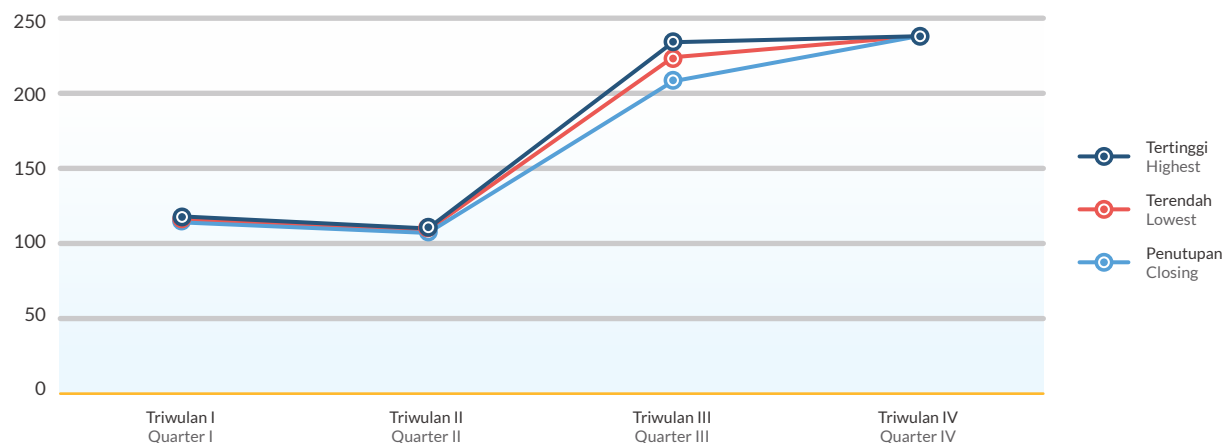
Ikhtisar Saham

Stock Highlights

Uraian Description	Harga Saham (Rp) Share Price (Rp)			Jumlah Saham Beredar (dalam satuan lembar saham) Total Outstanding Shares (in unit of shares)	Volume Transaksi (dalam satuan lembar saham) Transaction Volume (in unit of shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp Juta) Market Capitalization (Rp Million)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
2023						
Triwulan I Quarter I	118	114	116	17.710.708.194	851.893.900	2.054.442.150.504
Triwulan II Quarter II	110	107	109	17.710.708.194	494.755.500	1.930.467.193.146
Triwulan III Quarter III	234	208	224	17.710.708.194	5.336.227.200	3.967.198.635.456
Triwulan IV Quarter IV	238	238	238	17.710.708.194	12.134.028.800	4.215.148.550.172
2022						
Triwulan I Quarter I	125	100	112	17.710.708.194	102.402.300	1.983.599
Triwulan II Quarter II	130	107	116	17.710.708.194	76.406.700	2.054.442
Triwulan III Quarter III	197	113	142	17.710.708.194	7.980.657.400	2.514.921
Triwulan IV Quarter IV	194	116	121	17.710.708.194	2.928.183.300	2.142.996
2021						
Triwulan I Quarter I	150	144	145	17.710.708.194	2.466.559.100	2.568.053
Triwulan II Quarter II	129	125	126	17.710.708.194	234.341.300	2.231.549
Triwulan III Quarter III	128	126	126	17.710.708.194	233.000.300	2.231.549
Triwulan IV Quarter IV	122	114	114	17.710.708.194	233.936.200	2.019.021

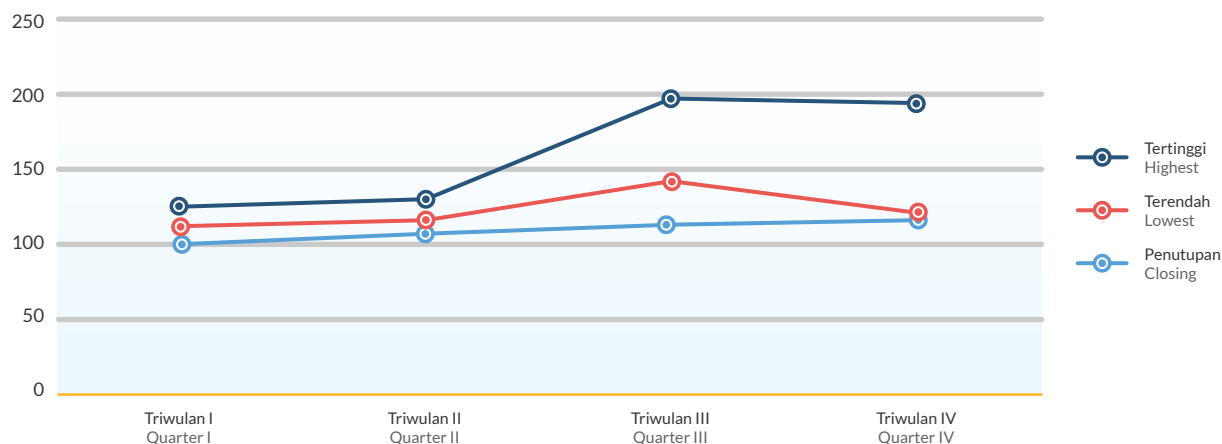
PERGERAKAN HARGA SAHAM TAHUN 2023 DI BURSA EFEK INDONESIA

Stock Movement in 2023 at the Indonesia Stock Exchange
dalam Rupiah | in Rupiah



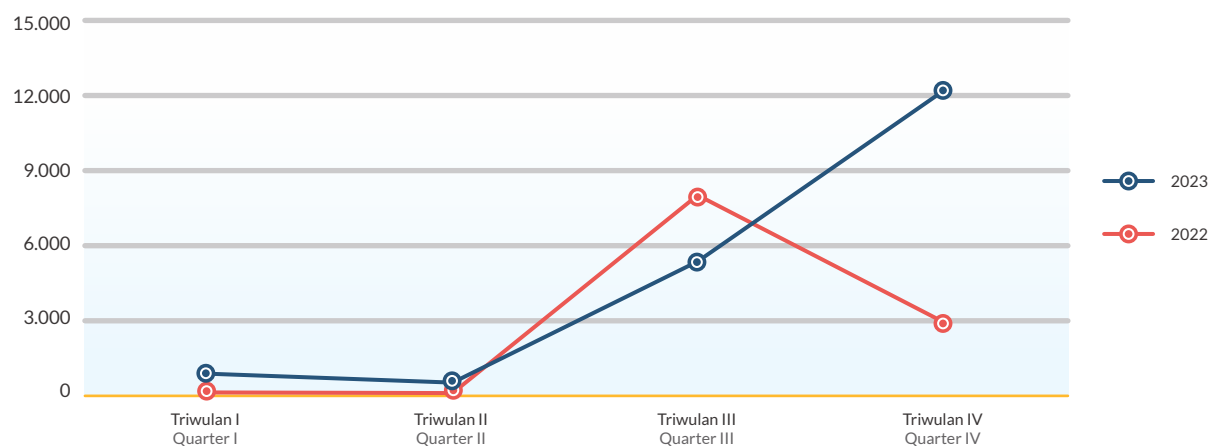
PERGERAKAN HARGA SAHAM TAHUN 2023 DI BURSA EFEK INDONESIA

Stock Movement in 2023 at the Indonesia Stock Exchange
dalam Rupiah | in Rupiah



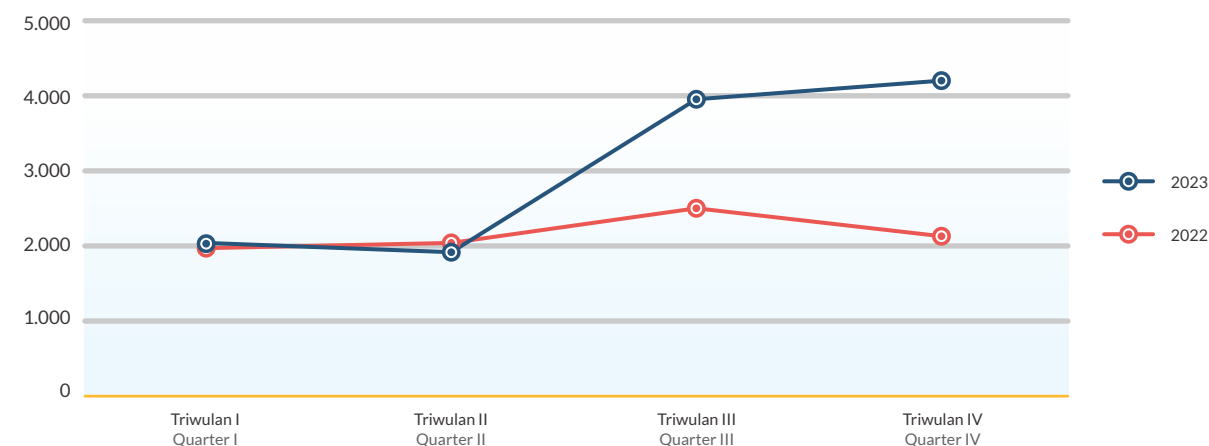
VOLUME TRANSAKSI/PERDAGANGAN TAHUN 2023 DAN 2022 DI BURSA EFEK INDONESIA

Transaction/Trading Volume in 2023 and 2022 at the Indonesia Stock Exchange
dalam juta lembar saham | in million of shares



KAPITALISASI PASAR TAHUN 2023 DAN 2022

Market Capitalization in 2023 and 2022
dalam juta Rupiah | in million Rupiah



Aksi Korporasi

Corporate Action

Pada tanggal 19 Desember 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk mengubah status Perseroan menjadi perusahaan tertutup (*Go Private*). RUPSLB juga memutuskan harga penawaran tender (*tender offer*) sebesar Rp250 per lembar saham, yang merupakan harga premium 34% lebih tinggi dari harga rata-rata harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPSLB.

Terkait dengan aksi korporasi tersebut, Perseroan telah mematuhi seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Hingga 31 Maret 2024, proses yang berlangsung dari perkembangan *tender offer* saham dengan kode META yaitu periode Penawaran Tender Sukarela yang dilakukan oleh pihak Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS) selaku Pemegang Saham Pengendali dari Perseroan yang berlangsung dari 19 Maret 2024 – 17 April 2024.

Sebagaimana diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Sukarela yang dikeluarkan oleh MPTIS, jadwal Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

- Pernyataan Efektif atas Penawaran Tender Sukarela: 15 Maret 2024
- Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Sukarela: 18 Maret 2024
- Periode Penawaran Tender Sukarela: 19 Maret – 17 April 2024
- Tanggal Pembayaran: 24 April 2024

On December 19, 2023, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company has approved the Company's plan to change its status to a private company (*Go Private*). The EGMS also decided on a tender offer price of Rp250 per share, which is a premium of 34% higher than the average price of the highest daily trading price on the Indonesia Stock Exchange (IDX) within the last 90 days prior to the announcement of the EGMS.

In relation to this corporate action, the Company has complied with all provisions in the applicable laws and regulations, especially the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market Sector. As of March 31st, 2024, the ongoing process of the development of the share tender offer with the META code was the Voluntary Tender Offer period carried out by Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS) as the Controlling Shareholder of the Company which will take place from 19 March 2024 – 17 April 2024.

As stated in the Amendment and/or Supplement to the Voluntary Tender Offer Information Disclosure issued by MPTIS, the Voluntary Tender Offer schedule is as follows:

- Effective Statement of Voluntary Tender Offer: March 15, 2024
- Changes and/or additions to Information Disclosure in the context of Voluntary Tender Offers: March 18, 2024
- Voluntary Tender Offer Period: March 19 – April 17, 2024
- Payment Date: April 24, 2024

Selain itu, sepanjang tahun 2023, telah terjadi sejumlah aksi korporasi yang dilakukan oleh entitas anak Perseroan. Berikut adalah rincian aksi korporasi Perseroan:

1. Divestasi Saham PT Tirta Bangun Nusantara oleh PT Potum Mundi Infranasantara

Perseroan, melalui entitas anak PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) yang merupakan perusahaan induk untuk seluruh usaha Perseroan di sektor pengelolaan air dan infrastruktur air bersih, menjual sahamnya di PT Tirta Bangun Nusantara (TBN). Jumlah saham dilepas kepada Bahtera Hijau Mandiri (BHM) sebanyak 26.957.000 saham atau yang mewakili 99,998% kepemilikan Potum di TBN. Kemudian, Potum menjual 547 saham atau setara dengan 0,002% di TBN kepada Bahtera Hutama Sentosa (BHS). Dari 2 (dua) transaksi tersebut, Potum menerima pembayaran Rp55,00 miliar.

Transaksi ini berpotensi mengurangi aset dan ekuitas Perseroan, namun tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan secara material. Sebab, hingga saat ini Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional.

2. Pelepasan Saham PT Portco Infranasantara di PT Intisentosa Alambahtera

PT Portco Infranasantara (Portco), entitas anak Perseroan yang merupakan perusahaan induk dan pemegang saham untuk unit pengelolaan usaha pelabuhan di grup Perseroan melepas 60.174 saham atau yang mewakili 39% saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) kepada PT Louis Dreyfus Company (LDC) Indonesia. ISAB merupakan perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan. Nilai Transaksi yang dibayarkan oleh LDC Indonesia kepada Portco adalah sebesar Rp87.951.000.000.

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan transaksi tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan secara material. Sebab, hingga saat ini, Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional.

3. PT Energi Infranasantara Beli Saham PT Pembangunan Perumahan Energi di PT Inpolo Meka Energi

PT Energi Infranasantara (EI), entitas anak Perseroan yang merupakan perusahaan induk dan pemegang saham untuk seluruh unit usaha pembangkit tenaga listrik dan infrastruktur penyediaan tenaga listrik di Perseroan, membeli 496.645 saham atau mewakili 38,77% dari seluruh saham milik PT Pembangunan Perumahan Energi (PPE) di PT Inpolo Meka Energi (IME).

In addition, there have been a number of corporate actions carried out by the Company's subsidiaries throughout 2023. Here is the details of The Company's corporate actions:

1. Shares Divestment on PT Tirta Bangun Nusantara by PT Potum Mundi Infranasantara

The Company, through its subsidiary PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) which is the holding company for all of the Company's businesses in the water management and clean water infrastructure sectors, sold its shares in PT Tirta Bangun Nusantara (TBN). The number of shares released to Bahtera Hijau Mandiri (BHM) was 26,957,000 shares or representing 99.998% of Potum's ownership in TBN. Potum then sold 547 shares or equivalent to 0.002% in TBN to Bahtera Hutama Sentosa (BHS). From the 2 (two) transactions, Potum received a payment of Rp55,00 billion.

This transaction has the potential to reduce the Company's assets and equity, however, it will not have a material negative impact on the Company's business activities and growth. This is due to the fact that the Company has sufficient working capital and cash flow to carry out its operational activities.

2. PT Portco Infranasantara's Shares Release in PT Intisentosa Alambahtera

PT Portco Infranasantara (Portco), a subsidiary of the Company, which is the holding company and shareholder for the port business management unit in the Company group, released 60,174 shares or representing 39% of the issued and paid-up shares in PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) to PT Louise Dreyfus Company (LDC) Indonesia. ISAB is a limited liability company engaged in warehousing and transportation support activities. The Transaction Value paid by LDCI to Portco amounted to Rp87,951,000,000.

The Company believes that the implementation of the transaction will not have a negative impact that can materially affect the Company's business activities and growth. This is due to the fact that the Company has sufficient working capital and cash flow to carry out its operational activities.

3. PT Energi Infranasantara Purchased PT Pembangunan Perumahan Energi's Shares in PT Inpolo Meka Energi

PT Energi Infranasantara (EI), the Company's subsidiary which is the holding company and shareholder for all power plant and power supply infrastructure business units in the Company, purchased 496,645 shares or representing 38.77% of all shares owned by PT Pembangunan Perumahan Energi (PPE) in PT Inpolo Meka Energi (IME)

Penandatanganan akta jual beli saham oleh/dan antara EI dan PPE merupakan kelanjutan dari penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 24 November 2023 yang dibuat di bawah tangan terkait dengan 100% saham IME. Baik Perseroan maupun EI tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PPE. Nilai Transaksi yang harus dibayar oleh EI kepada PPE untuk transaksi ini adalah Rp45,18 miliar.

Pelaksanaan transaksi berpotensi menambah aset dan ekuitas Perseroan. Perseroan yakin bahwa pelaksanaan Transaksi akan memberikan dampak positif dan tidak memberikan dampak negatif material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan secara material. Sebab, hingga saat ini Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

4. Peningkatan Modal di PT Margautama Nusantara

PT Margautama Nusantara (MUN) yang sebelumnya merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang mana Perseroan memiliki 76,51% dari modal ditempatkan dan disetor MUN. MUN berencana untuk melakukan peningkatan modal dengan menerbitkan 3.506 saham baru dengan masing-masing saham senilai Rp70.000.000 kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS) dan Warrington Investment Pte Ltd (Warrington) dengan rincian sebagai berikut:

- a. MPTIS: sebanyak 833 saham baru akan diterbitkan kepada MPTIS dengan nilai penyetoran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp1.033.768.778.576; dan
- b. Warrington: sebanyak 2.673 saham baru akan diterbitkan kepada Warrington dengan nilai penyetoran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp3.317.243.631.613.

Rencana peningkatan modal MUN akan mengakibatkan kepemilikan Perseroan dalam MUN menjadi terdilusi, dari semula 76,51% menjadi 43,39% sehingga laporan keuangan MUN menjadi tidak lagi dikonsolidasikan oleh Perseroan. Selain itu, pada tanggal 13 Desember 2023, antara PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) dan MPTIS telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, yakni MPTI akan menyelesaikan penjualan seluruh saham miliknya dalam Perseroan kepada MPTIS pada tanggal 20 Desember 2023 melalui transaksi di pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, MPTIS akan menjadi pihak yang mengendalikan MUN dan pencatatan laporan keuangan MUN akan dikonsolidasikan langsung kepada MPTIS.

The signing of the deed of shares sale and purchase by/ and between EI and PPE is a continuation of the signing of the Conditional Sale and Purchase Agreement dated November 24, 2023 made under and related to 100% of IME's shares. Neither the Company nor EI has any affiliation with PPE. The Transaction Value to be paid by EI to PPE for this transaction is Rp45.18 billion.

The implementation of the transaction has the potential to increase the Company's assets and equity. The Company believes that the implementation of the Transaction will have a positive impact and will not have a material negative impact that can materially affect the Company's business activities and growth due to the fact that the Company currently has sufficient working capital and cash flow to carry out its operational activities.

4. Capital Enlargement in PT Margautama Nusantara

PT Margautama Nusantara (MUN) previously a controlled company where the Company owns 76.51% of the issued and paid-up capital of MUN. MUN plans to increase its capital by issuing 3,506 new shares, each share with a nominal value of Rp70,000,000 to PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS) and Warrington Investment Pte Ltd (Warrington) with the following details:

- a. MPTIS: as many as 833 new shares will be issued to MPTIS with a paid-up value of Rp1,241,018,942 per share or a total of Rp1,033,768,778,576; and
- b. Warrington: as many as 2,673 new shares will be issued to Warrington with a paid-up value of Rp1,241,018,942 per share or a total of Rp3,317,243,631,613.

The plan to increase MUN's capital will result in the Company's ownership in MUN being diluted, from 76.51% to 43.39% resulting in MUN's financial statements will no longer be consolidated by the Company. In addition, on December 13, 2023, a Conditional Share Purchase Agreement was signed between PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) and MPTIS, whereby MPTI will complete the sale of its entire shares in the Company to MPTIS on December 20, 2023 through a transaction on the negotiated market of the Indonesia Stock Exchange (IDX). Therefore, MPTIS will become the party that controls MUN and the recording of MUN's financial statements will be consolidated directly to MPTIS.

Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham

Information on Trading Suspension

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai otoritas di pasar modal menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham Perseroan dengan kode META sejak sesi 1 perdagangan efek tanggal 8 November 2023. Suspensi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Perseroan tanggal 7 November 2023 kepada BEI perihal permohonan suspensi saham.

Dengan demikian, alasan terjadinya suspensi tersebut merupakan permintaan sukarela Perseroan kepada Otoritas Bursa, berkenaan dengan rencana Perseroan untuk "Go Private".

PT Bursa Efek Indonesia (IDX) as the authority in the capital market has temporarily suspended the trading of the Company's shares with the META code since the first session of securities trading on November 8, 2023. The suspension is a follow-up to the Company's letter dated November 7, 2023 to the IDX regarding the request for suspension of shares.

Thus, the reason for the suspension is the Company's voluntary request to the Stock Exchange Authority in relation to the Company's plan to "Go Private".

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

Bonds, Sukuk, or Conversion Bonds Highlights

Hingga akhir tahun 2023 Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi.

Until the end of 2023, the Company did not issue bonds, sukuk, or convertible bonds.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Information on Other Sources of Funding

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan tidak memiliki sumber pendanaan lain, sehingga tidak terdapat adanya informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

The Company has no other sources of funding until the end of 2023, so there is no information related to this subject.



Peristiwa Penting 2023

2023 Event Highlights



25 Januari
January 25

Divestasi PT Tirta Bangun Nusantara

Melalui PT Potum Mundi Infranasantara (Potum), Perseroan resmi mendivestasi anak usahanya di sektor air bersih, yakni PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) pada 25 Januari 2023. Potum resmi melepas kepemilikan terhadap TBN sebesar Rp55 miliar kepada Bahtera Utama Sentosa (BHS) dan Bahtera Hijau Mandiri (BHM). Aksi korporasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya manajemen untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi bisnis inti, melalui anak usahanya.

Divestment of PT Tirta Bangun Nusantara

The Company officially divested its subsidiary in the clean water sector, PT Tirta Bangun Nusantara (TBN), through PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) on January 25, 2023. Potum officially released its ownership of PT Tirta Bangun Nusantara of Rp55 billion to Bahtera Utama Sentosa (BHS) and Bahtera Hijau Mandiri (BHM). This corporate action was carried out through the Company's subsidiary as part of the management's efforts to strengthen its capital structure and expand its core business.



10 Maret
March 10

Divestasi PT Intisentosa Alambahtera

Perseroan resmi mendivestasi atau melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) melalui anak usahanya PT Portco Infranasantara (Portco) pada 10 Maret 2023. Jumlah saham yang dilepas yaitu sebanyak 60.174 saham atau setara dengan 39% dengan nilai transaksi yang ditandatangani sebesar Rp87,95 miliar.

Divestment of PT Intisentosa Alambahtera

The Company officially divested or released all of its share ownership in PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) through its subsidiary PT Portco Infranasantara (Portco) on March 10, 2023. The number of shares released was 60,174 shares or equivalent to 39% with a signed transaction value of Rp87.95 billion.



24 Mei
May 24

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

Perseroan menyelenggarakan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 24 Mei 2023 secara *hybrid* di Glass House the Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, perwakilan Biro Administrasi Efek (BAE), Notaris, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan para pemegang saham. Terdapat 5 (lima) agenda dalam rapat yang seluruhnya telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham.

The Annual General Meeting of Shareholders of the Company

The Company held a hybrid Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 24, 2023 at the Glass House of the Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. The event was attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, representatives of the Securities Administration Bureau (BAE), Notary, Public Accounting Firm (KAP) and shareholders. There were 5 (five) agendas in the meeting, all of which were approved by the shareholders.



30 Mei dan 2 Juli
May 30 and July 2

Kolaborasi PT Meta Media Infranasantara dan Komite Olahraga Nasional Indonesia

PT Meta Media Infranasantara (MMI), anak usaha dari Perseroan, bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berkolaborasi dalam acara "BNI-KONI OPEN 2023, Support for Indonesia Sports" yang diselenggarakan di Pondok Indah Golf Course pada 2 Juli 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari pekan olahraga antarperusahaan KONI Pusat yang diikuti oleh 19 perusahaan. Berbagai macam kompetisi di bidang olahraga yang diselenggarakan seperti golf, bulutangkis, tenis, futsal dan e-sport.

Sebelumnya, pada 30 Mei 2023 MMI bersama KONI telah melakukan penandatanganan kerja sama penyelenggaraan acara di bidang olahraga di bawah naungan KONI. Acara dihadiri oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purn Marciano Norman.

Collaboration of PT Meta Media Infranasantara and Komite Olahraga Nasional Indonesia

PT Meta Media Infranasantara (MMI), a subsidiary of the Company, together with the Indonesian National Sports Committee (KONI) collaborated in the "BNI-KONI OPEN 2023, Support For Indonesia Sports". The event was held at Pondok Indah Golf Course on July 2, 2023. This activity is part of the Central KONI inter-company sports week which was attended by 19 companies. Various competitions in sports were held such as golf, badminton, tennis, futsal and e-sport.

Previously, on May 30, 2023 MMI and KONI signed a cooperation agreement to organize events in the field of sports under the auspices of KONI. The event was attended by the Chairman of the Central KONI, Lieutenant General Retired Marciano Norman.



1 Agustus
August 1

Seremoni Provisional Hand Over Proyek Penambahan Lingkup Jalan Tol Ruas Pondok Aren

Manajemen Tol BSD bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor proyek telah melakukan seremoni penandatanganan Provisional Hand Over (PHO) untuk Proyek Penambahan Lingkup Jalan Tol Ruas Pondok Aren-Serpong yang diselenggarakan pada 1 Agustus 2023 di Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BSD, Bapak Purwoto, Direktur BSD, Bapak Ricky Camelien, Senior Vice President Infrastructure 1 WIKA, Bapak Eko Sujiyanto, dan General Manager Department Operasi 2 WIKA, Bapak Hernowo Adrianto, yang saksi oleh Direksi serta manajemen kedua perusahaan.

Ceremony Provisional Hand Over (PHO) of Pondok Aren Toll Road Extension Scope Project

BSD Toll Management together with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the project contractor have signed the Provisional Hand Over (PHO) for the Pondok Aren-Serpong Toll Road Extension Scope Project held on August 1, 2023 in Jakarta.

The signing was carried out by the President Director of BSD, Mr. Purwoto, Director of BSD, Mr. Ricky Camelien, Senior Vice President of Infrastructure 1 WIKA, Mr. Eko Sujiyanto, and General Manager of Operations Department 2 WIKA, Mr. Hernowo Adrianto, witnessed by the Board of Directors and management of both companies.



7 September
September 7

Proyek Jalan Tol Pondok Aren-Serpong Telah Difungsionalkan

Penambahan Lingkup Jalan Tol Pondok Aren-Serpong merupakan bagian strategis dari upaya meningkatkan pelayanan dan keamanan Jalan Tol Pondok Aren Serpong, dengan fokus pada perlindungan pengendara dari risiko banjir di KM 8 dan meningkatkan faktor keselamatan (safety). Tak hanya itu, Manajemen Tol BSD juga melakukan pelebaran Jalan Arteri Exit Tol Pamulang sepanjang 776 meter yang telah selesai seluruhnya di tahun ini dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Pondok Aren-Serpong Toll Road Project Has Been Functionalized

The addition of the Pondok Aren-Serpong Toll Road Scope is a strategic part of efforts to improve the service and safety of the road, with a focus on protecting riders from the risk of flooding at KM 8 and improving safety factors. Additionally, BSD Toll Management also widened the 776-meter Pamulang Exit Toll Arterial Road which has been fully completed this year and is expected to provide benefits to the people of South Tangerang City.



29 September
September 29

Penyesuaian Tarif Jalan Tol Seksi 1, 2, dan 3 Makassar

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR, penyesuaian tarif reguler resmi diterapkan di Jalan Tol Seksi 1, 2, dan 3 Makassar mulai 29 September 2023 untuk seluruh golongan kendaraan di 5 (lima) gerbang. Kelima gerbang tersebut di antaranya yakni Gerbang Tol Cambaya, Gerbang Tol Kaluku Bodoa, Gerbang Tol Parangloe, Gerbang Tol Tallo Timur dan Gerbang Tol Tallo Barat.

Berbagai tahapan sosialisasi dan edukasi juga telah dijalankan, bahkan sebelum waktu penyesuaian tarif ditetapkan. Penyebaran informasi disampaikan melalui media sosial, *website*, pemasangan spanduk di gerbang tol, penayangan informasi melalui *Variable Message Sign* (VMS), siaran pers ke berbagai media, termasuk penyelenggaraan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai *stakeholders* terkait. Tujuannya agar informasi penyesuaian tarif ini dapat tersosialisasikan dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat.

Tariff Adjustment for Makassar Toll Road Sections 1, 2, and 3

Based on the Decree of the Minister of PUPR, regular tariff adjustments are officially applied to Makassar Toll Road Sections 1, 2 and 3 starting September 29, 2023 for all classes of vehicles at 5 (five) gates. The five gates are Cambaya Toll Gate, Kaluku Bodoa Toll Gate, Parangloe Toll Gate, East Tallo Toll Gate and West Tallo Toll Gate.

Various stages of socialization and education have also been carried out, even before the tariff adjustment time is set. Information was disseminated through social media, websites, banner installation at toll gates, information broadcast through Variable Message Sign (VMS), press releases to various media, including organizing Focus Group Discussion (FGD) activities with various relevant stakeholders. The goal is that this tariff adjustment information can be socialized and can be well received by the entire community.



8 September, 11 Oktober, dan 17 Oktober
September 8, October 11, and October 17

Proyek Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road Elevated

PT Jakarta Metro Expressway (JMEIX), anak perusahaan tidak langsung Perseroan, berhasil memenangkan lelang Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami sepanjang 21,6 kilometer. Bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pendirian Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ditandatangani pada 8 September 2023 untuk menandai awal proyek ini. Selanjutnya, pada 11 Oktober 2023, Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) juga diteken oleh Direktur Utama JMEIX dan Kepala BPJT dengan disaksikan oleh Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Sekretaris BPJT, Ketua Bidang Investasi Jalan Tol, serta jajaran Direksi JMEIX.

Selain dua momen tersebut, Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres juga diadakan pada 17 Oktober 2023 sebagai rangkaian menuju pembangunan proyek. Perjanjian penjaminan ditandatangani oleh Direktur Utama PII sebagai penyedia penjaminan pemerintah bersama Direktur Utama JMEIX. Sementara Perjanjian Regres ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) bersama dengan Direktur Utama PII. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp21,3 triliun ini akan menghubungkan Jati Asih dengan Ulujami.

Jakarta Outer Ring Road Elevated Toll Road Project

PT Jakarta Metro Expressway (JMEIX), a subsidiary of the Company, successfully won the auction for the 21.6-kilometer (km) Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami project. Together with the Toll Road Regulatory Agency (BPJT), the establishment of the Toll Road Business Entity (BUJT) was signed on September 8, 2023 to mark the beginning of this project. Furthermore, on October 11, 2023, the PPJT was also signed by the President Director of JMEIX and the Head of BPJT, witnessed by the Business Director of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Secretary of BPJT, Head of Toll Road Investment Division, and JMEIX's Board of Directors.

In addition to these two moments, the signing of the Guarantee Agreement and Regression Agreement was also held on October 17, 2023 as a series towards the project construction. The guarantee agreement was signed by the President Director of PII as the government guarantee provider together with the President Director of JMEIX. While the Regression Agreement was signed by the Minister of Public Works and Housing (PUPR) as the Person in Charge of the Cooperation Project (PJPK) together with the President Director of PT PII. The project with an investment value of around Rp21.3 trillion will connect Jati Asih (Bekasi) with Ulujami (South Jakarta).



27 September
September 27

Provisional Hand Over Proyek Jalan Akses Tol Makassar New Port

Proyek strategis di Timur Indonesia Jalan Akses Tol Makassar New Port (MNP) telah melewati tahapan *Provisional Hand Over* (PHO) atau biasa dikenal dengan serah terima seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa kepada pemilik proyek. Acara ini diselenggarakan di kantor proyek WKA yang dihadiri oleh Direksi PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Makassar Metro Network (MMN), PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, Konsultan Supervisi JO Indokoei International - Nippon Koei - Cipta Strada, dan Konsultan PMI PT Virama Karya.

Keberadaan Jalan Akses Tol Makassar New Port diharapkan dapat memperlancar jalur ekspor dan impor melalui pelabuhan yang menghubungkan kawasan Gerbang Timur Indonesia, Makassar dengan kota lain di Sulawesi Selatan dan provinsi sekitarnya. Jalan ini sekaligus menjadi solusi dalam mengurangi kemacetan bagi angkutan barang atau logistik dengan akses langsung dari dan menuju ke Makassar New Port.

Provisional Hand Over of Makassar New Port Toll Access Road Project

The strategic project in Eastern Indonesia, Makassar New Port Toll Access Road, has passed the Provisional Hand Over (PHO) stage or commonly known as the handover of all work carried out by the service provider to the project owner. The event was held at the WKA project office which was attended by the Directors of PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Makassar Metro Network (MMN), PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as contractors, JO Indokoei International - Nippon Koei - Cipta Strada Supervision Consultants, and PT Virama Karya PMI Consultants.

The existence of the Makassar New Port Toll Access Road is expected to facilitate export and import routes through the port that connects the Eastern Gate of Indonesia, Makassar with other cities in South Sulawesi and surrounding provinces. This road is also a solution in unraveling congestion for freight or logistics transportation with direct access to and from Makassar New Port.



10 Oktober
October 10

Public Expose Insidentil

Perseroan telah menyelenggarakan *Public Expose* Insidentil yang diselenggarakan secara virtual melalui Aplikasi Zoom Webinar dan streaming YouTube pada 10 Oktober 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi permintaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada kesempatan itu, manajemen memaparkan informasi mengenai kinerja terkini dan rencana kerja ke depan di masing-masing sektor usaha Perseroan. Acara ini dihadiri para investor, perbankan, analis dan *research* perusahaan sekuritas, media serta publik.

The Incidental Public Expose

The Company has held an Incidental Public Expose virtually through the Zoom Webinar Application and YouTube streaming on October 10, 2023. This activity was carried out in order to fulfil the Indonesia Stock Exchange's (IDX) request.

On that occasion, the management presented information on the latest performance and future work plans in each of the Company's business sectors. The event was attended by investors, banks, analysts and research securities companies, media and the public.



30 Oktober
October 30

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 Oktober 2023 yang diselenggarakan di Equity Tower, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, perwakilan Biro Administrasi Efek (BAE), Notaris dan para pemegang saham.

Terdapat 2 (dua) agenda dalam RUPSLB, yang semuanya telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Salah satu agendanya menyetujui pengunduran diri Rodrigo E. Franco dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat Rogelio L. Singson sebagai Komisaris Perseroan yang baru.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on October 30, 2023 at Equity Tower, Jakarta. The event was attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, representatives of the Securities Administration Bureau (BAE), Notary and shareholders.

There were 2 (two) agendas in the EGMS, all of which were approved by the shareholders. One of the agendas approved the resignation of Rodrigo E. Franco from his position as Commissioner of the Company and appointed Rogelio L. Singson as the new Commissioner of the Company.



23 November
November 23

Public Expose Tahunan

Perseroan telah menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan pada 23 November 2023 secara *offline* dan *online*. Manajemen memaparkan informasi mengenai kinerja terkini dan rencana kerja ke depan di masing-masing sektor usaha Perseroan. Acara ini dihadiri para investor, perbankan, analis dan *research* perusahaan sekuritas, media serta publik.

The Annual Public Expose

The Company has held its Annual Public Expose on November 23, 2023 offline and online. The management presented information on the latest performance and future work plans in each of the Company's business sectors. The event was attended by investors, banks, analysts and research from securities companies, media and the public.



18 Desember
Desember 18

Fasilitas Kredit PT Potum Mundi Infranasantara

Anak Usaha Perseroan di sektor air bersih PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp230 miliar dari Bank Mandiri. Dukungan pembiayaan ini akan digunakan untuk pengembangan bisnis usaha Potum dan kedua anak usahanya yakni PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) di Serang, Banten dan PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) di Medan.

PT Potum Mundi Infranasantara Credit Facility

The Company's subsidiary in the clean water sector, PT Potum Mundi Infranasantara (Potum), received a credit facility of Rp230 billion from Bank Mandiri. This financing support will be used for business development of Potum and its two subsidiaries, PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) in Serang Banten and PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) in Medan.



19 Desember
Desember 19

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, SCBD, Jakarta pada 19 Desember 2023. Agenda RUPSLB terkait rangkaian aksi korporasi yang akan dilakukan Perseroan dan anak usahanya, PT Margautama Nusantara (MUN).

Setelah seluruh agenda mendapatkan persetujuan para pemegang saham, secara sah salah satu *sovereign wealth fund* terbesar di dunia, GIC Venture, melalui WIPL, resmi menjadi investor di MUN. Begitu juga dengan rencana *go private* dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dijalankan sesuai dengan prosesnya.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Company held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) at the Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, SCBD, Jakarta on December 19, 2023. The EGMS agenda is related to a series of corporate actions that will be carried out by the Company and its subsidiary, PT Margautama Nusantara (MUN).

After the entire agenda obtained shareholders' approval, one of the largest sovereign wealth funds in the world, GIC Venture, through WIPL, legally and officially became an investor in MUN. Likewise, the *go private* plan and the approval of changes to the Company's Articles of Association can be carried out in accordance with the process.



28 Desember
Desember 28

Penandatanganan Akta Jual Beli Saham oleh PT Energi Infranasantara

Entitas anak Perseroan, PT Energi Infranasantara (EI), telah menandatangani Akta Jual Beli Saham dan dokumen transaksi lainnya terkait pembelian 496.645 saham atau 38,77% dari seluruh saham milik PT Pembangunan Perumahan Energi (PPE) yang ditempatkan dan disetor dalam PT Inpolo Meka Energi (IME), anak usaha dari EI dan merupakan entitas tidak langsung dari Perseroan. Pelaksanaan transaksi ini diharapkan menambah aset dan ekuitas Perseroan, transaksi ini diyakini akan memberikan dampak positif pada kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan secara material karena memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

Signing of Deed of Shares Sale and Purchase by PT Energi Infranasantara

The Company's subsidiary, PT Energi Infranasantara (EI), has signed the Deed of Shares Sale and Purchase and other transaction documents related to the purchase of 496,645 shares or 38.77% of all shares owned by PT Pembangunan Perumahan Energi (PPE) issued and paid up in PT Inpolo Meka Energi (IME), a subsidiary of EI and an indirect entity of the Company. The implementation of this transaction is expected to increase the Company's assets and equity. This transaction is deemed to have a positive impact on the Company's business activities and growth materially due to having sufficient working capital and cash flow to carry out the Company's operational activities.

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

PENGHARGAAN

Awards

	Tanggal Perolehan Date of Award Received	Nama Penghargaan Name of Award	Agenda	Penyelenggara Organizer
	22 Februari 2023 February 22, 2023	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat Provinsi Banten tahun 2023 dalam kategori Zero Accident Occupational Health and Safety (OHS) at the level of Banten Province in 2023 in the Zero Accident category	Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety (OHS) Award	Pemerintah Provinsi Banten Banten Provincial Government
	28 Februari 2023 February 28, 2023	Digital PR Award	10 th Top Digital Public Relations Award 2023	TRAS N CO Indonesia dan Infobrand.id TRAS N CO Indonesia and Infobrand.id
	17 Maret 2023 March 17, 2023	Public Relation Indonesia Awards 2023	Community Based Development untuk Program CSR Kampung Bersih Nusantara di Makassar Community Based Development for Kampung Bersih Nusantara CSR Program in Makassar	Majalah PR Indonesia PR Indonesia Magazine
	6 April 2023 April 6, 2023	Indonesia Most Popular CEO Awards 2023	Top CEO in Excellent Asset Management untuk Direktur Utama Perseroan, M. Ramdani Basri Top CEO in Excellent Asset Management for the President Director of the Company, M. Ramdani Basri	The Economics
 	7 Juni 2023 June 7, 2023	TOP CSR Awards 2023 TOP Leader on CSR Commitment 2023 untuk Direktur Utama Perseroan, M. Ramdani Basri TOP Leader on CSR Commitment 2023 for the President Director of the Company, M. Ramdani Basri	TOP CSR Awards 2023 dengan predikat #Star 4 (Sangat Baik) TOP CSR Awards 2023 with the #Star 4 (Very Good) predicate	Majalah Top Business - MSI Group Top Business Magazine - MSI Group

	Tanggal Perolehan Date of Award Received	Nama Penghargaan Name of Award	Agenda	Penyelenggara Organizer
	2 Agustus 2023 August 2, 2023	Top Corporate Awards 2023	Pemberian Penghargaan Top Corporate Awards 2023 untuk PT Bintaro Serpong Damai (BSD) Presenting the Top Corporate Awards 2023 for PT Bintaro Serpong Damai (BSD)	Infobrand.id bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia Infobrand.id in collaboration with TRAS N CO Indonesia
	4 Agustus 2023 August 4, 2023	Corporate Reputation Awards 2023	Corporate Reputation Awards 2023 dalam kategori Infrastructure Corporate Reputation Awards 2023 in Infrastructure category	The Economics
	27 Desember 2023 December 27, 2023	Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional 2023 National Quality & Productivity Summit 2023	Penghargaan kategori Platinum untuk PT Bintaro Serpong Damai (BSD) atas inovasi digitalisasi layanan bagi pengguna jalan tol Platinum category award for PT Bintaro Serpong Damai (BSD) for its innovation in digitizing services for toll road users	Wahana Kendali Mutu (WKMM) dan Asosiasi Manajemen Mutu (AMMPI) Quality Management Consultant (WKMM) and Quality Management Association (AMMPI)
	27 Desember 2023 December 27, 2023	Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional 2023 National Quality & Productivity Summit 2023	Penghargaan kategori Gold untuk PT Makassar Metro Network (MMN) dan Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) atas pencapaiannya menciptakan inovasi Fast Accurate Traffic Report Powered by AI BOT Traffic Gold category award for PT Makassar Metro Network (MMN) and Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) for their achievement in creating Fast Accurate Traffic Report Powered by AI BOT Traffic innovation	Wahana Kendali Mutu (WKMM) dan Asosiasi Manajemen Mutu (AMMPI) Quality Management Consultant (WKMM) and Quality Management Association (AMMPI)

SERTIFIKASI

Certification

No.	Tanggal Perolehan Certification Date	Sertifikasi Certification	Pihak Pemberi Certifier	Masa Berlaku Validity Period
1	4 Juli 2023 July 4, 2023	Ahli K3 Bidang Kimia untuk Karyawan PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari OHS Expert in Chemical Field for Employees of PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	3 (tiga) tahun 3 Juli 2026 3 (three) years July 3, 2026
2	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Ahli Madya Di Bidang Manajemen Konstruksi dan Ahli Madya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk karyawan PT Tol BSD Associate Expert in Construction Management and Associate Expert in Road and Bridge Maintenance for employees of PT Tol BSD	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	5 (lima) tahun 26 Oktober 2028 5 (five) years October 26, 2028
3	18 Desember 2023 December 18, 2023	Quality System Management System ISO 9001:2015 untuk PT Energi Infranasantara	British Standard Institution (BSI)	3 (tiga) tahun 17 Desember 2026 3 (three) years December 17, 2026





02



Laporan Manajemen

Management Reports

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



Manuel V. Pangilinan
Komisaris Utama
President Commissioner



Strategi manajemen dalam memperoleh sumber pendanaan melalui kerja sama merupakan inisiatif yang sangat strategis, karena dapat mendukung rencana ekspansi Perseroan.

The management strategy to obtain funding sources through cooperation is a very strategic initiative, because it can support the Company's expansion plans.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Perseroan mampu melalui tahun buku 2023 dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya di bidang keterbukaan informasi.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Karena itu, Dewan Komisaris menjadi mitra strategis manajemen dalam upaya pencapaian target usaha Perseroan yang pelaksanaannya patut disampaikan.

Pada tahun buku 2023 ini, Dewan Komisaris berpandangan banyak peristiwa penting yang terjadi pada Perseroan. Di antaranya terkait dengan rencana untuk mengubah status Perseroan menjadi perusahaan tertutup (*Go Private*). Selain itu, telah selesainya *platform* Perseroan di bidang infrastruktur jalan tol.

Kedua hal tersebut juga telah mendapatkan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tahun 2023. Dengan demikian, pemegang saham pun telah menyetujuinya.

Praise be to God Almighty for allowing the Company to successfully complete the fiscal year 2023. This report is part of a good corporate governance implementation strategy, particularly in terms of information transparency.

The Board of Commissioners carries out its supervisory duties and functions in accordance with statutory regulations, as well as providing advice to the Board of Directors in carrying out the Company's business activities. Accordingly, the Board of Commissioners is a strategic partner of management in the effort to achieve the Company's business targets, the implementation of which needs to be conveyed.

The Board of Commissioners believes that the Company experienced many significant events during the fiscal year 2023. This includes plans to change the Company's status to Go Private, as well as the completion of the Company's platform in toll road infrastructure.

These two matters have also received ratification in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), which was implemented in 2023. Accordingly, shareholders have also approved them.

Pada kebijakan aksi korporasi *go private*, selain memberikan dukungan, Dewan Komisaris juga mengingatkan kepada Direksi, agar dalam pelaksanaannya senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maupun ketentuan lain.

Aksi korporasi lainnya adalah terkait modal di PT Margautama Nusantara (MUN), yang sebelumnya merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Entitas Perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan jalan tol tersebut melakukan peningkatan modal dengan menerbitkan saham baru.

Dengan adanya aksi korporasi tersebut, dua investor strategis yaitu Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan, serta GIC Ventures, *sovereign wealth fund* Pemerintah Singapura, melalui Warrington Investment Pte. Ltd (WIPL), bergabung menjadi pemegang saham MUN.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Direksi atas pengelolaan Perseroan, antara lain selaras dengan mandat POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Regulasi tersebut menekankan bahwa Direksi bertugas menjalankan kegiatan usaha, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan.

Mengacu pada regulasi tersebut, Dewan Komisaris memberikan penilaian terhadap Direksi, setidaknya melalui tiga dasar atau pertimbangan: Perumusan dan target usaha seperti tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP); pelaksanaan kegiatan usaha serta pencapaiannya; dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya telah termasuk pengelolaan manajemen risiko.

Dari sisi strategi pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi dan jajaran di bawahnya telah menerapkan kebijakan yang sangat tepat. Kehadiran *platform* bisnis infrastruktur jalan tol yang dijalankan oleh MUN sebagai entitas asosiasi dari Perseroan, kini didukung oleh tiga investor utama yang sangat kuat serta memiliki reputasi sangat baik, yakni Perseroan, PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), dan GIC melalui WIPL.

In terms of the *go-private* corporate action policy, in addition to providing support, the Board of Commissioners would remind the Board of Directors to consistently comply with the applicable statutory requirements. Other provisions include Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 3/POJK.04/2021 on the Implementation of Activities in the Capital Market Sector.

Another corporate action was related to the equity capital in PT Margautama Nusantara (MUN), previously the Company's controlled entity. The Company's entity in toll road management increase its capital through the issuance of new shares.

With this corporate action, two strategic investors, namely Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), which is the controlling shareholder of the Company, and GIC Ventures, the Singapore Government's sovereign wealth fund, through Warrington Investment Pte. Ltd (WIPL), have joined as shareholders of MUN.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners' assessment of the Company's management, including the Board of Directors, is in accordance with the POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. This regulation emphasizes the distinct roles of the Board of Directors, who are in charge of executing business activities, and the Board of Commissioners, who supervise the Company's policies and management.

According to this regulation, the Board of Commissioners evaluates the Board of Directors based on at least three criteria or considerations: formulation and business targets as contained in the Company's Work Plan and Budget (RKAP); implementation of business activities and their accomplishments; and application of *Good Corporate Governance* (GCG) principles as an indicator of compliance with laws and regulations, including risk management.

In terms of the Company's management strategy, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors and its management have implemented precise policies. The toll road infrastructure business platform, which is carried out by MUN as an associate of the Company, is now supported by three main investors that are very strong as well as having a good reputation, which are the Company, PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI), and GIC through WIPL.

Ditambah lagi, beban keuangan dari akuisisi Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated II atau Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) yang dilakukan pada tahun 2022 juga telah selesai. Dengan demikian, Perseroan semakin leluasa dalam menjalankan fase ekspansi, khususnya di bidang jalan tol yang membutuhkan modal besar dengan tingkat pengembalian investasi lama.

Menurut Dewan Komisaris, strategi manajemen dalam memperoleh sumber pendanaan (*source of financing*) dengan mengundang WIPL menjadi pemegang saham MUN sangat strategis, mengingat WIPL memiliki reputasi internasional serta kredibilitas yang baik, Perseroan semakin optimis dalam memasuki fase ekspansi.

Kedua investor tersebut telah berkomitmen yang sama untuk mendukung bisnis Perseroan di jalan tol. Saat ini Perseroan telah memiliki lima ruas jalan tol, melalui MUN, dan satu ruas jalan tol dalam tahap pembangunan.

Dari sisi kinerja keuangan, Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi, karena tumbuh positif. Dari sisi pendapatan usaha dan penjualan (di luar pendapatan konstruksi) misalnya, mengalami kenaikan 9,45%, dari Rp838,38 miliar pada tahun 2022 menjadi mencapai Rp917,63 miliar di tahun 2023.

Pengawasan dalam Perumusan dan Implementasi Strategi oleh Direksi

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, sejak perumusan strategi hingga pelaksanaannya. Dalam pembahasan rumusan strategi Perseroan, Dewan Komisaris juga memberikan masukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Direksi. Pola ini dijalankan, khususnya melalui rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Dengan demikian, pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pengurusan Perseroan telah berjalan sejak dari perumusan strategi usaha. Sedangkan untuk implementasi strategi yang telah ditetapkan pada saat perumusan, Dewan Komisaris dapat melihat langsung realisasinya saat diimplementasikan.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah memberikan pertimbangan yang sangat baik dalam merumuskan strategi yang akan dijalankan oleh Perseroan. Tidak terbatas pada kapasitas dan perkembangan kinerja internal Perseroan, tetapi Direksi juga mempertimbangkan faktor eksternal dalam perumusan strategi tersebut.

Sementara terkait dengan implementasi strategi, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain melalui rapat gabungan yang dilaksanakan secara berkala. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi telah merealisasikan rapat bersama sebanyak 4 (empat) kali, yang di dalamnya membahas pencapaian kinerja Perseroan.

Furthermore, the financial cost of acquiring the Jakarta-Cikampek Elevated II Toll Road, also known as the Mohammed Bin Zayed (MBZ) Elevated Road, which was completed in 2022, has been finalized. As a result, the Company has more flexibility in carrying out its expansion phase, particularly in the toll road sector, which requires significant capital with a long return on investment.

According to the Board of Commissioners, the management's strategy in obtaining sources of financing by inviting WIPL to become a shareholder of MUN is very strategic, considering that WIPL has an international reputation and good credibility, the Company is more optimistic in entering the expansion phase.

The two investors have committed to support the Company's toll road business. The Company currently owns five toll roads, through MUN, and one toll road under construction.

In terms of financial performance, the Board of Commissioners also expresses its appreciation for positive growth. For example, there was a 9.45% increase in operating and sales revenues (excluding construction revenue), from Rp838.38 billion in 2022 to Rp917.63 billion in 2023.

Supervision in the Formulation and Implementation of Strategy by the Board of Directors

In 2023, the Board of Commissioners supervised the implementation of the Company's business activities, from the formulation of strategy to its implementation. While discussing the strategy formulation, the Board of Commissioners provides input to the Board of Directors. This pattern is carried out mainly through joint meetings of the Boards of Commissioners and Directors.

Thus, the Board of Commissioners has been supervising the implementation of the Company's management since the business strategy was developed. However, by implementing the strategy that was determined at the time of formulation, the Board of Commissioners is able to observe results immediately.

In the view of the Board of Commissioners, the Board of Directors has given excellent consideration to formulating the strategy to be implemented by the Company. In addition to the capacity and development of the Company's internal performance, the Board of Directors also considers external factors in formulating the strategy.

Furthermore, related to strategy implementation, supervision is carried out by the Board of Commissioners, including through joint meetings, which are held periodically. Throughout 2023, the Board of Commissioners and Board of Directors have held 4 (four) joint meetings in which they discussed the Company's performance achievements.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris juga melibatkan komite pendukung yang beroperasi di bawahnya. Komite-komite tersebut berkoordinasi secara langsung dengan Perseroan, dan hasil kerjanya disampaikan kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya menjadi masukan penting dalam proses pemberian rekomendasi kepada Direksi.

Dewan Komisaris menilai bahwa perumusan dan implementasi strategi Perseroan telah dijalankan dengan baik oleh Direksi. Direksi tidak hanya berhenti dengan merumuskan strategi. Seluruh rencana didistribusikan dengan baik ke organisasi di bawahnya, sehingga seluruh organ di bawah Direksi bergerak. Selanjutnya, Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan.

PANDANGAN TERKAIT PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris telah membahas prospek usaha Perseroan yang disusun oleh Direksi dan berpandangan bahwa rencana strategis tersebut sangat baik. Direksi telah mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal Perseroan dalam menetapkan target dan rencana strategis tahun 2024.

Untuk kondisi eksternal, antara lain mempertimbangkan rencana pembangunan pemerintah, misalnya seperti tertuang dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Dalam dokumen tersebut, pembangunan infrastruktur jalan tol masih menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan konektivitas dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi.

Begitu pun dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon. Hal ini juga termasuk dalam lini bisnis yang dikembangkan oleh Perseroan.

Untuk kepentingan pembangunan Infrastruktur itu, anggaran yang disediakan masih sangat besar, yakni sekitar Rp422,7 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp399,6 triliun, terjadi kenaikan 5,78%.

Sedangkan dari sisi internal, Perseroan telah memiliki platform di bidang bisnis jalan tol yang akan ditopang oleh 3 (tiga) investor utama: Perseroan, GIC dan WIPL. Ketiga investor tersebut akan bersama-sama menopang rencana ekspansi Perseroan dalam bisnis jalan tol.

Karena itu, Dewan Komisaris optimistis bahwa prospek usaha Perseroan tahun 2024 bahkan ke depan akan sangat baik. Manajemen telah menyiapkan fundamentalnya dengan baik, sehingga rencana ekspansi Perseroan akan lebih terbuka.

The supervision conducted by the Board of Commissioners also involves supporting committees operating under it. These committees coordinate directly with the Company, and the results of their work are submitted to the Board of Commissioners, which then becomes an important input in the process of providing recommendations to the Board of Directors.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has properly formulated and implemented the Company's strategy. The Board of Directors does more than just formulate strategies. All plans are properly distributed to the organizations that support them, allowing all organs of the Board of Directors to function. Additionally, the Board of Directors assesses the effectiveness of the strategy's implementation.

OVERVIEW OF BUSINESS OUTLOOK

The Board of Commissioners has discussed the Company's business prospects as prepared by the Board of Directors and believes that the strategic plan is solid. The Board of Directors has considered the Company's external and internal conditions in establishing targets and strategic plans for 2024.

For external conditions, it also considered the government's development plans, for example, as stated in the 2024 State Budget (APBN) Financial Note. In this document, toll road infrastructure development is still a national priority to improve connectivity in order to support the acceleration of economic transformation.

As well as the development of energy and electricity plays a crucial role in facilitating the transition towards a low-carbon energy system. This is also included in the business lines developed by the Company.

The budget allocated for the purposes of infrastructure development is still very large, namely around Rp422.7 trillion. Compared to 2023, which amounted to Rp399.6 trillion, there was an increase of 5.78%.

Meanwhile, internally, the Company has established a platform in the toll road business sector, which will be supported by 3 (three) main investors: the Company, GIC, and WIPL. These three investors will jointly support the Company's expansion plans in the toll road business.

Therefore, the Board of Commissioners is optimistic that the Company's business outlook in 2024 and even into the future will be excellent. Management has prepared the fundamentals well, allowing the Company's expansion plans to be more open.

Karena itu, Dewan Komisaris akan memberikan dukungan secara penuh kepada manajemen untuk mewujudkan rencana dan target bisnis yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Dewan Komisaris juga meyakini, upaya mencapai visi “Menjadi Perusahaan Indonesia Terkemuka di Bidang Investasi dan Infrastruktur” dapat segera tercapai.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dewan Komisaris merupakan bagian terintegrasi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan, seperti tertuang dalam struktur GCG. Dengan demikian, Dewan Komisaris terlibat langsung dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang tidak hanya mengacu pada regulasi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga praktik terbaik di industri.

Salah satu tujuan penting dalam penerapan prinsip GCG di lingkungan Perseroan adalah mendorong kemandirian, profesionalisme dan objektivitas organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan operasional. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan GCG akan mendukung reputasi Perseroan sejalan dengan meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan GCG di lingkungan Perseroan telah berjalan dengan baik. Perseroan telah melaksanakannya sesuai dengan pedoman penerapan GCG.

Dalam penerapan GCG, Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan kepada Direksi untuk terus mengembangkan standar penerapannya, mengingat tantangan yang dihadapi Perseroan akan semakin besar, seiring dengan tumbuhnya kegiatan usaha Perseroan. Untuk itu, penerapan GCG diharapkan mampu beradaptasi dan merespons perkembangan kondisi eksternal dengan baik.

Sebagai bagian dari penerapan GCG di lingkungan Perseroan adalah implementasi manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan sejak dari awal proyek melalui tim yang melakukan analisis atas potensi risiko yang dialami oleh Perseroan. Pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi operasional untuk proses awal dan perencanaan, sementara di akhir oleh Tim Manajemen Risiko.

Perseroan senantiasa memastikan bahwa manajemen risiko telah diterapkan di seluruh proses operasional. Perseroan telah menetapkan kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi secara efektif dan efisien. Kebijakan tersebut selalu dikomunikasikan seluruh pemangku kepentingan agar dapat dipahami dan dilaksanakan, serta dievaluasi tingkat efektivitasnya.

Therefore, the Board of Commissioners will fully support management in achieving the business plans and targets set for 2024. The Board of Commissioners also believes that efforts to achieve the vision of “becoming a leading Indonesian company in the investment and infrastructure sector” can be achieved soon.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners is an integrated part of Good Corporate Governance (GCG) implementation within the Company, as stated in the GCG structure. Accordingly, the Board of Commissioners is directly involved in the implementation of GCG principles, which not only refer to regulations and laws but also best practices in the industry.

One of the critical objectives of implementing GCG principles within the Company is to encourage the independence, professionalism, and objectivity of the Company's organs in making decisions and carrying out operational activities. The Board of Commissioners believes that implementing GCG will strengthen the Company's reputation by increasing stakeholder confidence.

Throughout 2023, the Board of Commissioners believes that the implementation of GCG within the Company has been proper. The Company has implemented this in accordance with the GCG implementation guidelines.

In GCG implementation, the Board of Commissioners always reminds the Board of Directors to continue to develop implementation standards, keeping in mind that the Company's challenges will become even more significant as the Company's business activities expand. As a result, GCG implementation is expected to be adaptable and responsive to changes in external conditions.

Risk management is being implemented as part of the Company's GCG implementation. Risk management implementation has been used since the beginning of the project by a team that has analyzed the potential risks encountered by the Company. The operational organization is in charge of the initial process and planning, while the Risk Management Team oversees the final implementation.

The Company consistently ensures that risk management is embedded in all operational processes. The Company has developed an effective and efficient integrated risk management policy. This policy is always communicated to all stakeholders so that it can be understood and implemented, as well as evaluated for effectiveness.

Dewan Komisaris akan selalu melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG di lingkungan Perseroan. Untuk tahun 2023, Dewan Komisaris memandang bahwa Perseroan telah berada di jalur yang tepat dalam penerapan GCG.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2023 tidak terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris hingga akhir tahun buku adalah:

Jabatan	Nama Name	Position
Komisaris Utama	Manuel V. Pangilinan	President Commissioner
Komisaris	Rogelio L. Singson	Commissioner
Komisaris Independen	Johny J. Lumintang	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Farid Harianto	Independent Commissioner

APRESIASI

Pada tahun buku 2023, Dewan Komisaris berpandangan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Direksi telah sangat baik, sehingga memberikan hasil yang positif dalam pengembangan Perseroan ke depan. Karena itu, Dewan Komisaris senantiasa memberikan dukungan terhadap kebijakan dan strategi yang dijalankan oleh Direksi.

Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan usaha Perseroan. Begitu pun kepada regulator yang turut membimbing perjalanan kegiatan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan lain atas kerja sama yang terjalin. Dewan Komisaris berharap kerja sama yang telah terjalin dengan seluruh pemangku kepentingan akan terus meningkat, sehingga memberikan dukungan bagi Perseroan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

The Board of Commissioners will always supervise the implementation of GCG within the Company. For the achievement of 2023, the Board of Commissioners believes that the Company is on the right track in implementing GCG.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2023, the composition of the Board of Commissioners remained unchanged. Thus, the composition of the Board of Commissioners as of the end of the fiscal year is:

APPRECIATION

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors' business activities in the fiscal year 2023 were excellent, with positive results for the Company's future development. As a result, the Board of Commissioners consistently supports the policies and strategies implemented by the Board of Directors.

The Board of Commissioners would like to extend its appreciation to shareholders for the privilege of being a significant contributor to the Company's business trajectory. Similarly, regulators played a crucial role in guiding the Company's business trajectory.

The Board of Commissioners would also like to thank the other stakeholders for their cooperation. The Board of Commissioners hopes that this cooperation will continue to increase, thus providing support to the Company in meeting the targets that have been set.

Jakarta, 30 April 2024 | April 30, 2024



Manuel V. Pangilinan

Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Komisaris

Board of Commissioners



1 Farid Harianto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

2 Manuel V. Pangilinan
Komisaris Utama
President Commissioner

3 Rogelio L. Singson
Komisaris
Commissioner

4 Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Reports



M. Ramdani Basri
Direktur Utama & CEO
President Director & CEO



Tahun 2023 adalah tahun yang sangat penting bagi Perseroan, karena Perseroan berhasil mengukuhkan *platform* bisnis infrastruktur jalan tol.

2023 is a milestone year for the Company, as it successfully established its toll road infrastructure business platform.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kepada Tuhan Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perseroan") melewati tahun 2023 dengan baik di tengah kondisi eksternal yang masih bergerak dinamis. Selain kinerja keuangan yang tetap solid, aksi korporasi yang dilaksanakan juga berjalan dengan lancar.

Tahun buku 2023 menjadi momentum yang sangat penting bagi Perseroan, terutama karena Perseroan berhasil mengukuhkan platform bisnis di bidang infrastruktur jalan tol. Momentum ini merupakan bagian penting dari rencana ekspansi Perseroan, yang telah dimulai dengan akuisisi Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated II atau Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) pada tahun 2022.

Praise be to God Almighty for His grace and mercy in allowing PT Nusantara Infrastructure Tbk ("the Company") to navigate through 2023 successfully, despite dynamic external conditions. The Company not only achieved strong financial results, but also carried out corporate actions smoothly.

The fiscal year 2023 was a watershed moment for the Company, especially since the Company successfully established Nusantara Infrastructure's business platform in the toll road infrastructure sector. This momentum is vital to the Company's expansion plans, which began in 2022 with the acquisition of the Jakarta-Cikampek Elevated Toll Road, also known as the Mohamed Bin Zayed (MBZ) Elevated Toll Road.

Melengkapi pengukuhan platform Perseroan di sektor jalan tol, ditandai juga dengan masuknya Warrington Investment Pte. Ltd (WIPL) sebagai pemegang saham baru melalui PT Margautama Nusantara (MUN), entitas asosiasi dari Perseroan yang bergerak di bidang infrastruktur jalan tol. Melalui aksi korporasi ini, kinerja keuangan Perseroan telah menjadi semakin kuat, baik pada saat ini maupun ke depan.

WIPL merupakan perusahaan investasi milik GIC Ventures (GIC), *sovereign wealth fund* Pemerintah Singapura. Dengan masuknya investor terkemuka tersebut, saat ini Perseroan mendapat dukungan dari dua investor utama yaitu PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), dan GIC untuk mengembangkan bisnis pada sektor jalan tol.

Kedua investor tersebut telah berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan lini bisnis Perseroan di sektor jalan tol. Saat ini, Perseroan telah memiliki 5 (lima) ruas jalan tol melalui MUN, dan satu ruas jalan tol baru yang sedang dalam tahap persiapan pembangunan.

Ekspansi di bidang jalan tol ini merupakan bagian dari proses Perseroan yang sedang memasuki fase ekspansi untuk menjadi lebih besar. Karena itulah, dua investor yang memberikan dukungan modal dan reputasi menjadi sangat penting dalam perjalanan bisnis Perseroan ke depan yang bertindak sebagai holding investasi di bidang jalan tol yang dioperasikan oleh MUN.

Seiring dengan berkembangnya fase perjalanan bisnis Perseroan, nilai aset yang dibukukan juga berhasil terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2022, aset Perseroan sudah di atas Rp10 triliun, tepatnya sebesar Rp11,15 triliun.

Pada tahun 2023, dengan masuknya investasi dari WIPL dan MPTIS ke dalam MUN, Perseroan mengalami dilusi saham menjadi 43,39% sehingga laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan yang mengakibatkan penurunan pada nilai aset Perseroan menjadi sebesar Rp4,32 triliun.

Pada tahun yang sama, Perseroan juga memutuskan untuk melakukan *Go Private*, yakni mengubah status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Kebijakan dari aksi korporasi ini dilakukan sebagaimana yang sudah disampaikan melalui keterbukaan informasi pada tanggal 15 Desember 2023.

Completing the reinforcement of the Company's platform in the toll road sector is marked by the entry of Warrington Investment Pte. Ltd (WIPL) as a new shareholder through PT Margautama Nusantara (MUN), an associate of the Company engaged in toll road infrastructure. Through this corporate action, the Company's financial performance has become stronger, both for now and going forward.

WIPL is an investment company owned by GIC Ventures (GIC), the sovereign wealth fund of the Singapore government. With the participation of this prominent investor, the Company now receives support from two main investors, namely PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS) and GIC, to develop its business in the toll road sector.

Both investors have committed to jointly developing the Company's business line in the toll road sector. Currently, the Company has 5 toll road segments through MUN, and one new toll road segment is in the preparation stage of construction.

Expansion in the toll road sector is part of the Company's ongoing expansion phase to become larger. Therefore, the support of two investors providing capital and reputation becomes crucial in the Company's future business journey, acting as investment holdings in the toll road sector operated by MUN.

As the Company's business journey phase develops, the booked asset value continues to increase. Since 2022, the Company's assets have exceeded Rp10 trillion, precisely reaching Rp11.15 trillion.

In 2023, with the investment from WIPL and MPTIS into MUN, the Company experienced share dilution to 43.39%, resulting in MUN's financial statements no longer being consolidated with the Company's financial statements, leading to a decrease in the Company's asset value to Rp4.32 trillion.

In the same year, the Company also decided to *Go Private*, changing its status from a public company to a private company, a process that is currently underway. This policy on corporate action was announced through a disclosure dated December 15, 2023.

Di masa mendatang, Perseroan memiliki sejumlah rencana pengembangan usaha sektor jalan tol yang membutuhkan pendanaan besar (*capital intensive*). Sedangkan dengan karakteristik usaha tersebut, membutuhkan periode yang lama untuk menghasilkan keuntungan hasil investasi (*return on investment*).

Dengan begitu, Perseroan membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk dapat memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Melalui rencana Go Private, pemegang saham akan memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan Saham mereka dengan harga yang wajar dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Aksi korporasi Go Private, dan masuknya WIPL sebagai pemegang saham baru MUN telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 19 Desember 2023.

URAIAN PENCAPAIAN KINERJA USAHA

Kendala dan Tantangan

Posisi Perseroan sebagai pemain utama di sektor infrastruktur jalan tol semakin kuat. Perjalanan bisnis yang telah direalisasikan pada tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 2023 ini merupakan bagian dari corporate plan untuk mendukung kinerja Perseroan dalam jangka panjang. Momentum ekspansi tersebut merupakan kelanjutan dari proses yang telah dilalui sebelumnya, yakni fase pengembangan dan pertumbuhan.

Perseroan menyadari bahwa untuk mendukung ekspansi yang telah direncanakan membutuhkan investasi yang besar serta jangka waktu panjang, memahami kondisi tersebut, Perseroan menggandeng mitra investasi yang memiliki kapasitas baik dalam memberikan dukungan permodalan bagi Perseroan.

Kemampuan Perseroan dalam mengidentifikasi beragam kesempatan dan tantangan serta merealisasikan solusinya membuat Perseroan memiliki kemampuan yang sangat memadai untuk ekspansi dan mengembangkan bisnis jalan tol ke depan. Bahkan, manajemen telah menyiapkan beragam skema dalam ekspansi di lini bisnis ini, baik dari rencana inisiasi proyek hingga akuisisi, termasuk peningkatan modal.

In the future, the Company has several business development plans in the toll road sector that require substantial funding (*capital intensive*). However, given the nature of such business, it takes a long period to generate investment returns (*return on investment*).

Thus, the Company will require even more time to provide dividends to its shareholders. Through the Go Private plan, shareholders will have the opportunity to sell their shares at a fair price while still adhering to applicable legal provisions.

The corporate action of Go Private, and the entry of WIPL as a new shareholder of MUN, has received approval at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) held on December 19, 2023.

BUSINESS PERFORMANCE ACHIEVEMENT DESCRIPTION

Constraints and Challenges

The Company's position as a major player in the toll road infrastructure sector is strengthening. The business journey realized in previous years until 2023 is part of the corporate plan to support the Company's long-term performance. This expansion momentum is a continuation of the process undergone previously, namely the development and growth phase.

The Company recognizes that its planned expansion requires long-term investments in large amounts. As such, the Company engages investment partners with strong capacity to provide capital support for the Company.

The Company's ability to identify various opportunities and challenges and realize solutions makes it highly capable of expanding and developing its toll road business in the future. In fact, management has prepared various schemes for expansion in this business line, ranging from project initiation plans to acquisitions, including capital enlargement.

Selain jalan tol, Perseroan juga memiliki rencana untuk mengembangkan lini bisnis yang telah dijalani selama ini, yaitu pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Pada sektor ini, Perseroan akan berfokus pada pembangkit hidro. Meskipun demikian, Perseroan tidak menutup kesempatan untuk merealisasikan berbagai peluang di sektor EBT lainnya yang tersedia.

Melalui pengembangan EBT ini, Perseroan berharap dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup dan mendukung upaya penurunan emisi karbon.

Penerapan Strategi dan Kebijakan Strategis

Sebagai bagian dari penerapan strategi pengembangan bisnis khususnya terkait permodalan, Perseroan telah merealisasikan kerja sama investasi dengan mitra strategis untuk mendukung rencana bisnis ke depan. Pertimbangan Perseroan dalam memilih mitra investor institusi tidak hanya karena memiliki modal kuat, tetapi juga dengan pertimbangan reputasi dari mitra tersebut.

Saat ini, Perseroan telah menggandeng 2 (dua) investor besar dengan permodalan kuat dan memiliki reputasi internasional yang sangat baik. Investor yang dimaksud adalah MPTIS yang memang telah menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 74,65%. MPTIS merupakan anak usaha Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), operator jalan tol terbesar di Filipina. Mitra selanjutnya adalah GIC, yang melalui WIPL menjadi bagian dari pemegang saham baru MUN, yang saat ini merupakan entitas asosiasi Perseroan yang khusus bergerak di bidang infrastruktur jalan tol. Masuknya investor terkemuka tersebut mendukung fundamental keuangan Perseroan menjadi semakin kuat, sehingga peluang ekspansi akan semakin besar.

Bersamaan dengan kehadiran GIC, Perseroan telah melunasi kewajiban keuangannya dalam proses akuisisi 40% saham PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), pengelola Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated II atau yang saat ini dikenal sebagai Jalan Layang MBZ. Untuk itu, Perseroan akan lebih leluasa untuk mengembangkan bisnis infrastruktur jalan tol. Kendati demikian, pada saat bersamaan, Perseroan tetap menjadi holding dengan lini bisnis: jalan tol, pengelolaan air bersih, energi terbarukan, serta periklanan dan pengelolaan parkir.

In addition to toll roads, the Company also has plans to develop the business lines it has been involved in, namely power generation based on new and renewable energy sources (EBT). In this sector, the Company will focus on hydro power generation. However, the Company does not rule out the opportunity to realize various opportunities in other available EBT sectors.

Through the development of EBT, the Company hopes to contribute to environmental preservation and support efforts to reduce carbon emissions.

Implementation of Strategy and Strategic Policies

As part of the implementation of its business development strategies, especially related to capital, the Company has realized investment cooperation with strategic partners to support future business plans. The Company's consideration in choosing institutional investor partners is not only because they have strong capital, but also by considering the reputation of the partner.

Currently, the Company has partnered with 2 (two) major investors with strong capital and excellent international reputations. The investors in question are MPTIS, which has become the majority shareholder of the Company with a share ownership of 74.65%. MPTIS is a subsidiary of Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), the largest toll road operator in the Philippines. The next partner is GIC, which, through WIPL, has become part of the new shareholders of MUN, which is currently an associated entity of the Company's specifically engaged in toll road infrastructure. The entry of these leading investors supports the Company's financial fundamentals becoming even stronger, thus expanding opportunities further.

Alongside the presence of GIC, the Company has settled its financial obligations in the acquisition process of a 40% stake in PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), the operator of the Jakarta-Cikampek Elevated II toll road section now known as Jalan Layang MBZ. As a result, the Company will have more flexibility to develop its toll road infrastructure business. Nevertheless, concurrently, the Company remains a holding company with business lines including toll roads, clean water management, renewable energy, and advertising and parking management.

Selain dukungan dari mitra investasi dalam pengembangan bisnis, Perseroan memiliki beragam pilihan opsi di bidang pendanaan. Pertama, menggunakan kas internal. Kedua, melalui pinjaman. Ketiga, dapat dilakukan dengan peningkatan modal. Manajemen dapat memilih beragam pilihan pendanaan tersebut, dengan pertimbangan yang lebih cepat dan menguntungkan.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, ditegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Dengan demikian, Direksi memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis Perseroan.

Karena itu, seluruh anggota Direksi terlibat aktif sejak dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan, begitu juga dengan pelaksanaannya. Dalam perumusan strategi, seluruh organisasi Perseroan ikut terlibat mulai dari perencanaan, khususnya dalam menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Selanjutnya, Direksi bersama Dewan Komisaris memutuskan strategi utama dalam RKAP yang menjadi panduan dalam menjalankan kegiatan usaha pada tahun buku. Hal ini menunjukkan bahwa Direksi terlibat langsung dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan.

Proses Direksi dalam Memastikan Implementasi Strategi

Direksi melakukan pemantauan terhadap realisasi strategi dan kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Dalam proses pemantauan tersebut, Direksi juga melakukan evaluasi dan menetapkan strategi baru jika diperlukan, dengan melihat perkembangan situasi pada tahun buku.

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direksi, antara lain melalui rapat koordinasi secara berkala dengan organisasi pelaksana di bawahnya. Selain untuk mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaannya, Direksi juga menetapkan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi. Dengan demikian, seluruh strategi dapat diimplementasikan dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

In addition to support from investment partners in business development, the Company has various financing options. First, utilizing internal cash reserves. Second, through loans. Third, through capital increases. Management can choose from these financing options, considering factors such as speed and profitability.

The Role of the Board of Directors in Formulating the Strategy and Strategic Policies

Strategies and In accordance with the Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 33/POJK.04/2014 concerning the Boards of Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies, it is emphasized that the Board of Directors manages the company in accordance with appropriate policies. Thus, the Board of Directors plays a crucial role in formulating the Company's strategic strategies and policies.

Therefore, all members of the Board of Directors are actively involved in formulating the Company's strategic strategies and policies, as well as their implementation. In strategy formulation, the entire organization of the Company is involved from planning stages, especially in setting the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

Furthermore, the Board of Directors, together with the Board of Commissioners, decides on the main strategies in the RKAP, which serve as guidelines for conducting business activities in the fiscal year. This demonstrates that the Board of Directors is directly involved in formulating the Company's strategic strategies and policies.

The Board of Directors' Process in Ensuring Strategy Implementation

The Board of Directors monitors the realization of strategies and strategic policies that have been established. In this monitoring process, the Board of Directors also conducts evaluations and establishes new strategies if necessary, based on the developments throughout the fiscal year.

The monitoring and evaluation conducted by the Board of Directors include regular coordination meetings with the executing organizations under its purview. Apart from gathering information on the progress of implementation, the Board of Directors also establishes follow-up plans based on the evaluation results. Therefore, all strategies can be implemented effectively to achieve the set targets.

Pencapaian Kinerja: Perbandingan Target dan Realisasi

Kinerja Perseroan pada tahun 2023 sangat solid. Di bidang operasional, PT Jakarta Metro Expressway (JMEX), anak usaha Perseroan, berhasil memenangkan lelang proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami sepanjang 21,6 kilometer (km). Pendirian Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ditandatangani pada 8 September 2023 bersama dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk menandai awal dari proyek ini.

Selanjutnya, pada 11 Oktober 2023, penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) direalisasikan oleh Direktur Utama JMEX dan Kepala BPJT. Kegiatan tersebut disaksikan oleh Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Sekretaris BPJT, Ketua Bidang Investasi Jalan Tol, serta jajaran Direksi JMEX.

Selain 2 (dua) momen tersebut, penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres juga diadakan sebagai rangkaian menuju pembangunan proyek. Perjanjian penjaminan ditandatangani oleh Direktur Utama PII sebagai penyedia penjaminan pemerintah bersama Direktur Utama JMEX.

Perjanjian Regres itu ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) bersama dengan Direktur Utama PII. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp21,3 triliun ini akan menghubungkan Jati Asih (Bekasi) dengan Ulujami (Jakarta Selatan).

Sementara dari sisi keuangan, total pendapatan usaha dan penjualan Perseroan di luar konstruksi dan usaha lainnya pada tahun 2023 mencapai Rp917,63 miliar, lebih tinggi 9,45% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp838,38 miliar.

Total beban langsung dan beban pokok Perseroan (di luar beban konstruksi) pada tahun 2023 mencapai Rp266,35 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp257,08 miliar, terdapat kenaikan 3,60%.

Hingga 31 Desember 2023, total rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan mencapai Rp238,31 miliar. Hal ini terjadi akibat adanya *non-recurring item* berupa beban bunga pinjaman sementara atas utang jangka pendek (*bridge loan*) terkait proses akuisisi saham Jalan Layang MBZ.

Performance Achievement: Target and Realization Comparison

The Company's performance in 2023 was very solid. In operational, PT Jakarta Metro Expressway (JMEX), a subsidiary of the company, successfully won the tender for the Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami project covering a length of 21.6 kilometers (km). The establishment of the Toll Road Business Entity (BUJT) was signed on September 8, 2023, along with the Toll Road Regulatory Agency (BPJT), marking the beginning of this project.

Subsequently, on October 11, 2023, the signing of the Toll Road Concession Agreement (PPJT) was realized by the CEO of JMEX and the Head of BPJT. The event was witnessed by the Business Director of PT Infrastructure Guarantee Indonesia (PII), the Secretary of BPJT, the Chairman of the Toll Road Investment Division, and the JMEX Board of Directors.

In addition to those two moments, the signing of Guarantee Agreements and Regress Agreements was also held as part of the series towards the project development. The guarantee agreement was signed by the President Director of PII as the government guarantee provider together with the President Director of JMEX.

The Regress Agreement was signed by the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) as the Project Cooperation Responsible (PJPK) along with the President Director of PII. This project, with an investment value of around Rp21.3 trillion, will connect Jati Asih (Bekasi) with Ulujami (South Jakarta).

Meanwhile, from a financial standpoint, the total business revenue and sales of the Company outside of construction and other businesses in 2023 reached Rp917.63 billion, an increase of 9.45% compared to 2022 which was Rp838.38 billion.

The total direct expenses and cost of goods sold of the Company (excluding construction expenses) in 2023 reached Rp266.35 billion. Compared to 2022 which was Rp257.08 billion, there was an increase of 3.60%.

As of December 31, 2023, the total comprehensive loss for the current fiscal year of the Company reached Rp238.31 billion. This was due to non-recurring items such as temporary interest expenses on short-term loans (bridge loans) related to the acquisition process of MBZ Elevated Road shares.

Total aset pada tahun buku 2023 mencapai Rp4,32 triliun. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp11,15 triliun. Penurunan ini diakibatkan karena aset pada MUN sudah tidak lagi dikondolidasikan dengan aset Perseroan.

Dari total aset tersebut, jumlah aset lancar Perseroan mencapai Rp442,62 miliar atau 10,25% dari total aset. Sedangkan aset tidak lancar, sebesar Rp3,88 triliun atau 89,75% terhadap total aset.

PROSPEK USAHA

Pada tahun 2023, Perseroan telah memantapkan platform dalam bisnis infrastruktur jalan tol. Keberhasilan ini akan menjadi modal penting bagi Perseroan untuk berkembang ke depan, didukung dengan keselarasan atas kebijakan pemerintah yang masih terus fokus pada pengembangan infrastruktur, termasuk jalan tol.

Mengacu pada Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, untuk kepentingan pembangunan infrastruktur tersebut, anggaran yang disediakan masih sangat besar, yakni sekitar Rp422,7 triliun. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp399,6 triliun, terdapat kenaikan 5,78%.

Komitmen pemerintah tersebut selaras dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan. Terlebih lagi pada tahun 2023, Perseroan telah memiliki platform di bidang bisnis jalan tol yang akan ditopang oleh dua investor utama yaitu MPTIS dan GIC

Kehadiran mitra investasi itu turut serta menyempurnakan rencana bisnis Perseroan ke depan. Perseroan menyadari pentingnya ketersediaan modal yang besar dalam rangka pengembangan atau ekspansi di bidang infrastruktur jalan tol.

Saat ini, posisi Perseroan pada sektor jalan tol sudah sangat kuat. Bukan hanya memiliki pengalaman, tetapi juga dukungan permodalan yang selalu siaga dari para pemilik modal dengan reputasi baik di tingkat internasional.

Dengan kehadiran platform bisnis yang matang, kemampuan bersaing Perseroan akan semakin kompetitif di industri yang mana memiliki sedikit pemain dari sektor swasta. Dengan demikian, ketika ada kesempatan bisnis yang datang, Perseroan akan lebih siap untuk menyerap potensi tersebut.

Total assets in the fiscal year 2023 reached Rp4.32 trillion. Compared to 2022 which was Rp11.15 trillion. This decrease was due to the fact that the assets of MUN are no longer consolidated with the Company's assets.

Of the total assets, the amount of the Company's current assets reached Rp442.62 billion or 10.25% of the total assets. Meanwhile, non-current assets amounted to Rp3.88 trillion or 89.75% of the total assets.

BUSINESS OUTLOOK

In 2023, the Company has solidified its platform in the toll road infrastructure business. This success will be an important capital for the Company to develop in the future, supported by the alignment with government policies that continue to focus on infrastructure development, including toll roads.

Referring to the State Budget (APBN) 2024 Financial Notes, for the purpose of infrastructure development, the allocated budget is still very large, around Rp422.7 trillion. Compared to 2023 which was Rp399.6 trillion, there is an increase of 5.78%.

The government's commitment is in line with the Company's business development plan. Moreover, in 2023, the Company has a platform in the toll road business supported by two main investors, namely MPTIS and GIC.

The presence of investment partners also complements the Company's future business plans. The Company realizes the importance of having a large capital available for development or expansion in the toll road infrastructure sector.

Currently, the Company's position in the toll road sector is very strong. Not only does it have experience, but it also has financial support that is always ready from reputable capital owners at the international level.

With the presence of a mature business platform, the Company's competitive ability will become increasingly competitive in industries with few players from the private sector. Thus, when there are business opportunities, the Company will be better prepared to seize them.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan memandang bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan insiatif yang sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan, terutama melalui kepercayaan para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham. Selain itu, prinsip-prinsip GCG juga dapat mendukung pencapaian kinerja secara berkelanjutan.

Karena itu, Perseroan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai komitmen yang terus dipraktikkan dan dikembangkan pada setiap kegiatan usaha Perseroan. Prinsip GCG akan terus disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta dinamika di lingkungan industri.

Perseroan juga meyakini, penerapan GCG mampu memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi Perseroan. Begitu juga terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pelaksanaan GCG, Perseroan juga telah memiliki struktur yang mendukung pelaksanaannya. Mengacu pada Pedoman Komite Nasional Kebijakan Governansi dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur GCG Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, serta regulasi lain yang relevan.

Melalui penerapan GCG, Perseroan diharapkan dapat menghindari praktik yang melanggar etika bisnis dengan mencegah adanya benturan kepentingan, penyelewengan, pernyataan palsu, gratifikasi, dan diskriminasi. Selain itu, Perseroan ikut mendorong terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang baik, kondusif, dan profesional di antara organ-organ Perseroan, karyawan, dan masyarakat serta lingkungan. Perseroan juga turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi atau penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*) dalam industri infrastruktur

Dengan demikian, implementasi tata kelola perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan dalam industri infrastruktur nasional maupun internasional. Sehingga, Perseroan dapat berkontribusi Mendorong terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang baik, kondusif, dan profesional di antara organ-organ Perseroan, karyawan, dan masyarakat serta lingkungan.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Company views the implementation of good corporate governance (GCG) as a crucial initiative to maintain and enhance the company's reputation, especially through the trust of stakeholders, particularly shareholders. Additionally, GCG principles can also support sustainable performance achievements.

Therefore, the Company considers GCG principles as commitments that are continuously practiced and developed in every business activity of the Company. GCG principles will be continuously adjusted to the development of regulations and dynamics in the industry environment.

The Company also believes that the implementation of GCG can provide maximum added value for the Company, as well as for shareholders and other stakeholders.

In the implementation of GCG, the Company also has a supporting structure. Referring to the National Committee on Governance Policy Guidelines and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company's GCG structure consists of the General Meeting of Shareholders (RUPS), the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as other relevant regulations.

Through the implementation of GCG, the Company is expected to avoid practices that violate business ethics by preventing conflicts of interest, deviations, false statements, gratuities, and discrimination. Additionally, the Company also encourages the creation of good, conducive, and professional relationships and work environments among the Company's organs, employees, and the community as well as the environment. The Company also participates in promoting national economic growth through increased investment or foreign direct investment in the infrastructure industry.

Thus, the implementation of corporate governance can enhance the performance and competitiveness of the Company in both national and international infrastructure industries. As a result, the Company can contribute to fostering good, conducive, and professional relationships and work environments among the Company's organs, employees, and the community as well as the environment.

KOMITMEN TERHADAP KEBERLANJUTAN

Hingga saat ini, sudah lebih dari 15 tahun Perseroan hadir dan berperan aktif dalam mempercepat pertumbuhan infrastruktur di Indonesia. Berbagai proyek infrastruktur telah dihadirkan Perseroan di antaranya sektor jalan tol, pengelolaan air, energi terbarukan, serta periklanan dan pengelolaan parkir. Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan infrastruktur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa kemajuan bangsa Indonesia.

Melalui berbagai proyek infrastruktur yang dijalankan, Perseroan berkomitmen memberikan manfaat berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan di seluruh wilayah operasional. Bagi Perseroan, inovasi dan adaptasi dalam aktivitas bisnis maupun operasional merupakan kunci Perseroan menjawab tantangan dan dinamika bisnis untuk terwujudnya keberlanjutan Perseroan pada masa yang akan datang.

Perseroan memiliki 7 Pilar Strategi yang di dalamnya terdapat aspek keberlanjutan dan secara konsisten diterapkan di setiap kegiatan operasional Perseroan. Ketujuh pilar tersebut meliputi People & Culture as the Main Foundation, Financial Stability, Strengthen Core Business, Elevate Customer Experience, Digital Foundation, Mobility Ecosystem and Business Diversification, dan Health, Safety and Environment.

Melalui pilar-pilar tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan operasional yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan menyeimbangkan aspek People, Planet, dan Profit, sehingga meningkatkan dampak positif sosial dan lingkungan. Seluruh pilar ini menjadi panduan atau roadmap bagi Perseroan, anak perusahaan, dan seluruh proyeknya dalam mengembangkan aktivitas bisnis dan operasional di masa yang akan datang guna memastikan Perseroan berada di jalur yang tepat dalam mencapai visi dan misinya serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan terbaik serta maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

Strategi keberlanjutan yang diterapkan menjadi cerminan harapan, tugas, dan tanggung jawab Perseroan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang dijalankan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Begitu juga terhadap para pemangku kepentingan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Until now, for more than 15 years, the Company has been present and actively involved in accelerating infrastructure growth in Indonesia. Various infrastructure projects have been undertaken by the Company, including toll roads, water management, renewable energy, as well as advertising and parking management. The Company believes that infrastructure growth will enhance the welfare of society and bring progress to the Indonesian nation.

Through various infrastructure projects, the Company is committed to providing sustainable benefits to stakeholders across its operational areas. For the Company, innovation and adaptation in business and operational activities are key to addressing challenges and business dynamics to achieve sustainability in the future.

The Company has 7 Pillars of Strategy, within which sustainability aspects are consistently applied in every operational activity of the Company. These seven pillars include People & Culture as the Main Foundation, Financial Stability, Strengthen Core Business, Elevate Customer Experience, Digital Foundation, Mobility Ecosystem and Business Diversification, and Health, Safety, and Environment.

Through these pillars, the Company can conduct operational activities that prioritize sustainability principles by balancing the aspects of People, Planet, and Profit, thus enhancing positive social and environmental impacts. All these pillars serve as guidance or a roadmap for the Company, its subsidiaries, and all its projects in developing business and operational activities in the future to ensure that the Company is on the right track in achieving its vision and mission and providing the best and maximum economic, social, and environmental benefits to all stakeholders of the Company.

The sustainability strategy applied reflects the hopes, duties, and responsibilities of the Company to ensure that the infrastructure development undertaken can provide sustainable benefits for all Indonesian society. The same applies to stakeholders, both now and in the future.

Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan infrastruktur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa kemajuan bangsa Indonesia. Untuk itu, Perseroan berharap terus menjadi bagian dari Pemerintah dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan infrastruktur di Indonesia.

The Company believes that infrastructure growth will enhance the welfare of society and bring progress to the Indonesian nation. Therefore, the Company hopes to continue to be part of the Government's efforts to enhance and accelerate infrastructure growth in Indonesia.

Perseroan juga menyadari, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, peran penerapan tata kelola keberlanjutan yang baik di seluruh aktivitas operasional sangat penting. Perseroan senantiasa menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat positif bagi sosial dan lingkungan di setiap aktivitas operasional.

The Company also recognizes that in carrying out its business activities, the role of good sustainability governance in all operational activities is essential. The Company always strives to create sustainable growth and provide positive benefits to society and the environment in every operational activity.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASANNYA

Pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan. Dengan demikian, susunan Direksi hingga akhir tahun buku adalah:

CHANGES IN BOARD COMPOSITION AND REASONS

In 2023, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors. Thus, the composition of the Board remains unchanged until the end of the fiscal year:

Jabatan	Nama Name	Position
Direktur Utama	M. Ramdani Basri	President Director
Direktur	Danni Hasan	Director
Direktur	Ridwan Irawan	Director
Direktur	Benny S. Santoso	Director
Direktur	Denn Charly G. Espanola	Director
Direktur	Christopher Daniel C. Lizo	Director
Direktur	Francis Emmanuel D. Rojas	Director
Direktur	Amadeo N. Bejec	Director

APRESIASI

Direksi menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan dalam organisasi Perseroan yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi terbaiknya sepanjang tahun 2023. Kepada Dewan Komisaris, Direksi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin sepanjang tahun buku sehingga pengelolaan Perseroan berjalan dengan baik.

Direksi juga menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham yang telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Kepada regulator, Perseroan menyampaikan terima kasih atas bimbingannya, sehingga dapat melalui tahun buku 2023 dengan kinerja yang solid.

Perseroan berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan kinerja usaha yang berkelanjutan. Karena itu, Perseroan juga berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan mitra usaha, dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

APPRECIATION

The Board of Directors extends its appreciation to all employees within the Company's organization who have demonstrated dedication and made their best contributions throughout the year 2023. To the Board of Commissioners, the Board of Directors expresses gratitude for the cooperation maintained throughout the fiscal year, enabling the management of the Company to proceed smoothly.

The Board of Directors also expresses thanks to the Shareholders who have placed their trust in the Company's business activities. To the regulators, the Company expresses gratitude for their guidance, enabling it to navigate through the fiscal year 2023 with solid performance.

The Company is committed to always comply with applicable laws and regulations to achieve sustainable business performance. Therefore, the Company also hopes that the cooperation established with stakeholders, including business partners, can continue to be enhanced in the future.

Jakarta, 30 April 2024 | April 30, 2024



M. Ramdani Basri
Direktur Utama & CEO
President Director & CEO

Direksi

Board of Directors



1

1 Denn Charly G. Espanola
Direktur
Director

2

2 Christopher Daniel C. Lizo
Direktur
Director

3

3 M. Ramdani Basri
Direktur Utama & CEO
President Director & CEO

4

4 Francis Emmanuel D. Rojas
Direktur
Director



5 Amadeo N. Bejec
Direktur
Director

6 Danni Hasan
Direktur
Director

7 Benny S. Santoso
Direktur
Director

8 Ridwan Irawan
Direktur
Director



03



Profil Perusahaan

Company Profile

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan

General Information and Corporate Identity



Nusantara Infrastructure

Nama Perusahaan Company Name	PT Nusantara Infrastructure Tbk	
Bidang Usaha Line of Business	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, jasa, dan pertanian.	Professional, Scientific and Technical Activities, trade, construction, industry, transportation, services, and agriculture.
Produk dan Jasa Product and Service	Investasi	Investment
Tanggal Pendirian dan Beroperasi Komersial Date of Establishment and Commercial Operation	1 September 1995	September 1, 1995
Jumlah Karyawan Number of Employees	325 orang	325 people
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian Akta No. 3 tanggal 1 September 1995 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, SH., Notaris di Jakarta.	Deed of Establishment Deed No. 3 dated September 1, 1995 made before Abdullah Ashal, SH., Notary in Jakarta.
	Perubahan Anggaran Dasar Terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas No. 115 tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta	Last Amendment to the Articles of Association Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company No. 115 dated August 31, 2021 made before Humbert Lie, S.H., S.E., MKn., Notary in Jakarta.
Perubahan Nama Name Changes	Tahun 1995 Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Sawitia Bersama Darma berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 1 September 1995 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, SH., Notaris di Jakarta.	Year 1995 The Company was first established under the name PT Sawitia Bersama Darma based on Notarial Deed No. 3 dated September 1, 1995 made before Abdullah Ashal, SH., Notary in Jakarta.
	Tahun 1998 Perseroan mengubah nama menjadi PT Wahana Tradindo Jaya, berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 10 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.	Year 1998 The Company changed its name to PT Wahana Tradindo Jaya, based on Notarial Deed No. 23 dated June 10, 1998 made before Linda Herawati, S.H., Notary in Jakarta.
	Tahun 2001 Nama Perseroan diubah menjadi T Metamedia Technologies. Pada tahun yang sama, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan mengubah statusnya menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk) dengan kode saham META.	Year 2001 The Company's name was changed to PT Metamedia Technologies. In the same year, the Company conducted an Initial Public Offering and changed its status to a Public Company (Tbk) with ticker code META.
	Tahun 2006 Perseroan kembali melakukan perubahan nama menjadi PT Nusantara Infrastructure Tbk yang digunakan hingga saat ini.	Year 2006 The Company changed its name to PT Nusantara Infrastructure Tbk which is used until now.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Saham Seri A: PT Bosowa Utama: 0,00%	Series A Share: PT Bosowa Utama: 0.00%
	Saham Seri B: - PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services: 74,65% - PT Indonesia Infrastructure Finance: 8,19% - Masyarakat dan Lainnya: 17,16%	Series B Share: - PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services: 74.65% - PT Indonesia Infrastructure Finance: 8.19% - Public and Other: 17.16%



Pencatatan Saham di Bursa Saham Listing on Stock Exchange	Bursa Efek Indonesia, 18 Juli 2001	Indonesia Stock Exchange, July 18, 2001
Kode Saham Ticker Code	META	
Modal Dasar Authorized Capital	Modal Dasar terdiri dari 2 saham Seri A dengan nilai nominal Rp35 per saham dan 80.999.999.999 saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham	The Company's Authorized Capital consists of 2 Series A shares with a nominal value of Rp35 per share and 80,999,999,999 Series B shares with a nominal value of Rp70 per share
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	Rp1.239.749.573.545 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh terdiri dari 1 (satu) saham Seri A dengan nominal Rp35 per saham dan 17.710.708.193 saham Seri B dengan nominal Rp70 per saham	Rp1,239,749,573,545 The Company's Issued and Fully Paid-up Capital consists of 1 (one) Series A share with a nominal value of Rp35 per share and 17,710,708,193 Series B shares with a nominal value of Rp70 per share
Kontak Perusahaan Company Contact	Dahlia Evawani Sekretaris Perusahaan Telp/Phone: +6221 5150100 Fax/Facs: +6221 515 1221 Email: corsec@nusantarainfrastructure.com	Dahlia Evawani Sekretaris Perusahaan Phone: +6221 5150100 Facs: +6221 515 1221 Email: corsec@nusantarainfrastructure.com
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Equity Tower Lantai 38 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12190	Equity Tower 38 th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Senayan Sub-District, Kebayoran Baru District, South Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province 12190
Media Sosial Social Media	Instagram: nusantara.infrastructure Facebook: Nusantara Infrastructure Twitter: @nusantarainfra Youtube: Nusantara Infrastructure Linked.In : Nusantara Infrastructure	
Situs Web Website	www.nusantarainfrastructure.com	

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company



Perseroan didirikan pada 1 September 1995 berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 September 1995 yang dibuat di hadapan Abdullah Ashal, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.375.HT.01.01. Tahun 1995, 28 Desember 1995 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 41/2000 tanggal 19 Oktober 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2001, Tambahan No. 1140. Perseroan didirikan dengan fokus tujuan sebagai perusahaan yang menjalankan usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, jasa, dan pertanian.

Perseroan terus berkomitmen dan berupaya untuk menjalankan berbagai inisiatif strategis guna meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan. Pada tahun 2001, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan kode saham META dan status Perseroan berubah menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk).

Komitmen dan upaya tersebut terus dipegang teguh hingga tahun-tahun berikutnya dan kemudian kembali dihadirkan secara nyata melalui merger yang dilakukan dengan PT Nusantara Konstruksi Indonesia pada tahun 2006 berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

The Company was established on September 1, 1995, on the basis of Deed of Establishment No. 3 dated September 1, 1995 made before Abdullah Ashal, S.H., Notary in Jakarta and approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Decree No. C2-7.375.HT.01.01. 1995 on December 28, 1995, and registered with the Central Jakarta District Court Registrar under No. 41/2000 dated October 19, 2000, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 15 dated February 20, 2001, Supplement No. 1140. The Company was established with the goal of achieving objectives as a company that conducts business in the fields of Professional, scientific and technical activities, trade, construction, industry, transportation, services, and agriculture.

The Company remains committed and strives to implement various strategic initiatives to improve overall performance quality. In 2001, the Company went public through an Initial Public Offering with the ticker code META, and its status was changed to Public Company (Tbk).

This commitment and effort was upheld in the years that followed, and then remanifested with the merger with PT Nusantara Construction Indonesia in 2006, which was based on Notary Deed No. 17 dated October 20, 2006, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan terakhir pada tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 115 tanggal 31 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta, guna menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut.

Pembangunan di sektor jalan tol menjadi proyek pembangunan pertama Perseroan dan langkah pertama tersebut membawa Perseroan memiliki konsesi infrastruktur di bagian barat dan timur Indonesia. Hingga kini, konsesi jalan tol yang dikelola Perseroan melalui entitas asosiasi Perseroan, yaitu Jalan Tol Serpong-Pondok Aren; Jalan Tol Pelabuhan Soekarno Hatta-A.P. Pettarani, Makassar; Jalan Tol Jembatan Tallo-Simpang Mandai, Makassar; Jalan Tol Kebon Jeruk-Penjarangan; dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selain jalan tol, Perseroan terus memperluas portofolio ke berbagai sektor infrastruktur di Indonesia, yaitu pengelolaan air, energi terbarukan, serta periklanan dan pengelolaan parkir.

Sampai dengan akhir tahun 2023, Perseroan memiliki 10 (sepuluh) entitas anak yang telah beroperasi, baik yang dimiliki secara langsung 6 (enam) entitas maupun tidak langsung 5 (lima) entitas, serta 1 (satu) entitas asosiasi, sebagai kelompok usaha yang bergerak di 4 (empat) sektor infrastruktur, yaitu jalan tol, pengelolaan air, energi terbarukan, serta periklanan dan pengelolaan parkir.

Hingga kini Perseroan terus aktif memberikan kontribusi nyata dalam mendukung Pemerintah mewujudkan program percepatan pembangunan infrastruktur terutama di ranah infrastruktur ekonomi, yakni berbagai infrastruktur yang hadir untuk mendorong pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat dan keberadaannya dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, seperti prasarana umum, energi listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan pembuangan limbah.

The Company's Articles of Association underwent the latest amendment in 2021 as stated in the Deed of Limited Liability Company Meeting Resolution No. 115 dated August 31, 2021, made before Humbert Lie, SH, SE, MKn, Notary in Jakarta, to approve the amendment of the Company's Articles of Association, in order to adjust to the enactment of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the GMS of Public Companies, and its amendments or renewals or other sounds, as specified in the Regulation.

The Company's first development project was in the toll road sector, and this first step resulted in the Company owning infrastructure concessions in both the western and eastern parts of Indonesia. Until now, the Company has managed toll road concessions through its associated entities, which include the Serpong-Pondok Aren Toll Road, the Soekarno Hatta Port-A.P. Pettarani Toll Road, Makassar, the Tallo Bridge-Mandai Interchange Toll Road Makassar, the Kebon Jeruk-Penjarangan Toll Road, and the Jakarta-Cikampek Toll Road. Aside from toll roads, the Company is expanding its portfolio in Indonesia to include water management, renewable energy, as well as advertising and parking management.

Until the end of 2023, the Company has 10 (ten) operating subsidiaries, 6 (six) directly owned entities and 6 (six) indirectly owned entities, as well as 1 (one) associates, as a business group engaged in 4 (four) infrastructure sectors, namely toll roads, water management, renewable energy, as well as advertising and parking management.

Until now, the Company continues to actively contribute in supporting the Government to realize the accelerated infrastructure development program, particularly in the realm of economic infrastructure, namely various infrastructures that are present to encourage the implementation of community economic activities and their existence is used by the community as a whole, such as public infrastructure, electricity, telecommunications, transportation, irrigation, clean water, sanitation and waste disposal.

Rekam Jejak Pencapaian

Milestones

1995

Pertama kali berdiri 1 September 1995 dengan nama PT Sawitia Bersama Darma.

First established on September 1, 1995 under the name PT Sawitia Bersama Darma.

1998

Perseroan mengubah nama menjadi PT Wahana Tradindo Jaya.

The Company changed its name to PT Wahana Tradindo Jaya.

2001

1. Perseroan mengubah nama menjadi PT Metamedia Technologies pada 6 Februari 2001.
2. Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) dengan kode saham META.

1. The Company changed its name to PT Metamedia Technologies on February 6, 2001.
2. The Company conducted an Initial Public Offering (IPO) with ticker code META.

2006

1. Perseroan mengubah nama menjadi PT Nusantara Infrastructure Tbk.
2. Melakukan penggabungan usaha dengan PT Nusantara Konstruksi Indonesia.

1. The Company changed its name to PT Nusantara Infrastructure Tbk.
2. Merger with PT Nusantara Konstruksi Indonesia.

2007

Peletakan batu pertama pembangunan Jalan Tol Seksi IV (JTSE) di Makassar.

Groundbreaking for the Section IV Toll Road (JTSE) in Makassar.

2020

1. Penyesuaian Tarif Tol BSD Ruas Pondok Aren-Serpong dan Tol Bosowa Marga Nusantara (BMN) Ruas Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I dan II.
2. Penyelesaian Jalan Tol Layang A.P. Pettarani Makassar yang direncanakan akan disahkan pada Maret 2021.
3. Perubahan nama PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) menjadi PT Makassar Metro Network (MMN).
4. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung milik IME dioperasikan.

1. Tariff adjustment for BSD Toll Road, Pondok Aren-Serpong Section as well as Bosowa Marga Nusantara (BMN) Toll Road, Section I and II of Ujung Pandang Toll Road.
2. Completion of the A.P. Pettarani Makassar Elevated Toll Road which was planned to be ratified in March 2021.
3. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) changed its name to PT Makassar Metro Network (MMN).
4. Lau Gunung HPP (PLTA) owned by PT Inpol Meka Energi (IME) commenced the operations.

2019

1. El meningkatkan jumlah kepemilikan di IME menjadi 56,23%.
2. MUN menandatangani Perjanjian Konsorsium Pengusahaan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dengan PT Mahkota Permata Perdana, PT Summarecon Agung Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

1. El increased the total ownership in IME to 56.23%.
2. MUN signed Bandung Intra Urban Toll Road Consortium Agreement (BIUTR) with PT Mahkota Permata Perdana, PT Summarecon Agung Tbk, and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

2018

1. El mengakuisisi 80% Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Siantan, Kalimantan Barat.
2. Pencatatan Obligasi I JLB senilai Rp1,3 triliun.
3. PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) melaksanakan Mandatory Tender Offer (MTO) untuk kepemilikan saham Perseroan dengan harga penawaran Rp211/saham untuk 3.760.231.769 saham.
4. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Perseroan menawarkan sebanyak 4.950.072.626 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
5. Divestasi KIN dengan nilai Rp1.044 miliar dan rasio valuasi EV/EBITDA 12,2 kali.
6. Perseroan melalui entitas anak usahanya yaitu MUN, kembali mengakuisisi saham milik JLB sebesar 10% sehingga bertambah menjadi 35%.

1. El acquired 80% of the Biomass Power Plant (BPP) in Siantan, West Kalimantan.
2. Listing of Bond I of JLB amounted to Rp1.3 trillion.
3. PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) conducted a Mandatory Tender Offer (MTO) with an offering price of Rp211/share for 3,760,231,769 shares.
4. According to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) resolution, the Company offered a total of 4,950,072,626 Common Shares on behalf of Series B with a nominal value of Rp70 per share through the Pre-emptive Rights (HMETD).
5. KIN divestment with a value of Rp1,044 billion and EV/EBITDA valuation ratio of 12.2 times.
6. The Company through its subsidiary, MUN, re-acquired 10% of JLB's shares, thus increasing it to 35%.

2022

1. Perseroan akuisisi 40% saham PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) / Jakarta-Cikampek (Japek) melalui PT Margautama Nusantara (MUN).
2. PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), anak usaha MUN melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan jalan akses tol Makassar New Port.

1. The Company acquired 40% shares of PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)/ Jakarta-Cikampek (Japek) through PT Margautama Nusantara (MUN).
2. PT Toll Road Seksi Empat (JTSE), a subsidiary of MUN conducted groundbreaking for the construction of Makassar New Port toll access road.

2021

1. PT Makassar Metro Network mengoperasikan Jalan Tol Ujung Pandang seksi 3 (Tol Layang A.P. Pettarani Makassar) sepanjang 4,3 km sejak 19 Maret 2021.
2. PT Marga Metro Nusantara, berhasil lolos dalam tahap prakualifikasi untuk pengusahaan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami.

1. PT Makassar Metro Network operates Ujung Pandang Toll Road section 3 (A.P. Pettarani Makassar Elevated Toll Road) with a length of 4.3 km since March 19, 2021.
2. PT Marga Metro Nusantara, successfully passed the prequalification stage for the concession of Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami Toll Road.

2008

Perseroan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Jalan Tol Seksi IV (JTSE).

The Company conducted a groundbreaking for the construction of Section IV Toll Road (JTSE).

2012

Perseroan melalui PT Potum Mundi Infranasutara (Potum), mengakuisi saham PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) dengan kepemilikan 51,00%

The Company, through PT Potum Mundi Infranasutara (Potum), acquired the shares of PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) with 51.00% ownership.

2013

1. Akuisisi PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) melalui Potum sebesar 51,00%.
2. Potum kembali mengakuisisi saham PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) sebesar 65,00%.

1. Acquisition of PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) through Potum for 51.00%
2. Potum re-acquired shares of PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) amounting to 65.00%

2014

1. Akuisisi 70,17% milik PT Tara Cell Intrabuana melalui anak usahanya PT Telekom Infranasutara yang kemudian mengganti nama menjadi PT Komet Infra Nusantara (KIN).
2. Peresmian PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) sebagai penyedia air bersih 100 liter/detik kepada PT Kawasan Industri Medan di Kawasan Industri Medan.
3. Peletakan batu pertama peresmian sistem pengolahan dan distribusi air bersih oleh PT Sarana Catur Tirta Kelola di Serang Timur, Banten.
4. JEXWAY dan NEXCO masuk sebagai pemegang saham PT Bintaro Serpong Damai (BSD).
1. The Company acquired 70.17% shares of PT Tara Cell Intrabuana through its subsidiary, PT Telekom Infranasutara which then changed its name to PT Komet Infra Nusantara (KIN).
2. Inaugurated PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) as a provider of 100 liters/second clean water to PT Kawasan Industri Medan in Medan Industrial Estate.
3. Groundbreaking of the clean water treatment and distribution system by PT Sarana Catur Tirta Kelola in East Serang, Banten.
4. JEXWAY and NEXCO joined as shareholders of PT Bintaro Serpong Damai (BSD).

2017

1. PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM) menandatangani Perjanjian Perpanjangan Konsesi dengan PDAM Tirta Kerta Rahardja (TKR) Kabupaten Tangerang untuk jangka waktu 20 tahun.
2. MMN melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Jalan Tol Layang AP, Pettarani sepanjang 4,3 km.
3. SCTK menyelesaikan konstruksi peningkatan kapasitas dari 150 lps menjadi 350 lps.
4. Perusahaan asosiasi TKCM melakukan pembangunan untuk meningkatkan kapasitas sebesar 300 lps, dari 1.275 lps menjadi 1.575 lps.
1. PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM) signed a Concession Extension Agreement with PDAM Tirta Kerta Rahardja (TKR) Tangerang Regency for a period of 20 years.
2. MMN conducted groundbreaking of the AP, Pettarani Elevated Toll Road of 4.3 km.
3. SCTK completed construction of capacity increase from 150 lps to 350 lps.
4. TKCM associated companies carried out construction to increase capacity by 300 lps, from 1,275 lps to 1,575 lps.

2016

Perseroan mendapatkan sertifikat merek atas hak merek "Nusantara Infrastructure dan Nusantara Care" dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

The Company received a brand certificate for the brand right of "Nusantara Infrastructure and Nusantara Care" from the Ministry of Law and Human Rights.

2015

1. PT Energi Infranasutara (EI) meningkatkan kepemilikannya menjadi 54,64% dalam PT Inpolo Meka Energi (IME), entitas anak yang mengembangkan proyek PLTA Lau Gunung.
2. IME menyelesaikan finalisasi desain teknis dengan optimasi desain dari 10 MW menjadi 15 MW
3. Peningkatan portofolio menara telekomunikasi KIN, dari 591 menara di akhir tahun 2014 menjadi 901 menara di akhir tahun 2015.
4. Operasionalisasi Water Treatment Plan (WTP) 2 SCTK mengalami peningkatan kapasitas produksi (*uprating*) dari 25 liter/detik menjadi 50 liter/detik.
1. PT Energi Infranasutara (EI) increased its ownership to 54.64% in IME, a subsidiary that developed the Lau Gunung HPP project.
2. IME finalized the technical design with design optimization from 10 MW to 15 MW
3. KIN expanded the portfolio of telecommunication towers from 591 towers by the end of 2014 to 901 towers by the end of 2015.
4. Increased the 2 SCTK Water Treatment Plan (WTP) operational in production capacity (*uprating*) from 25 liters/second to 50 liters/second.

2023

1. Divestasi Saham PT Tirta Bangun Nusantara oleh PT Potum Mundi Infranasantara

Perseroan, melalui entitas anak PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) yang merupakan perusahaan induk untuk seluruh usaha Perseroan di sektor pengelolaan air dan infrastruktur air bersih, menjual sahamnya di PT Tirta Bangun Nusantara (TBN). Jumlah saham dilepas kepada Bahtera Hijau Mandiri (BHM) sebanyak 26.957.000 saham atau yang mewakili 99,998% kepemilikan Potum di TBN. Kemudian, Potum menjual 547 saham atau setara dengan 0,002% di TBN kepada Bahtera Hutama Sentosa (BHS). Dari 2 (dua) transaksi tersebut, Potum menerima pembayaran Rp55,00 miliar.

2. Penambahan Modal di PT Margautama Nusantara

PT Margautama Nusantara (MUN) melakukan peningkatan modal dengan menerbitkan 3.506 saham baru dengan masing-masing saham senilai Rp70.000.000 kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS) dan Warrington Investment Pte Ltd (Warrington) dengan rincian sebagai berikut:

- a. MPTIS: sebanyak 833 saham baru akan diterbitkan kepada MPTIS dengan nilai penyetoran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp1.033.768.778.576; dan
- b. Warrington: sebanyak 2.673 saham baru akan diterbitkan kepada Warrington dengan nilai penyetoran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp3.317.243.631.613.

1. Divestment of PT Tirta Bangun Nusantara Shares by PT Potum Mundi Infranasantara

The Company, through its subsidiary PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) which is the holding company for all of the Company's businesses in the water management and clean water infrastructure sectors, sold its shares in PT Tirta Bangun Nusantara (TBN). The number of shares released to Bahtera Hijau Mandiri (BHM) amounted to 26,957,000 shares or representing 99.998% of Potum's ownership in TBN. Then, Potum sold 547 shares or equivalent to 0.002% in TBN to Bahtera Hutama Sentosa (BHS). From these 2 (two) transactions, Potum received a payment of Rp55.00 billion.

2. Capital Increase in PT Margautama Nusantara

PT Margautama Nusantara (MUN) increase its capital by issuing 3,506 new shares with each share valued at Rp70,000,000 to PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS) and Warrington Investment Pte Ltd (Warrington) with details as follows:

- a. MPTIS: a total of 833 new shares will be issued to MPTIS with a subscription value of Rp1,241,018,942 per share or a total of Rp1,033,768,778,576; and
- b. Warrington: as many as 2,673 new shares will be issued to Warrington with a subscription value of Rp1,241,018,942 per share or a total of Rp3,317,243,631,613.

3. Pelepasan Saham PT Portco Infranasantara di PT Intisentosa Alambahtera

PT Portco Infranasantara (Portco), entitas anak Perseroan yang merupakan perusahaan induk dan pemegang saham untuk unit pengelolaan usaha pelabuhan di Perseroan melepas 60.174 saham atau yang mewakili 39% saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) kepada PT Louis Dreyfus Company (LDC) Indonesia. ISAB merupakan perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan. Nilai Transaksi yang dibayarkan oleh LDC Indonesia kepada Portco adalah sebesar Rp87.951.000.000.

4. Energi Infranasantara Beli Saham PT Pembangunan Perumahan Energi di PT Inpolo Meka Energi

PT Energi Infranasantara (EI), entitas anak Perseroan yang merupakan perusahaan induk dan pemegang saham untuk seluruh unit usaha pembangkit tenaga listrik dan infrastruktur penyediaan tenaga listrik di Perseroan, membeli 496.645 saham atau mewakili 38,77% dari seluruh saham milik PT Pembangunan Perumahan Energi (PPE) di PT Inpolo Meka Energi (IME).

3. Disposal of PT Portco Infranasantara's Shares in PT Intisentosa Alambahtera

PT Portco Infranasantara (Portco), a subsidiary of the Company which is the holding company and shareholder for the port business management unit in the Company disposed of 60,174 shares or representing 39% of the issued and paid-up shares in PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) to PT Louis Dreyfus Company (LDC) Indonesia. ISAB is a limited liability company engaged in warehousing and transportation support activities. The Transaction value paid by LDC Indonesia to Portco amounted to Rp87,951,000,000.

4. Energi Infranasantara Purchases PT Pembangunan Perumahan Energi's Shares in PT Inpolo Meka Energi

PT Energi Infranasantara (EI), a subsidiary of the Company which is the holding company and shareholder for all power generation and power supply infrastructure business units in the Company, purchased 496,645 shares or representing 38.77% of all shares owned by PT Pembangunan Perumahan Energi (PPE) in PT Inpolo Meka Energi (IME).



Visi dan Misi

Vision and Mission



VISI Vision

Menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur.

To become Indonesia's leading investment and infrastructure development company.



MISI Mission

Memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan standar tertinggi untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Providing high-quality infrastructure needs to improve quality of life and maximize value for all stakeholders.

Nilai Perusahaan

Corporate Value

Nilai "GROWTH" merupakan nilai yang ditanamkan dan TUMBUH dalam benak dan karakter para pemimpin, karyawan, dan semua insan dalam lingkungan Perseroan. Sebuah sikap, pola pikir, dan SEMANGAT yang akan diraih bersama sebagai SATU TIM, SATU RENCANA, dan SATU TUJUAN.

The value of "GROWTH" is embedded and GROW in the minds and characters of the leaders, workers, and every individual at the Company. An attitude, mindset, and SPIRIT to be achieved together as ONE TEAM, ONE PLAN, ONE GOAL.

GROWING

Tumbuh lebih besar dan lebih cepat seiring berjalannya waktu.
Become bigger and faster over a period of time.

OPTIMISTIC

Memiliki impian dan percaya diri dalam menyongsong masa depan.
Hopeful and confident about the future.

TEAM UP

Satu tim, satu rencana, satu tujuan.
One team, one plan, one goal.



RELIABLE

Memenuhi komitmen dengan standar yang tinggi.
Delivering commitments with high standards.



WILLING

Siap memberikan yang terbaik dan melebihi dari tuntutan tugas.
Ready and eager to perform beyond duties.



HARMONIOUS

Hidup bersama dalam harmoni.
Existing together in harmony.

Kegiatan Usaha

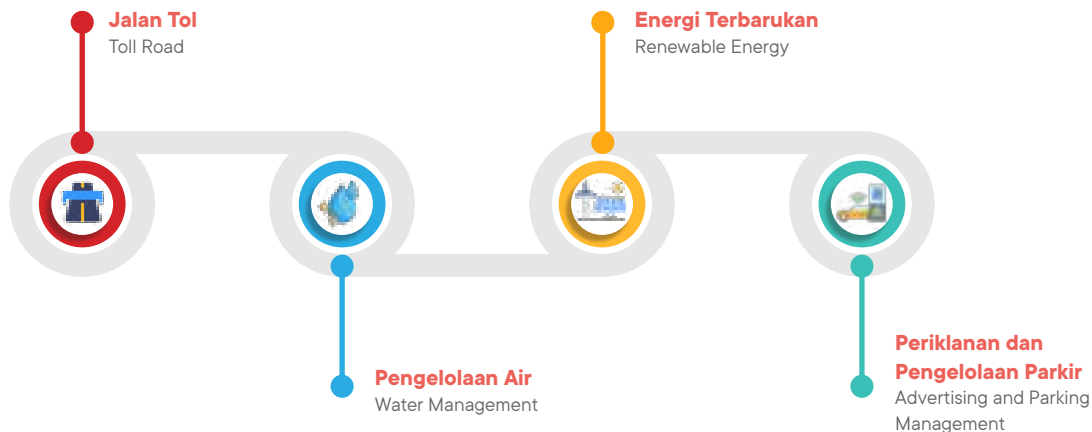
Business Activities

KEGIATAN USAHA SESUAI ANGGARAN DASAR

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, jasa dan pertanian. Hingga tahun 2023, kegiatan usaha Perseroan masih berorientasi pada bidang infrastruktur transportasi dan infrastruktur utilitas yang terdiri dari 4 (empat) sektor utama, yaitu pengelolaan jalan tol, pengelolaan air, energi terbarukan, serta periklanan dan pengelolaan parkir.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

As stipulated in Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's purposes and objectives are to carry out business in the fields of trade, construction, industry, transportation, services and agriculture. Until 2023, the Company's business activities have been focused on transportation infrastructure and utility infrastructure, consisting of 4 (four) main sectors such as toll road management, water management, renewable energy, trading, and advertising and parking management.



KEGIATAN USAHA DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku sejalan dengan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

1. Jalan Tol
2. Air
3. Energi Terbarukan
4. Periklanan dan Pengelolaan Parkir

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT DURING FISCAL YEAR

The business activities carried out during the fiscal year were in line with those stipulated by the Company's Articles of Association, namely:

1. Toll Road
2. Water
3. Renewable Energy
4. Advertising and Parking Management

Produk dan Jasa

Products and Services



PENGELOLAAN JALAN TOL

Kegiatan usaha di bidang pengelolaan jalan tol dilaksanakan melalui PT Margautama Nusantara (MUN). Kegiatan usaha tersebut mencakup pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol serta mengusaha lahan di Ruang Milik Jalan Tol (RUMIJA tol) dan lahan yang berbatasan dengan RUMIJA tol untuk tempat istirahat dan pelayanan, serta berbagai fasilitas dan usaha lainnya.

Perseroan memastikan bahwa pengelolaan jalan tol dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menaruh perhatian besar pada aspek-aspek unggulan, seperti kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan kepuasan dari para pengguna jalan tol. Informasi terkait ruas tol yang dikelola pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TOLL ROAD MANAGEMENT

Business activities in the field of toll road management are carried out by PT Margautama Nusantara (MUN). These business activities include the operation and/or maintenance of toll roads as well as operation of land in the toll road space (toll road's RUMIJA) and land adjacent to the toll road's RUMAJA for rest area and services, along with other facilities and businesses.

The Company ensures that the toll road management is carried out effectively and efficiently by focusing on superior aspects such as convenience, comfort, safety, and satisfaction of toll road users. Information on toll roads managed by the Company in 2023 is described in the following table:

Perusahaan Company	Keterangan	Description
PT Bintaro Serpong Damai (BSD)	Mulai Beroperasi: 1999 Panjang: 7,2 km jalur Jalur: Serpong-Pondok Aren Masa Konsesi: Sampai dengan 30 September 2040	Commencing Operation: 1999 Length: 7.2 km track Lane: Serpong-Pondok Aren Concession Period: Until September 30, 2040
PT Makassar Metro Network (MMN)	Mulai Beroperasi: 1998 Panjang: 1. Seksi II: 5,9 km 2. Seksi III Pettarani: 4,3 km Jalur: • Pelabuhan Soekarno Hatta-A.P. Pettarani • Akhir jalan tol seksi II, Persimpangan Jl. Urip Sumoharjo-Persimpangan Jl. Boulevard Panakkuk kang-Jl. Hertasning-Persimpangan Jl. Sultan Alauddin Masa Konsesi: Sampai dengan 12 April 2043	Commencing Operation: 1998 Length: 1. Section II: 5.9 km 2. Section III Pettarani: 4.3 km Lane: • Soekarno Hatta Port-AP Pettarani • End of section II toll road, Intersection of Jl. Urip Sumoharjo-Intersection of Jl. Boulevard Panakkuk kang-Jl. Hertasning- Intersection of Jl. Sultan Alauddin Concession Period: Until April 12, 2043
PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)	Mulai Beroperasi: 2006 Panjang: 11,6 km Jalur: Jembatan Tallo—Bandara Hasanuddin Masa Konsesi: Sampai dengan 30 September 2041	Commencing Operation: 2006 Length: 11.6 km Lane: Tallo Bridge—Hasanuddin Airport Concession Period: Until September 30, 2041
PT Jakarta Lingkar Barat satu (JLB)	Mulai Beroperasi: 1995 Panjang: 9,7 km Jalur: Kebon Jeruk-Penjarangan Masa Konsesi: Sampai dengan 2 Februari 2042	Commencing Operation: 1995 Length: 9.7 km Lane: Kebon Jeruk-Penjarangan Concession Period: Until February 2, 2042
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)	Mulai Beroperasi: 2021 Panjang: 38 km Jalur: Jakarta-Cikampek II Elevated Masa Konsesi: 6 Juli 2017 s.d. 6 Juli 2062 (45 tahun)	Commencing Operation: 2021 Length: 38 km Lane: Jakarta-Cikampek II Elevated Concession Period: July 6, 2017 up to July 6, 2062 (45 years)

PENGELOLAAN AIR

Perseroan menjalankan usahanya di sektor pengelolaan air yang mencakup pengelolaan air bersih dan distribusi air bersih untuk industri dan rumah tangga melalui PDAM setempat. Perseroan melaksanakan bisnis usaha di bidang pengelolaan air melalui entitas anak, yaitu PT Potum Mundi Infranasantara (Potum). Potum mengoperasikan 2 (dua) instalasi pengolahan air atau *water treatment plant* (WTP), yaitu:

1. SCKT WTP, Serang, Banten
2. DCC WTP, Medan, Sumatera Utara

Perseroan juga melalui Potum telah mengoperasikan 2 (dua) Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) sesuai dengan ketentuan Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan (*Health, Safety, and Environment/HSE*). Melalui sektor ini, Perseroan mewujudkan kontribusinya dalam turut mendukung penyediaan air bersih guna mengatasi krisis air bersih sekaligus mendukung terwujudnya program pelestarian lingkungan secara nyata di Indonesia.

WATER MANAGEMENT

The Company's business in water management sector encompasses clean water management and clean water distribution for industry and households through Local Government Owned Water Utilities Companies (PDAM). The Company conducts water management business through its subsidiary, PT Potum Mundi Infranasantara (Potum). Potum operates 2 (two) water treatment plants (WTP), namely:

1. SCKT WTP, Serang, Banten
2. DCC WTP, Medan, North Sumatra

Through Potum, the Company has operated 2 (two) SPAM (Drinking Water Treatment System) locations in accordance with strict Health, Safety, and Environment/HSE provisions. Through this sector, the Company realizes its contribution in providing clean water to overcome the clean water crisis as well as supporting the implementation of the environmental conservation program in Indonesia.

ENERGI TERBARUKAN

Perseroan berkomitmen meningkatkan ketersediaan energi terbarukan untuk mendukung kehidupan yang berkelanjutan dan memperluas portofolio di bidang energi terbarukan. Komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan melalui entitas anak, yaitu PT Energi Infranasantara (EI).

Melalui PT Inpolo Meka Energi (IME), entitas anak tidak langsung, Perseroan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung yang berlokasi di Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara. PLTA berkapasitas terpasang 2x7,5 Megawatt (MW) ini merupakan pembangkit *run-off river* yang telah beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 16 Desember 2020.

Tidak hanya PLTA Lau Gunung, Perseroan juga mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Siantan yang berlokasi di Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pembangkit tersebut berkapasitas 1x15 Megawatt (MW) yang telah beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 23 April 2018 melalui EI dan entitas anak tidak langsung, yaitu PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL).

PLTBm Siantan menjadi pembangkit energi terbarukan swasta pertama di Kalimantan Barat. Pembangkit ini memanfaatkan teknologi *boiler* yang menggunakan bahan bakar limbah pertanian dan perkebunan, seperti cangkang kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit, serbuk kayu, limbah kayu masyarakat, sekam padi, tongkol jagung, dan lain-lain.

PERIKLAMAN DAN PENGELOLAAN PARKIR

Dalam rangka memperkuat strategi bisnis, Perseroan memperluas lini bisnisnya dalam bidang periklanan dan pengelolaan parkir sebagai wujud dari inovasi teknologi dalam perkembangan digital saat ini. Perseroan melalui anak usahanya PT Meta Media Infranasantara (MMI), yang sebelumnya bernama PT Telekom Infranasantara berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 30 November 2022.

MMI bergerak dalam pemanfaatan koridor jalan tol untuk Iklan Luar Ruang dan Utilitas, pengembangan dan pengelolaan *Rest Area*, serta saat ini MMI sedang berfokus dalam pengembangan digitalisasi parkir, melalui Aplikasi OTTO Parking.

Saat ini, MMI memiliki beberapa papan iklan dan pilar iklan pada beberapa ruas tol yang dimiliki oleh Perseroan seperti pada Ruas Tol Pondok Aren-Serpong dan Ruas Tol Makassar.

RENEWABLE ENERGY

The Company is committed to increasing the availability of renewable energy to support sustainable living and expanding its portfolio in renewable energy. This commitment is realized through the development of new and renewable energy power plants through its subsidiary, PT Energi Infranasantara (EI).

Through PT Inpolo Meka Energi (IME), an indirect subsidiary, the Company developed Lau Gunung Hydroelectric Power Plant (HPP) located in Tanah Pinem District, North Sumatra. This hydropower plant with an installed capacity of 2x7.5 Megawatts (MW) is a run-off river plant that has been operating (*Commercial Operating Date/COD*) since December 16, 2020.

Aside from Lau Gunung HPP, the Company operates a Biomass Power Plant (BPP) in Siantan, Wajok Hulu Village, Siantan District, Mempawah Regency, West Kalimantan. The 1x15-Megawatt (MW) plant commenced its operations (*Commercial Operating Date/COD*) on April 23, 2018, through EI and PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL), the Company's indirect subsidiary.

Siantan Biomass Power Plant is the first private renewable energy plant in West Kalimantan. The plant utilizes boiler technology that uses agricultural and plantation waste as fuel, such as oil palm shells, empty palm bunches, sawdust, community wood waste, rice husks, corn cobs and others.

ADVERTISING AND PARKING MANAGEMENT

In order to strengthen its business strategy, the Company expanded its business lines in advertising and parking management as a form of technological innovation in today's digital development. The Company through its subsidiary PT Meta Media Infranasantara (MMI), which was previously known as PT Telekom Infranasantara based on Notarial Deed No. 19 dated November 30, 2022.

MMI is engaged in the utilization of toll road corridors for Outdoor Advertising and Utilities, development and management of Rest Areas, and currently MMI is focusing on the development of parking digitization, through the OTTO Parking Application.

Currently, MMI has several billboards and advertising pillars on several toll roads owned by the Company such as the Pondok Aren-Serpong toll road and Makassar toll road.

Keanggotaan pada Asosiasi

Association Membership

No.	Nama Asosiasi Name of Association	Status	Mulai Bergabung Joining Since
1	Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) Indonesian Biomass Energy Society (MEBI)	Aktif Active	2021
2	Asosiasi Pengembang PLTA (APPLTA) Association of HPP Developers (APPLTA)	Aktif Active	2020
3	Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Indonesian Renewable Energy Society (METI)	Aktif Active	2018
4	Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Indonesian Toll Road Association (ATI)	Aktif Active	2018
5	Asosiasi Perusahaan Air Minum Swasta Perpipaan Indonesia (Aspasindo) Association of Indonesian Piping Drinking Water Private Companies (Aspasindo)	Aktif Active	2016
6	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Aktif Active	2015
7	Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Association of Indonesian Water Supply Enterprises (Perpamsi)	Aktif Active	2013
8	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesian Public Listed Companies Association (AEI)	Aktif Active	2006

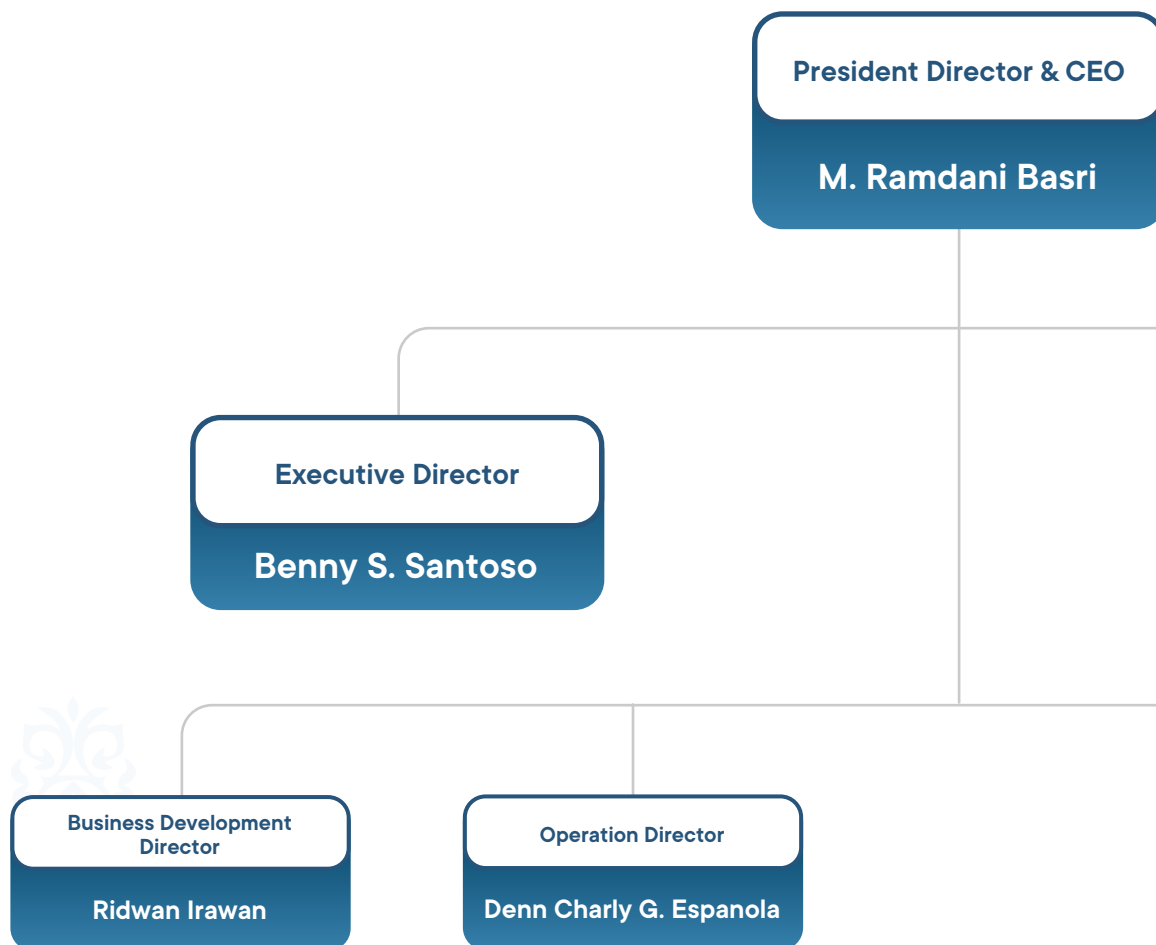


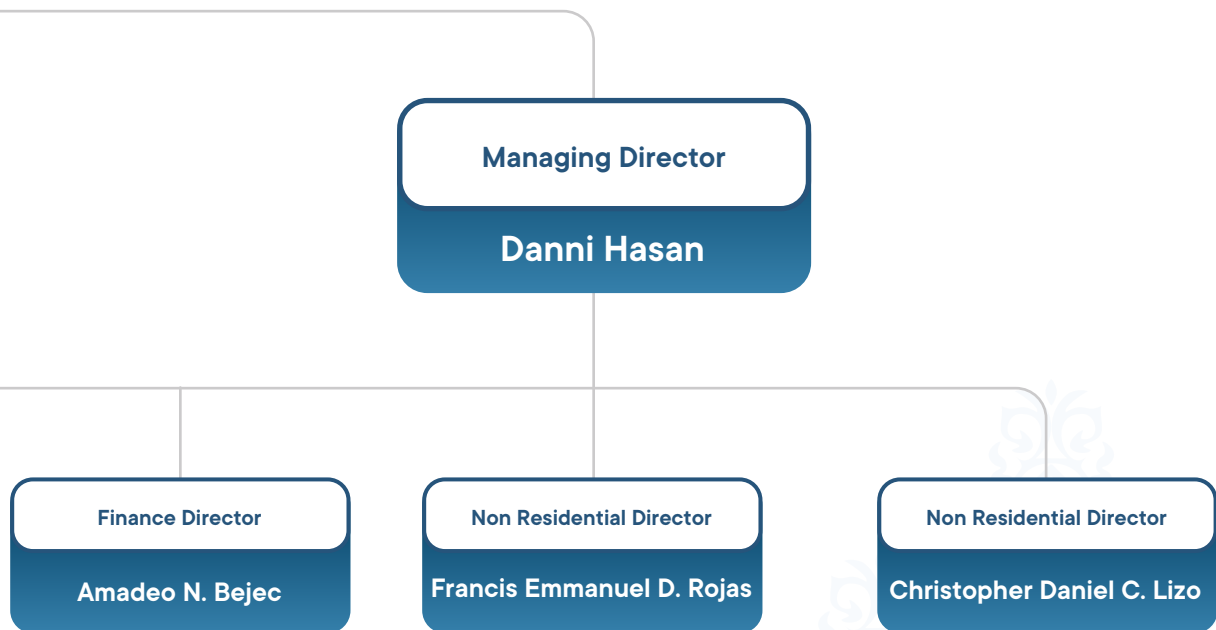
Struktur Organisasi

Organization Structure

Struktur Organisasi Perusahaan dibentuk sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Berikut Struktur Organisasi Perseroan:

The Company's Organizational Structure was established in accordance with the development of the Company's business. The following is the Organizational Structure of the Company:





Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Manuel V. Pangilinan

Komisaris Utama

President Commissioner

Umur | Age

76 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship

Filipina | Philippines

Domisili | Domicile

Filipina | Filipino



Dasar Hukum Penunjukan

Legal Basis of Appointment

Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 6 September 2022 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 9 Agustus 2022 hingga RUPST Tahun 2023.

Diangkat kembali sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 24 Mei 2023 hingga RUPST Tahun 2028.

First appointed as President Commissioner based on the Deed of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 15 dated September 6, 2022, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the term of office from August 9, 2022 until the 2023 AGMS.

Re-appointed as President Commissioner based on the Deed of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 51 May 24, 2023, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the term of office from May 24, 2023 until the 2028 AGMS.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi

Educational Background/Certification

- Doktor Kehormatan di Bidang Science dan Humanities dari Asian Institute of Management, Filipina (2016)
- Magister Administrasi Bisnis dari Wharton School di University of Pennsylvania
- Sarjana Ekonomi (cum laude) dari Universitas Ateneo de Manila, Filipina
- Honorary Doctorate in Management from the Asian Institute of Management, the Philippines (2016)
- Master of Business Administration degree from the Wharton School at the University of Pennsylvania, USA
- Bachelor of Arts Degree (cum laude) in Economics from Ateneo de Manila University, the Philippines



Riwayat Pekerjaan

Work Experience

- Managing Director and Chief Executive Officer, First Pacific Company Ltd (2003-sekarang)
- Executive Chairman, First Pacific Company Ltd (1999-2003)
- Managing Director, First Pacific Company Ltd (1981-1999)
- Founder, First Pacific Company Ltd (1981)
- Managing Director and Chief Executive Officer, First Pacific Company Ltd (2003-present)
- Executive Chairman, First Pacific Company Ltd (1999-2003)
- Managing Director, First Pacific Company Ltd (1981-1999)
- Founder, First Pacific Company Ltd (1981)



Rangkap Jabatan

Concurrent Position

- Presiden Komisaris, PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- Chairman, Presiden and Chief Executive Officer, Metro Pacific Investment Corporation
- Chairman, PLDT, Inc.
- Chairman, PLDT Communications and Energy Ventures, Inc.
- Chairman, Smart Communications Inc
- Chairman, Manila Electric Company
- Chairman, Global Business Power Corporation
- Chairman, Philex Mining Corporation
- Chairman, PXP Energy Corporation
- Chairman, Maynilad Water Services, Inc.
- Chairman, Metro Pacific Tollways Corporation
- Chairman, NLEX Corporation
- Chairman, Landco Pacific Corporation
- Vice Chairman, Roxas Holdings, Inc.
- President Commissioner, PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- Chairman, Presiden and Chief Executive Officer, Metro Pacific Investment Corporation
- Chairman, PLDT, Inc.
- Chairman, PLDT Communications and Energy Ventures, Inc.
- Chairman, Smart Communications Inc
- Chairman, Manila Electric Company
- Chairman, Global Business Power Corporation
- Chairman, Philex Mining Corporation
- Chairman, PXP Energy Corporation
- Chairman, Maynilad Water Services, Inc.
- Chairman, Metro Pacific Tollways Corporation
- Chairman, NLEX Corporation
- Chairman, Landco Pacific Corporation
- Vice Chairman, Roxas Holdings, Inc.



Hubungan Afiliasi

Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Rogelio L. Singson

Komisaris
Commissioner

Umur | Age
75 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship
Filipina | Philippines

Domisili | Domicile
Filipina | Filipino



Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 75 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. dengan periode jabatan sejak 30 Oktober 2023 hingga RUPST 2028.

Appointed as Commissioner based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 75 dated October 30, 2023 made before Notary Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. with the term of office from October 30, 2023 until the 2028 AGMS.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi Educational Background/Certification

- Magister Manajemen Publik dan Bisnis, Universitas De La Salle (2017)
- Sarjana Teknik, University of Philippines (1971)
- Master of Public and Business Management, De La Salle University (2017)
- Bachelor of Engineering, University of Philippines (1971)



Riwayat Pekerjaan Work Experience

- Presiden Direktur dan CEO Meralco PowerGen Corporation (Oktober 2016-Juni 2021)
- Presiden Direktur dan CEO Light Rail Manila Corporation (Oktober 2016-Oktober 2017)
- Menteri Pekerjaan Umum dan Bina Marga (Juli 2010-Juni 2016)
- Presiden Direktur dan CEO Maynilad Water Services (Juli 2007-Juni 2010)
- Ketua dan Presiden Bases Conversion Development Authority (BCDA) (1998 - 2002)
- President Director and CEO of Meralco PowerGen Corporation (October 2016-June 2021)
- President Director and CEO of Light Rail Manila Corporation (October 2016-October 2017)
- Minister of Public Works and Highways (July 2010-June 2016)
- President Director and CEO of Maynilad Water Services (July 2007-June 2010)
- Chairman and President of Bases Conversion Development Authority (BCDA) (1998 - 2002)



Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Direktur Utama Metro Pacific Waters
- Anggota dari Dewan Pengawas Universitas De La Salle
- President Director of Metri Pacific Waters
- Member of the Supervisory Board of De La Salle University



Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
Has affiliation with the Controlling Shareholders of the Company.



Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Umur | Age

76 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile

DKI Jakarta | DKI Jakarta



Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPS Tahun 2023.

Diangkat kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 24 Mei 2023 hingga RUPS Tahun 2028.

First appointed as President Commissioner based on the Deed of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the term of office from August 31, 2018 until the 2023 AGMS.

Re-appointed as President Commissioner based on the Deed of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 51 May 24, 2023, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the term of office from May 24, 2023 until the 2028 AGMS.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi Educational Background/Certification

- Perguruan Tinggi Hukum Militer (2002)
- Akademi Militer Indonesia tahun (1970)
- School of Military Law (2002)
- Indonesian Military Academy (1970)



Riwayat Pekerjaan Work Experience

- Duta Besar Indonesia untuk Republik Filipina, Palau, dan Kepulauan Marshall (2014-2017)
- Direktur Utama PT Adimitra Baratama Nusantara (2012-2014)
- Komisaris Utama PT Borneo Indobara (2011-2014)
- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (1993-1998)
- Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (1998-2002)
- Ambassador of Indonesia to the Republic of the Philippines, Palau, and the Marshall Islands (2014-2017)
- President Director of PT Adimitra Baratama Nusantara (2012-2014)
- President Commissioner of PT Borneo Indobara (2011-2014)
- Member of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (1993-1998)
- Lieutenant General of the Indonesian Armed Forces (1998 - 2002)



Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Ketua Komite Audit Perseroan
- Komisaris Utama PT Borneo Indobara
- Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purn) (2002-sekarang)
- Chairman of the Company's Audit Committee
- President Commissioner of PT Borneo Indobara
- Lieutenant General of the Indonesian Armed Forces (Retired) (Purn) (2002-present)



Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Farid Harianto

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Umur | Age

71 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile

DKI Jakarta | DKI Jakarta



Dasar Hukum Penunjukan

Legal Basis of Appointment

Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 94 tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara dengan periode jabatan sejak 2020 hingga RUPS Tahun 2025.

Diangkat kembali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 24 Mei 2023 hingga RUPST Tahun 2028.

First appointed as Independent Commissioner based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 94 dated November 18, 2020 drawn up before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta with the term of office from 2020 to 2025 GMS.

Re-appointed as Independent Commissioner based on the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023 made before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the term of office from May 24, 2023 to the 2028 AGMS.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi

Educational Background/Certification

- Ph.D. in Applied Economics and Managerial Science dari The Wharton School of University of Pennsylvania, Amerika Serikat (1989)
- Master of Applied Economics and Managerial Science dari The Wharton School of University of Pennsylvania, Amerika Serikat (1988)
- Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1975)
- Ph.D. in Applied Economics and Managerial Science from The Wharton School of University of Pennsylvania, United States (1989)
- Master of Applied Economics and Managerial Science from The Wharton School of University of Pennsylvania, United States (1988)
- Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung (1975)



Riwayat Pekerjaan

Work Experience

- Komisaris Independen PT Toba Bara Sejahtera (2012-2020)
- Komisaris Independen PT Sepatu Bata Indonesia Tbk (2011- 2020)
- Komisaris Independen PT Siloam Hospitals Tbk (2008-2019)
- Wakil Ketua Dewan Rumah Sakit Pang Hlay Siloam di Myanmar (2014- 2019)
- Independent Commissioner of PT Toba Bara Sejahtera (2012-2020)
- Independent Commissioner of PT Sepatu Bata Indonesia Tbk (2011-2020)
- Independent Commissioner of PT Siloam Hospitals Tbk (2008-2019)
- Deputy Chairman of Pang Hlay Siloam Hospital Board in Myanmar (2014-2019)



Rangkap Jabatan

Concurrent Position

- Komite Audit Perseroan
- Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
- Komisaris Independen PT Unggul Indah Cahaya Tbk
- Komisaris Independen PT Indika Energy Tbk
- Komisaris Utama PT Pertamina Bina Medika
- Komisaris PT Tripatra Engineering
- Komisaris Independen PT Toba Bara Sejahtera
- Komisaris Independen PT Sepatu Bata Indonesia Tbk
- Anggota Komite Risk Oversight, PT Maybank Indonesia
- Audit Committee of the Company
- Nomination and Remuneration Committee of the Company
- Independent Commissioner of PT Unggul Indah Cahaya Tbk
- Independent Commissioner of PT Indika Energy Tbk
- President Commissioner of PT Pertamina Bina Medika
- Commissioner of PT Tripatra Engineering
- Independent Commissioner of PT Toba Bara Sejahtera
- Independent Commissioner of PT Sepatu Bata Indonesia Tbk
- Member of Risk Oversight Committee, PT Maybank Indonesia



Hubungan Afiliasi

Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.

Profil Direksi

Board of Directors Profile



M. Ramdani Basri

Direktur Utama & CEO
President Director & CEO

Umur | Age

62 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile

DKI Jakarta | DKI Jakarta



Dasar Hukum Penunjukan

Legal Basis of Appointment

Pertama kali diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPST Tahun 2023.

Diangkat kembali sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 24 Mei 2023 hingga RUPST Tahun 2028.

First appointed as President Director based on the Deed of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the term of office from August 31, 2018 until the 2023 AGMS.

Re-appointed as President Director based on the Deed of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 May 24, 2023, made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the term of office from May 24, 2023 until the 2028 AGMS.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi

Educational Background/Certification

- Executive Education in Economic Infrastructure dari Harvard Kennedy School, Amerika Serikat (2012)
- Master of Science dalam bidang Public Policy dari Universitas Indonesia (2002)
- Executive Education in Economic Infrastructure from Harvard Kennedy School, United States (2012)
- Master of Science in Public Policy from the University of Indonesia (2002)



Riwayat Pekerjaan

Work Experience

- Direktur Utama PT Potum Mundi Infranasantara (2017-2021)
- Komisaris Utama PT Margautama Nusantara (2016-2023)
- President Director of PT Potum Mundi Infranasantara (2017-2021)
- President Commissioner of PT Margautama Nusantara (2016-2023)



Rangkap Jabatan

Concurrent Position

- Komisaris PT Jakarta Metro Ekspresway
- Komisaris Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
- Bendahara Asosiasi Tol Indonesia
- Ketua Komite Tetap Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Transportasi Publik, Perumahan dan Pemukiman Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
- Direktur Utama PT Potum Mundi Infranasantara
- Komisaris Utama PT Margautama Nusantara
- Commissioner of PT Jakarta Metro Ekspresway
- President Commissioner of PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
- Treasurer of Indonesian Toll Road Association
- Chairman of the Standing Committee on Infrastructure Development Planning, Public Transportation, Housing and Settlement of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN)
- President Director of PT Potum Mundi Infranasantara
- President Commissioner of PT Margautama Nusantara



Hubungan Afiliasi

Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has no affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Danni Hasan

Direktur
Director

Umur | Age
60 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
DKI Jakarta | DKI Jakarta



Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPST Tahun 2023.

Diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 24 Mei 2023 hingga RUPST Tahun 2028.

First appointed as Director based on Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since August 31, 2018 until the AGMS Year 2023.

Reappointed as Director based on the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023 made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since May 24, 2023 until the AGMS Year 2028.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi Educational Background/Certification

- Pendidikan dan Pelatihan Program Strategi Kepemimpinan Internasional, dan Program Penggabungan & Akuisisi, The Wharton School of the University of Pennsylvania pada (2015)
- Master of Science dalam bidang Manajemen Industri dari Universitas Adamson, Filipina (1998)
- Sarjana dalam bidang Teknik Kimia dari Universitas Adamson, Filipina (1986)
- Education and Training in International Leadership Strategy Program, and Mergers & Acquisitions Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania in (2015)
- Master of Science in Industrial Management from Adamson University, Philippines (1998)
- Bachelor of Science in Chemical Engineering from Adamson University, Philippines (1986)



Riwayat Pekerjaan Work Experience

- Direktur Utama PT Centris Multi Pratama (2001- 2007)
- Chief Financial Officer (CFO) PT Centris Multi Pratama (1995-2001)
- Contract Supervisor, Asmera Oil Ltd. (1990-1992)
- Head of Private Equity Advisory & Investment PT Sigma Barata (1990-1995)
- Technical Superintendent, Akzo Coating Indonesia (1988-1990)
- President Director of PT Centris Multi Pratama (2001-2007)
- Chief Financial Officer (CFO) of PT Centris Multi Pratama (1995-2001)
- Contract Supervisor, Asamera Oil Ltd. (1990- 1992).
- Head of Private Equity Advisory & Investment PT Sigma Barata (1990-1995)
- Technical Superintendent, Akzo Coating Indonesia (1988-1990)



Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Direktur Utama PT Margautama Nusantara (MUN)
- Direktur Utama PT Jakarta Metro Ekspresway (JMEX)
- Komisaris PT Portco Infranasantara (Portco)
- Komisaris Utama PT Meta Media Infranasantara (MMI)
- Komisaris PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)
- Komisaris PT Energi Infranasantara (EI)
- President Director of PT Margautama Nusantara (MUN)
- President Director PT Jakarta Metro Ekspresway (JMEX)
- Commissioner of PT Portco Infranasantara (Portco)
- President Commissioner of PT Meta Media Infranasantara (MMI)
- Commissioner of PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)
- Commissioner of PT Energi Infranasantara (EI)



Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has no affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Benny S. Santoso

Direktur
Director

Umur | Age

65 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship

Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile

DKI Jakarta | DKI Jakarta



Dasar Hukum Penunjukan

Legal Basis of Appointment

Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 94 tanggal 18 November 2020 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 9 Agustus 2022 hingga RUPST Tahun 2023.

Diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 24 Mei 2023 hingga RUPST Tahun 2028.

First appointed as Director based on the Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 94 dated November 18, 2020 drawn up before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with a period of office from August 9, 2022 to the 2023 AGMS.

Reappointed as Director based on the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023 made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the term of office from May 24, 2023 until the AGMS of 2028.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi

Educational Background/Certification

Sarjana Studi Bisnis dari Ngee Ann College, Singapura (1981)
Bachelor of Business Study from Ngee Ann College, Singapore (1981)



Riwayat Pekerjaan

Work Experience

- Presiden Komisaris ICBP (2009-2015)
- Presiden Komisaris PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (2013-2015)
- Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk. (2007-2015)
- President Commissioner of ICBP (2009-2015)
- President Commissioner of PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (2013-2015)
- Commissioner of PT Bumi Serpong Damai Tbk (2007-2015)



Rangkap Jabatan

Concurrent Position

- Komisaris Utama PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
- Komisaris PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
- Anggota Dewan First Pacific
- Komisaris PT Fast Food Indonesia Tbk
- Dewan Penasihat PLTD. Inc
- Direktur Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
- President Commissioner of PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
- Commissioner of PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- Board Member of First Pacific
- Commissioner of PT Fast Food Indonesia Tbk
- Advisory Board of PLTD. Inc
- Director of Indocement Tunggal Prakarsa Tbk



Hubungan Afiliasi

Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has no affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Ridwan Irawan

Direktur
Director

Umur | Age
57 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia | Indonesian

Domisili | Domicile
DKI Jakarta | DKI Jakarta



Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPST Tahun 2023.

Diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 24 Mei 2023 hingga RUPST Tahun 2028.

First appointed as Director based on Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 made before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since August 31, 2018 until the AGMS Year 2023.

Reappointed as Director based on the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023 made before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since May 24, 2023 until the AGMS Year 2028.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi Educational Background/Certification

- Master in International Banking & Financial Services dari University of Reading, England (1993)
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1991)
- Master in International Banking & Financial Services from the University of Reading, England (1993)
- Bachelor of Economics from the University of Indonesia (1991)



Riwayat Pekerjaan Work Experience

- Direktur PT Telekom Infranasantara (2016-2020)
- Komisaris PT Komet Infranasantara (2014-2018)
- Chief Financial Officer, Trada Trading dan Trada Holding (2008-2013)
- Chief Financial Officer, Trada Group (2006-2008)
- Direktur Delta Advisory Pte. Ltd (2004-2006)
- Wakil Direktur Corporate Finance di PT Holdiko Perkasa (1999-2004)
- Manajer Senior Divisi Keuangan Perusahaan PT HSBC Securities Indonesia (HSBC Investment Banking) (1993-1999)
- Director of PT Telekom Infranasantara (2016-2020)
- Commissioner of PT Komet Infranasantara (2014-2018)
- Chief Financial Officer, Trada Trading and Trada Holding (2008-2013)
- Chief Financial Officer, Trada Group (2006-2008)
- Director of Delta Advisory Pte Ltd (2004-2006)
- Deputy Director of Corporate Finance at PT Holdika Perkasa (1999-2004)
- Senior Manager of Corporate Finance Division of PT HSBC Securities Indonesia (HSBC Investment Banking) (1993-1999)



Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Direktur Utama PT Portco Infranasantara (Portco)
- Komisaris Utama PT Intisentosa Alambahtera (ISAB)
- Direktur Utama PT Energi Infranasantara (EI)
- Komisaris Utama PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)
- Direktur Utama PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)
- Komisaris Utama PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)
- Komisaris PT Meta Media Infranasantara (MMI)
- Komisaris Utama PT Inpol Meka Energi (IME)
- President Director of PT Portco Infranasantara (Portco)
- President Commissioner of PT Intisentosa Alambahtera (ISAB)
- President Director of PT Energi Infranasantara (EI)
- President Commissioner of PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)
- President Director of PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)
- President Commissioner of PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)
- Commissioner of PT Meta Media Infranasantara (MMI)
- President Commissioner of PT Inpol Meka Energi (IME)



Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has no affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Amadeo N. Bejec

Direktur
Director

Umur | Age

49 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship

Filipina | Philippines

Domisili | Domicile

Jakarta | Jakarta



Dasar Hukum Penunjukan

Legal Basis of Appointment

Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPST Tahun 2023.

Diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 24 Mei 2023 hingga RUPST Tahun 2028.

First appointed as Director based on Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since August 31, 2018 until the AGMS Year 2023.

Reappointed as Director based on the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023 made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since May 24, 2023 until the AGMS Year 2028.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi

Educational Background/Certification

- Master of Business Administration di Universitas De La Salle, Filipina (2004)
- Bachelor of Accounting di Universitas De La Salle, Filipina (1994)
- Master of Business Administration at De La Salle University, Philippines (2004)
- Bachelor of Accounting at De La Salle University, Philippines (1994)



Riwayat Pekerjaan

Work Experience

- Manager Corporate Finance C&P Homes (2000–2003)
- Auditor SGV (1996–1999)
- Corporate Finance Manager of C&P Homes (2000–2003)
- Auditor at SGV (1996–1999)



Rangkap Jabatan

Concurrent Position

- Direktur PT Margautama Nusantara (MUN)
- Komisaris PT Bintaro Serpong Damai (BSD)
- Direktur Keuangan PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS)
- Vice President of Corporate Finance di NLEX Corporation
- Director of PT Margautama Nusantara (MUN)
- Commissioner of PT Bintaro Serpong Damai (BSD)
- Director of Finance of PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS)
- Vice President of Corporate Finance at NLEX Corporation



Hubungan Afiliasi

Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Denn Charly G. Espanola

Direktur
Director

Umur | Age

53 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship

Filipina | Philippines

Domisili | Domicile

Filipina | Filipino



Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPST Tahun 2023.

Diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 24 Mei 2023 hingga RUPST Tahun 2028.

First appointed as Director based on Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 made before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since August 31, 2018 until the AGMS Year 2023.

Reappointed as Director based on the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023 made before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since May 24, 2023 until the AGMS Year 2028.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi Educational Background/Certification

Bachelor of Oceanography dari US Naval Academy, Annapolis, Maryland, USA (1994)
Bachelor of Oceanography from US Naval Academy, Annapolis, Maryland, USA (1994)



Riwayat Pekerjaan Work Experience

- Deputy CEO di CII Bridges and Roads (2015– 2018)
- Direktur CII Bridges and Roads (2015–2018)
- Vice Chairman Board of Directors di MCSC Operations and Maintenance Company (2015–2018)
- Vice President Division Head, Subic Freeport Expressway and Subic Clark Tarlac Expressway di Tollways Management - Corporation (2008–2015)
- Manager–Subic Freeport Expressway di Tollways Management Corporation (2005–2008)
- Manager–Traffic Management, Safety and Security Dept di Tollways Management Corporation (2004–2005)
- Deputy CEO of CII Bridges and Roads (2015-2018)
- Director of CII Bridges and Roads (2015-2018)
- Vice Chairman of the Board of Directors at MCSC Operations and Maintenance Company (2015-2018)
- Vice President Division Head, Subic Freeport Expressway and Subic Clark Tarlac Expressway at Tollways Management - Corporation (2008-2015)
- Manager–Subic Freeport Expressway at Tollways Management Corporation (2005-2008)
- Manager–Traffic Management, Safety and Security Dept at Tollways Management Corporation (2004-2005)



Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Country Head di Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)
- Direktur Utama PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS)
- Direktur di PT Margautama Nusantara (MUN)
- Direktur PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)
- Komisaris PT Meta Media Infranasantara (MMI)
- Country Head at Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)
- President Director of PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS)
- Director of PT Margautama Nusantara (MUN)
- Director of PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)
- Commissioner of PT Meta Media Infranasantara (MMI)



Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Christopher Daniel C. Lizo

Direktur
Director

Umur | Age

51 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship

Filipina | Philippines

Domisili | Domicile

Filipina | Filipino



Dasar Hukum Penunjukan

Legal Basis of Appointment

Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPST Tahun 2023.

Diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 24 Mei 2023 hingga RUPST Tahun 2028.

First appointed as Director based on Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since August 31, 2018 until the AGMS Year 2023.

Reappointed as Director based on the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023 made before Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since May 24, 2023 until the AGMS Year 2028.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi

Educational Background/Certification

- Pendidikan Manajemen Eksekutif, University of Wharton, Philadelphia, USA (2015)
- Sarjana Ilmu Akuntansi, De La Salle University (1993)
- Executive Management Education, University of Wharton, Philadelphia, USA (2015)
- Bachelor of Accounting Science, De La Salle University (1993)



Riwayat Pekerjaan

Work Experience

- CFO Treasurer di NLEX Corporation (2008-2016)
- Director di Metro Pacific Investments Corporation (2007-2008)
- Vice President of Treasury di Metro Pacific Investments Corporation (2006-2007)
- CFO Treasurer of NLEX Corporation (2008-2016)
- Director of Metro Pacific Investments Corporation (2007-2008)
- Vice President of Treasury at Metro Pacific Investments Corporation (2006-2007)



Rangkap Jabatan

Concurrent Position

- Kepala Bidang Operasional dan Keuangan di MP Cala Holdings, Inc
- Treasurer & Director di Cavitex Infrastructure Corporation
- Senior Vice President CFO di Metro Pacific Tollways Corporation
- Treasurer & Director di NLEX Corporation
- Treasurer & Director di Tollways Management Corporation
- Head of Operations and Finance of MP Cala Holdings, Inc
- Treasurer & Director at Cavitex Infrastructure Corporation
- Senior Vice President of CFO at Metro Pacific Tollways Corporation
- Treasurer & Director at NLEX Corporation
- Treasurer & Director at Tollways Management Corporation



Hubungan Afiliasi

Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.



Francis Emmanuel D. Rojas

Direktur
Director

Umur | Age

51 Tahun | years old

Kewarganegaraan | Citizenship

Filipina | Philippines

Domisili | Domicile

Filipina | Filipino



Dasar Hukum Penunjukan

Legal Basis of Appointment

Pertama kali diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 117 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 31 Agustus 2018 hingga RUPST Tahun 2023.

Diangkat kembali sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dengan periode jabatan sejak 24 Mei 2023 hingga RUPST Tahun 2028.

First appointed as Director based on Deed of Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 117 dated August 31, 2018 made before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since August 31, 2018 until the AGMS Year 2023.

Reappointed as Director based on the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023 made before Humbert Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, with the period of office since May 24, 2023 until the AGMS Year 2028.



Riwayat Pendidikan/Sertifikasi

Educational Background/Certification

- Magister Manajemen Bisnis dari Asian Institute of Management, Manila pada (1999)
- Sarjana Manajemen Bisnis, Ateneo de Manila University (1994)
- Master in Business Management, Asian Institute of Management, Manila (1999)
- Bachelor of Business Management, Ateneo de Manila University (1994)



Riwayat Pekerjaan

Work Experience

Direktur Senior Ernst and Young Philippines (2001-2007)
Senior Director of Ernst and Young Philippines (2001-2007)



Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Senior Vice President Pengembangan Bisnis di PT Metro Pacific Tollways Corporation
Senior Vice President of Business Development at PT Metro Pacific Tollways Corporation



Hubungan Afiliasi

Affiliation Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.
Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and has affiliation with Majority/Controlling Shareholders.

Profil Pejabat Eksekutif

Executive Officers' Profile



Arnaf Radin Yogananta
Head of Procurement

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Procurement Senior Manager pada 1 November 2018 berdasarkan 066/SK-HRD/XI/2018. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti pada tahun 2005 dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Head of Procurement di PT Nusantara Infrastructure (2018-sekarang); Head of Procurement & Logistic di PT Komet Infra Nusantara (2014-2018); Procurement Manager di SAP Group (2012-2014); Procurement di PT Siemens Indonesia dan PT Nokia Siemens (2006-2012); dan Site Supervisor di CV Hikmah Mandiri (2005-2006).

Indonesian citizen, 43 years old, and domiciled in Jakarta. Appointed as Senior Procurement Manager on November 1, 2018 based on Decree No. 066/SK-HRD/XI/2018. Holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Trisakti University in 2005 and has various work experiences as Head of Procurement at PT Nusantara Infrastructure (2018-present); Head of Procurement & Logistics at PT Komet Infra Nusantara (2014-2018); Procurement Manager at SAP Group (2012-2014); Procurement at PT Siemens Indonesia and PT Nokia Siemens (2006-2012); and Site Supervisor at CV Hikmah Mandiri (2005-2006).



Dadi Purwadi
Head of Accounting & Tax

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Head of Accounting & Tax General Manager pada tanggal 1 Juni 2022 berdasarkan SK No. 012/SK-HRD/V/2022. Meraih gelar Master di Bidang Finance and Accounting dari Universitas Pancasila pada tahun 2015; mendapatkan sertifikasi Certified Management Accountant (CMA) dari ICMA Australia pada tahun 2018; mengambil gelar MBA di Singapore Business School; serta telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Supervisor Internal Audit di Sierad Group (3 tahun); Business Analyst di Kimberly-Lever Indonesia (Unilever Group) (5 tahun); Head of Accounting di Holcim Indonesia (12 Tahun); dan Senior Manager Accounting and Tax di PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018-sekarang); Komisaris PT SCTK dan DCC (anak Perusahaan PT Nusantara Infrastructure Tbk).

Indonesian citizen, 47 years old, and domiciled in Jakarta. Appointed as Head of Accounting & Tax General Manager on June 1, 2022 based on Decree No. 012/SK-HRD/V/2022. Holds a Master's degree in Finance and Accounting from Pancasila University in 2015; obtained Certified Management Accountant (CMA) from ICMA Australia in 2018; holds an MBA degree at the Singapore Business School; and has experience as Internal Audit Supervisor at Sierad Group (3 years); Business Analyst at Kimberly-Lever Indonesia (Unilever Group) (5 years); Head of Accounting at Holcim Indonesia (12 years old); and Senior Manager of Accounting and Tax at PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018-present); Commissioner of PT SCTK and DCC (a subsidiary of PT Nusantara Infrastructure Tbk).



Meggie Burhan^{*)}
Head of Finance

^{*)} Yang bersangkutan meninggal dunia pada Januari 2024.
The person in question passed away in January 2024.

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Head of Finance General Manager pada tanggal 1 Juni 2022 berdasarkan 012/SK-HRD/V/2022. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 1988 dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Senior Manager di PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018-sekarang); General Manager Finance di PT Tirta Bangun Nusantara (2013-2017); dan General Manager Finance di PT Certis Multipersada Pratama Tbk (1996-2012).

Indonesian citizen, 58 years old, and domiciled in Jakarta. Appointed as Head of Finance General Manager on June 1, 2022 based on Decree No. 012/SK-HRD/V/2022. Holds a Bachelor's degree in Accounting from the Advent Indonesia University in 1988 and has various work experiences as a Senior Manager at PT Nusantara Infrastructure Tbk (2018-present); General Manager Finance at PT Tirta Bangun Nusantara (2013-2017); and General Manager Finance at PT Certis Multipersada Pratama Tbk (1996-2012).



Helda M. Manuhutu
Head of Human Resources/General Affairs

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, dan berdomisili di Bekasi. Diangkat sebagai Human Resource/General Affairs pada 2 September 2013 berdasarkan 073/PKT/HRD/NI/VIII/2013. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya pada tahun 1996 dan gelar Magister Management Human Resources, Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2021 serta telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Corporate Human Resource/General Affairs/Information Technology General Manager dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Nusantara Infrastructure Tbk (2013-sekarang); dan selama 15 tahun menangani berbagai pilar HR di Unilever Indonesia.

Indonesian citizen, 50 years old, and domiciled in Bekasi. Appointed as Human Resource/General Affairs on September 2, 2013 based on Decree No. 073/PKT/HRD/NI/VIII/2013. Holds a Bachelor's degree in Civil Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya in 1996 and a Master's degree in Human Resources Management from Pelita Harapan University, Jakarta in 2021. She has various work experiences as Corporate Human Resource/General Affairs/Information Technology General Manager and Member Nomination and Remuneration Committee of PT Nusantara Infrastructure Tbk (2013-present); and handling various business pillars at Unilever Indonesia for 15 years.



Indah D.P. Pertiwi
Head of Corporate Communication & CSR

Warga Negara Indonesia, 37 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Head of Corporate Communication & CSR pada 24 Oktober 2022 berdasarkan 038/SK-HRD/X/2022. Meraih gelar Sarjana Ekonomi bidang Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki pengalaman kerja lebih dari 15 tahun di bidang Corporate Communication dan telah bekerja di berbagai perusahaan baik di level domestik hingga multinasional. Jenis industri yang digeluti beragam antara lain perusahaan tembakau, perbankan, pertambangan, dan infrastruktur. Sebelum bekerja di Nusantara Infrastructure, pernah mengelola komunikasi perusahaan di ABM Investama, Bank Muamalat Indonesia, CIMB Niaga, dan British American Tobacco.

Indonesian citizen, 37 years old, and domiciled in Jakarta. Appointed as Head of Corporate Communication & CSR on October 24, 2022, based on 038/SK-HRD/X/2022. Holds a Bachelor of Economics degree in Management from the Faculty of Economics, University of Indonesia. She has more than 15 years of work experience in the field of Corporate Communication and had been working in various companies both at the domestic and multinational levels. The types of industries involved are various, including tobacco companies, banking, integrated mining and infrastructure. Prior to working at Nusantara Infrastructure, she had managed corporate communications at ABM Investama, Bank Muamalat Indonesia, CIMB Niaga, and British American Tobacco.



Junianto T. Prijono
Head of Internal Audit

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Head of Internal Audit berdasarkan SKD No. 106/NIDIR1/31/08/2018. Meraih gelar Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya pada tahun 1981 dan Master of Business Administration dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada tahun 1989 serta telah memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai Komisaris PT Nusantara Infrastructure Tbk (2008-2017); Chief Finance Officer di Bosowa Corporation (2008-2009); Star Petrogas Corporation/Persian Gulf Star Oil Company (2007-2008); PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (2006-2007); Direktur PT Renaissance Capital Asia (2005-2006); Komisaris PT Bank Lippo Tbk (2002-2004); Deputy Direktur Keuangan-Kontroler & Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero); Deputy Ketua-Dukungan Kerja & Administrasi (2001-2004), Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA); Partner-Financial Advisory di Deloitte Touche (1991-2001) dan sebagainya.

Indonesian, 68 years old, and domiciled in Jakarta. Appointed as Head of Internal Audit based on Decree No. 106/NIDIR1/31/08/2018. Holds a Bachelor's degree in Accounting from Faculty of Economics of Brawijaya University in 1981 and a Master of Business Administration from PPM School of Management in 1989. He has had various work experiences as Commissioner of PT Nusantara Infrastructure Tbk (2008-2017); Chief Finance Officer at Bosowa Corporation (2008-2009); Star Petrogas Corporation/Persian Gulf Star Oil Company (2007-2008); PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (2006-2007); Director at PT Renaissance Capital Asia (2005-2006); Commissioner at PT Bank Lippo Tbk (2002-2004); Deputy Director of Finance-Controller & Risk Management at PT Pertamina (Persero); Deputy Chairman-Work Support & Administration (2001-2004), Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA); Partner-Financial Advisory at Deloitte Touche (1991-2001) and so on.



Real Chandra
Head of Operational Excellence

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, dan berdomisili di Depok. Diangkat sebagai Head of Operational Excellence pada 12 Oktober 2020 berdasarkan 018/SK-HRD/X/2020. Meraih gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002 dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di bidang Strategic Management, Commercial Excellence, Operational Excellence, dan Retail Financing di berbagai perusahaan nasional maupun multinasional, seperti Federal International Finance Group, Holcim Indonesia, dan Semen Indonesia Group.

Indonesian citizen, 45 years old, and domiciled in Depok. Appointed as Senior Manager-Head of Operational Excellence on October 12, 2020 based on Decree No. 018/SK-HRD/X/2020. Holds a Bachelor's degree from Bogor Agricultural University in 2002 and has various work experiences of more than 20 years in the fields of Strategic Management, Commercial Excellence, Business Process Optimization, Project Management, and Microfinancing in various companies such as Federal International Finance Group, Holcim Indonesia, and Semen Indonesia Group.



Winda Adriana
Head of Legal

Warga negara Indonesia, 39 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Head of Legal pada tahun 2021 berdasarkan 021/SK-HRD/X/2021. Sarjana Hukum lulusan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Memiliki pengalaman kerja antara lain sebagai Corporate Legal Manager di PT Komet Infra Nusantara (2014-2021), Legal Manager di PT Brent Ventura (2013-2014), dan staf Legal & Compliance di PT Nusantara Capital Securities (2010-2013).

Indonesian citizen, 39 years old, domiciled in Jakarta. Appointed as Head of Legal in 2021 based on 021/SK-HRD/X/2021. Bachelor of Law from Universitas Sebelas Maret, Surakarta. She has work experience, among others, as Corporate Legal Manager at PT Komet Infra Nusantara (2014-2021), Legal Manager at PT Brent Ventura (2013-2014), and Legal & Compliance staff at PT Nusantara Capital Securities (2010-2013).



Adrianto Januri
Business Development & Investment Analyst

Warga negara Indonesia, 32 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Senior Manager, Business Development & Investment Analyst pada tahun 2021 berdasarkan 003/SK-HRD/IV/2021. Sarjana Ekonomi lulusan Prasetya Mulya Business School. Pengalaman kerja sebelumnya sebagai Strategy & Portfolio Manager di PT Waskita Toll Road (2018-2019) dan Senior Associate, Capital Projects & Infrastructure, PT PricewaterhouseCoopers (2017-2018).

Indonesian citizen, 32 years old, domiciled in Jakarta. Appointed as Senior Manager, Business Development & Investment Analyst in 2021 on 003/SK-HRD/IV/2021. Bachelor of Economics from Prasetya Mulya Business School. Previous work experience as Strategy & Portfolio Manager at PT Waskita Toll Road (2018-2019) and Senior Associate, Capital Projects & Infrastructure, PT PricewaterhouseCoopers (2017-2018).



David E. Parry
Head of HSE

Warga Negara Inggris, 79 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Kepala Divisi HSE pada tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan HRD. Meraih gelar Diploma in Education dari Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1966, gelar Bachelor of Arts Honours (BA Hons) Geography pada tahun 1965 dan Master of Science (MSc) bidang Natural Resource Survey (Soil Science, Geomorphology and Ecology) pada tahun 1968 dengan keduanya dari Universitas Sussex, Inggris, serta gelar Doctor of Philosophy (PhD) bidang Remote Sensing (Satellite Imagery) dan Natural Resources Evaluation dari Universitas Aston di Birmingham, Inggris pada tahun 1979 dan telah memiliki berbagai pengalaman kerja panjang yang dimulai dari ketika menjabat sebagai Soil Scientist, Land-use Planner di Dallol Maori Irrigation Project, Nigeria, Afrika pada tahun 1968 dan kini telah berpengalaman selama 52 tahun sebagai ahli lingkungan dan soil scientist di lingkungan tropis termasuk Afrika, Timur Tengah, Sub Benua India dan Asia Tenggara serta memiliki pengalaman hampir 45 tahun bekerja di sector infrastruktur di Indonesia. Bergabungnya Dr. David E. Parry dengan Perusahaan di tahun 2013 mendorong terwujudnya peningkatan kualitas kinerja Perusahaan dengan keahliannya di bidang identifikasi proyek, perencanaan, dan pengembangan serta memiliki beragam pengalaman di berbagai sector industri, antara lain seperti irigasi, pertanian, kehutanan, pengelolaan daerah aliran sungai, pengadaan air bersih, sanitasi, drainase perkotaan, perencanaan lalu lintas, hingga pengembangan sistem mass rapid test.

British citizen, 81 years old, and domiciled in Jakarta. Appointed as Head of HSE Division on July 1, 2019 based on HRD Decree. Holds a Diploma in Education from the University of Oxford, UK in 1966, a Bachelor of Arts Honours (BA Hons) Geography in 1965 and a Master of Science (MSc) in Natural Resource Survey (Soil Science, Geomorphology and Ecology) in 1968, both from the University of Sussex, UK, and a Doctor of Philosophy (PhD) in Remote Sensing (Satellite Imagery) and Natural Resources Evaluation from Aston University in Birmingham, England in 1979 and has had various long working experiences starting from when he served as Soil Scientist, Land-use Planner at Dallol Maori Irrigation Project, Nigeria, Africa in 1968 and currently has 52 years of experience as an environmentalist and soil scientist in tropical environments including Africa, Middle Eastern, Indian Sub Continent and South East Asia as well as having almost 45 years of experience working in the infrastructure sector in Indonesia. Dr. David E. Parry joined the Company in 2013 to encourage the improvement of the quality of the Company's performance with his expertise in project identification, planning and development and has diverse experience in various industrial sectors, such as irrigation, agriculture, forestry, watershed management, clean water supply, sanitation, urban drainage, traffic planning, to the development of mass rapid test systems.



Dahlia Evawani
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, berdomisili di Depok. Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan pada 30 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas, Jakarta, pada tahun 2000. Memiliki pengalaman kerja sebagai Accounting Officer di PT Daruma Investama (2004-2006), Accounting Officer di Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (2000-2004), dan staf Fund Administration di ABN Amro Bank N.V. (2000).

Indonesian citizen, 47 years old, domiciled in Depok. Appointed as Corporate Secretary on July 30, 2013 based on Board of Directors' Decree. Earned a Bachelor of Economics degree from STIE Perbanas, Jakarta, in 2000. Previous work experience include as Accounting Officer with PT Daruma Investama (2004-2006), Accounting Officer with Indonesian Banking Restructuring Agency/IBRA (2000-2004), and Fund Administration staff with ABN Amro Bank N.V. (2000).



Yoshiro Wada
Chief Engineer

Warga negara Jepang, 60 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Technical Engineering pada tahun 2022 berdasarkan 028/SPK-HRD/IX/2022. Sarjana Teknik Sipil lulusan Osaka City University, Jepang (1986). Memiliki pengalaman kerja antara lain sebagai Director of Overseas Business in Technical Development Bureau (2017-2022), Development Advance Technology Director in Expressway Operation Bureau (2016-2017) dan Chief Representative of Indonesia Representative Office (2011-2016).

Japanese citizen, 61 years old, domiciled in Jakarta. Appointed as Technical Engineering in 2022 based on 028/SPK-HRD/IX/2022. Bachelor of Civil Engineering graduated from Osaka City University, Japan (1986). Previous work experience include serving as Senior General Manager (2023), Director for Overseas Business in Technical Development Bureau (2017-2022) and Chief of Representative Indonesia Office (2011-2016) of West Nippon Expressway Company Limited.

Demografi Karyawan

Employee Demography

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN PERUSAHAAN

Employee Composition based on Company

Nama Perusahaan Name of Company	2023	2022	2021
PT Nusantara Infrastructure Tbk	46	47	45
Entitas Anak Perusahaan Langsung Direct Subsidiaries			
PT Margautama Nusantara	17	10	11
PT Potum Mundi Infranasantara	9	6	5
PT Portco Infranasantara	1	1	1
PT Energi Infranasantara	11	9	9
PT Meta Media Infranasantara	1	1	1
Entitas Anak Perusahaan Tidak Langsung Indirect Subsidiaries			
PT Bintaro Serpong Damai	43	40	38
PT Makassar Metro Network	43	48	50
PT Jalan Tol Seksi Empat	23	22	23
PT Dain Celicani Cemerlang	21	21	24
PT Sarana Catur Tirta Kelola	57	59	46
PT Inpolo Meka Energi	8	7	5
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari	45	42	42
Total	325	321	310

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Employee Composition based on Gender

Jenis Kelamin	2023	2022	2021	Gender
Laki-laki	269	267	255	Male
Perempuan	56	54	55	Female
Jumlah	325	321	310	Total

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Employee Composition based on Employment Status

Status	2023	2022	2021	Status
Karyawan Tetap	272	281	261	Permanent Employee
Karyawan Kontrak	53	40	49	Contract Employee
Jumlah	325	321	310	Total

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Employee Composition based on Position Level

Jabatan	2023	2022	2021	Position
Executive Vice President	1	0	4	Executive Vice President
General Manager	23	26	17	General Manager
Senior Manager	11	8	9	Senior Manager
Manager	24	26	27	Manager
Assistant Manager	66	68	74	Assistant Manager
Staff	163	152	136	Staff
Non-Staff	37	41	43	Non-Staff
Jumlah	325	321	310	Total

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Employee Composition based on Education Level

Tingkat Pendidikan	2023	2022	2021	Education Level
Strata 3	2	2	2	Doctorate
Strata 2	22	25	27	Postgraduate
Strata 1	143	140	139	Undergraduate
Diploma (D3)	33	38	37	Diploma (D3)
SMA atau Sederajat	120	109	91	Senior High or Equivalent
SMP atau Sederajat	5	7	8	Junior High or Equivalent
SD	1	0	6	Elementary School
Jumlah	325	321	310	Total

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN KELOMPOK USIA

Employee Composition based on Age Group

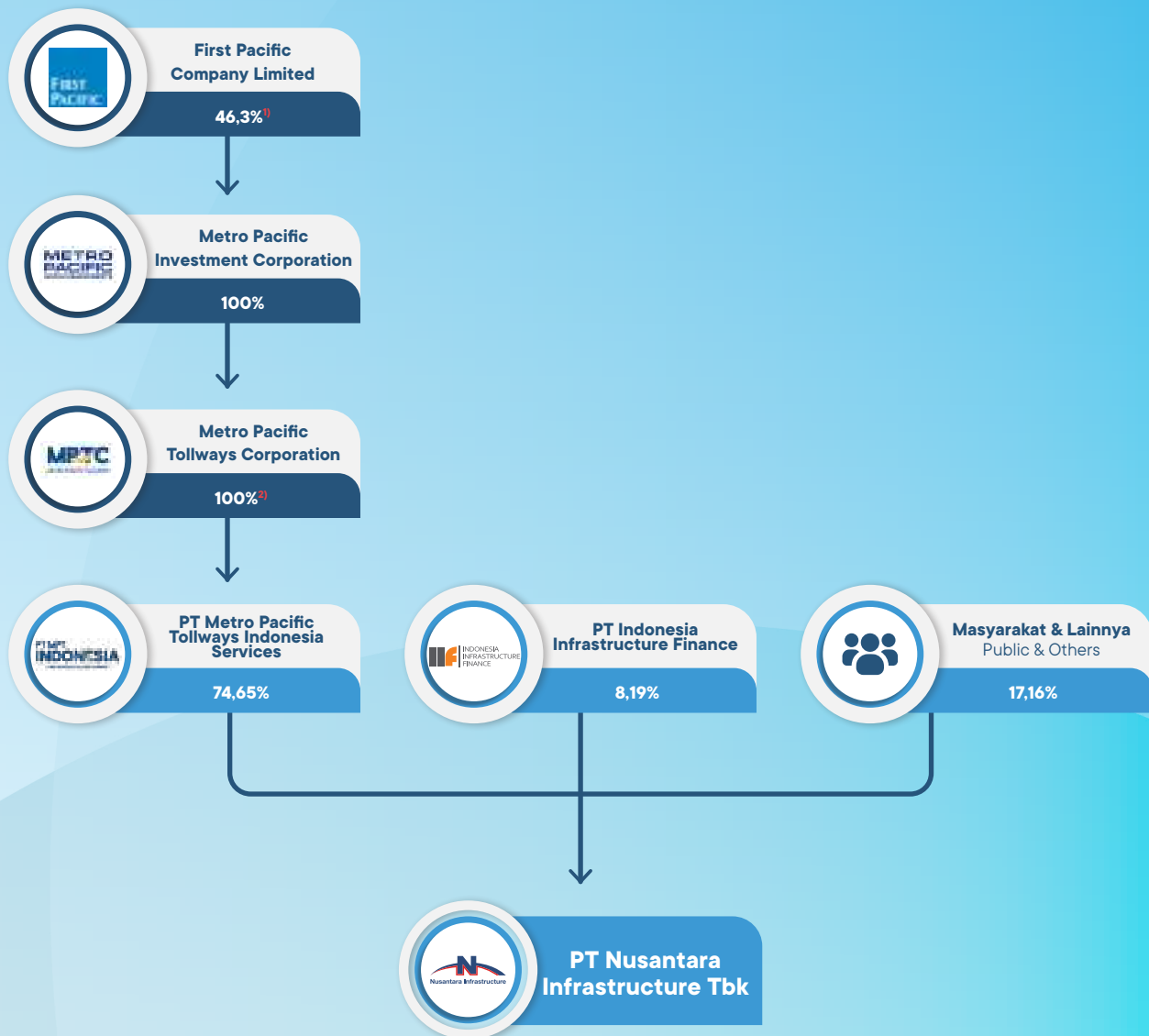
Tingkat Pendidikan	2023	2022	2021	Education Level
>50 tahun	62	65	67	>50 years old
30 – 50 tahun	199	182	179	30 – 50 years old
<30 tahun	64	74	64	<30 years old
Jumlah	325	321	310	Total

Informasi Pemegang Saham

Shareholders Information

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Major and Controlling Shareholders



MPTC dan PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS) adalah anak perusahaan langsung dan tidak langsung dari Metro Pacific Investments Corporation (MPIC). MPIC adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Filipina, dimana First Pacific Company Ltd (FPC), sebuah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong (SEHK), memiliki 46,3% hak kepemilikan.

MPTC and PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS) are, respectively, direct and indirect subsidiaries of Metro Pacific Investments Corporation (MPIC). MPIC is a company incorporated under the laws of the Republic of the Philippines, in which First Pacific Company Ltd (FPC), a listed company on the Stock Exchange of Hong Kong (SEHK), holds 46.3% economic interest.

1) Hak Kepemilikan | Economic Interest

2) Kepemilikan Saham Tidak Langsung | Indirect Equity Interest

Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2023

Share Ownership Composition as of December 31, 2023

Pemegang Saham	Jumlah Saham Number of Shares	Nilai Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)	Kepemilikan (%) Ownership (%)	Shareholder
Seri A Series A				
PT Bosowa Utama	1	35	0	PT Bosowa Utama
Sub Jumlah Saham Beredar Seri A	1	35	0	Sub-Total of Outstanding Series A Shares
Seri B Series B				
PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services	13.220.263.850	925.418.469.500	74,65	PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services
PT Indonesia Infrastructure Finance	1.451.267.500	101.588.725.000	8,19	PT Indonesia Infrastructure Finance
Masyarakat	2.653.721.844	185.760.529.080	14,98	Public
Saham Tresuri	385.454.000	26.981.850.000	2,18	Treasury Stock
Sub Jumlah Saham Beredar Seri B				Sub-Total of Outstanding Series B Shares
Jumlah Saham Beredar	17.710.708.194	1.239.749.573.580	100,00	Total Outstanding Shares
Jumlah Saham dalam Portepel	63.289.291.807	4.430.250.426.490		Total Shares in Portfolio

PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH

Shareholders with 5% or More Ownership

Pemegang Saham	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan (%) Ownership (%)	Shareholder
PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services	13.220.263.850	74,65	PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services
PT Indonesia Infrastructure Finance	1.451.267.500	8,19	PT Indonesia Infrastructure Finance
Masyarakat dan Lainnya	3.039.176.845	17,16	Public and Other
Jumlah	17.710.708.194	100,00	Total

PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI

Shareholders Based on Classification

Kategori	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan (%) Ownership (%)	Category
Ritel Domestik	2.508.085.779	14,16	Domestic Retail
Insititusi Domestik	15.056.986.350	85,02	Domestic Institution
Jumlah Pemegang Saham Domestik	17.565.072.129	99,18	Total Domestic Shareholders
Ritel Asing	10.256.307	0,06	Foreign Retail
Institusi Asing	135.379.758	0,76	Foreign Institution
Jumlah Pemegang Saham Asing	145.636.065	0,82	Total Foreign Shareholders
Jumlah	17.710.708.194	100	Total

20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Top 20 Largest Shareholders

No.	Nama Pemegang Saham Name of Shareholder	Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Share)	Persentase (%) Percentage (%)
1	PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES	13.220.263.850	74,65
2	PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE	1.451.267.500	8,19
3	REKSA DANA TREASURE SAHAM MANTAP	199.350.200	1,13
4	RENOLD BARENO	85.677.300	0,48
5	SANJAY SUNNIL NATHANI	78.100.000	0,44
6	BANK OF SINGAPORE LIMITED	68.102.933	0,38
7	SULISTIANI SAMPOERNA	56.000.000	0,32
8	EDWINT WIDJAYA	51.740.700	0,29
9	SURIANTHEN	94.943.000	0,54
10	PT DUX CAPITAL INVESTAMA	39.850.000	0,23
11	ELLYS BUSTOMI	37.996.800	0,21
12	REKSA DANA SYARIAH TREASURE SAHAM BERKAH SYARIAH	34.120.000	0,19
13	DB AG SG SES CLT A/C FOR SGMV VCC-864134302	30.000.000	0,17
14	JOYOINEL G.M	30.000.000	0,17
15	CHANDRA WIDJAJA	26.714.900	0,15
16	SEPPALGA AHMAD	25.000.000	0,14
17	ASHISH KUMAR D. KESWANI	21.552.000	0,12
18	THE JOK TUNG	21.500.000	0,12
19	EMILIA SAERA	20.893.400	0,12
20	HENDRA WANGSANATA	20.861.767	0,12

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SECARA LANGSUNG

Direct Share Ownership by Board of Commissioners and Board of Director

Nama Name	Jabatan Position	2023	
		Jumlah Saham (Lembar) Total Shares (Share)	Kepemilikan (%) Ownership (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Manuel V. Pangilinan	Komisaris Utama President Commissioner	-	-
Rogelio L. Singson	Komisaris Commissioner	-	-
Johnny J. Lumintang	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Farid Harianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Direksi Board of Directors			
M. Ramdani Basri	Direktur Utama & CEO President Director & CEO	302.823	0,00%
Danni Hasan	Direktur Director	-	-
Benny S. Santoso	Direktur Director		
Ridwan Irawan	Direktur Director	-	-
Denn Charly G. Espanola	Direktur Director	-	-
Amadeo N. Bejec	Direktur Director	-	-
Christopher Daniel C. Lizo	Direktur Director	-	-
Francis Emmanuel D. Rojas	Direktur Director	-	-

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SECARA TIDAK LANGSUNG

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak ada yang memiliki saham Perseroan secara tidak langsung.

INDIRECT SHARE OWNERSHIP BY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTOR

Until the end of the 2023 fiscal year, none of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors own shares of the Company indirectly.

Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Tanggal Pelaksanaan Listing Date	Aksi Korporasi Corporate Action	Jumlah Saham Total Shares	Jumlah Setelah Pencatatan Saham Total Shares after Share Listing	Modal Disetor Paid-up Capital	Bursa Saham Stock Exchange
18 Juli 2001 July 18, 2001	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	60.000.000	60.000.000	6.000.000.000	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
18 Juli 2001 July 18, 2001	Penambahan Pencatatan Additional Listing	375.000.000	435.000.000	43.500.000.000	
8 November 2006 November 8, 2006	Penggabungan Usaha Merger	9.693.571.429	10.128.571.429	354.500.000.015	
20 Juli 2010 July 20, 2010	Penggabungan Nilai Nominal Reverse Stock	(5.064.285.714)	5.064.285.715	354.500.000.050	
12 Agustus 2010 August 12, 2010	Penawaran Umum Terbatas 1:2 Limited Public Offering 1:2	8.476.500.000	13.540.785.715	947.855.000.050	
26 Juli 2013 July 26, 2013	Konversi Waran Seri Series Warrant Conversion	154.308.244	15.235.671.880	1.066.497.031.565	
28 Desember 2018 December 28, 2018	Penambahan Saham Seri B dengan HMETD Additional Series B Shares with Preemptive Rights	2.475.036.314	17.710.708.194	1.239.749.573.545	

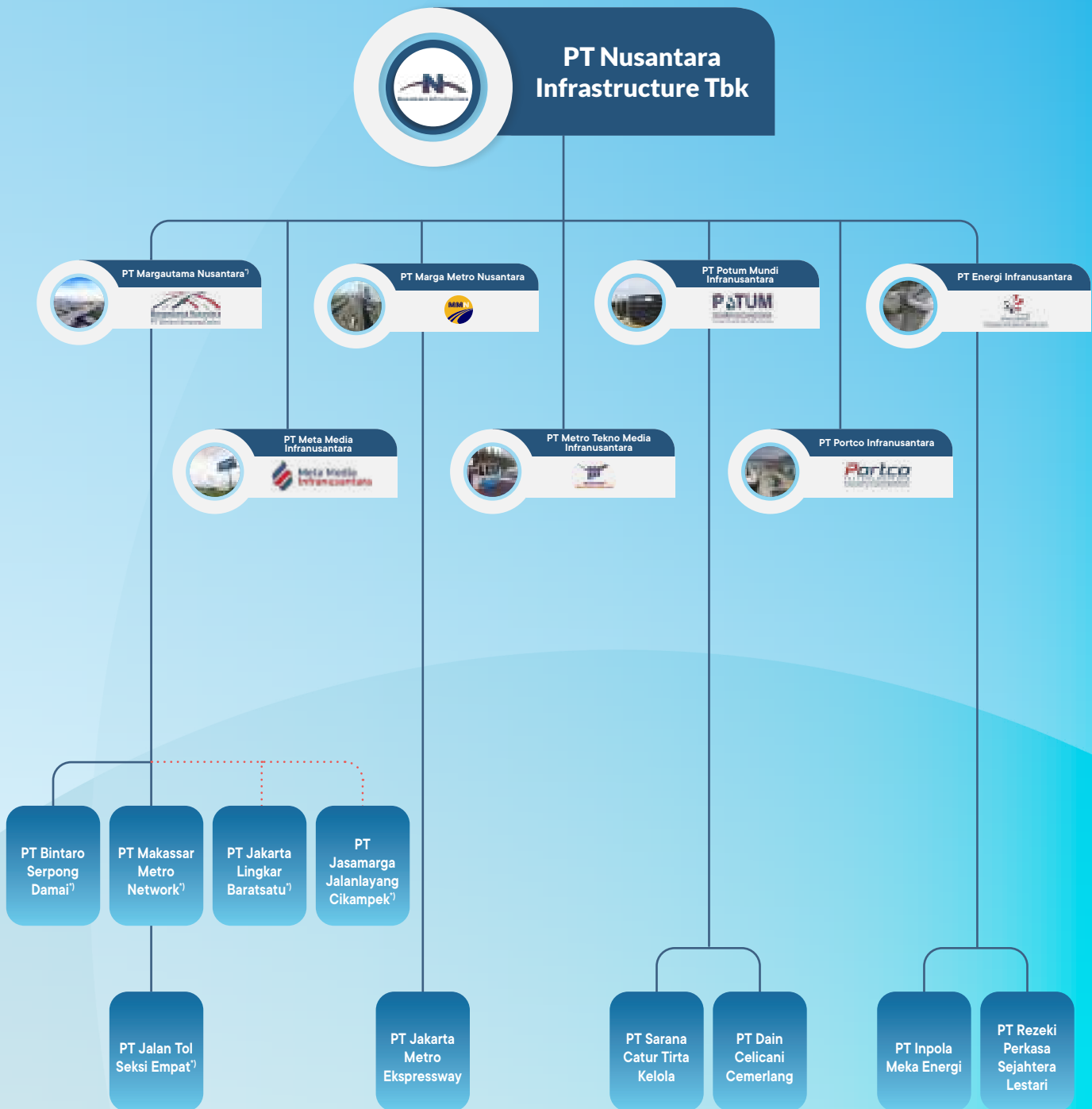
PERATURAN KEPEMILIKAN DAN HAK SAHAM NUSANTARA INFRASTRUCTURE

Nusantara Infrastructure Share Ownership and Rights Regulations

Jenis Saham Type of Shares	Peraturan Kepemilikan Ownership Regulation	Hak	Rights
Saham Seri A Series A Shares	Akta No. 23 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Deed No. 23 dated May 12, 2015, made in the presence of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta	Saham Seri A merupakan saham tanpa hak suara, tidak berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Right Issue apabila Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Terbatas, tidak berhak untuk melakukan penambahan saham, dan Saham Seri A tidak dapat dialihkan kepada siapa pun. Hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A hanyalah hak atas dividen, yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari hak atas dividen yang diterima oleh Pemegang Saham Seri B.	Series A Shares are shares without voting rights, are not entitled to Preemptive Rights (HMETD) or Right Issue if the Company is going to conduct a Limited Public Offering, are not entitled to make additional shares, and Series A Shares cannot be transferred to anyone. The rights owned by the Series A Shareholders are only the right to dividends, which is 50% (fifty percent) of the rights to the dividends received by the Series B Shareholders.
Saham Seri B Series B Shares	Akta No. 23 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Deed No. 23 dated May 12, 2015, made in the presence of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta	Saham Seri B tidak dapat dipindahkan dengan cara apapun kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan khususnya peraturan di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan.	Series B shares are not transferable by any means unless otherwise stipulated in the laws, especially regulations in the field of capital market and the Company's Articles of Association.

Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure



*) Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Desember 2023 atas persetujuan penambahan modal oleh entitas terkendali Perseroan yakni, MUN, yang mengakibatkan kepemilikan Perseroan dalam MUN menjadi terdilusi dari semula 76,51% menjadi 43,39%, sehingga laporan keuangan MUN menjadi tidak lagi dikonsolidasikan oleh Perseroan.
Based on the decision of the Company's EGMS dated December 19, 2023 on the approval of the capital increase by the Company's controlled entity, MUN, which resulted in the Company's ownership in MUN being diluted from 76.51% to 43.39%, so that MUN's financial statements are no longer consolidated by the Company.

Entitas Anak
Subsidiaries

Entitas Asosiasi
Associated Company

Entitas Anak dan Asosiasi

Subsidiaries and Associate Entities

Nama Anak Perusahaan Name of Subsidiary	Tahun Awal Kegiatan First Year of Operation	Tahun Penyertaan Year of Investment	Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Business Line	Status Operasi Operational Status	Total Aset 2023 (Rp juta) 2023 Total Assets (Rp million)
Entitas Anak Langsung Direct Subsidiary						
PT Margautama Nusantara ^{*)}	2011	2010	43,39%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	14.060.624
PT Potum Mundi Infranasantara	2012	2011	99,99%	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating	533.625
PT Portco Infranasantara	2013	2011	99,99%	Pengusahaan Pelabuhan Port Management	Beroperasi Operating	123.394
PT Energi Infranasantara	2013	2012	99,99%	Energi Terbarukan Renewable Energy	Beroperasi Operating	691.524
PT Meta Media Infranasantara	2014	2014	100,00%	Perdagangan, Periklanan, dan Pengelolaan Parkir Trading, Advertising and Parking Management	Beroperasi Operating	11.600
PT Metro Tekno Media Infranasantara	2016	2016	100,00%	Perdagangan, Periklanan, dan Pengelolaan Parkir Trading, Advertising and Parking Management	Belum beroperasi Not operational yet	60
PT Marga Metro Nusantara	2018	2018	70,00%	Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa Development, Trading, and Service	Belum beroperasi Not operational yet	99.761
Entitas Anak Tidak Langsung, melalui PT Margautama Nusantara ^{*)} Indirect Subsidiary, through PT Margautama Nusantara ^{*)}						
PT Bintaro Serpong Damai ^{*)}	1999	2006	-	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	2.216.459
PT Makassar Metro Network ^{*)}	1998	2006	-	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	3.076.940
Entitas Anak Tidak Langsung, melalui PT Potum Mundi Infranasantara Indirect Subsidiary, through PT Potum Mundi Infranasantara						
PT Dain Celicani Cemerlang	2014	2012	74,52%	Pengelolaan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating	147.777
PT Sarana Catur Tirta Kelola	1997	2013	65,00%	Pengelolaan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Beroperasi Operating	219.739
Entitas Anak Tidak Langsung, melalui PT Energi Infranasantara Indirect Subsidiary, through PT Energi Infranasantara						
PT Inpol Meka Energi	2020	2013	100,00%	Energi Terbarukan Renewable Energy	Beroperasi Operating	390.398
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari	2018	2018	79,99%	Energi Terbarukan Renewable Energy	Beroperasi Operating	254.037
Entitas Anak Tidak Langsung, melalui PT Makassar Metro Network ^{*)} Indirect Subsidiary, through PT Makassar Metro Network ^{*)}						
PT Jalan Tol Seksi Empat ^{*)}	2008	2013	-	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	900.433
Entitas Anak Tidak Langsung, melalui PT Marga Metro Nusantara Indirect Subsidiary, through PT Marga Metro Nusantara						
PT Jakarta Metro Ekspresway	2023	2023	85,00%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating	26.917

^{*)} Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Desember 2023 atas persetujuan penambahan modal oleh entitas terkendali Perseroan yakni, MUN, yang mengakibatkan kepemilikan Perseroan dalam MUN menjadi terdilusi dari semula 76,51% menjadi 43,39%, sehingga laporan keuangan MUN menjadi tidak lagi dikonsolidasikan oleh Perseroan. Based on the decision of the Company's EGMS dated December 19, 2023 on the approval of the capital increase by the Company's controlled entity, MUN, which resulted in the Company's ownership in MUN being diluted from 76.51% to 43.39%, so that MUN's financial statements are no longer consolidated by the Company.

ENTITAS ANAK LANGSUNG

PT Margautama Nusantara (MUN)^{*)}

PT Margautama Nusantara (MUN) berdiri pada 11 Mei 2007 dengan tujuan untuk menjalankan bisnis usaha pada bidang pengelolaan jalan tol dan berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2013, Perseroan melakukan akuisisi atas 75% saham MUN dan menjadikan MUN secara resmi sebagai entitas anak Perseroan.

Sebelum dekonsolidasi, MUN memiliki 2 (dua) entitas anak, yaitu PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dengan kepemilikan saham sebesar 66,68% dan PT Makassar Metro Network (MMN) dengan kepemilikan saham sebesar 76,22%. MUN juga memiliki 1 (satu) entitas anak tidak langsung, yaitu PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) dengan kepemilikan saham sebesar 75,66% serta 2 (dua) entitas asosiasi, yaitu PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) dengan kepemilikan saham sebesar 35% dan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) dengan kepemilikan sebesar 40%.

Pada tahun 2023, MUN berhasil bermitra dengan GIC Ventures (GIC) melalui anak usahanya, Warrington Investment Pte. Ltd, serta Matro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), untuk menjadi bagian dari pemegang saham dalam sektor pengelolaan jalan tol milik Perseroan tersebut. Dengan masuknya GIC dan MPTIS, utang akuisisi 40% pembelian saham Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) dapat dilunasi. Keputusan bergabungnya GIC tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)

Potum didirikan pada tahun 2011 sebagai salah satu entitas anak Perseroan yang berfokus pada pengelolaan air. Saham di Potum oleh Perseroan hingga akhir tahun 2020 adalah sebesar 99,99%.

Pada tahun 2023, Potum menjual sahamnya di PT Tirta Bangun Nusantara (TBN). Jumlah saham dilepas kepada Bahtera Hijau Mandiri (BHM) sebanyak 26.957.000 saham atau yang mewakili 99,998% kepemilikan Potum di TBN. Kemudian, Potum menjual 547 saham atau setara dengan 0,002% di TBN kepada Bahtera Utama Sentosa (BHS). Dari 2 (dua) transaksi tersebut, Potum menerima pembayaran Rp55,00 miliar.

Saat ini Potum memiliki 2 (dua) entitas anak, yakni PT Dain Celicani Cemerlang (DCC), perusahaan jasa pengelolaan air bersih dan limbah di Medan, dengan kepemilikan saham 74,52% dan PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) dengan kepemilikan 65,00%. SCTK bergerak di bidang pengelolaan air bersih di Serang, Banten.

DIRECT SUBSIDIARIES

PT Margautama Nusantara (MUN)^{*)}

PT Margautama Nusantara (MUN) was founded on May 11, 2007 with the aim of operating a toll road management business in Jakarta. In 2013, the Company acquired 75% of MUN's shares, establishing MUN officially as a subsidiary of the Company.

MUN had 2 (two) subsidiaries prior to the deconsolidation, namely PT Bintaro Serpong Damai (BSD) with a 66.68% shareholding and PT Makassar Metro Network (MMN) with a 76.22% shareholding. MUN also has 1 (one) indirect subsidiary, PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), with 75.66% shareholding, and 2 (two) associated entities, PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) with 35% shareholding and PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) with 40% shareholding.

In 2023, MUN successfully partnered with GIC Ventures (GIC) through its subsidiary, Warrington Investment Pte. Ltd., and Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), to become shareholders in the Company's toll road management sector. With the entry of GIC and MPTIS, the acquisition debt of 40% share purchase of Mohammed Bin Zayed (MBZ) Elevated Road was immediately paid off. The decision to include GIC has been approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)

Potum was founded in 2011 as a subsidiary of the Company dedicated to the water management. The Company owns 99.99% of the shares in Potum until the end of 2020.

In 2023, Potum sold its shares in PT Tirta Bangun Nusantara (TBN). The number of shares released to Bahtera Hijau Mandiri (BHM) was 26,957,000 shares or representing 99.998% of Potum's ownership in TBN. Then, Potum sold 547 shares or equivalent to 0.002% in TBN to Bahtera Utama Sentosa (BHS). From these 2 (two) transactions, Potum received a payment of Rp55.00 billion.

Currently Potum has 2 (two) subsidiaries, namely PT Dain Celicani Cemerlang (DCC), a water and waste management services company in Medan, with 74.52% ownership and PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) with 65.00% ownership. SCTK is engaged in clean water management in Serang, Banten.

^{*)} Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Desember 2023 atas persetujuan penambahan modal oleh entitas terkendali Perseroan yakni, MUN, yang mengakibatkan kepemilikan Perseroan dalam MUN menjadi terdilusi dari semula 76,51% menjadi 43,39%, sehingga laporan keuangan MUN menjadi tidak lagi dikonsolidasikan oleh Perseroan. Based on the decision of the Company's EGMS dated December 19, 2023 on the approval of the capital increase by the Company's controlled entity, MUN, which resulted in the Company's ownership in MUN being diluted from 76.51% to 43.39%, so that MUN's financial statements are no longer consolidated by the Company.

PT Portco Infranasantara (Portco)

Perseroan mendirikan Portco pada 8 Maret 2011 dengan tujuan untuk menyediakan layanan manajemen pelabuhan. Seluruh aktivitas bisnis usaha dijalankan Portco dengan menerapkan prosedur Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS) dan *Business to Business* (B2B). Portco telah mendapatkan izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pada Oktober 2011 untuk mendukung Portco menjalankan usahanya dalam bentuk Keputusan Menteri yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan.

Pada tahun 2023, Portco melepas 60.174 saham atau yang mewakili 39% saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) kepada PT Louis Dreyfus Company (LDC) Indonesia. ISAB merupakan perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan aktivitas penunjang angkutan.

PT Energi Infranasantara (EI)

Perseroan mendirikan PT Energi Infranasantara (EI) pada tahun 2012 sebagai entitas bisnis yang bergerak di bidang pengelolaan sektor energi terbarukan. Hingga akhir tahun 2022, kepemilikan saham Perseroan di EI adalah sebesar 99,99%.

Pada tahun 2013, EI mengakuisisi saham PT Inpolo Meka Energi (IME), sebuah perusahaan pengembang pembangkit listrik tenaga air, sebesar 61,22%. Dengan akuisisi ini, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung secara otomatis dimiliki oleh EI. IME memiliki proyek konstruksi pembangunan PLTA 2x7,5 MW yang telah selesai pada tahun 2020 dan sudah mulai beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak 16 Desember 2020.

Pada 16 Agustus 2018, EI melakukan akuisisi saham PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) sebesar 79,99%. RPSL merupakan sebuah perusahaan Independent Power Producer (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang berlokasi di Siantan, Mempawah, Kalimantan Barat, dengan kapasitas 1x15 MW dan sudah beroperasi (*Commercial Operating Date/COD*) sejak tanggal 23 April 2018. PLTBm tersebut menjadi pembangkit listrik bertenaga biomassa pertama di Kalimantan Barat. Seluruh akuisisi yang dilakukan Perseroan melalui EI menjadi salah satu bentuk strategi bisnis Perseroan dalam mengembangkan portofolio di bidang Energi Bersih (*Green*) Baru dan Terbarukan (EBT).

PT Meta Media Infranasantara (MMI)

PT Meta Media Infranasantara (MMI) merupakan entitas anak yang beroperasi di bawah naungan Perseroan. Berdasarkan akta notaris No. 19 tanggal 30 November 2022, terjadi perubahan nama dari PT Telekom Infranasantara menjadi MMI. Perseroan secara resmi memegang 100% saham dalam MMI.

PT Portco Infranasantara (Portco)

On March 8, 2011, the Company established Portco with the goal of providing port management services. Portco conducts all business activities using Public-Private Partnership (KPS) and Business to Business (B2B) procedures. In the form of a Ministerial Decree issued by the Minister of Transportation, Portco obtained a Port Business Entity (BUP) license in October 2011 to assist Portco in running its business.

In 2023, Portco released 60,174 shares or representing 39% of the issued and paid-up shares in PT Intisentosa Alambahtera (ISAB) to PT Louis Dreyfus Company (LDC) Indonesia. ISAB is a limited liability company engaged in warehousing and transportation support activities.

PT Energi Infranasantara (EI)

In 2012, the Company established PT Energi Infranasantara (EI) as a business entity engaged in the field of renewable energy management. The Company owns 99.99% shares of EI until the end of 2022.

EI acquired 61.22% shares of PT Inpolo Meka Energi (IME), a hydropower plant development company, in 2013. EI now owns the Lau Gunung Hydropower Plant (HPP) as a result of this acquisition. IME has a 2x7.5 MW HPP construction project that was completed in 2020 and has been operational (*Commercial Operating Date/COD*) since December 16, 2020.

On August 16, 2018, EI acquired 79.99% shares of PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL). RPSL is an Independent Power Producer (IPP) company for a Biomass Power Plant (BPP) with a capacity of 1x15 MW in Siantan, Mempawah, West Kalimantan, that has been in operation (*Commercial Operating Date/COD*) since April 23, 2018. The Biomass Power Plant became West Kalimantan's first biomass-powered power plant. All acquisitions made by the Company through EI are part of the Company's business strategy of developing a portfolio in the sector of New and Renewable Clean (*Green*) Energy (NRE).

PT Meta Media Infranasantara (MMI)

PT Meta Media Infranasantara (MMI) is a subsidiaries that operates under the Company. Based on the notarial deed No. 19 dated November 30, 2022, there was a change of name from PT Telekom Infranasantara to MMI. The Company Tbk officially holds 100% shares in MMI.

MMI berkembang menjadi perusahaan yang memiliki berbagai lini bisnis, seperti pemanfaatan koridor jalan tol untuk iklan luar ruang dan utilitas, pengembangan dan pengelolaan *rest area*. Selama tahun 2023, MMI berfokus untuk mengembangkan lini bisnis baru dalam pengelolaan sistem parkir yaitu OTTO Parking.

Saat ini MMI telah memiliki dan mengelola sejumlah papan iklan dan pilar iklan pada sejumlah ruas jalan tol, yaitu pada Ruas Tol Pondok Aren-Serpong dan Ruas Tol Makassar.

PT Metro Tekno Media Infranasantara (MTMI)

PT Metro Tekno Media Infranasantara (MTMI) merupakan entitas anak usaha langsung Perseroan yang bergerak di bidang yang sama dengan MMI. MTMI yang sebelumnya merupakan PT Nusantara Infrastruktur Teknologi (NIT), telah diubah menjadi PT Metro Tekno Media Infranasantara berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham NIT dengan Akta No. 6 tanggal 19 September 2022 oleh Notaris Vita Cahyojati, S.H., M. Hum., notaris di Jakarta. Sampai tahun 2023, Perseroan memiliki 100% saham dalam MTMI.

ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG

Sektor Pengelolaan Jalan Tol

PT Bintaro Serpong Damai (BSD)^{*)}

PT Bintaro Serpong Damai (BSD) adalah perusahaan yang memegang konsesi jalan tol sepanjang 7,25 km antara Serpong dan Pondok Aren di wilayah Tangerang Selatan. Saham BSD diakuisisi oleh Perseroan melalui PT Margautama Nusantara (MUN) dengan kepemilikan saham sebesar 66,68%. BSD mulai menjalankan operasionalnya sejak 2 Februari 1999, Jalan Tol Serpong-Pondok Aren menjadi jalur utama yang memiliki peran besar dalam membantu menekan waktu tempuh dan mengurangi kepadatan kendaraan secara efisien di wilayah Tangerang Selatan.

PT Makassar Metro Network (MMN)^{*)}

PT Makassar Metro Network (MMN) didirikan pada tahun 1998 dengan nama PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) dan merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan jalan tol yang berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020, PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) secara resmi berganti nama menjadi PT Makassar Metro Network (MMN) yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BMN sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tertanggal 2 November 2020 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta. Melalui MUN, kepemilikan saham MMN oleh Perseroan sejak tahun 2006 hingga kini adalah sebesar 76,22%.

MMI has developed into a company that has various business lines, such as utilization of toll road corridors for outdoor advertising and utilities, development and management of rest areas. During 2023, MMI focused on developing a new business line in parking system management OTTO Parking.

MMI currently has and manage a number of billboards and advertising pillars on a number of toll roads, namely on the Pondok Aren-Serpong Toll Road and A.P Pettarani Toll Road.

PT Metro Tekno Media Infranasantara (MTMI)

PT Metro Tekno Media Infranasantara (MTMI) is a direct subsidiary of the Company which is engaged in the same field as MMI. MTMI, which was previously PT Nusantara Infrastruktur Teknologi (NIT), has been changed to PT Metro Tekno Media Infranasantara based on the Resolution of the Shareholders of NIT with Deed No. 6 dated September 19, 2022 by Notary Vita Cahyojati, S.H., M. Hum. a notary in Jakarta. Until 2023, the Company owns 100% of the shares in MTMI.

INDIRECT SUBSIDIARIES

Toll Road Management Sector

PT Bintaro Serpong Damai (BSD)^{*)}

PT Bintaro Serpong Damai (BSD) is a company that operates a 7.25-kilometer toll road between Serpong and Pondok Aren in South Tangerang. The Company acquired 66.68% of BSD's shares through PT Margautama Nusantara (MUN). Since BSD began commercially operating on February 2, 1999, the Serpong-Pondok Aren Toll Road has played an important role in reducing travel time and efficiently reducing vehicle density in the South Tangerang area.

PT Makassar Metro Network (MMN)^{*)}

PT Makassar Metro Network (MMN) is a toll road management company based in Makassar, South Sulawesi that was founded in 1998 under the name PT Bosowa Marga Nusantara (BMN). In 2020, PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) officially changed its name to PT Makassar Metro Network (MMN), as stated in the Deed of Resolutions of BMN Shareholders made in the presence of Karin Christiana Basoeki, S.H., Notary in Jakarta as a replacement for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2 dated November 2, 2020. Since 2006, the Company has owned 76.22% shares of MMN through MUN.

^{*)} Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Desember 2023 atas persetujuan penambahan modal oleh entitas terkendali Perseroan yakni, MUN, yang mengakibatkan kepemilikan Perseroan dalam MUN menjadi terdilusi dari semula 76,51% menjadi 43,39%, sehingga laporan keuangan MUN menjadi tidak lagi dikonsolidasikan oleh Perseroan. Based on the decision of the Company's EGMS dated December 19, 2023 on the approval of the capital increase by the Company's controlled entity, MUN, which resulted in the Company's ownership in MUN being diluted from 76.51% to 43.39%, so that MUN's financial statements are no longer consolidated by the Company.

MMN merupakan perusahaan pemegang konsesi jalan tol penghubung sepanjang 5,95 km antara Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan Jalan A.P. Pettarani (*Flyover* Urip Sumoharjo) yang juga terhubung dengan Jalan Tol Seksi Empat. Kedua jalan tol ini menjadi jalur utama antarkota di wilayah tersebut.

Pembangunan tahap awal dilakukan pada akhir Jalan Tol Seksi II, tepatnya di persimpangan Jl. Urip Sumoharjo dengan melewati persimpangan Jl. Boulevard Panakkukang, Jl. Hertasning, kemudian berakhir di Persimpangan Jl. Sultan Alauddin. Jalur tol ini berukuran 2 x 2 dengan lebar 3,50 meter dan memiliki dua *on-off ramp* yang terletak di Boulevard dan Alauddin.

Pada tahun 2020, proyek pembangunan Jalan Tol Layang A.P. Pettarani sepanjang 4,3 km yang dilaksanakan oleh MMN dan Pemerintah Daerah telah melalui tahapan Uji Laik Fungsi (ULF). Pembangunan jalan tol layang pertama di Makassar ini bertujuan untuk menekan kemacetan lalu lintas dan menunjang terwujudnya konektivitas secara lebih optimal di Area Timur Indonesia yang berdampak pada tercapainya percepatan pada aspek pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)¹⁾

PT Makassar Metro Network (MMN) dalam bisnisnya memiliki entitas anak, yakni PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) dengan kepemilikan saham MMN pada JTSE adalah sebesar 99,42%. JTSE memegang konsesi ruas Jalan Tol Seksi IV di Makassar dengan jalur sepanjang 11,57 km. Ruas jalan tol milik JTSE terhubung dengan ruas jalan tol yang dioperasikan oleh MMN, mulai dari Jembatan Tallo sampai dengan Simpang Mandai Makassar dan menjadi jalur akses ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

PT Jakarta Metro Ekspresway (JMEX)

PT Jakarta Metro Ekspresway (JMEX), merupakan entitas anak Perseroan melalui PT Marga Metro Nusantara (Marga Metro) yang merupakan pemegang konsesi Ruas Jalan Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) *Elevated* Cikunir-Ulujami. Sampai dengan saat ini Perseroan melalui JMEX sedang dalam tahap persiapan atas pembangunan Jalan Tol JORR *Elevated* Cikunir-Ulujami yang akan dibangun sepanjang kurang lebih 21,6 km. Melalui Marga Metro, Perseroan memiliki 85,00% saham dalam JMEX

Sektor Pengelolaan Air

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) merupakan perusahaan pengelola air dengan sahamnya telah diakuisisi oleh Potum sebesar 51% pada bulan Oktober 2012 melalui penandatanganan Perjanjian Pembelian Saham yang telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 11 April 2013. Kemudian, di tahun 2019, kepemilikan saham DCC oleh Potum telah ditingkatkan menjadi sebesar 74,52%.

MMN holds the concession for the 5.95-kilometer connecting toll road between Soekarno-Hatta Port in Makassar and A.P. Pettarani Road (Urip Sumoharjo Flyover), which is also linked to Section Four of the Toll Road. These two toll roads serve as the primary links between the region's cities.

The first phase of construction began at the end of Section II Toll Road, specifically at the intersection of Jl. Urip Sumoharjo, and continued through the intersections of Jl. Panakkukang Boulevard, Jl. Hertasning, and Jl. Sultan Alauddin. This toll lane is 2 x 2 with a width of 3.50 meters and has two on-off ramps located at Boulevard and Alauddin.

In 2020, the 4.3 km long A.P. Pettarani Elevated Toll Road project, implemented by MMN and the Regional Government, passed the Function Worthy Test (ULF) stage. The construction of the first elevated toll road in Makassar aims to reduce traffic congestion and support the realization of more optimal connectivity in Indonesia's Eastern Region, which will have an impact on accelerating aspects of economic growth in society more broadly.

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)¹⁾

In its business, PT Makassar Metro Network (MMN) has a subsidiary entity, namely PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), with MMN owning 99.42% shares of JTSE. JTSE holds the concession for the 11.57-kilometer Section IV Toll Road section in Makassar. The JTSE toll road section connects to the MMN toll road section from the Tallo Bridge to the Makassar Mandai Intersection and serves as an access point to Sultan Hasanuddin International Airport.

PT Jakarta Metro Ekspresway (JMEX)

PT Jakarta Metro Ekspresway (JMEX) is an subsidiaries of the Company through PT Marga Metro Nusantara (Marga Metro), which holds the concession for the Jakarta Outer Ring Road (JORR) *Elevated* Cikunir-Ulujami toll road section. As of now, the Company through JMEX is in the preparation stage for the construction of the JJORR *Elevated* Cikunir-Ulujami toll road, which will be built along approximately 21.6 km. Through Marga Metro, the Company holds 85.00% of the shares in JMEX.

Water Treatment Sector

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC)

PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) is a water management company whose shares were acquired by Potum by 51% in October 2012 through the signing of the Share Subscription Agreement which was approved by the Ministry of Law and Human Rights on April 11, 2013. Then, in 2019, Potum increased DCC's share ownership to 74.52%.

DCC memiliki hak eksklusif untuk pengolahan air dengan cakupan hingga termasuk membangun, mengoperasikan, dan mengelola Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM), Sumatera Utara, dengan berada di bawah pengawasan TBN. IPA memiliki sumber air baku yang berasal dari Sungai Deli, yang kemudian air bersihnya disalurkan IPA kepada 154 pabrik yang ada di Kawasan Industri Medan (KIM). Periode kontrak kerja sama adalah 20 tahun dan berada di bawah skema Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer/BOT*).

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) merupakan perusahaan yang berdiri pada 1997 dan telah diakuisisi oleh Perseroan melalui Potum pada Desember 2013 dengan kepemilikan saham sebesar 65%. SCTK merupakan sebuah perusahaan pemegang konsesi pengolahan dan distribusi air bersih yang berfokus pada pelayanan bagi pelanggan industri di area Serang, Banten. SCTK saat ini melakukan pendistribusian air bersih kepada sekitar 171 pabrik yang ada di Kawasan Industri Modern Cikande, Pancatama Industrial Estate dan pabrik-pabrik di luar kawasan industri di wilayah Serang Timur.

Sungai Ciujung yang berada di Serang Timur menjadi sumber air untuk *Water Treatment Plant* (WTP) SCTK. Dalam menjalankan usahanya, SCTK bekerja sama dengan PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang dalam bentuk konsesi penuh yang meliputi sistem penyediaan air minum hingga sambungan akhir ke pelanggan industri khusus di daerah pelayanan Serang Timur. Adanya dukungan dari Potum dan TBN diharapkan dapat menunjang pencapaian target oleh SCTK untuk meningkatkan kapasitas penyerapan hingga 375 liter/detik.

Sektor Energi Terbarukan

PT Inpol Meka Energi (IME)

PT Inpol Meka Energi (IME) merupakan perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung 2x7,5 MW yang berada di Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2013, Perseroan mengakuisisi saham IME sebesar 55% melalui entitas anak Perseroan, PT Energi Infranasantara (EI).

Pada tahun 2023, Perseroan melalui IE membeli saham PT Pembangunan Perumahan Energi (PPE) di IME, sehingga pada akhir tahun buku, kepemilikan Perseroan di EI menjadi 100,00%.

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) merupakan perusahaan *Independent Power Producer* (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang berada di Siantan, Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas 1x15 MW. RPSL telah beroperasi sejak *Commercial Operating Date* (COD) pada tanggal 23 April 2018 dan menjadi pembangkit listrik bertenaga biomassa pertama di Kalimantan Barat.

DCC has exclusive rights for water treatment up to and including the construction, operation, and management of a *Water Treatment Plant* (WTP) in the Medan Industrial Estate (KIM), North Sumatra, under the supervision of TBN. WTP has a raw water source coming from the Deli River, which it then distributes to 154 factories in the Medan Industrial Area (KIM). The cooperation contract has a 20-year term and is based on the *Build, Operate, and Transfer* (BOT) scheme.

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) was established in 1997 and was acquired by the Company through Potum in December 2013 for 65% shareholding. SCTK is a company that operates a clean water treatment and distribution concession in the Serang area of Banten, focusing on industrial customers. SCTK is currently distributing clean water to 171 factories in the Modern Cikande Industrial Area, Pancatama Industrial Estate and factories in the East Serang area outside the industrial area.

The SCTK *Water Treatment Plant* (WTP) gets its water from the Ciujung River in East Serang. SCTK collaborates with PDAM Tirta Albantani Serang Regency in the operation of its business through a full concession covering the drinking water supply system to the final connection to special industrial customers in the East Serang service area. The support from Potum and TBN is expected to support the target achievement by SCTK to increase absorption capacity to 375 liters/second.

Renewable Energy Sector

PT Inpol Meka Energi (IME)

PT Inpol Meka Energi (IME) is an *Independent Power Producer* (IPP) for the Lau Gunung 2x7.5 MW *Hydroelectric Power Plant* (HPP) in Tanah Pinem, Dairi Regency, North Sumatra Province. In 2013, the Company acquired 55% shares of IME through its subsidiary, PT Energi Infranasantara (EI).

In 2023, the Company through IE purchased PT Pembangunan Perumahan Energi's (PPE) shares in IME, so that at the end of the financial year, the Company's ownership in EI became 100.00%.

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) is an *Independent Power Producer* (IPP) company for a 1x15 MW *Biomass Power Plant* (BPP) in Siantan, Mempawah, West Kalimantan. RPSL, West Kalimantan's first biomass-powered power plant, has been in operation since its *Commercial Operating Date* (COD) on April 23, 2018.

Pada 16 Agustus 2018, melalui entitas anak usaha, PT Energi Infranasantara (EI), Perseroan melakukan akuisisi sebesar 79,99% saham milik RPSL.

On August 16, 2018, the Company acquired 79.99% of RPSL's shares through its subsidiary, PT Energi Infranasantara (EI).

ENTITAS ASOSIASI

ASSOCIATE ENTITIES

Nama Name	Tahun Penyertaan Year of Investment	Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Business Line	Status Operasi Operational Status
Melalui PT Margautama Nusantara ^{*)} Through PT Margautama Nusantara ^{*)}				
PT Jakarta Lingkar Barat satu	2010	35%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	2022	40%	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Beroperasi Operating

^{*)} Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Desember 2023 atas persetujuan penambahan modal oleh entitas terkendali Perseroan yakni, MUN, yang mengakibatkan kepemilikan Perseroan dalam MUN menjadi terdilusi dari semula 76,51% menjadi 43,39%, sehingga laporan keuangan MUN menjadi tidak lagi dikonsolidasikan oleh Perseroan. Based on the decision of the Company's EGMS dated December 19, 2023 on the approval of the capital increase by the Company's controlled entity, MUN, which resulted in the Company's ownership in MUN being diluted from 76.51% to 43.39%, so that MUN's financial statements are no longer consolidated by the Company.

Sektor Tol

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) merupakan entitas asosiasi dari PT Margautama Nusantara (MUN) yang menjalankan aktivitas usahanya melalui pengoperasian ruas jalan tol penghubung Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan Penjarangan (kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng) dengan jalur sepanjang 9,7 km. Pada 29 Agustus 2018, melalui MUN, Perseroan menambah kepemilikan saham pada JLB menjadi 35%. Karena posisinya yang terhubung langsung dengan 3 (tiga) jalan tol lain, yaitu jalan tol Jakarta Tangerang dan jalan tol JORR W-2 Utara di daerah Kebon Jeruk dan dengan jalan tol Bandara Soekarno Hatta (Prof. Sedyatmo) di Penjarangan, jalan tol ini memiliki lokasi yang sangat strategis.

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) merupakan entitas asosiasi dari PT Margautama Nusantara (MUN) yang menjalankan kegiatan usahanya melalui pengoperasian ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat dengan jalur sepanjang kurang lebih 38km. Pada 10 Oktober 2022, melalui MUN, Perseroan resmi memiliki 40% saham dalam JJC.

ALAMAT ENTITAS ANAK, ANAK TIDAK LANGSUNG, DAN ASOSIASI

Toll Sector

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) is a subsidiary of PT Margautama Nusantara (MUN) that conducts business by operating a 9.7-kilometer toll road connecting Kebon Jeruk, West Jakarta, and Penjarangan (Soekarno-Hatta International Airport area, Cengkareng). On August 29, 2018, the Company increased its share ownership in JLB to 35% through MUN. This toll road has a strategic location due to its position that is directly connected to three (three) other toll roads, namely the Jakarta Tangerang toll road, the JORR W-2 North toll road in the Kebon Jeruk area, and the Soekarno Hatta Airport (Prof. Sedyatmo) toll road in Penjarangan.

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) is an associated entity of PT Margautama Nusantara (MUN) that conducts business by operating the Jakarta-Cikampek II Elevated Toll Road section Cikunir to West Karawang with a 38 kilometer route. On October 10, 2022, the Company officially owned 40% of JJC shares through MUN.

ADDRESS OF SUBSIDIARIES, INDIRECT SUBSIDIARIES, AND ASSOCIATES

ENTITAS ANAK LANGSUNG

Direct Subsidiaries

Nama Perusahaan Company Name	Sektor Sector	Alamat Address
PT Margautama Nusantara ^{*)}	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Potum Mundi Infranasantara	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Portco Infranasantara	Pengusahaan Pelabuhan Port Management	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100

Nama Perusahaan Company Name	Sektor Sector	Alamat Address
PT Energi Infranasantara	Energi Terbarukan Renewable Energy	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Meta Media Infranasantara	Perdagangan, Periklanan, dan Pengelolaan Parkir Trading, Advertising, and Parking Management	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100
PT Metro Tekno Media Infranasantara	Perdagangan, Periklanan, dan Pengelolaan Parkir Trading, Advertising, and Parking Management	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9, Jakarta 12190 +62 21 515 0100

ENTITAS ANAK TIDAK LANGSUNG

Indirect Subsidiaries

Nama Perusahaan Company Name	Sektor Sector	Alamat Address
PT Bintaro Serpong Damai	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Intermark Associate Tower Lantai 16 Jl. Lingkar Timur, BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota +62 21 537 3015 Intermark Associate Tower 16 th Floor Jl. Lingkar Timur, BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota +62 21 537 3015
PT Makassar Metro Network	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Gedung Menara Bosowa Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman No. 5 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia +62 411 368 1035 Bosowa Tower Building, 4 th Floor Jl. Gen. Sudirman No. 5 Makassar, South Sulawesi, Indonesia +62 411 368 1035
PT Jalan Tol Seksi Empat	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Gedung Menara Bosowa Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman No. 5 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia +62 411 368 1035 Bosowa Tower Building, 4 th Floor Jl. Gen. Sudirman No. 5 Makassar, South Sulawesi, Indonesia +62 411 368 1035
PT Dain Celicani Cemerlang	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Komplek Perkantoran Permata Kebayoran Plaza Jl. Raya Kebayoran Lama, No. 225 Blok B10, Jakarta 12220, Indonesia +62 21 722 9045-46 Permata Kebayoran Plaza Office Complex Jl. Raya Kebayoran Lama, No. 225 Block B10, Jakarta 12220, Indonesia +62 21 722 9045-46
PT Sarana Catur Tirta Kelola	Pengolahan dan Distribusi Air Bersih Clean Water Treatment and Distribution	Jl. Yusuf Martadilaga No. 25 Serang, Banten, Indonesia +62 254 206813
PT Inpola Meka Energi	Energi Terbarukan Renewable Energy	Plaza PP Lantai 4 Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, Indonesia +62 21 8778 4135 PP Plaza 4 th Floor Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, East Jakarta 13760, Indonesia +62 21 8778 4135
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari	Energi Terbarukan Renewable Energy	Jl. Raya Wajok Hulu Km 7,5 RT 008/RW 001, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat +62 561 882013 Jl. Raya Wajok Hulu Km 7.5 RT 008/RW 001, Wajok Hulu Village, Siantan District, Mempawah Regency, West Kalimantan +62 561 882013

ENTITAS ASOSIASI

Associate Entities

Nama Perusahaan Company Name	Sektor Sector	Alamat Address
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260, Indonesia. +62 21 570 9091 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54, Petamburan, Tanah Abang, Central Jakarta 10260, Indonesia. +62 21 570 9091
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur Tol Taman Mini Indonesia Indah Plaza, Dukuh, Kramat Jati, East Jakarta

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young)

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Lt.7

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Periode Penugasan: 2023

Jasa yang Diberikan: Audit terhadap laporan keuangan

Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young)

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Period of Assignment: 2023

Services Provided: Audit on financial statements

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions and Professions

Nama Name	Jenis Lembaga Type of Institution	Alamat Address
Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham Information on Share Trading and Listing	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 4 Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 4 th Floor
PT Adimitra Jasa Korpora	Biro Administrasi Efek Share Registrar	Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 13250, Indonesia Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III, Block F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 13250, Indonesia
Investor Relation	Informasi Investor Investor Information	Equity Tower 38 th Floor, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9 Jakarta 12190, Indonesia



04



Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Kenaikan pendapatan (di luar pendapatan konstruksi) Perseroan berdasarkan segmen usaha, yang terbesar berasal dari segmen pengelolaan jalan tol, yaitu mencapai 10,02%.

The largest increase in the Company's revenues (exclude construction income) by business segment came from the toll road management segment, which reached 10.02%.

Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha

Business Segment Overview

Hingga akhir tahun buku 2023, segmen usaha Perseroan terbagi menjadi 4 (empat) sektor utama: pengelolaan jalan tol, pengelolaan air, energi terbarukan, serta periklanan dan pengelolaan parkir.

Perseroan menanamkan investasi pada entitas anak maupun asosiasi yang menjalankan kegiatan usaha pada 4 (empat) segmen bisnis tersebut. Tujuan utama dari kegiatan usaha adalah dalam rangka mencapai visi Perseroan: "Menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur." Selain itu, untuk mewujudkan misi: "Memenuhi kebutuhan infrastruktur dengan standar tertinggi untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan."

STRATEGI USAHA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Perseroan telah memantapkan *platform* dalam bisnis infrastruktur jalan tol, yang menjadi bisnis utama (*core business*) Perseroan. Saat ini, kegiatan usaha tersebut mendapatkan dukungan dari dua investor terkemuka yaitu: PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), dan GIC Ventures (GIC), melalui Warrington Investment Pte. Ltd (WIPL) sebagai pemegang saham baru PT Margautama Nusantara (MUN).

Kedua investor ini telah berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan lini bisnis Perseroan di bidang jalan tol. Saat ini Perseroan memiliki lima ruas jalan tol melalui MUN, dan satu ruas jalan tol yang saat ini dalam tahap persiapan pembangunan.

Perseroan menyadari bahwa untuk mendukung ekspansi dalam sektor pengelolaan jalan tol membutuhkan investasi yang besar serta jangka waktu yang panjang. Memahami kondisi tersebut, manajemen Perseroan telah menyiapkan beragam skema untuk dapat mengidentifikasi tantangan serta merealisasikan solusi, baik akuisisi, inisiasi proyek, termasuk peningkatan modal.

Selain jalan tol, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan lini bisnis yang telah dijalani selama ini, antara lain pengelolaan air maupun pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Di sektor EBT, Perseroan akan fokus ke pembangkit hidro tanpa menutup kemungkinan merealisasikan peluang lain yang tersedia. Melalui pengembangan EBT tersebut, Perseroan berharap dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup serta pencapaian nasional di bidang penurunan emisi karbon.

Until the end of the fiscal year 2023, the business segment of the Company was divided into 4 (four) main sectors: toll road management, water management, renewable energy, and advertising and parking management.

The Company has invested in subsidiary entities as well as associations engaged in business activities in these 4 (four) business segments. The primary objective of these business activities is to achieve the Company's vision: "To become a leading Indonesian company in the field of investment and infrastructure development." Furthermore, to fulfill the mission: "Meeting infrastructure needs with the highest standards to improve quality of life and create the best value for all stakeholders."

BUSINESS STRATEGY IN 2023

In 2023, the Company has established the platform in the toll road infrastructure business, which is the Company's core business. Currently, this business activity acquire support from 2 leading investors, PT Metro Pacific Tollways Indonesia Service (MPTIS) and GIC Ventures (GIC), through Warrington Investment Pte. Ltd. (WIPL), as the new shareholder of PT Margautama Nusantara (MUN).

The two investors have committed to collectively developing the Company's business line in the toll road sector. Currently, the Company has 5 (five) toll road sections through MUN and 1 (one) other toll road section currently in the construction preparation stage.

The Company realizes that supporting expansion in the toll road management sector requires large investments and a long period of time. Understanding these conditions, the Company's management has prepared various schemes to identify challenges and realize solutions, including acquisitions, project initiation, including increasing capital.

In addition to toll roads, the Company planned to develop the business lines it has been running so far, including water management and new and renewable energy (NRE) based power plants. In the NRE sector, the Company will focus on hydro plants without disregarding other possibilities for realizing other available opportunities. Through NRE development, the Company hopes to contribute to environmental preservation and national achievements in the field of reducing carbon emissions.

Strategi usaha yang dijalankan oleh Perseroan pada tahun 2023 tersebut, selaras dengan 7 (tujuh) pilar strategi Perseroan. Terutama terkait dengan pilar 2: stabilitas keuangan, serta pilar 3: penguatan bisnis inti.

SEGMENT USAHA PENGELOLAAN JALAN TOL

Kegiatan usaha Perseroan di bidang pengelolaan jalan tol dijalankan oleh PT Margautama Nusantara (MUN) yang saat ini merupakan entitas asosiasi dari Perseroan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2007 dengan fokus bisnis pada bidang pengelolaan jalan tol. Pada tahun 2013, Perseroan mengakuisisi saham MUN dengan kepemilikan saham 77%.

MUN memiliki 2 (dua) entitas anak yang bergerak di sektor yang sama, yakni PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dan PT Makassar Metro Network (MMN), serta 1 (satu) entitas anak tidak langsung, yakni PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). MUN juga memiliki entitas asosiasi, yakni PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) dan Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC).

Saat ini, BSD memiliki konsesi jalan tol sepanjang 7,25 kilometer (km) yang terbentang antara Serpong dan Pondok Aren. Keduanya berlokasi di Tangerang Selatan, Banten.

MMN yang saat didirikan bernama PT Bosowa Marga Nusantara dan berubah menjadi PT Makassar Metro Network (MMN) pada tahun 2020, memiliki konsesi jalan sepanjang 10,08 km. Konsesi tersebut adalah tol penghubung antara Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar (Seksi 1 dan 2) dengan Jalan A.P. Pettarani (Seksi 3) yang terhubung dengan Jalan Tol Seksi Empat (JTSE).

JTSE merupakan perusahaan yang memegang konsesi ruas jalan tol seksi IV di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memiliki jalur hingga mencapai 11,57 km. Ruas tersebut terhubung dengan ruas jalan tol yang dikelola dan dioperasikan oleh MMN, mulai dari Jembatan Tallo sampai dengan Simpang Mandai Makassar. Ruas tol ini juga menjadi jalur akses menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.

Selanjutnya JLB yang merupakan entitas asosiasi. Perusahaan ini mengoperasikan ruas jalan tol penghubung dengan panjang 9,7 km antara Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan Penjarangan (kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng). Entitas asosiasi lainnya yaitu PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), JJC memegang konsesi Jalan Tol Jakarta-Cikampek *Elevated II*, yang merupakan tol penuh sepanjang 38 km. Tol ini merupakan bagian dari jaringan Tol Trans-Jawa.

Setelah aksi korporasi berupa peningkatan modal yang dilakukan oleh MUN di akhir tahun 2023, kepemilikan Perseroan pada MUN terdilusi menjadi sebesar 43,39%. Hal ini dikarenakan Perseroan tidak ikut penyertaan modal langsung pada MUN.

The business strategy implemented by the Company in 2023 is in line with the 7 (seven) pillars of the Company's strategy. Especially related to pillar 2: financial stability, as well as pillar 3: strengthening core business.

BUSINESS SEGMENT TOLL ROAD MANAGEMENT

The Company's business activities in toll road management are conducted by PT Margautama Nusantara (MUN), which is currently the Company's associated entity. This company was established in 2007 with a business focus on toll road management. In 2013, the Company acquired shares in MUN, owning 77% of the shares.

MUN has 2 (two) subsidiary entities operating in the same sector, namely PT Bintaro Serpong Damai (BSD) and PT Makassar Metro Network (MMN), as well as 1 (one) indirect subsidiary, namely PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE). MUN also has an associated entity, PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) and Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC).

Currently, BSD holds a toll road concession spanning 7.25 kilometers (km) between Serpong and Pondok Aren, both located in South Tangerang, Banten.

MMN, originally named PT Bosowa Marga Nusantara (BMN), and was renamed as PT Makassar Metro Network (MMN) in 2020, holds a 10.08 km toll road concession. This concession is the connecting toll road between Soekarno-Hatta Port, Makassar (Sections 1 and 2) and A.P. Pettarani Road (Section 3), which is connected to Jalan Tol Seksi Empat (JTSE).

JTSE is the company holding the concession for toll road section IV in Makassar, South Sulawesi, with a length of up to 11.57 km. This section is connected to the toll road section managed and operated by MMN, from Tallo Bridge to Simpang Mandai Makassar. This toll road section also serves as an access route to Sultan Hasanuddin International Airport, Makassar.

Next is JLB, an associated entity. This company operates a toll road section with a length of 9.7 km between Kebon Jeruk, West Jakarta, and Penjarangan (Soekarno-Hatta International Airport area, Cengkareng). Another associated entity is PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), JJC holds the concession for the Jakarta-Cikampek Elevated II Toll Road, which is a full toll road spanning 38 km. This toll road is part of the Trans-Java toll network.

After a corporate action in the form of increasing capital carried out by MUN at the end of 2023, the Company's ownership in MUN was diluted to 43.39%. This is because the Company does not participate in direct capital participation in MUN.

Kegiatan Operasional Tahun 2023

Pada tahun 2023, Perseroan melalui anak usahanya yaitu PT Marga Metro Nusantara (MMN) menggarap Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated dari Cikunir ke Ulujami. Proyek tersebut dikerjakan bersama PT Acset Indonusa Tbk dan PT Adhi Karya Tbk.

Kinerja Usaha Tahun 2023

Pada tahun 2023, rata-rata kendaraan yang melintasi jalan tol kelolaan MUN mencapai 204.892 unit per hari, tumbuh 9,24% dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 187.557 unit. Seluruh ruas mengalami kenaikan volume lalu lintas dengan kenaikan tertinggi terjadi pada ruas BSD, yang mencapai 14,94%.

Penambahan volume kendaraan yang melintasi ruas tol di bawah kelolaan MUN ini, terutama karena telah berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat.

VOLUME LALU LINTAS HARIAN

Daily Traffic Volume

(Unit Kendaraan Per Hari)
(Vehicles per day)

Uraian Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth
BSD	111.680	97.163	14,94%
MMN	53.535	52.505	1,96%
JTSE	39.677	37.889	4,74%
Jumlah Total	204.892	187.557	9,24%

Prospek Usaha

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan yang solid di atas 5,0% (yoy) pada tahun 2024 mendatang, ditopang oleh konsumsi domestik yang tinggi dan belanja pemerintah yang cukup besar seiring dengan berlangsungnya konstelasi pemilu Presiden Indonesia. Dengan berkembangnya asumsi dan optimisme bahwa fundamental ekonomi nasional akan terus berada di jalur pertumbuhan yang kuat dan diikuti dengan kebangkitan aktivitas manufaktur serta kinerja bisnis dari sektor industri lainnya, maka kinerja industri jalan tol pun diharapkan dapat menunjukkan perkembangan yang selaras. Meningkatnya geliat bisnis dan ramainya mobilitas masyarakat diyakini akan memberikan dampak positif berupa peningkatan volume kendaraan yang melintas di semua ruas jalan tol di Indonesia.

Dari segi operasional jalan tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa total panjang jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.816 km pada akhir 2023. Jumlah itu terbagi di Pulau Jawa 1.782,47 km, Pulau Sumatera 865,43 km, Pulau Kalimantan 97,27 km, Pulau Sulawesi 61,64 km, dan Pulau Bali 10,07 km. Keseluruhan Jalan Tol yang telah beroperasi di Indonesia tersebut dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di 73 ruas Jalan Tol yang di dalamnya terdapat 132 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP).

Operational Activities in 2023

In 2023, the Company, through its subsidiary, PT Marga Metro Nusantara (MMN), constructed the Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Toll Road from Cikunir to Ulujami. This project was carried out collaboratively with PT Acset Indonusa Tbk and PT Adhi Karya Tbk.

Business Performance in 2023

The toll road under MUN's management reached 204,892 units per day, growing by 9.24% compared to 187,557 units in 2022. All sections experienced an increase in traffic volume with the highest increase occurring on the BSD section, which reached 14.94%.

The increase in the volume of vehicles crossing the toll road under MUN's management is mainly due to the end of the restrictions on community social activities.

Business Prospect

The Indonesian economy is projected to continue its solid growth above 5.0% (yoy) in the upcoming year of 2024, supported by high domestic consumption and substantial government spending, coinciding with the Indonesian presidential election. With the assumption and optimism that the national economic fundamentals will remain on a strong growth trajectory, coupled with the revival of manufacturing activities and business performance in other industrial sectors, it is expected that the performance of the toll road industry will also show synchronized development. The increasing business activities and bustling societal mobility are believed to have a positive impact, leading to an increase in vehicle volumes across all toll roads in Indonesia.

In terms of toll road operations, the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) reports that the total length of toll roads in Indonesia reached 2,816 km by the end of 2023. This length is distributed across Java Island with 1,782.47 km, Sumatra Island with 865.43 km, Kalimantan Island with 97.27 km, Sulawesi Island with 61.64 km, and Bali Island with 10.07 km. The entirety of toll roads operational in Indonesia is managed by 59 Toll Road Business Entities (BUJTs) across 73 toll road sections, encompassing 132 Rest Areas and Services (TIPs).

Dalam rangka memperlancar konektivitas logistik, industri, hingga mobilitas masyarakat di berbagai wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur jalan tol pada 2024 mendatang. Hal ini mengingat kebutuhan terhadap pembangunan jalan tol sangat besar di Indonesia terutama dalam meningkatkan konektivitas antar-wilayah dan berkontribusi dalam mengurangi kemacetan pada ruas jalan utama.

Untuk tahun 2024, BPJT berencana melakukan lelang atas tiga ruas jalan tol dengan perkiraan biaya investasi sebesar Rp71,77 triliun, antara lain, Bogor-Serpong (via Parung) dengan perkiraan biaya investasi Rp11,79 triliun, Gedebage - Tasikmalaya - Ciamis (Getaci) dengan perkiraan biaya investasi Rp 37,14 triliun dan Gilimanuk - Mengwi dengan perkiraan biaya investasi Rp 22,84 triliun. Sementara terkait rencana pembangunan jalan tol baru, Kementerian PUPR menargetkan akan membangun 1000 km jalan tol baru sehingga proyeksi total panjang pengoperasian jalan tol baru hingga 2024 akan mencapai 1.405,6 km.

Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan potensi bisnis yang terbuka lebar di industri jalan tol terutama dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah terhadap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur jalan tol, maka Perseroan optimis akan memiliki ruang pertumbuhan yang lebih baik di 2024. Dalam memanfaatkan momentum tersebut, Perseroan telah memasang target-target operasional bisnis yang realistis dengan memperhatikan kapasitas dan sumber daya internal, dukungan permodalan dari pemegang saham serta tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian agar seluruh aktivitas investasi Perseroan senantiasa berada pada *risk appetite* yang sudah ditetapkan.

SEGMENT USAHA PENGELOLAAN AIR

Aktivitas usaha Perseroan di bidang pengelolaan air bersih dijalankan oleh entitas anak, yakni PT Potum Mundi Infranasantara (Potum) yang telah berdiri sejak tahun 2011. Perseroan memiliki saham sebesar 99,99% pada Potum.

Pada tahun 2012, Potum mengakuisisi saham PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) dengan kepemilikan 51,00%, kemudian pada tahun 2018 kepemilikan sahamnya meningkat menjadi 100,00%. Di tahun yang sama, Potum juga mengakuisisi 51,00% saham PT Dain Celicani Cemerlang (DCC), perusahaan yang memiliki kontrak pengelolaan air bersih di Medan, Sumatra Utara. Kepemilikannya ditingkatkan menjadi 74,52% pada tahun 2019.

In order to facilitate logistics connectivity, industrial development, and societal mobility in various regions, the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) has reaffirmed its commitment to continue toll road infrastructure development projects in 2024. This is due to the significant need for toll road development in Indonesia, especially in improving inter-regional connectivity and contributing to the reduction of congestion on main road sections.

For the year 2024, BPJT (the toll road regulatory agency) plan on auctions for three toll road sections with an estimated investment cost of Rp71.77 trillion, including Bogor-Serpong (via Parung) with an estimated investment cost of Rp11.79 trillion, Gedebage - Tasikmalaya - Ciamis (Getaci) with an estimated investment cost of Rp37.14 trillion, and Gilimanuk - Mengwi with an estimated investment cost of Rp22.84 trillion. Regarding the plan for new toll road construction, the Ministry of PUPR targets to build 1000 km of new toll roads, thus projecting the total operational length of new toll roads by 2024 to reach 1,405.6 km.

Considering the various business opportunities and potentials available in the toll road industry, especially with full support from the government for toll road infrastructure projects, the Company is optimistic about having better growth opportunities in 2024. In utilizing this momentum, the Company has set realistic operational targets while considering internal capacity and resources, shareholder capital support, and adhering to the principle of prudence to ensure that all company investment activities are within the predetermined risk appetite.

BUSINESS SEGMENT WATER MANAGEMENT

The Company's business activities in the clean water management are carried out by its subsidiary, PT Potum Mundi Infranasantara (Potum), which was established in 2011. The Company owns 99.99% of the shares in Potum.

In 2012, Potum acquired shares of PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) with a 51.00% ownership, then in 2018, its share ownership increased to 100.00%. In the same year, Potum also acquired 51.00% of PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) shares, a company with a clean water management contract in Medan, North Sumatra. Its ownership was increased to 74.52% in 2019.

Selanjutnya, pada tahun 2013, Potum mengakuisisi saham PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) sebesar 65,00%. Perusahaan ini fokus pada pengolahan dan pendistribusian air bersih di Kabupaten Serang, Banten.

Pada tahun 2023, Perseroan, melalui Potum menjual sahamnya di PT Tirta Bangun Nusantara (TBN). Jumlah saham dilepas kepada Bahtera Hijau Mandiri sebanyak 26.957.000 saham atau yang mewakili 99,998% kepemilikan Potum di TBN. Kemudian, Potum menjual 547 atau setara dengan 0,002% di TBN kepada Bahtera Utama Sentosa. Dari 2 (dua) transaksi itu, Potum menerima pembayaran Rp55 miliar.

Kegiatan Operasional Tahun 2023

Pada tahun 2023, DCC telah menyelesaikan pembangunan *Water Treatment Plan* (WTP) Fase 2 dengan kapasitas 100 liter per *second* (lps). Dengan demikian, total kapasitas pasokan air bersih DCC pada tahun buku menjadi 200 lps.

Selain itu, Pada Oktober 2023, DCC juga melakukan peningkatan penyerapan distribusi *bulk-water-supply* dengan skema *take or pay* oleh *off-taker*. Jika pada awalnya 65,00 lps atau setara dengan 160.000 m³ per bulan, kemudian menjadi 154,00 lps atau setara dengan 400.000 m³ per bulan.

Kinerja Usaha Tahun 2023

Pada tahun 2023, total pendapatan Perseroan dari segmen usaha penyediaan air bersih mencapai Rp90,43 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp75,84 miliar, peningkatan 19,24%. Kontributor utama pendapatan Potum tahun 2023 berasal dari SCTK, yaitu dengan porsi 53,85% dari total pendapatan.

Prospek Usaha

Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan lini bisnis penyediaan air bersih. Prospek usaha di bidang penyediaan air bersih pada tahun 2024 akan didukung oleh sejumlah aktivitas usaha Potum, yang saat ini dalam proses.

Selain penambahan kapasitas, Perseroan akan terus meningkatkan aktivitas pemasaran dan penjualan. Sedangkan untuk mendukung kinerja keuangan, Potum akan melakukan efisiensi di bidang operasional. Inisiatif tersebut akan direalisasikan melalui optimalisasi pemanfaatan bahan kimia dan listrik.

Upaya efisiensi juga dilakukan oleh penggunaan aplikasi digital Aguadigi. Aplikasi tersebut akan diterapkan secara efektif di proyek-proyek SPAM Potum.

Furthermore, in 2013, Potum acquired 65.00% of PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) shares. This company focuses on the processing and distribution of clean water in Serang Regency, Banten.

In 2023, the Company, through Potum sold its shares in PT Tirta Bangun Nusantara (TBN). The number of shares released to Bahtera Hijau Mandiri amounted to 26,957,000 shares or representing 99.998% of Potum's ownership in TBN. Then, Potum sold 547 or equivalent to 0.002% in TBN to Bahtera Utama Sentosa. From the 2 (two) transactions, Potum received a payment of IDR 55 billion.

Operational Activities in 2023

DCC completed Phase 2 of the Water Treatment Plan (WTP) in 2023, with a capacity of 100 liters per second (lps). Hence, DCC's total clean water supply capacity during the fiscal year was 200 lps.

Apart from that, in October 2023, DCC increased the absorption of bulk-water-supply distribution through a take or pay scheme by off-takers. If it was initially 65.00 lps, or the equivalent of 160,000 m³ per month, it increased to 154.00 lps, or the equivalent of 400,000 m³/month.

Business Performance in 2023

In 2023, the Company's total revenue from the water supply business segment reached Rp90.43 billion. Compared to 2022 which amounted to Rp75.84 billion, there was an increase of 19.24%. The main contributor to Potum's revenue in 2023 came from SCTK, which accounted for 53.85% of total revenue.

Business Prospects

The Company continues to work on expanding its clean water supply business line. Business prospects in the sector of clean water supply in 2024 will be supported by a number of Potum business activities that are currently in process.

Apart from expanding capacity, the company will continue to increase marketing and sales activities. Meanwhile, to support financial performance, Potum will implement operational efficiency measures. This initiative will be implemented by optimizing the use of chemicals and electricity.

Efficiency is also conducted by using the Aguadigi digital application. The application will be implemented effectively in SPAM Potum projects.

SEGMENT USAHA ENERGI TERBARUKAN

Aktivitas usaha Perseroan di bidang energi terbarukan dijalankan oleh PT Energi Infranasantara (EI) yang didirikan pada tahun 2012. Fokus utama EI pada pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), salah satu program penting yang dicanangkan pemerintah. Kepemilikan saham Perseroan di EI mencapai 99,99%.

Pada tahun 2013, EI melakukan akuisisi saham PT Inpol Meka Energi (IME) dengan kepemilikan saham sebesar 61,23%. IME merupakan perusahaan Independent Power Producer (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Lau Gunung yang berlokasi di Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. PLTA dengan kapasitas 2x7,5 MW telah selesai dibangun dan sudah mulai beroperasi (Commercial Operating Date/COD) sejak 16 Desember 2020.

Kemudian pada tahun 2018, EI mengakuisisi PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestara (RPSL), perusahaan Independent Power Producer (IPP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Siantan, Mempawah, Kalimantan Barat sebesar 80%. PLTBm ini telah beroperasi (Commercial Operating Date/COD) sejak 23 April 2018.

Kegiatan Operasional Tahun 2023

Pada tahun 2023, IME berhasil menyediakan 81.728.382 kilowatt-hour (kWh) atau setara dengan 9,33 AHMW (*Average Hourly Mega-Watt*). Jumlah energi tersebut tumbuh 4% dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan jumlah yang disediakan oleh RPSL mencapai 109.178.809 kWh atau setara dengan 12,32 AHMW. Jumlah energi tersebut lebih tinggi 18% dibanding tahun sebelumnya.

Kinerja Usaha Tahun 2023

Total pendapatan dari segmen usaha energi terbarukan pada tahun 2023 sebesar Rp194,80 miliar, naik 13,74% dibandingkan tahun 2022 yang Rp171,26 miliar. Kontributor utama pendapatan tahun 2023 berasal dari RPSL, yaitu dengan porsi 71,87% dari total pendapatan.

Prospek Usaha

Potensi lini usaha di bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) akan terus berkembang di masa depan, seiring dengan kebijakan pemerintah yang fokus pengembangan EBT untuk mencapai target “nol emisi karbon” pada tahun 2060. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk terus menambah kapasitas pembangkit EBT.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030, PT PLN (Persero) menargetkan kontribusi EBT yang saat ini berada di 13% menjadi 23% di tahun 2025. Skenario perkembangan ini merupakan peluang bagi Perseroan yang telah menjalankan bisnis di sektor EBT.

BUSINESS SEGMENT: RENEWABLE ENERGY

The Company's business activities in the renewable energy sector are carried out by PT Energi Infranasantara (EI), established in 2012. EI's primary focus is on the development of Renewable Energy (EBT), one of the government's important programs. The Company's ownership stake in EI reaches 99.99%.

In 2013, EI acquired shares of PT Inpol Meka Energi (IME) with a 61.23% ownership. IME is an Independent Power Producer (IPP) company for the Lau Gunung Hydroelectric Power Plant (PLTA) located in Tanah Pinem, Dairi Regency, North Sumatra Province. The 2x7.5 MW capacity PLTA has been completed and has been in operation (Commercial Operating Date/COD) since December 16, 2020.

Then in 2018, EI acquired PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestara (RPSL), an Independent Power Producer (IPP) company for the Siantan Biomass Power Plant (PLTBm) in Siantan, Mempawah, West Kalimantan, by 80%. This PLTBm has been in operation (Commercial Operating Date/COD) since April 23, 2018.

Operational Activities in 2023

In 2023, IME provided 81,728,382 kilowatthours (kWh), which was equivalent to 9.33 AHMW (*Average Hourly Mega-Watt*). The amount of energy increased by 4% over the previous year.

Meanwhile, RPSL provided 109,178,809 kWh, the equivalent of 12.32 AHMW. This amount of energy was 18% higher than the previous year.

Business Performance in 2023

Total revenue from the renewable energy business segment in 2023 amounted to Rp194.80 billion, up 13.74% compared to Rp171.26 billion in 2022. The main contributor to revenue in 2023 came from RPSL, which accounted for 71.87% of total revenue.

Business Prospects

The potential for business lines in the field of New and Renewable Energy (EBT) will continue to grow in the future, in line with government policy that focuses on developing EBT to achieve the “zero carbon emissions” target of 2060. Therefore, the government is working on increasing the capacity of EBT generators.

In the RUPTL (Electricity Supply Business Plan) for 2021–2030, PT PLN (Persero) aims to increase NRE's contribution from 13% to 23% by 2025. This development scenario gives an opportunity for companies that already carry out businesses in the EBT sector.

SEGMENT USAHA PERIKLAMAN DAN PENGELOLAAN PARKIR

Kegiatan usaha Perseroan di bidang periklanan dan pengelolaan parkir dijalankan oleh PT Meta Media Infranasantara (MMI), yang sebelumnya bernama PT Telekom Infranasantara, entitas anak yang bergerak di bidang perdagangan, periklanan, dan pengelolaan parkir. Fokus bisnis MMI adalah pengembangan usaha di sekitar koridor ruas jalan tol, seperti iklan luar ruang (*billboard*) dan utilitas (*fiber optic*) di bawah ruas tol kelolaan PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Makassar Metro Network (MMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE).

Saat ini, kepemilikan saham Perseroan di MMI sebesar 99,99%. MMI mulai mengembangkan bisnis seperti sistem parkir dengan nama OTTO Parking, iklan luar ruang yang berada di luar tol kelompok usaha Perseroan, serta kawasan di sekitar jalan tol seperti *rest area & Transit Oriented Development* (TOD).

Kegiatan Operasional Tahun 2023

Kegiatan pemasaran dan *branding* MMI untuk bisnis OTTO Parking telah berlangsung sejak awal tahun. Pada bulan Juni, OTTO Parking berhasil memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk mengembangkan QRIS *Payment*.

Selanjutnya, pada bulan Oktober, OTTO Parking meraih sertifikasi penggunaan merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pada bulan yang sama, OTTO Parking juga ditunjuk sebagai pengelola parkir di Tallasa City Makassar, yang menjadi *pilot project*.

Untuk kegiatan iklan luar ruang dalam kelompok usaha Perseroan, MMI melakukan penambahan konstruksi pilar *advertising* sejumlah 6 (enam) *neon box* di Makassar. Inisiatif ini menjadi langkah awal pengembangan. Ke depan, Perseroan berencana membangun sekitar 50 pilar di bawah jalan tol Pettarani.

Untuk kegiatan lainnya, MMI telah melakukan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada bulan Mei 2023. MMI akan menjadi mitra strategis yang mendukung KONI menyebarkan informasi dan kegiatan-kegiatan olahraga di Indonesia. Selain itu, untuk kegiatan iklan luar ruang, MMI berkolaborasi dengan PT Data Indo Media (DIM) untuk iklan luar ruang dalam bentuk digital seperti *LED/Videotron* dan LCD yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

ADVERTISING AND PARKING MANAGEMENT BUSINESS SEGMENT

The Company's business activities in the field of advertising and parking management are carried out by PT Meta Media Infranasantara (MMI), formerly known as PT Telekom Infranasantara, which is the Company's subsidiary that operates in the trading sector, advertising, and parking management. MMI's primary business focus is toll road corridor development, including outdoor advertising (*billboards*) and utilities (*fiber optics*) under toll roads managed by PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Makassar Metro Network (MMN), and PT Jalan Tol Section Four (JTSE).

Currently, the Company owns 99.99% of MMI's shares. MMI began developing businesses such as OTTO Parking, outdoor advertising located outside the Company's business group, toll roads, rest areas, and Transit-Oriented Development (TOD).

Operational Activities in 2023

MMI's marketing and branding activities for the OTTO Parking business have been ongoing since the beginning of the year. In June, OTTO Parking obtained approval from Bank Indonesia to develop QRIS *Payment*.

Furthermore, in October, OTTO Parking obtained certification for brand use from the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) or Intellectual Property Rights (HAKI). In the same month, OTTO Parking was also appointed as parking manager at Tallasa City Makassar, which became a pilot project.

MMI has also built advertising pillars totaling 6 (six) neon boxes in Makassar for outdoor advertising activities within the Company's business group. This initiative represents the first step towards development. In the future, the company plans to build approximately 50 pillars under the Pettarani toll road.

In May 2023, MMI signed a *Memorandum of Understanding* (MOU) with the Indonesian National Sports Committee (KONI) to pursue other activities. MMI will be a strategic partner for KONI in spreading information and sports activities throughout Indonesia. In addition, MMI collaborates with PT Data Indo Media (DIM) for outdoor advertising in digital formats such as LED, Videotron, and LCD across several cities in Indonesia.

Kinerja Usaha Tahun 2023

Total pendapatan dari segmen usaha Periklanan dan Pengelolaan Parkir pada tahun 2023 sebesar Rp2,65 miliar. Kontributor utama pendapatan tahun 2023 berasal dari iklan luar ruang (*billboard*).

Prospek Usaha

Dalam segmen bisnis parkir, MMI akan fokus pada pengembangan titik pengelolaan OTTO Parking di wilayah Sulawesi dan Jawa. Kami berencana untuk meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas parkir OTTO Parking di kawasan-kawasan tersebut. Selain itu, kami juga akan terus mengembangkan sistem pembayaran melalui QRIS Payment.

Sementara itu, di segmen rest area & TOD, MMI sedang dalam perencanaan untuk pengembangan ulang kawasan *rest area* & TOD yang terletak di jalan tol PT Bintaro Serpong Damai (BSD). MMI akan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada dan menambahkan berbagai layanan yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna *rest area*.

Adapun terkait iklan luar ruang (*Billboard*) dan utilitas (fiber optik) yang berada di bawah MUN, MMI akan memaksimalkan pengelolaan dan pemasaran pada titik-titik strategisnya. MMI akan terus meningkatkan jumlah dan kualitas pilar *advertising* di jalan tol MUN dan melakukan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian pengiklan.

Selain itu, untuk iklan luar ruang (*Billboard*) yang berada di luar jaringan tol MUN, MMI akan memperluas cakupan bisnisnya dengan melakukan konstruksi baru di lokasi-lokasi strategis atau berkolaborasi dengan agensi lainnya. Kami akan terus mencari peluang untuk mengembangkan portofolio iklan kami di luar jaringan tol dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas iklan.

PROFITABILITAS PER SEGMENT USAHA

Pendapatan Per Segmen Usaha di luar Pendapatan Konstruksi

Pada tahun 2023, total pendapatan Perseroan diluar pendapatan konstruksi secara konsolidasi mencapai Rp917,62 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp824,03 miliar, terjadi kenaikan 11,35%.

Kenaikan terbesar berasal dari segmen pengelolaan jalan tol, yaitu mencapai Rp58,88 miliar.

Business Performance in 2023

Total revenue from the Advertising and Parking Management segment in 2023 amounted to Rp2,65 billion. The main contributor to revenue in 2023 comes from outdoor advertising (*billboards*).

Business Prospects

In the parking business segment, MMI will focus on developing OTTO Parking management points in Sulawesi and Java regions. We plan to increase the number and quality of OTTO Parking facilities in these areas. Additionally, we will continue to develop payment systems through QRIS Payment.

Meanwhile, in the rest area & TOD segment, MMI is planning for the redevelopment of rest area & TOD areas located on the toll road of PT Bintaro Serpong Damai (BSD). MMI will update existing facilities and add various services to enhance user comfort and satisfaction at the rest area.

Regarding outdoor advertising (*Billboards*) and utilities (fiber optics) under the MUN, MMI will maximize management and marketing at strategic points. MMI will continue to increase the number and quality of advertising pillars on the MUN toll roads and implement effective marketing strategies to attract advertisers.

Furthermore, for outdoor advertising (*Billboards*) outside the MUN toll network, MMI will expand its business coverage by constructing new structures in strategic locations or collaborating with other agencies. We will continue to seek opportunities to develop our advertising portfolio outside the toll network and utilize digital technology to enhance advertising effectiveness.

PROFITABILITY BY BUSINESS SEGMENT

Revenue by Business Segment Excluding Construction Revenue

In 2023, the Company's total revenue excluding construction revenue on a consolidated basis will reach Rp917.62 billion. Compared to 2022 which amounted to Rp824.03 billion, there is an increase of 11.35%.

The largest increase came from the toll road management segment, which reached Rp58.88 billion.

KINERJA PENDAPATAN PER SEGMENT USAHA

Revenue by Business Segment

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2023	2022	2021	YoY 2022-2023 (%)
Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	646.061	587.179	610.731	10,02
Pengelolaan Air Water Management	74.480	65.587	78.434	13,56
Energi Terbarukan Renewable Energy	194.799	171.265	155.622	13,74
Periklanan dan Pengelolaan Parkir Advertising and Parking Management	2.652	-	-	100,00
Pendapatan Konsolidasian di luar Pendapatan Konstruksi Consolidated Income excluding Construction Income	917.625	824.031	844.790	11,35

Segmen usaha yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan pada tahun 2023 adalah pengelolaan jalan tol yang mencapai Rp646,06 miliar atau 70,40% terhadap total pendapatan.

The business segment that contributes to the Company's consolidated revenue in 2023 is toll road management which reached IDR 646.06 billion or 70.40% of total revenue.

Selanjutnya, segmen energi terbarukan dengan pendapatan sebesar Rp194,80 miliar. Kontribusinya terhadap total pendapatan sebesar 11,55%.

Furthermore, the renewable energy segment with revenue of Rp194.80 billion. Its contribution to total revenue amounted to 11.55%.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan per Segmen Usaha

Perseroan membukukan rugi tahun berjalan secara konsolidasi pada tahun 2023 mencapai Rp235,87 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang meraih laba sebesar Rp122,47 miliar, terjadi penurunan 292,60%.

Profit (Loss) for the Current Year by Business Segment

The company posted a consolidated loss for the year in 2023 of Rp235.87 billion. Compared to 2022 which achieved a profit of Rp122.47 billion, there was a 292.60% decrease.

KINERJA LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Profit for the Year by Business Segment

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2023	2022	2021	YoY 2022-2023 (%)
Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	(261.188)	139.684	63.808	(287,19)
Pengelolaan Air Water Management	2.391	292	815	(49,32)
Energi Terbarukan Renewable Energy	11.720	16.270	(5.653)	65,63
Periklanan dan Pengelolaan Parkir Advertising and Parking Management	(47)	(310)	(662)	(56,66)
Pelabuhan Port	(347)	2.821	(5.029)	(112,30)
Segmen Lain Other Segment	11.598	-	-	100,00
Laba Tahun Berjalan Konsolidasian Consolidated Profit for the Year	(235.873)	122.465	25.761	(292,60)

Kontributor kerugian terbesar datang dari pengelolaan jalan tol yang mencapai Rp261,19 miliar. Sementara segmen lainnya, yaitu pengelolaan air bersih serta perdagangan, *advertising*, dan lain-lain, tetap membukukan laba.

The biggest contributor to the loss came from toll road management, which reached Rp261.19 billion. Meanwhile, the other segments, namely clean water management and trading, advertising, and others, continued to book profits.

Aset per Segmen Usaha

Hingga akhir tahun 2023, total aset Perseroan secara konsolidasi mencapai Rp4,32 triliun, turun 61,27% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp11,2 triliun.

Assets by Business Segment

By the end of 2023, the Company's total consolidated assets reached Rp4.32 trillion, a 61.27% decrease compared to Rp11.2 trillion in 2022.

KINERJA ASET PER SEGMENT USAHA

Asset by Business Segment

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	2023	2022	2021	YoY 2022-2023 (%)
Pengelolaan Jalan Tol Toll Road Management	99.761	9.842.686	5.219.369	(98,99)
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associate	2.861.685	-	-	100,00
Pengelolaan Air Water Management	533.525	485.322	451.717	9,93
Energi Terbarukan Renewable Energy	689.735	712.786	708.527	(3,23)
Periklanan dan Pengelolaan Parkir Advertising and Parking Management	11.600	8.193	85.192	(41,58)
Segmen Lain Other Segment	122.937	104.515	122.524	17,63
Aset Konsolidasian Consolidated Assets	4.319.243	11.153.502	6.587.329	(61,27)

Tinjauan Keuangan

Financial Overview

Laporan kinerja keuangan Perseroan di bawah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Penyusunan Laporan Keuangan telah dilakukan dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia dan telah memenuhi kriteria standar penyajian informasi.

The financial performance report of the Company below is based on the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries, which were audited by KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young Member) for the fiscal years ended December 31, 2023, and 2022. The Financial Statements were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FAS) and meet the standard criteria for information presentation.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp million, unless otherwise stated)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Pendapatan Usaha dan Penjualan	904.163	822.438	9,94	Revenue and Sales
Pendapatan Usaha Lainnya	13.462	15.937	(15,53)	Other Operating Income
Pendapatan Konstruksi	769.367	563.995	36,41	Construction Revenues
Jumlah	1.686.992	1.402.370	20,30	Total
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan				Direct Costs and Cost of Sales
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan	(266.347)	(257.082)	3,60	Direct Costs and Cost of Sales
Beban Konstruksi	(769.367)	(563.995)	36,41	Construction Costs
Jumlah	(1.035.714)	(821.077)	26,14	Total
Laba Kotor	651.278	581.293	12,04	Gross Profit
Beban Umum dan Administrasi	(260.029)	(226.439)	14,83	General and Administrative Expenses
Beban Operasional Lainnya	1.914	(76.666)	(102,50)	Other Operating Expenses
Laba Usaha	393.163	278.188	41,33	Operating Profit
Beban Lain-lain - Neto	(559.598)	(99.986)	459,68	Other Expenses - Nett
Laba Sebelum Pajak	(166.435)	178.202	(193,40)	Profit Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	(69.438)	(55.737)	24,58	Income Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan	(235.873)	122.465	(292,60)	Profit for the Year
Rugi Komprehensif Lain	(2.442)	(1.381)	76,83	Other Comprehensive Loss
Jumlah (Rugi)/Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(238.314)	121.084	(296,82)	Total Comprehensive Income for the Year
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				Profit for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	(233.745)	72.439	(422,68)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	(2.128)	50.026	(104,25)	Non-Controlling Interests
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				Comprehensive Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	(236.200)	72.899	(424,01)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	(2.115)	48.185	(104,39)	Non-Controlling Interests
Laba per Saham	(13,20)	4,09	(422,74)	Earnings Per Share

Pendapatan Usaha dan Penjualan

Total pendapatan usaha dan penjualan Perseroan di luar konstruksi dan usaha lainnya pada tahun 2023 mencapai Rp904,16 miliar, lebih tinggi 9,94% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp822,44 miliar. Kenaikan atas total pendapatan dan penjualan tersebut dikarenakan meningkatnya volume *traffic* tol, peningkatan tarif penjualan air bersih dan volume penjualan serta tarif per-unit penjualan energi listrik.

Untuk pendapatan usaha dari segmen usaha pengelolaan jalan tol pada tahun 2023 Rp634,88 miliar, naik 8,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp582,83 miliar. Kenaikan pendapatan usaha pada segmen pengelolaan jalan tol tersebut disebabkan kenaikan volume pemakai jalan tol pada tahun berjalan.

Dari segmen usaha pengelolaan air, hingga akhir tahun 2023 pendapatan yang dibukukan tercatat Rp74,48 miliar, meningkat 13,57% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp65,58 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan volume serta peningkatan tarif penjualan air.

Sedangkan pendapatan untuk segmen usaha energi terbarukan naik sebesar 13,74%, dari Rp171,27 miliar di tahun 2022 menjadi Rp194,80 miliar pada tahun 2023. Kenaikan itu dipengaruhi oleh meningkatnya volume pemakaian tenaga listrik.

Beban-beban

Total beban langsung dan beban pokok Perseroan (di luar beban konstruksi) pada tahun 2023 mencapai Rp266,35 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp257,08 miliar, terjadi kenaikan 3,60%. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan atas pendapatan dan penjualan Perusahaan pada tahun berjalan.

Pada sektor pengelolaan jalan tol, jumlah beban pada tahun 2023 sebesar Rp142,73 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang Rp135,04 miliar, terjadi kenaikan 5,69%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada semua biaya yang terkait dengan operasional jalan tol.

Untuk sektor pengelolaan air, jumlah beban naik 2,10%, dari Rp30,42 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp31,05 miliar di tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan beban pemeliharaan dan biaya pengelolaan air.

Business Revenue and Sales

Total business revenue and sales of the Company outside of construction and other businesses in 2023 reached Rp904.16 billion, which is 9.94% higher compared to Rp822.44 billion in 2022. The increase in total revenue and sales was due to increased toll traffic volume and increase in toll traffic volume, increase in water sales rate and sales volume and per-unit rate of electricity sales.

For revenue from the toll road management business segment in 2023, it amounted to Rp634.88 billion, up 8.93% compared to the previous year's Rp582.83 billion. The increase in revenue in the toll road management segment was due to increased toll road user volume and tariff increases in the current year.

From the water management business segment, until the end of 2023, recorded revenue amounted to Rp74.48 billion, an increase of 13.57% compared to Rp65.58 billion in 2022. This condition was influenced by an increase in volume and an increase in water sales tariffs.

Meanwhile, revenue for the renewable energy business segment increased by 13.74%, from Rp171.27 billion in 2022 to Rp194.80 billion in 2023. The increase was influenced by increased electricity usage volume.

Expenses

Total direct expenses and cost of goods sold by the Company (excluding construction costs) in 2023 amounted to Rp266.35 billion. Compared to Rp257.08 billion in 2022, there was an increase of 3.60%. This increase is in line with the increase in the Company's revenue and sales in the current year.

In the toll road management sector, the total expenses in 2023 amounted to Rp142.73 billion. Compared to Rp135.04 billion in 2022, there was an increase of 5.69%. This was due to an increase in all costs related to toll road operations.

For the water management sector, the total expenses increased by 2.10%, from Rp30.42 billion in 2022 to Rp31.05 billion in 2023. This was due to increased maintenance expenses and water management costs.

Beban pada sektor energi di tahun 2023 mengalami kenaikan 1,03%, menjadi Rp92,56 miliar. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp91,62 miliar. Penyebabnya adalah peningkatan beban karyawan pada tahun berjalan.

Laba Usaha, Laba sebelum Pajak, dan Laba Tahun Berjalan

Perseroan mencatatkan laba usaha tahun 2023 sebesar Rp393,16 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang Rp278,19 miliar, lebih tinggi 41,33%. Hal ini disebabkan terutama oleh kenaikan pendapatan usaha dan penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya dan beban operasional.

Rugi sebelum pajak mencapai Rp166,44 miliar, turun 193,40% dibandingkan tahun 2022 yang Rp178,20 miliar. Penurunan laba sebelum pajak ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga atas pinjaman bank yang diperuntukan untuk akuisisi JJC.

Sementara rugi bersih tahun berjalan mencapai Rp235,87 miliar. Dengan demikian, terjadi penurunan 292,60% dalam kinerja laba bersih, jika dibandingkan tahun 2022 yang laba sebesar Rp122,46 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak. Sementara itu, beban pajak penghasilan meningkat menjadi sebesar Rp69,43 miliar, naik 24,58% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp55,73 miliar.

Laba (Rugi) Komprehensif Lainnya

Pada tahun 2023, rugi komprehensif lainnya naik 76,83%, sehingga menjadi sebesar Rp2,44 miliar. Sedangkan pada tahun 2022 posisinya rugi sebesar Rp1,38 miliar. Penyebabnya terutama karena kerugian yang belum direalisasi atas beban aktuarial dari program imbalan pasca kerja yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Hingga 31 Desember 2023, total rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan mencapai Rp238,31 miliar. Kinerja tersebut mengalami penurunan 296,82% dibandingkan tahun 2022 yang membukukan laba sebesar Rp121,08 miliar.

Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun 2023 terutama karena peningkatan atas beban bunga pinjaman bank.

Expenses in the energy sector in 2023 increased by 1.03%, reaching Rp92.56 billion. Whereas in 2022, it was Rp91.62 billion. The reason is the increase in employee expenses in the current year.

Operating Profit, Profit Before Tax, and Profit for the Year

The Company recorded an operating profit of Rp393.16 billion in 2023. Compared to Rp278.19 billion in 2022, this is an increase of 41.33%. This is mainly due to the increase in revenue and sales compared to operational costs and expenses.

The loss before tax amounted to Rp166.44 billion, down 193.40% compared to Rp178.20 billion in 2022. The decrease in profit before tax is mainly due to an increase in bank loan interest expenses allocated for the JJC acquisition.

Meanwhile, the net loss for the current year amounted to Rp235.87 billion. Thus, there was a decrease of 292.60% in net profit performance compared to Rp122.46 billion in 2022. This is due to the decrease in profit before tax. Meanwhile, income tax expenses increased to Rp69.43 billion, up 24.58% compared to Rp55.73 billion in 2022.

Other Comprehensive Profit (Loss)

In 2023, other comprehensive loss increased by 76.83%, reaching Rp2.44 billion, compared to a loss of Rp1.38 billion in 2022. The main reason is the unrealized losses on actuarial expenses from the post-employment benefits program, which are smaller than the previous year.

Total Comprehensive Income for the Year

As of December 31, 2023, the total comprehensive loss for the current year amounted to Rp238.31 billion. This performance experienced a decrease of 296.82% compared to Rp121.08 billion in 2022, which recorded a profit.

This is mainly due to the decrease in net profit in 2023, primarily due to the increase in bank loan interest expenses.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Aset

STATEMENTS OF CONSOLIDATED FINANCIAL
POSITION

Assets

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp million, unless otherwise stated)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Aset Lancar	442.624	946.739	(53,25)	Current Assets
Aset Tidak Lancar	3.876.618	10.206.763	(62,02)	Non-Current Assets
Jumlah Aset	4.319.243	11.153.502	(61,27)	Total Assets

Hingga akhir tahun buku 2023, total aset yang berhasil dibukukan Perseroan mencapai Rp4,32 triliun. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp11,15 triliun, terjadi penurunan 61,27%.

Dari total aset tersebut, jumlah aset lancar Perseroan mencapai Rp442,62 miliar, lebih rendah 53,25% dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp946,74 miliar.

Untuk aset tidak lancar, jumlahnya Rp3,88 triliun. Dibandingkan tahun 2022 yang Rp10,21 triliun, terjadi penurunan 62,02%.

Seluruh penurunan atas nilai aset Perusahaan pada posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 disebabkan oleh terjadinya dekonsolidasi MUN. Sehingga pada posisi keuangan per 31 Desember 2023, Perusahaan tidak lagi mencatat keseluruhan bagian aset yang dimiliki oleh MUN.

Until the end of the fiscal year 2023, the total assets successfully recorded by the Company amounted to Rp4.32 trillion. Compared to Rp11.15 trillion in 2022, there was a decrease of 61.27%.

Of the total assets, the Company's current assets amounted to Rp442.62 billion, which is 53.25% lower than the previous year's Rp946.74 billion.

For non-current assets, the amount was Rp3.88 trillion. Compared to Rp10.21 trillion in 2022, there was a decrease of 62.02%.

The entire decrease in the Company's asset value in the financial position as of December 31, 2023, was due to the deconsolidation of MUN. Therefore, as of December 31, 2023, the Company no longer records the entirety of the assets owned by MUN.

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp million, unless otherwise stated)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Liabilitas Liabilities				
Liabilitas Jangka Pendek	117.355	1.933.169	(93,93)	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	510.386	5.737.786	(91,10)	Long-Term Liabilities
Jumlah Liabilitas	627.741	7.670.955	(91,82)	Total Liabilities
Ekuitas Equity				
Ekuitas	3.691.502	3.482.547	6,00	Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	4.319.243	11.153.502	(61,27)	Total Liabilities and Equity

Total liabilitas Perseroan pada tahun 2023 mencapai Rp627,74 miliar. Dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp7,67 triliun, terjadi penurunan 91,82%.

Seluruh penurunan atas nilai liabilitas Perusahaan pada posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 disebabkan oleh terjadinya dekonsolidasi MUN. Sehingga pada posisi keuangan per 31 Desember 2023, Perusahaan tidak lagi mencatat liabilitas yang dimiliki oleh MUN.

The total liabilities of the Company in 2023 amounted to Rp627.74 billion. Compared to Rp7.67 trillion in 2022, there was a decrease of 91.82%.

The entire decrease in the Company's liability value in the financial position as of December 31, 2023, was due to the deconsolidation of MUN. Therefore, as of December 31, 2023, the Company no longer records the liabilities held by MUN.

Sedangkan untuk ekuitas, terjadi kenaikan 6,00% pada tahun 2023, sehingga menjadi Rp3,69 triliun. Pada tahun 2022, posisinya Rp3,48 triliun. Kenaikan pada ekuitas terjadi karena peningkatan tambahan modal disetor atas yang berasal dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dari MUN.

As for equity, there was an increase of 6.00% in 2023, amounting to Rp3.69 trillion. In 2022, it was Rp3.48 trillion. The increase in equity occurred due to additional capital injections from the restructuring transactions of related-party entities from MUN.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENTS

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp million, unless otherwise stated)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan Growth (%)	Description
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	106.412	181.085	(41,24)	Net Cash Flows from Operating Activities
(Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi)	719.860	4.431.992	(83,76)	(Net Cash Flows used in Investing Activities)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	671.925	3.788.259	(82,26)	Net Cash Flows Used from Financing Activities
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	58.477	(462.648)	112,64	Net Increase/(Decrease) of Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	523.370	986.019	(46,92)	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas yang Tidak Dikonsolidasi	(333.639)	-	(100,00)	Unconsolidated Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	248.208	523.370	(52,58)	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp106,41 miliar turun sebesar 41,24% dibandingkan tahun 2022 yang Rp181,08 miliar. Penurunan arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh penurunan atas pembayaran kepada *supplier* dan kenaikan dari kas yang dibatasi penggunaannya.

Cash Flow from Operating Activities

The Company recorded a net cash flow from operating activities in 2023 amounting to Rp106.41 billion decreased by 41.24% compared to Rp181.08 billion in 2022. The decrease in cash flow from operating activities was primarily due to reduced payments to suppliers and an increase in restricted cash usage.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2023, arus kas dari aktivitas investasi Perseroan tercatat sebesar Rp719,86 miliar, turun 83,76% dari tahun 2022 yang Rp4,43 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengeluaran modal untuk proyek MNP dan akuisisi atas kepemilikan 40% saham di JJC pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 tidak terdapat pengeluaran investasi yang lebih besar dari tahun 2022.

Cash Flows from Investing Activities

In 2023, the Company's cash flow from investing activities was recorded at Rp719.86 billion, down by 83.76% from Rp4.43 trillion in 2022. This decline was mainly caused by capital expenditures for the MNP project and the acquisition of a 40% stake in JJC in 2022. Meanwhile, in 2023, there were no significant investment outflows as compared to 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Hingga akhir tahun 2023, arus kas dari aktivitas pendanaan mencapai Rp671,93 miliar. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp3,79 triliun, sehingga terjadi penurunan 82,26%. Penyebabnya terutama dari penerimaan pinjaman bank yang diperoleh pada tahun 2022 yang akan digunakan untuk pengeluaran modal pada proyek strategis dan akuisisi atas kepemilikan 40% saham di JJC. Pada tahun 2023, Perusahaan hanya melakukan pencairan pinjaman jangka Panjang sejumlah Rp949,01 miliar.

Cash Flow from Financing Activities

Until the end of 2023, cash flow from financing activities amounted to Rp671.93 billion. Whereas in 2022, it was Rp3.79 trillion, resulting in a decrease of 82.26%. The main reason for this decline was the receipt of bank loans obtained in 2022, which were intended for capital expenditures on strategic projects and the acquisition of a 40% stake in JJC. In 2023, the Company only disbursed long-term loans amounting to Rp949.01 billion.

RASIO – RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIOS

Uraian	2023	2022	Description
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
Modal Kerja Bersih (dalam jutaan Rupiah)	325.270	986.430	Net Working Capital (in million Rupiah)
Rasio Lancar	377,17%	48,97%	Current Ratio
Rasio Kas	211,50%	27,07%	Cash Ratio
Rasio Operasi Operating Ratio			
Rasio Margin Kotor	70,97%	69,34%	Gross Margin Ratio
Margin Usaha	42,85%	19,84%	Operating Margin
Margin Laba Bersih	(25,70%)	14,61%	Net Profit Margin
Margin EBITDA	53,33%	55,88%	EBITDA Margin
Tingkat Pengembalian Aset	(5,41%)	0,65%	Return on Assets
Tingkat Pengembalian Ekuitas	(6,33%)	2,08%	Return on Equity
Rasio Leverage Leverage Ratio			
Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas	13,87%	190,67%	Interest-bearing debt to Equity Ratio
Rasio Utang Berbunga terhadap Aset	11,86%	59,53%	Interest-bearing debt to Assets Ratio
Debt Service Coverage Ratio	0,63x	2,46x	Debt to Service Coverage Ratio
Interest Coverage	(54,52%)	104,43%	Interest Coverage

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban, antara lain ditunjukkan melalui tingkat solvabilitas yang mengacu pada 3 (tiga) indikator utama, yakni rasio gearing bersih, rasio liabilitas terhadap jumlah aset, serta rasio EBITDA terhadap utang berbunga.

Solvabilitas Perseroan pada tahun 2023 dan 2022 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

ABILITY TO REPAY DEBTS

The Company's ability to meet its obligations, among other things, is shown by its level of solvency, which refers to 3 (three) main indicators: the net gearing ratio, the liabilities to total assets ratio, and the EBITDA to interest-bearing debt ratio.

The table below shows the Company's solvency in 2023 and 2022.

(dalam kali lipat | times)

Uraian	Perbandingan Comparison		Description
	2023	2022	
Rasio Gearing Bersih	0,07	1,76	Net Gearing Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,15	0,69	Liabilities to Total Assets Ratio
Rasio EBITDA terhadap Jumlah Utang Berbunga	0,95	2,68	EBITDA to Interest Bearing Debt Ratio

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Pada tahun 2023, Perseroan mencatat rata-rata periode kolektibilitas piutang berada di kisaran 13,83 hari. Kondisi tersebut lebih lambat dibandingkan tahun 2022 yang 9,70 hari.

COLLECTABILITY OF RECEIVABLES

In 2023, the Company recorded an average accounts receivable collection period of approximately 13.83 days. This condition is slower compared to 9.70 days in 2022.

STRUKTUR MODAL

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Perseroan selalu memastikan bahwa kondisi struktur modal dalam kondisi baik, sehingga mampu menjaga kinerja keuangan agar tetap stabil. Karena itu, komitmen untuk memastikan dan memelihara aspek kesehatan rasio laba terhadap ekuitas (*return on equity*) dan rasio-rasio lain yang ditetapkan oleh pemberian pinjaman, senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan oleh Perseroan.

Rasio-rasio tersebut menjadi bagian dari pengelolaan modal Perseroan guna mendukung tercapainya kelancaran dalam aktivitas bisnis yang dijalankan serta dampak pada terwujudnya nilai tambah bagi seluruh pihak. Dalam hal ini, terutama para pemegang saham.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Details of Capital Structure

Uraian	Nilai (Rp Miliar) Value (Rp Billion)		Kontribusi (%) Contribution (%)		Pertumbuhan Growth (%)	Description
	2023	2022	2023	2022		
Liabilitas Jangka Panjang	510	5.738	12,16	62,23	(91,09)	Long-Term Liabilities
Ekuitas	3.692	3.483	87,84	37,77	6,00	Equity
Jumlah Sumber Dana Jangka Panjang	4.202	10.121	100,00	100,00	(54,42)	Total Long-Term Source of Funds

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2023, Perseroan tidak memiliki ikatan yang bersifat material dalam melaksanakan investasi barang modal.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Investasi barang modal yang dilaksanakan oleh Perseroan serta entitas anak maupun asosiasi, bertujuan untuk mendukung pengembangan bisnis dan keberlanjutan usaha di masa mendatang. Di antara jenis investasi tersebut, yaitu investasi barang modal yang didefinisikan sebagai aktivitas pengeluaran dana dengan tujuan untuk membeli sejumlah aset atau investasi dengan harapan dapat menunjang kelangsungan usaha dan menghadirkan nilai tambah yang bermanfaat di masa depan.

CAPITAL STRUCTURE

Management Policy on Capital Structure

The Company always ensures that its capital structure is in good condition so that it can maintain stable financial performance. As a result, the Company consistently upholds and implements its commitment to ensuring and maintaining a healthy profit-to-equity ratio (*return on equity*) and other lending-related ratios.

These ratios are part of the Company's capital management to support the smooth operation of business activities and have an impact on the achievement of added value for all parties. In this case, especially shareholders.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURES

As of 2023, the Company has no material ties in carrying out capital goods investment. As of 2023, the Company has no material ties in carrying out capital goods investment.

REALIZATION OF CAPITAL EXPENDITURES

Capital goods investments carried out by the Company and its subsidiaries and associations aim to support business development and business sustainability in the future. Among these types of investment is investment in capital goods, which is defined as the activity of spending funds with the intention of purchasing a number of assets or investments in the hope of supporting business continuity and providing added value that will be useful in the future.

Pada tahun 2023, realisasi investasi barang modal Perseroan adalah senilai Rp1,00 triliun. Rincian terkait investasi barang modal adalah sebagai berikut:

In 2023, the Company's capital goods investment realization was Rp1.00 trillion. Details on capital goods investment are as follows:

(Rp juta)
(Rp million)

Uraian	Tujuan Investasi Investment Objectives	Nilai Investasi Investment Value	Description
Aset Konsesi	Belanja Modal Capital Expenditure	816.290	Concession Assets
Aset Non Konsesi	Belanja Modal Capital Expenditure	8.024	Non-Concession Assets
Jumlah		1.002.015	Total

INFORMASI FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Marga Metro Nusantara yang diaktakan dengan Akta No. 09 tanggal 22 Januari 2024 oleh Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., notaris di Jakarta Selatan, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp62.130.000.000 atau setara dengan 62.130 saham menjadi sebesar Rp84.994.000.000, atau setara dengan 89.994 saham. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0023507 tanggal 26 Januari 2024.

INFORMATION ON MATERIAL FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORTING DATE

Based on the Decision Statement of the Shareholders of PT Marga Metro Nusantara stated in Deed No. 09 dated January 22, 2024, executed by Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., a notary in South Jakarta, they approved the increase of issued and paid-up capital from the original amount of Rp62,130,000,000 or equivalent to 62,130 shares to Rp84,994,000,000 or equivalent to 89,994 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03-0023507 dated January 26, 2024.

DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Selain itu, pendapatan dan pengeluaran Perusahaan hampir seluruhnya diterima dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah.

IMPACT ON MOVEMENT ON FOREIGN EXCHANGE RATES

Currency risk is the risk where the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rates. Additionally, the Company's income and expenses are almost entirely received and paid in Indonesian Rupiah.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Target dan Realisasi 2023

COMPARISON OF TARGETS AND REALIZATION

Targets and Realization 2023

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp million, unless otherwise stated)

Uraian	Target 2023 2023 Target	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Description
Pendapatan/Penjualan (di luar pendapatan konstruksi)	948.963	917.625	97%	Revenues/Sales (excluding construction revenues)
Laba Bruto	609.473	651.248	107%	Gross Profit
Laba Usaha	360.032	393.162	106%	Operating Profit
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	181.589	(235.873)	(130%)	Profit (Loss) for the Year
Struktur Modal				Capital Structure
Liabilitas	3.561.230	627.741	18%	Liabilities
Aset	11.386.810	4.319.243	38%	Assets
Ekuitas	11.030.680	3.691.502	33,47%	Equity

Target 2024

2024 Target

(Rp juta, kecuali dinyatakan lain)
(Rp million, unless otherwise stated)

Uraian	Target 2024 2024 Target	Description
Pendapatan/Penjualan (di luar pendapatan konstruksi)	373.823	Revenues/Sales (excluding construction revenues)
Laba Bruto	252.095	Gross Profit
Laba Usaha	102.461	Operating Profit
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	183.704	Profit (Loss) for the Year
Struktur Modal		Capital Structure
Liabilitas	723.090	Liabilities
Aset	4.061.077	Assets
Ekuitas	3.337.987	Equity

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar

Saat ini, infrastruktur menjadi tantangan terbesar di Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sepanjang tahun lalu, Indonesia terus melakukan upaya berkelanjutan untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sektor infrastruktur seperti jalan tol, penyediaan air bersih, pembangkit listrik serta infrastruktur penunjang lainnya. Pemerintah secara terus menerus melakukan berbagai macam investasi dan melakukan banyak perubahan dalam kebijakan.

Selama tahun 2023, Indonesia terus mencatatkan penambahan konektivitas melalui pembangunan jalan tol. Namun, masih ada tantangan dalam hal pemeliharaan dan manajemen lalu lintas yang efisien. Beberapa bagian jalan tol masih perlu dilakukan perbaikan berkala untuk meningkatkan standar mutu jalan demi kenyamanan pengguna jalan tol dan *planning* ke depan untuk perluasan dan penambahan fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dengan fasilitas yang lebih beragam. Selain itu, diperlukan juga investasi lebih lanjut dalam pemeliharaan periodik jangka Panjang dan perluasan jaringan jalan tol (koneksi antar tol atau daerah terpadu melalui *interchange/junction*) untuk mengakomodasi mobilitas (*driving end-to-end point*) para pengguna tol yang terus meningkat.

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy and Market Share

Currently, infrastructure is the biggest challenge in Indonesia as a country with immense population and rapid economic growth. Throughout last year, Indonesia continued to make continuous efforts to improve and develop the infrastructure sector, such as toll roads, clean water supply, power plants, as well as other supporting infrastructure. The government continuously made various investments and made many changes to its policies.

During 2023, Indonesia continued to record additional connectivity through toll road constructions. However, challenges remain in terms of maintenance and efficiency of traffic management. Several parts of toll roads still require regular repairs to improve road quality standards for the comfort of toll road users as well as future planning for the expansion and addition of Rest and Service Facilities (TIP) with more diverse facilities. In addition, further investment is also required for the long-term maintenance period and expansion of the toll road network (connection between toll roads or integrated areas via interchanges/ junctions) to accommodate the increasing mobility (*end-to-end point driving*) of toll users.

Selain jalan tol, tantangan lainnya juga harus dihadapi pada segmen produksi dan pengelolaan air bersih yang dimana air bersih sendiri merupakan isu penting di Indonesia. Target pemerintah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Program pembangunan infrastruktur air bersih telah diluncurkan di berbagai daerah, namun tantangan dalam pengelolaan sumber daya air dan distribusi yang efisien masih ada. Perubahan iklim juga menjadi faktor yang saling berkaitan dengan efisiensi operasi dan pasokan air, dengan musim kemarau yang panjang dan banjir di beberapa wilayah yang lebih sering terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang holistik dalam manajemen air bersih, termasuk konservasi sumber daya air dan pengembangan teknologi manajemen produksi yang lebih efisien.

Di sisi lain, dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta dalam rangka membatasi dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pemerintah menjadikan pembangunan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan sebagai fokus utama. Alokasi investasi pemerintah akan berfokus pada pembangkit listrik tenaga surya, air, dan angin. Namun, kendala dalam hal infrastruktur transmisi yang memadai untuk mendistribusikan energi terbarukan ke berbagai daerah, serta regulasi yang memiliki keseimbangan dalam mengakomodasi *interest* dari para pemangku kepentingan (termasuk investor) untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Perlu juga diingat bahwa pengembangan energi terbarukan harus seimbang dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial, termasuk mitigasi terhadap dampak lingkungan dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait aspek lingkungan di sekitar pembangkit tersebut.

Upaya pemerintah selaku regulator telah menempatkan Investasi yang relatif besar untuk pembangunan infrastruktur, pemeliharaan jalan tol, pengelolaan air, pengembangan energi terbarukan, serta periklanan dan pengelolaan parkir. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan sektor badan usaha (baik BUMN maupun swasta) semakin ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam.

In addition to toll roads, other challenges must also be addressed in the clean water production and management segment, in which clean water is an important issue in Indonesia. The government's target is to increase people's access to clean water. Clean water infrastructure development programs have been launched in various regions, but challenges in managing water resources and efficient distribution still exist. Climate change is also an interrelated factor in operational efficiency and water supply, with long dry seasons and more frequent flooding in some areas. Therefore, a holistic approach is needed in clean water management, including conservation of water resources and the development of more efficient production management technology.

On the other hand, in an effort to reduce dependence on fossil fuels and in the context of limiting and reducing Green House Gas (GHG) emissions, the government has made the development of renewable energy power plants the main focus. The focus of the government's allocation in this industry will be in solar, water, and wind power plants. However, obstacles in terms of adequate transmission infrastructure to distribute renewable energy to various regions, as well as regulations that have a balance in accommodating the interests of stakeholders (including investors) to encourage the growth of this sector. It should also be noted that the development of renewable energy must be counterbalanced with environmental and social sustainability, including mitigation of environmental impacts and participation of stakeholders in decision making regarding environmental aspects in the vicinity of the plant.

The government's efforts as a regulator have allocated large investment for infrastructure development, toll road maintenance, water management, renewable energy development, as well as advertising and parking management. In addition, cooperation between the government and the business sector (both SOEs and private) is increasingly being enhanced to ensure sustainability and inclusivity in the development of infrastructure and management of natural resources.

Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pemerintah perlu terus mendorong reformasi kebijakan yang progresif, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Penting juga untuk menggalakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya infrastruktur yang berkelanjutan dan memperkuat partisipasi mereka sebagai pengguna dan bagian dari pemangku kepentingan terkait pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, tahun 2023 merupakan tahun yang menjanjikan dalam upaya Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur, pengelolaan air bersih, dan penggunaan energi terbarukan. Namun, tantangan besar masih ada dan kerja keras bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

PROSPEK USAHA

Di tengah perubahan global yang terus berlangsung, industri infrastruktur memainkan peran vital dalam mengarahkan arah perkembangan masyarakat dan ekonomi. Di tahun 2024, prospek industri infrastruktur khususnya di 4 (empat) lini antara lain jalan tol, pengelolaan air, energi terbarukan, serta periklanan dan pengelolaan parkir tetap diyakini oleh Perseroan sebagai bisnis yang bersifat *resilient assets*. Beberapa tren utama dan prospek yang mungkin dihadapi industri infrastruktur di tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

Salah satu tren utama yang akan terus mempengaruhi industri infrastruktur terlepas dari 4 (empat) lini usaha Perseroan adalah adopsi teknologi terkini, seperti sistem digitalisasi dan adopsi *Internet of Things* (IoT) dalam implementasi *Enterprise Resources Planning* (ERP), kecerdasan buatan (AI), dan pemodelan informasi bangunan (BIM) yang lebih difungsikan dalam proses *design* dan konstruksi *asset*. Integrasi teknologi ini telah memungkinkan pengembangan proyek infrastruktur yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Contohnya adalah penggunaan sensor digital (*remote-sensing*) untuk memantau kondisi struktur jembatan dan permukaan jalan secara *real-time*.

However, there is still much work to be done. The Government needs to continue to encourage progressive policy reform, improve inter-agency coordination, as well as strengthening supervision and law enforcement. It is also important to promote public awareness regarding the importance of sustainable infrastructure and strengthen their participation as users and stakeholders related to the development and management of natural resources.

Overall, 2023 was an encouraging year in Indonesia's efforts to improve infrastructure, clean water management, and use of renewable energy. However, major challenges remain and collective hard work from various parties is still required to achieve sustainable and inclusive development goals.

BUSINESS PROSPECTS

In the midst of ongoing global changes, the infrastructure industry plays a vital role in shaping the direction of societal and economic development. In 2024, the prospects for the infrastructure industry, especially in the 4 (four) lines of toll roads, water management, renewable energy, as well as advertising and parking management are still believed by the Company to be a business that has resilient assets. Some of the main trends and prospects that the infrastructure industry may face in 2024 are explained as follows.

One of the main trends that will continue to influence the infrastructure industry, regardless of the Company's 4 (four) business lines, is the adoption of the latest technology, such as digitalization systems and the adoption of the Internet of Things (IoT) in the implementation of Enterprise Resources Planning (ERP), artificial intelligence (AI), and information modeling building (BIM) which is used more in the asset design and construction process. The integration of these technologies has enabled the development of more efficient, safer and more sustainable infrastructure projects. An example is the use of digital sensors (*remote-sensing*) to monitor the condition of bridge structures and road surfaces in real-time.

Di samping itu, kesadaran akan pentingnya infrastruktur berkelanjutan semakin meningkat di tahun 2024. Pemerintah dan perusahaan semakin fokus pada pengembangan proyek infrastruktur yang ramah lingkungan, mulai dari pembangkit energi terbarukan, pengelolaan dan penggunaan air secara tepat guna dan tepat sasaran hingga desain bangunan yang hemat energi. Hal ini bukan hanya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan infrastruktur yang dapat bertahan dalam jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas.

Namun, meskipun ada banyak peluang dan potensi dalam industri infrastruktur di tahun 2024, tetap ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah pendanaan. Pengembangan proyek infrastruktur yang besar seringkali memerlukan modal yang signifikan (capital intensive), dan sumber pendanaan dengan *cost of fund* yang wajar. Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan perlu bekerja sama untuk menemukan model pendanaan yang berkelanjutan dan bersifat inklusif, untuk mendukung struktur proyek infrastruktur yang mengedepankan implementasi *sustainability* ini.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keberlanjutan sumber daya manusia yang terampil dalam industri ini. Dengan teknologi terus berkembang, tenaga kerja infrastruktur perlu terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang teknologi dan manajemen proyek. Hal ini menuntut investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi para profesional infrastruktur agar mereka dapat tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja yang berubah.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci. Hanya dengan bekerja sama, pihak pemangku kepentingan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif.

Secara keseluruhan, prospek industri infrastruktur di tahun 2024 menjanjikan masa depan yang penuh potensi. Dengan adopsi teknologi terkini dan komitmen terhadap keberlanjutan, industri ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti pendanaan dan pengembangan sumber daya manusia perlu diatasi dengan kerja sama lintas sektor dan pendekatan yang holistik. Dengan demikian, kita dapat menciptakan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

In addition, awareness of the importance of sustainable infrastructure will increase in 2024. Governments and companies are increasingly focusing on developing environmentally friendly infrastructure projects, starting from renewable energy generation, managing and using water in an efficient and targeted manner, and on to energy efficient building designs. This is not only about minimizing negative impacts on the environment, but also about creating infrastructure that can last in the long term and reduce dependence on limited natural resources.

However, although there are many opportunities and potential in the infrastructure industry in 2024, there are still several challenges that need to be overcome. One of them is the problem of funding. The development of large infrastructure projects is often capital intensive, and requires funding sources with a reasonable cost of funds. The government, private sector and financial institutions need to work together to find sustainable and inclusive funding models, to support infrastructure project structures that prioritize the implementation of sustainability.

Apart from that, another challenge is the sustainability of skilled human resources in this industry. As technology continues to develop, the infrastructure workforce needs to stay abreast of the latest developments in technology and project management. This calls for investment in education and training for infrastructure professionals so they can remain relevant and competitive in a changing job market.

In facing this challenge, collaboration between government, the private sector, academia and civil society will be key. Only by working together can these stakeholders create an environment that supports sustainable, innovative and inclusive infrastructure development.

Overall, the prospects for the infrastructure industry in 2024 promise a future full of potential. With the adoption of the latest technology and commitment to sustainability, this industry has the potential to become one of the main drivers of economic growth and societal prosperity. However, challenges such as funding and human resource development need to be addressed with cross-sector collaboration and a holistic approach. In this way, we can create infrastructure that not only meets current needs, but also provides long-term benefits for future generations.

DIVIDEN

Kebijakan

Kebijakan Perseroan dalam memutuskan dividen dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam prosesnya, Direksi diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan terkait dividen, mencakup ada atau tidaknya serta mekanisme pembagian dividen yang seluruhnya dilakukan dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris.

Hal ini selaras dengan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Begitu juga dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

Untuk dividen tahun 2023, RUPS Tahunan memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

KOMPENSASI JANGKA PANJANG MELALUI PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun buku 2023, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham, baik untuk karyawan maupun manajemen. Dengan demikian, rincian informasi tidak dapat disampaikan.

KOMPENSASI JANGKA PENDEK MANAJEMEN KUNCI

Perseroan memberikan kompensasi jangka pendek kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp47.512.153.762 dan Rp37.170.078.921 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Hingga tahun buku 2023, tidak ada dana dari hasil penawaran umum yang masih *outstanding*. Dengan demikian, rincian informasi tidak dapat disampaikan.

DIVIDEND

Policy

The General Meeting of Shareholders (GMS) determines the company's dividend policy. Through the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors has the authority to determine dividend policies, including whether or not there is a dividend distribution and the mechanism of distribution, all of which are carried out with the approval of the Board of Commissioners.

This is in accordance with applicable laws and regulations, including Law No. 40 of 2007, which governs Limited Liability Companies. Likewise with the Company's Articles of Association.

For dividends in 2023, the Annual GMS decided not to distribute dividends to the company's shareholders.

LONG-TERM COMPENSATION THROUGH THE EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

Until the end of the fiscal year 2023, the company does not have a share ownership program for either employees or management. Therefore, detailed information cannot be provided.

KEY MANAGEMENT SHORT-TERM COMPENSATION

For the fiscal years ending December 31, 2023, and 2022, the Company paid short-term compensation to the Board of Commissioners and the Board of Directors in the amounts of Rp47,512,153,762 and Rp37,170,078,921, respectively.

USE OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING

There are no outstanding funds from the public offering as of fiscal year 2023. Therefore, detailed information cannot be provided.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI

Sifat Hubungan dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi tertentu. Sifat dari hubungan Perseroan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Margautama Nusantara	- Entitas asosiasi - Entitas sepengendali dalam MPTIS Grup - Associate entity - Entity under common control of MPTIS Group	Utang lain-lain Others payables
PT Bintaro Serpong Damai	Entitas sepengendali MUN Entity under common-control of MUN	Utang lain-lain Others payables
PT Makassar Metro Network	Entitas sepengendali MUN Entity under common-control of MUN	Piutang non-usaha Non-trade receivables
PT Jalan Tol Seksi Empat	Entitas sepengendali MUN Entity under common-control of MUN	Piutang non-usaha Non-trade receivables
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Entitas asosiasi tidak langsung Indirect associated entity	Piutang non-usaha Non-trade receivables
PT Intisentosa Alambahtera	Entitas asosiasi tidak langsung Indirect associated entity	Piutang non-usaha Non-trade receivables
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Entitas asosiasi tidak langsung Indirect associated entity	Jasa manajemen Management fee

Piutang kepada ISAB merupakan piutang modal kerja berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 3 April 2012 yang dikenakan bunga sesuai dengan USD LIBOR ditambah 3,5% per tahun dan memiliki tanggal jatuh tempo sampai 10 Januari 2020.

Seluruh piutang dari ISAB telah dilunasi pada tanggal 10 Maret 2023.

Piutang dari JTSE dan MMN merupakan transaksi atas jasa manajemen.

Manajemen tidak melakukan pembentukan penyisihan penurunan nilai atas piutang tersebut karena manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut akan tertagih.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICTS OF INTEREST OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Nature of Relationships with Related Parties

In the normal course of business, the Company conducts business and financial transactions with related parties. The Company's relationships with related parties are described below:

Due from ISAB working capital receivable based on Shareholder Loan Agreement dated April 3, 2012. bears interest at USD LIBOR plus 3.5% per annum and have maturity date until January 10, 2020. As of the issuance date of consolidated financial statements.

The non-trade receivables from ISAB has been fully repaid on March 10, 2023.

Due from JTSE and MMN represents management fee transaction.

Management does not provide any allowance for impairment of this receivable due to the management believes that such receivable is collectible.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Perseroan senantiasa memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi/terafiliasi merupakan transaksi yang wajar. Untuk itu, Perseroan selalu mempertimbangkan dan memenuhi segala persyaratan dalam peraturan perundang-undangan sebelum melakukan transaksi berelasi/terafiliasi direalisasikan.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi/terafiliasi yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Anggaran Dasar Perseroan.

Pernyataan Direksi bahwa Transaksi telah Memenuhi Prosedur Memadai dan Sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum

Direksi memandang bahwa transaksi dengan pihak berelasi/terafiliasi telah memenuhi prosedur memadai serta sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Seluruh transaksi pada tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan praktik bisnis yang berlaku umum dan prinsip *arm's length* (prinsip transaksi yang wajar), selain mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk Memastikan Transaksi Dilakukan sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku umum, yang antara lain dilakukan dengan memenuhi Prinsip Transaksi yang Wajar (*Arms-Lenght Principle*)

Dewan Komisaris dan Komite Audit berperan dalam memastikan bahwa transaksi afiliasi atau berelasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang memadai. Terutama, memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik bisnis yang berlaku umum, dalam hal ini memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).

Transaksi afiliasi atau transaksi material yang dilakukan Perseroan juga telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya pengelolaan Perseroan.

Description of the Fairness of the Transaction

The Company always ensures that transactions involving related or affiliated parties are fair. Therefore, the Company always considers and meets all statutory requirements before engaging in related/affiliated transactions.

Compliance with Related Regulations and Provisions

All transactions with related/affiliated parties conducted by the Company have been in accordance with applicable laws and regulations. Among them are the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliate and Conflict of Interest Transactions, as well as the Company's Articles of Association.

A Statement from the Board of Directors that Transactions Have Complied with Adequate Procedures and are in Accordance with Generally Accepted Business Practices

The Board of Directors believes that transactions with related/affiliated parties followed adequate procedures and were in accordance with generally accepted business practices. All transactions in 2023 were carried out in accordance with generally accepted business practices and the arm's length principle (fair transaction principles), as well as applicable laws and regulations.

The Role of the Board of Commissioners and the Audit Committee to Ensure that Transactions are Carried Out in accordance with Generally Accepted Business Practices, which, Among Others, are Conducted by Complying with the Arms-Length Principle

The Board of Commissioners and the Audit Committee are responsible for ensuring that affiliated or related transactions follow proper procedures. In particular, ensuring that transactions are carried out in accordance with applicable laws and regulations as well as generally accepted business practices, such as the arm's length principle.

Affiliate transactions and material transactions conducted by the Company are also disclosed in the annual financial report. This activity is part of the Board of Commissioners' oversight of the company's management.

Rujukan Informasi Transaksi dengan Pihak Berelasi pada Laporan Keuangan

Uraian terkait dengan transaksi dengan pihak afiliasi/berelasi ini juga disampaikan pada laporan keuangan yang telah diaudit, seperti terdapat di Laporan Tahunan ini, yaitu bagian lampiran Laporan Keuangan Audit Catatan 36.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tidak terdapat perubahan peraturan dan atau perundang-undangan yang berdampak pada bisnis Perseroan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PADA TAHUN BUKU

Informasi Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Amandemen tersebut tidak berdampak secara signifikan pada laporan keuangan Perseroan.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perseroan pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- Amandemen PSAK 1: "Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan";
- Amandemen PSAK 73: "Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik".

Reference Information on Transactions with Related Parties in Financial Statements

Descriptions of transactions with affiliated/related parties are also included in the audited financial reports, which are available in this Annual Report, which is the appendix of the Audit Financial Statements Note 36.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS

There are no changes in laws and regulations that have an impact on the Company's business.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED IN THE FISCAL YEAR

Information on Changes in Accounting Policies

The Company made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2024, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Company.

Those amendments had no significant impact on the financial statements of the Company.

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Company.

Effective beginning on or after January 1, 2024

- Amendment to PSAK 1: "Non-current Liabilities with Covenants";
- Amendment to PSAK 73: "Lease liability in a Sale and Leaseback".

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Perseroan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Alasan Perubahan

Perubahan atas PSAK tersebut di atas adalah untuk menyelaraskan antara PSAK dan International Financial Reporting Standard (IFRS).

Dampaknya terhadap Laporan Keuangan

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya.

Amandemen tersebut tidak berdampak secara signifikan pada laporan keuangan Perseroan.

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. Pillar 1 International Financial Accounting Standards,
2. Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),
3. Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and
4. Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.

Reason for Changes

The amendments to PSAK mentioned above are to harmonize between PSAK and International Financial Reporting Standard (IFRS).

Impacts on the Financial Statements

The implementation of the following new and revised standards and interpretations did not result in significant changes to the Company's accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported for the current or prior financial years.

The amendments did not have a significant impact on the Company's financial statements.



05



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Perseroan menjadikan penerapan prinsip-prinsip GCG sebagai komitmen yang terus dipraktikkan dan dikembangkan pada setiap kegiatan usaha.

The Company makes the implementation of GCG principles a commitment that continues to be practiced and developed in every business activity.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan inisiatif yang sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan, terutama melalui kepercayaan para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham. Perseroan meyakini hal tersebut, bahkan GCG dapat mendukung pencapaian kinerja secara berkelanjutan.

Karena itu, Perseroan menjadikan penerapan prinsip-prinsip GCG sebagai komitmen yang terus dipraktikkan dan dikembangkan pada setiap kegiatan usaha Perseroan. Prinsip GCG akan terus sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta dinamika di lingkungan industri, Perseroan meyakini dalam menciptakan kinerja bisnis yang berkelanjutan, sesuai dengan visi dan misi Perseroan.

Perseroan juga meyakini, penerapan GCG mampu memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Begitu juga terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Good corporate governance (GCG) implementation is a very important initiative to maintain and improve the Company's reputation, mainly through the trust of stakeholders, specifically shareholders. The Company believes that GCG can even support the achievement of sustainable performance.

Therefore, the Company considers the implementation of GCG principles a commitment that continues to be practiced and developed in every business activity of the Company. GCG principles will continue to be in accordance with the development of laws and regulations and the dynamics in the industrial environment. The Company believes in creating sustainable business performance in accordance with its vision and mission.

The Company also believes that the GCG implementation can provide maximum added value for the Company. Likewise for shareholders and other stakeholders.

Komitmen dan Prinsip Penerapan GCG

Commitment and Principles of GCG Implementation

Perseroan memastikan bahwa komitmen penerapan GCG dilaksanakan pada seluruh aspek kegiatan usaha. Penerapan komitmen dan prinsip tersebut mengacu pada 4 (empat) pilar tata kelola korporat yang mencakup: (1) perilaku beretika; (2) akuntabilitas; (3) transparansi; dan (4) keberlanjutan.

The Company ensures that GCG implementation commitments are carried out in all aspects of business activities. The implementation of these commitments and principles refers to the 4 (four) pillars of corporate governance which include: (1) ethical behavior; (2) accountability; (3) transparency; and (4) sustainability.

Sedangkan prinsip penerapan GCG terdiri atas 8 (delapan) yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok: (1) prinsip-prinsip yang mengatur organ-organ penyelenggara governansi korporat, (2) prinsip-prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh organ-organ di atas, dan (3) kelompok prinsip yang mengatur penerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat.

Meanwhile, the principles of GCG implementation consist of 8 (eight), which are divided into 3 (three) groups: (1) principles governing the organs administering corporate governance, (2) principles governing the processes and outputs produced by the organs above, and (3) groups of principles governing the beneficiaries of the implementation of corporate governance.

Adapun 8 (delapan) prinsip dimaksud diuraikan dalam tabel di bawah ini:

The 8 (eight) principles are described in the table below:

Prinsip Principle	Uraian	Description
Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Principle 1: Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.	The Board of Directors and Board of Commissioners carry out their roles and responsibilities independently to create sustainable value for the long-term best interests of the corporation and shareholders by taking into account the interests of stakeholders.
Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Principle 2: Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris. Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.	Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are selected and appointed in such a way that the composition of the Board of Directors as the management organ and the composition of the Board of Commissioners as the supervisory organ are diverse and each consists of Directors and Commissioners who have the commitment, knowledge, ability, experience, and expertise needed to appropriately fulfill the management role of the Board of Directors and the supervisory role of the Board of Commissioners. Remuneration is designed to effectively align the interests of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with the corporation's long-term interests and sustainable value creation.
Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Principle 3: Work Relations between the Board of Directors and the Board of Commissioners	Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.	The Board of Directors and the Board of Commissioners have a close, open, constructive, professional, and trusting working relationship for the best interests of the corporation.
Prinsip 4: Perilaku Etis Principle 4: Ethical Behavior	Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.	The corporation has a commitment to act ethically and responsibly, upholding the values and culture of the organization.

Prinsip Principle	Uraian	Description
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan Principle 5: Risk Management, Internal Control and Compliance	Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas.	The Corporation implements corporate governance practices that are integrated with the implementation of internal control and risk management systems, as well as an effective compliance management system to support the achievement of corporate goals, vision, mission, objectives, and performance targets in conducting business with integrity.
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi Principle 6: Disclosure and Transparency	Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.	The corporation makes accurate and timely disclosures regarding all material matters concerning the corporation.
Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham Principle 7: Shareholders' Rights	Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.	Corporations protect and facilitate the exercise of shareholder rights, as well as ensure the fair treatment of shareholders, specifically minority shareholders. All shareholders have the opportunity to obtain effective compensation for violations of their rights.
Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan Principle 8: Stakeholders' Rights	Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.	The corporation recognizes the rights of stakeholders as outlined in applicable laws and regulations or an agreement reached by the corporation and fosters active collaboration with stakeholders in the creation of wealth, employment, and financially sound business continuity.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN GCG

Perseroan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik, dengan mengacu pada sejumlah ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta
5. Peraturan Bursa Efek Indonesia.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Mengingat Perseroan merupakan perusahaan terbuka, Perseroan wajib memenuhi pedoman dalam yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

LEGAL BASIS OF GCG IMPLEMENTATION

The Company implements good corporate governance practices by referring to several provisions, which include:

1. Law (UU) No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law No. 8 of 1995 on Capital Markets;
3. The 2021 Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG);
4. Financial Services Authority (POJK) Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance; and
5. Indonesian Stock Exchange Regulations.

IMPLEMENTATION OF PUBLIC LISTED COMPANY GOVERNANCE GUIDELINES

Considering that the Company is a public company, the Company must abide by internal guidelines established by the Financial Services Authority as specified in OJK Circular Letter (SEOJK) No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

Informasi pelaksanaan Perseroan dalam menerapkan pedoman tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

The following table describes information pertaining to the Company's implementation of these guidelines:

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Pelaksanaan di Perseroan Implementation in the Company
	No.	Perihal Subject	
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham Aspect 1: Public Company Relations with Shareholders in Guaranteeing Shareholders' Rights			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1: Increasing the value of holding a General Meeting of Shareholders (GMS).	1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi. In order to promote independence, a public company has both open and closed voting mechanisms or technical procedures.	Pelaksanaan RUPS Perseroan telah memenuhi prinsip dan rekomendasi. The Company's GMS implementation has complied with the principles and recommendations.
	1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Public Company's Board of Directors and members of the Board of Commissioners attend the Annual GMS.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diundang untuk datang ke setiap RUPS yang dilaksanakan. All members of the Company's Board of Directors and members of the Board of Commissioners are invited to attend the Annual GMS.
	1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company's Website for at least 1 (one) year.	Informasi pelaksanaan dan keputusan RUPS telah dipublikasikan di situs web Perseroan yang beralamat di: www.nusantarainfrastructure.com Information on the implementation and resolutions of the GMS has been published on the Company's website at: www.nusantarainfrastructure.com
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2: Improving the quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.	2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. A Public Company has a policy for communicating with its shareholders, or investors.	Perseroan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemegang saham atau investor; dan lainnya . Media komunikasi yang digunakan, antara lain RUPS, <i>Public Expose</i> , investor dan <i>analyst meeting</i> . The Company submitted periodic reports to shareholders, investors, and others. GMS, Public Expose, investor and analyst meetings are among the communication mediums used.
	2.2	Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. A public company discloses its communication policy with shareholders or investors on its Website.	Laporan pelaksanaan tata kelola, informasi kinerja Perseroan, serta informasi penting lainnya untuk pemegang saham yang disyaratkan peraturan perundang-undangan telah dipublikasikan di situs web Perseroan yang beralamat di: www.nusantarainfrastructure.com Reports on governance implementation, information on the Company's performance, and other relevant shareholder information required by laws and regulations have been published on the Company's website at: www.nusantarainfrastructure.com .
Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners.	3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka. Determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of a public company.	Prinsip dan rekomendasi ini telah dijalankan, seperti tercermin dalam komposisi Dewan Komisaris saat ini. These principles and recommendations have been applied, as reflected by the current Board of Commissioners composition.
	3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of members of the Board of Commissioners considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required	Prinsip dan rekomendasi ini telah dijalankan, seperti tercermin dalam komposisi Dewan Komisaris saat ini. These principles and recommendations have been applied, as evidenced by the current Board of Commissioners composition.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation		Pelaksanaan di Perseroan Implementation in the Company
	No.	Perihal Subject	
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4: Improving the quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.	4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy in place to evaluate the Board of Commissioners' performance.	Penilaian terhadap Dewan Komisaris secara tidak langsung dilakukan saat perumusan remunerasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. The Nomination and Remuneration Committee assesses the Board of Commissioners indirectly during the remuneration formulation process.
	4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the annual report of the public company.	Laporan Tahunan telah memuat penilaian kinerja Dewan Komisaris yang terdapat dalam bab "Tata Kelola Perusahaan" ini. The performance assessment of the Board of Commissioners has been presented in the Annual Report under the "Corporate Governance" chapter.
	4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy that requires members of the Board of Commissioners to resign if they are involved in financial crimes.	Kebijakan pengunduran diri telah termuat dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners' resignation policy is outlined in the Work Guidelines for the Board of Commissioners.
	4.4	Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. In the Nomination process for members of the Board of Directors, the Board of Commissioners or the committee carrying out the Nomination and Remuneration Functions formulates a succession policy.	Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang antara lain melakukan penilaian kepada calon anggota Direksi sebelum ditetapkan oleh RUPS. The Company has a Nomination and Remuneration Committee in place that, among other things, assesses prospective Board of Directors members before they are appointed by the GMS.
Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: Functions and Roles of the Board of Directors			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.	5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of a public company as well as the effectiveness of decision making.	Prinsip dan rekomendasi telah dijalankan, sehingga pengambilan keputusan berjalan efektif di Perseroan. These Principles and recommendations have been applied to ensure that decision-making in the Company functions effectively.
	5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of the Board of Directors considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Perseroan telah memperhatikan keberagaman dalam penentuan komposisi Direksi. The Company has taken diversity into consideration in determining the composition of the Board of Directors.
	5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge of accounting.	Anggota Direksi yang membawahi bidang keuangan dan akuntansi memiliki keahlian dan pengalaman di bidang keuangan. Members of the Board of Directors in charge of finance and accounting have expertise and experience in the field of finance.
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6: Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.	6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy in place to evaluate the Board of Directors' performance.	Penilaian terhadap Direksi secara tidak langsung dilakukan saat perumusan remunerasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. The Nomination and Remuneration Committee assesses the Board of Directors indirectly during the remuneration formulation process.
	6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Directors is disclosed in the annual report of the Public Company.	Penilaian terhadap Direksi secara tidak langsung dilakukan saat perumusan remunerasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. The Nomination and Remuneration Committee assesses the Board of Directors indirectly during the remuneration formulation process.
	6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy requiring members of the Board of Directors to resign if they are involved in financial crimes.	Kebijakan pengunduran diri Direksi telah tertuang dalam Pedoman Kerja Direksi. The Board of Directors' resignation policy is outlined in the Work Guidelines for the Board of Directors.

Prinsip Principle	Rekomendas Recommendation		Pelaksanaan di Perseroan Implementation in the Company
	No.	Perihal Subject	
Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation			
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7: Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.	7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . A Public Company has a policy in place to prevent insider trading.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait <i>insider trading</i> , yang terutama ditujukan demi terciptanya integritas dan tanggung jawab Perseroan kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. The Company has an insider trading policy in place that is primarily focused at increasing the Company's integrity and responsibility to shareholders and other stakeholders.
	7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> . A Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies in place.	Kebijakan terkait anti korupsi dan anti <i>fraud</i> Perseroan merupakan bagian dari Kode Etik dan Norma Perilaku yang telah diterapkan Perseroan. The anti-corruption and anti-fraud policies implemented by the Company are part of the Company's Code of Ethics and Behavioral Norms.
	7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. A public company has policies in place regarding supplier or vendor selection and capacity building.	Perseroan telah memiliki mekanisme seleksi pemasok seperti tertuang dalam kebijakan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dilaksanakan oleh bagian <i>procurement</i> . As outlined in the policy and mechanism for procurement of goods and services, the Company has a supplier selection mechanism in place. Procurement activities are carried out by the procurement department.
	7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. A Public Company has policies in place to ensure the fulfillment of creditor rights.	Perseroan memenuhi segala hak kreditur sesuai dengan yang diperjanjikan antara Perseroan dengan kreditur. The Company fulfills all creditor rights in accordance with what the Company and the creditor agreed upon.
	7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . A Public Company has a whistleblower system policy in place.	Perseroan telah memiliki pedoman <i>whistleblowing system</i> serta menjalankannya sebagai sistem pelaporan pelanggaran. The Company has whistleblowing system guidelines in place for the operation of the violation reporting system.
	7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan A Public Company has a policy for the provision of long-term incentives to Directors and employees.	Perseroan telah memiliki mekanisme pemberian insentif jangka panjang, antara lain berupa bonus, kesehatan, serta manfaat pensiun. The Company has a mechanism in place to provide long-term incentives such as bonuses, health and retirement benefits.
Aspek 5 : Keterbukaan Informasi Aspect 5: Information Disclosure			
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8: Improving the Implementation of Information Disclosure	8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. Aside from the website as a medium for information disclosure, a Public Company benefit from the broader use of information technology.	Selain menggunakan situs web, keterbukaan informasi Perseroan juga dilaksanakan melalui <i>investor meeting</i> maupun paparan publik dengan teknologi digital (virtual) serta media sosial: Instagram, Facebook dan Twitter. Aside from the website, the Company disclosed information through investor meetings and public expose via digital (virtual) technologies and social media platforms such as Instagram, Facebook, and Twitter.
	8.2	Laporan tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The annual report of a public company discloses the ultimate beneficial owner of the public company with at least 5% of share, in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner of the Public Company through the major and controlling shareholders.	Laporan tahunan telah mengungkapkan komposisi pemegang saham, baik pemilik manfaat akhir maupun pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan 5% lebih. The annual report disclosed the composition of shareholders, including both ultimate beneficial owners and public shareholders with more than 5% of share.

Struktur dan Kebijakan Tata Kelola

Structure and Policy of Governance

STRUKTUR GCG

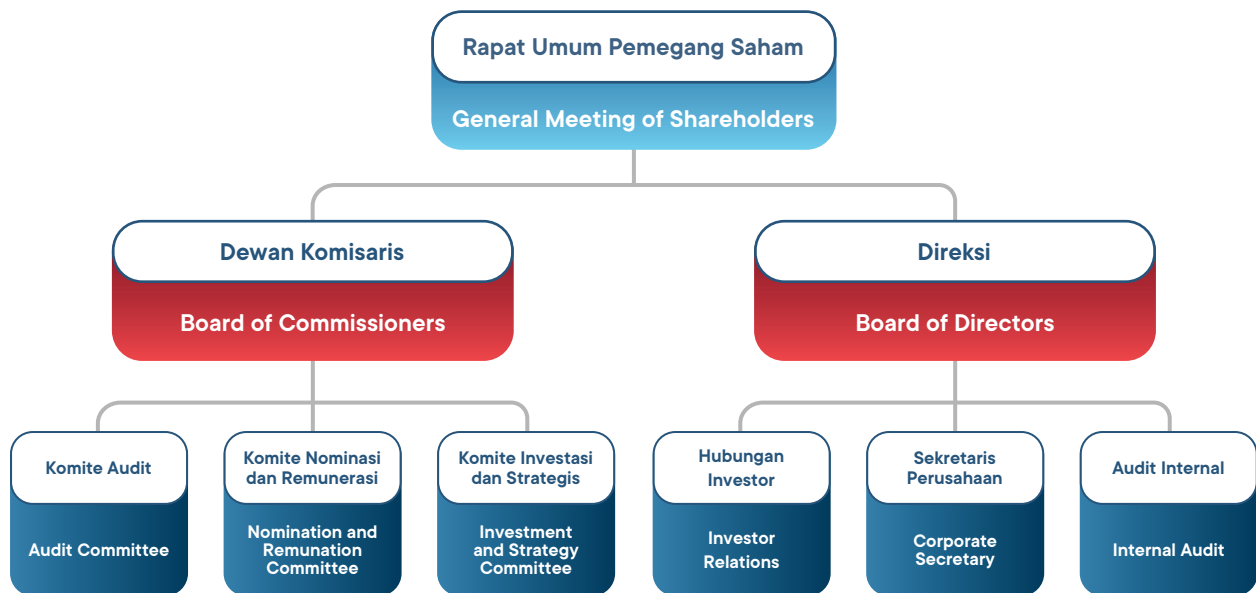
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur GCG Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS memegang peranan sebagai organ tertinggi dalam struktur yang memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan.

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang berperan menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Direksi adalah organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan Perseroan dan menjadi perwakilan Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

GCG STRUCTURE

The Company's GCG structure is comprised of a General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, in accordance with Law (UU) Number 40 of 2007. Within the specified parameters, the GMS serves as the highest organ in the structure with specific jurisdiction not owned by the Board of Commissioners or the Board of Directors.

The Board of Commissioners is an organ of the Company whose responsibility is to supervise and advise the Board of Directors. The Board of Directors is an organ of the Company with duties and responsibilities in managing and administering the Company as well as representing the Company inside and outside of the court.



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan 24 Mei 2023

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun 2023

Penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diperbarui dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 serta sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Keterlibatan Pihak Independen

Pelaksanaan penghitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPS, termasuk pencatatan dan penyusunan berita mata acara dilakukan oleh Notaris.

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2023

Stages of Implementation of the 2023 Annual GMS

Kegiatan Activity	Pelaksanaan Implementation
Pemberitahuan kepada OJK Notification to the OJK	10 April 2023 melalui surat dengan Nomor 018/NI-CORSEC/IV/23 April 10, 2023 through letter Number 018/NI-CORSEC/IV/23
Pengumuman RUPS Announcement of GMS	10 April 2023 melalui surat dengan Nomor 019/NI-CORSEC/IV/23 April 10, 2023 through letter Number 019/NI-CORSEC/IV/23
Pemanggilan RUPS Convocation of GMS	2 Mei 2023 melalui surat dengan Nomor 022/NI-CORSEC/V/23 May 2, 2023 through letter Number 022/NI-CORSEC/V/23
Pelaksanaan RUPS Implementation of GMS	24 Mei 2023 May 24, 2023
Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPS Announcement of Summary of Minutes of GMS Results	27 Mei 2023 melalui surat dengan Nomor 029/NI-CORSEC/V/23 May 27, 2023 through letter Number 029/NI-CORSEC/V/23
Penyampaian Akta Risalah RUPS Submission of Deed of Minutes of GMS	23 Juni 2023 melalui surat dengan Nomor 036/NI-CORSEC/V/23 June 23 through letter Number 036/NI-CORSEC/V/23

Kesempatan Tanya Jawab

Pimpinan RUPS Tahunan (RUPST) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Kesempatan tanya-jawab tersebut diberikan sebelum keputusan diambil. Pada pelaksanaannya, tidak ada pertanyaan dan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada mata acara RUPST.

IMPLEMENTATION OF THE 2023 GMS

In 2023, the Company held 3 (three) General Meetings of Shareholders (GMS), 1 (one) Annual GMS and 2 (two) Extraordinary GMS.

Annual GMS May 24, 2023

Mechanism for the implementation of the 2023 Annual GMS

The Company's implementation of the GMS follows the mechanism outlined in the Company's Articles of Association and POJK No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, which was updated with POJK No. 15/POJK.04/2020 and as amended by POJK No. 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017.

Independent Party Involvement

The implementation of vote counting in the GMS decision-making, including the recording and preparation of the minutes, is conducted by the Notary.

Q&A Sessions

The Annual GMS (AGMS) Chairperson allows Shareholders and/or Shareholders' proxies who are present physically and electronically to ask questions during any discussion of the AGMS agenda. Before a decision is made, the opportunity to ask questions is provided. There were no queries from Shareholders and/or Shareholder proxies on the AGMS agenda during its implementation.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Decision Making Mechanism

Deliberation is used to reach a consensus on decisions. If the Shareholders or Shareholders' Attorneys do not approve or abstain from voting, the decision is made by voting.

Agenda, Keputusan, dan Realisasi Hasil RUPS Tahun 2023

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dilakukan pada 24 Mei 2023. Rincian agenda dan keputusannya diuraikan pada tabel di bawah ini.

Agenda, Resolutions, and Realization of the Results of the 2023 GMS

The Annual GMS was held on May 24, 2023. The agenda and resolutions are detailed in the table below.

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 1 Agenda 1			
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.	Setuju: 15.134.972.108 (99,999%) Tidak Setuju: 17.200 (0,000%) Abstain: 400.000 (0,000%)	Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, termasuk laporan tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya dengan pendapat: "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".	Terealisasi
Approval of the Company's Annual Report, including Ratification of the Annual Financial Report and Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties for the 2022 Financial Year.	Agree: 15,134,972,108 (99.999%) Disagree: 17,200 (0.000%) Abstain: 400,000 (0.000%)	Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022, including the annual report of the Company's Board of Directors, and ratified the Company's Board of Commissioners' supervisory report, as well as the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, which were audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja. (Member of Ernst & Young Global Limited). The Public Accountant Firm's audit opinion is: "The consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Nusantara Infrastructure Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2022, and consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".	Realized

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 2 Agenda 2			
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022.	Setuju: 15.134.972.108 (99,999%) Tidak Setuju: 17.200 (0,000%) Abstain: 400.000 (0,000%)	Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2022 sebesar Rp72.439.030.119 (Tujuh Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah), dan saldo laba per 31 Desember 2022 sebesar Rp593.213.262.304 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) sebagai berikut: - Sebesar Rp724.390.301,19 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Satu koma Satu Sembilan Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; - Sisanya disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial dan pembagian dividen masa depan; dan - Untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang berlangsung, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.	Terealisasi
Approval of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending December 31, 2022.	Agree: 15,134,972,108 (99.999%) Disagree: 17,200 (0.000%) Abstain: 400,000 (0.000%)	Approved the use of Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity for the 2022 fiscal year of Rp72,439,030,119 (Seventy Two Billion Four Hundred Thirty-Nine Million Thirty Thousand One Hundred Nineteen Rupiah) and retained earnings as of December 31, 2022, of Rp593,213,262,304 (Five Hundred Ninety-Three Billion Two Hundred Thirteen Million Two Hundred Sixty-Two Thousand Three Hundred Four Rupiah) as follows: - According to the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law, a mandatory reserve of Rp724,390,301.19 (Seven Hundred Twenty-Four Million Three Hundred Ninety Thousand Three Hundred One point One Nine Rupiah) is set aside; - The remainder is set aside as other reserves in accordance with Article 70 of the Limited Liability Company Law, which can be used for the needs of the Company, such as business development, working capital, social and future dividend distribution; - For the purpose of the Company's interests and due to the Company's ongoing expansion, the Company will not distribute dividends to its shareholders.	Realized
Mata Acara 3 Agenda 3			
Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Setuju: 15.134.972.108 (99,999%) Tidak Setuju: 17.200 (0,000%) Abstain: 400.000 (0,000%)	Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apa pun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, selanjutnya Dewan Komisaris akan memberikan kuasa kepada Direksi sehubungan dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.	Terealisasi
Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2023.	Agree: 15,134,972,108 (99.999%) Disagree: 17,200 (0.000%) Abstain: 400,000 (0.000%)	Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority ("OJK") to audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year and determine the honorarium and other terms of appointment as well as appoint a substitute Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties for any reason whatsoever based on the provisions of the Capital Market regulations or other applicable laws and regulations. Subsequently, the Board of Commissioners will authorize the Board of Directors in connection with the appointment of the Public Accounting Firm.	Realized

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 4 Agenda 4			
Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Setuju: 15.134.972.108 (99,999%) Tidak Setuju: 17.200 (0,000%) Abstain: 400.000 (0,000%)	1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini ditutup, sekaligus mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa mereka berikan bagi Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tanggung jawab serta tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku perseroan. 2. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diberhentikan tersebut untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Dengan demikian, susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: • Komisaris Utama: Manuel V. Pangilinan • Komisaris: Rodrigo E. Franco • Komisaris Independen: Johny J. Lumintang • Komisaris Independen: Farid Harianto DIREKSI: • Direktur Utama: M. Ramdani Basri • Direktur: Danni Hasan • Direktur: Benny S. Santoso • Direktur: Ridwan Irawan • Direktur: Denn Charly G. Espanola • Direktur: Amadeo N. Bejec • Direktur: Christopher Daniel C. Lizo • Direktur: Francis Emmanuel D. Rojas 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kepengurusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap tidak perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.	Terealisasi

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Approval of the reappointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.	Agree: 15,134,972,108 (99.999%) Disagree: 17,200 (0.000%) Abstain: 400,000 (0.000%)	- Respectfully dismissed all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing date of this Meeting while expressing gratitude and giving the highest appreciation for their services to the Company and providing release and discharge (acquit et de charge) for their responsibilities and actions of management and supervision that they have carried out during their term of office as long as they are evidenced in the Company's books. - Reappointed all of the dismissed members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for a term of office of 5 (five) years as of the closing of this Meeting, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time. Thus, the composition of Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows: BOARD OF COMMISSIONERS: - President Commissioner: Manuel V. Pangilinan - Commissioner: Rodrigo E. Franco - Independent Commissioner: Johny J. Lumintang - Independent Commissioner: Farid Harianto BOARD OF DIRECTORS: - President Director: M. Ramdani Basri - Director: Danni Hasan - Director: Benny Setiawan Santoso - Director: Ridwan Irawan - Director: Denn Charly G. Espanola - Director: Amadeo N. Bejec - Director: Christopher Daniel C. Lizo - Director: Francis Emmanuel D. Rojas - Granted authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to declare the management of the Meeting in a separate deed and take all necessary actions on the Meeting's resolutions, including to confirm the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, submit applications and/or notifications of changes in the Company's Data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and relevant institutions including but not limited to conducting matters deemed unnecessary by the Company's Board of Directors and applicable laws and regulations to obtain approval from the competent institution.	Realized
Mata Acara 5 Agenda 5			
Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2023.	Setuju: 15.134.972.108 (99,999%) Tidak Setuju: 17.200 (0,000%) Abstain: 400.000 (0,000%)	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan tugas dan wewenang serta honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.	Terealisasi
Determination of duties and authorities as well as salaries and benefits for members of the Company's Board of Directors, and salaries or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for 2023.	Agree: 15,134,972,108 (99.999%) Disagree: 17,200 (0.000%) Abstain: 400,000 (0.000%)	Approved to authorize the Nomination and Remuneration Committee, in which case the function is carried out by the Company's Board of Commissioners, to determine the duties and authorities, as well as honorarium or salary, as well as other benefits, for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the financial year 2023, taking the Company's financial condition into consideration.	Realized

RUPS Luar Biasa 30 Oktober 2023

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2023

Penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diperbarui dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 serta sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Keterlibatan Pihak Independen

Pelaksanaan penghitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPS, termasuk pencatatan dan penyusunan berita mata acara dilakukan oleh Notaris.

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA

Stages of Implementation of the Extraordinary GMS

Kegiatan Activity	Pelaksanaan Implementation
Pemberitahuan kepada OJK Notification to the OJK	14 September 2023 melalui surat dengan Nomor 051/NI-CORSEC/IX/23 September 14, 2023 through letter Number 051/NI-CORSEC/IX/23
Pengumuman RUPS Announcement of GMS	21 September 2023 melalui surat dengan Nomor 055/NI-CORSEC/IX/23 September 21, 2023 through letter Number 055/NI-CORSEC/IX/23
Pemanggilan RUPS Convocation of GMS	6 Oktober 2023 melalui surat dengan Nomor 059/NI-CORSEC/X/23 October 6, 2023 through letter Number 059/NI-CORSEC/X/23
Pelaksanaan RUPS Implementation of GMS	30 Oktober 2023 October 30, 2023
Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPS Announcement of Summary of Minutes of GMS Results	1 November 2023 melalui surat dengan Nomor 073/NI-CORSEC/XI/23 November 1, 2023 through letter Number 073/NI-CORSEC/XI/23
Penyampaian Akta Risalah RUPS Submission of Deed of Minutes of GMS	28 November 2023 melalui surat dengan Nomor 101/NI-CORSEC/XI/23 November 28, 2023 through letter Number 101/NI-CORSEC/XI/23

Kesempatan Tanya Jawab

Pimpinan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB. Kesempatan tanya-jawab tersebut diberikan sebelum keputusan diambil. Pada pelaksanaannya, tidak ada pertanyaan dan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada mata acara RUPSLB.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Agenda, Keputusan, dan Realisasi Hasil RUPSLB

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dilakukan pada 30 Oktober 2023. Rincian agenda dan keputusannya diuraikan pada tabel di bawah ini.

Extraordinary GMS October 30, 2023

Mechanism for the Implementation of the Extraordinary GMS in 2023

The Company's implementation of the GMS follows the mechanism outlined in the Company's Articles of Association and POJK No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, which was updated with POJK No. 15/POJK.04/2020 and as amended by POJK No. 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017.

Independent Party Involvement

The implementation of vote counting in the GMS decision-making, including the recording and preparation of the minutes, is conducted by the Notary.

Q&A Session

The Extraordinary GMS (EGMS) Chairperson allows Shareholders and/or Shareholders' proxies who are present physically and electronically to ask questions during any discussion of the EGMS agenda. Before a decision is made, the opportunity to ask questions is provided. There were no queries from Shareholders and/or Shareholder proxies on the EGMS agenda during its implementation.

Decision Making Mechanism

Deliberation is used to reach a consensus on decisions. If the Shareholders or Shareholders' Attorneys do not approve or abstain from voting, the resolution is made by voting.

Agenda, Resolutions, and Realization of the Results of the EGMS

The Extraordinary GMS was held on October 30, 2023. The agenda and resolutions are detailed in the table below.

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 1 Agenda 1			
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Setuju: - Tidak Setuju: - Abstain: -	Mata Acara Pertama RUPSLB tidak dibahas lebih lanjut sehingga tidak dilakukan pemungutan suara serta pengambilan keputusan.	-
Approval of Changes in the Company's Articles of Association.	Agree: - Disagree: - Abstain: -	The First Agenda of the EGMS was not discussed further, thus no voting and decision-making were conducted.	-
Mata Acara 2 Agenda 2			
Persetujuan Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Setuju: 15.000.351.412 (100%) Tidak Setuju: Nihil Abstain: Nihil	- Menyetujui pengunduran diri Bapak Rodrigo Emmanuel Franco dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepadanya atas segala tindakan pengawasan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. - Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rogelio L. Singson sebagai Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama: Manuel V. Pangilinan - Komisaris: Rogelio L. Singson - Komisaris Independen: Johnny J. Lumintang - Komisaris Independen: Farid Harianto - Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.	Terealisasi

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Approval of Changes in Members of the Company's Board of Commissioners.	Agree: 15,000,351,412 (100%) Disagree: Nil Abstain: Nil	1. Approved Mr. Rodrigo Emmanuel Franco's resignation as the Company's Commissioner by granting him full release and discharge (Acquit et de Charge) for all supervisory actions during his term of office and effective as of the closing of the Meeting. 2. Approved to appoint Mr. Rogelio L. Singson as the new Commissioner of the Company with a term of office of 5 (five) years without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time and effective as of the closing of the Meeting. As a result of the changes made to the Company's Board of Commissioners, the composition of the Company's Board of Commissioners became as follows: BOARD OF COMMISSIONERS • President Commissioner: Manuel V. Pangilinan • Commissioner: Rogelio L. Singson • Commissioner: Johny J. Lumintang • Independent Commissioner: Farid Harianto 3. Approved granting the Board of Directors of the Company authority and power of attorney with substitution rights to state the resolutions of the Meeting in a separate deed and take all necessary actions for the resolutions of the Meeting, including changing the composition of the Company's Board of Commissioners, submitting requests and/or notifications of changes to the Company's Data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and related agencies including but not limited to doing matters deemed necessary by the Board of Directors of the Company and the applicable laws and regulations to obtain approval from the competent authority.	Realized

RUPS Luar Biasa 19 Desember 2023

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2023

Penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diperbarui dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 serta sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Keterlibatan Pihak Independen

Pelaksanaan penghitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPS, termasuk pencatatan dan penyusunan berita mata acara dilakukan oleh Notaris.

Extraordinary GMS December 19, 2023

Mechanism for the Implementation of the Extraordinary GMS in 2023

The Company's implementation of the GMS follows the mechanism outlined in the Company's Articles of Association and POJK No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, which was updated with POJK No. 15/POJK.04/2020 and as amended by POJK No. 10/POJK.04/2017 dated March 14, 2017.

Independent Party Involvement

The implementation of vote counting in the GMS decision-making, including the recording and preparation of the minutes, is conducted by the Notary.

TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA

Stages of Implementation of the Extraordinary GMS

Kegiatan Activity	Pelaksanaan Implementation
Pemberitahuan kepada OJK Notification to the OJK	3 November 2023 melalui surat dengan Nomor 075/NI-CORSEC/XI/23 November 3, 2023 through letter Number 075/NI-CORSEC/XI/23
Pengumuman RUPS Announcement of GMS	10 November 2023 melalui surat dengan Nomor 085/NI-CORSEC/XI/23 November 10, 2023 through letter Number 085/NI-CORSEC/XI/23
Pemanggilan RUPS Convocation of GMS	27 November 2023 melalui surat dengan Nomor 098/NI-CORSEC/XI/23 November 27, 2023 through letter Number 098/NI-CORSEC/XI/23
Pemanggilan RUPS (Koreksi) Convocation of GMS (Correction)	6 Desember 2023 melalui surat dengan Nomor 105/NI-CORSEC/XII/23 December 6, 2023 through letter Number 105/NI-CORSEC/XII/23
Pelaksanaan RUPS Implementation of GMS	19 Desember 2023 December 19, 2023
Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPS Announcement of Summary of Minutes of GMS Results	21 Desember 2023 melalui surat dengan Nomor 120/NI-CORSEC/XII/23 December 21, 2023 through letter Number 120/NI-CORSEC/XII/23
Penyampaian Akta Risalah RUPS Submission of Deed of Minutes of GMS	18 Januari 2024 melalui surat dengan Nomor 007/NI-CORSEC/I/24 January 18, 2024 through letter Number 007/NI-CORSEC/I/24

Kesempatan Tanya Jawab

Pimpinan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB. Kesempatan tanya-jawab tersebut diberikan sebelum keputusan diambil. Pada pelaksanaannya, tidak ada pertanyaan dan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada mata acara RUPSLB.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Agenda, Keputusan, dan Realisasi Hasil RUPSLB

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dilakukan pada 19 Desember 2023. Rincian agenda dan keputusannya diuraikan pada tabel di bawah ini.

Q&A Session

The Extraordinary GMS (EGMS) Chairperson allows Shareholders and/or Shareholders' proxies who are present physically and electronically to ask questions during any discussion of the EGMS agenda. Before a decision is made, the opportunity to ask questions is provided. There were no queries from Shareholders and/or Shareholder proxies on the EGMS agenda during its implementation.

Decision Making Mechanism

Deliberation is used to reach a consensus on decisions. If the Shareholders or Shareholders' Attorneys do not approve or abstain from voting, the resolution is made by voting.

Agenda, Resolutions, and Realization of the Results of the EGMS

The Extraordinary GMS was held on December 19, 2023. The agenda and resolutions are detailed in the table below.

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 1 Agenda 1			
Persetujuan atas rencana penambahan modal oleh perusahaan terkendali Perseroan yakni, PT Margautama Nusantara ("MUN"), yang mengakibatkan laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.	Pemegang Saham Independen yang Setuju: 2.310.068.723 (56,283%) Tidak Setuju: 417.444.601 (10,171%) Abstain: 9.604.100 (0,234%)	Menyetujui rencana penambahan modal oleh perusahaan terkendali Perseroan yakni, PT Margautama Nusantara ("MUN"), yang mengakibatkan laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan.	Terealisasi

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Approval of the additional capital plan by the Company's controlled entity, PT Margautama Nusantara ("MUN"), which resulted in the financial statements of MUN is no longer consolidated by the Company, in accordance with the provisions of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, and OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.	Independent Shareholders who Agree: 2,310,068,723 (56.283%) Disagree: 417,444,601 (10.171%) Abstain: 9,604,100 (0.234%)	Approved the additional capital plan by the Company's controlled entity, PT Margautama Nusantara ("MUN"), which resulted in MUN's financial statements no longer being consolidated by the Company.	Realized
Mata Acara 2 Agenda 2			
Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (go private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 64 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("Rencana Go Private"), yang meliputi: a. persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (delisting); b. persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan (i) status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan. c. persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Go Private; d. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada Rencana Go Private satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.	Setuju: 2.326.906.708 (56,694%) Tidak Setuju: 400.606.616 (9,760%) Abstain: 9.540.900 (0,232%)	Menyetujui rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (Go Private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 64 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("Rencana Go Private"), yang meliputi: a. persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (delisting); b. persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan (i) status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan. c. persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Go Private; d. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada Rencana Go Private satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.	Terealisasi

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Approval of the plan to change the Company's status from a public company to a private company (go private) in accordance with the provisions of Article 84A paragraph (2) of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets, as amended by Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development, and Article 64 of OJK Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market ("Go Private Plan"), which includes: a. approval of the delisting of the Company's shares from the Indonesia Stock Exchange; b. approval of the amendment to the Company's Articles of Association related to (i) the Company's status from a public company to a private company and (ii) the change of the Company's name. c. approval of the appointment of supporting professional parties required in connection with the Go Private Plan; d. granting full authority to the Company's Board of Directors to take any necessary or deemed necessary actions in connection with the implementation or completion of the Go Private Plan without any exception.	Agree: 2,326,906,708 (56.694%) Disagree: 400,606,616 (9.760%) Abstain: 9,540,900 (0.232%)	Approved the plan to change the Company's status from a public company to a private company (Go Private) in accordance with the provisions of Article 84A paragraph (2) of Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, as amended by Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development, and Article 64 of OJK Regulation No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market ("Go Private Plan"), which includes: a. approval of the delisting of the Company's shares from the Indonesia Stock Exchange; b. approval of the amendment to the Company's Articles of Association related to (i) the Company's status from a public company to a private company and (ii) the change of the Company's name. c. approval of the appointment of supporting professional parties required in connection with the Go Private Plan; d. granting full authority to the Company's Board of Directors to take any necessary or deemed necessary actions in connection with the implementation or completion of the Go Private Plan without any exception.	Realized

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 3 Agenda 3			
Persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private termasuk terkait dengan: (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan.	Setuju: 15.717.089.927 (98,551%) Tidak Setuju: 231.041.233 (1,448%) Abstain: 8.787.900 (0,055%)	Menyetujui perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private termasuk terkait dengan: (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan yang di dalamnya termasuk untuk menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat atau dipandang perlu termasuk untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.	Terealisasi
Approval of the amendments to all provisions of the Company's articles of association related to the Go Private Plan, including related to (i) the change of the Company's status from a public company to a private company and (ii) the change of the Company's name.	Agree: 15,717,089,927 (98,551%) Disagree: 231,041.233 (1,448%) Abstain: 8.787.900 (0,055%)	Approved the amendment of all provisions of the Company's articles of association in connection with the Go Private Plan including related to (i) the change of the Company's status from a public company to a private company and (ii) the change of the Company's name, including to approve granting authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors to state the resolutions of the Meeting in a separate deed and to take any actions necessary for the Meeting's resolutions or deemed necessary including to make changes to the Company's Articles of Association, submit applications for approval and/or submit notifications of changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and relevant institutions including but not limited to conducting matters deemed necessary by the Company's Board of Directors and applicable laws and regulations to obtain approval from the authorized institution.	Realized

RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Sepanjang tahun 2022, Perseroan melaksanakan RUPS 3 (tiga) kali, yaitu satu kali RUPS Tahunan dan dua kali RUPS Luar Biasa.

Agenda, Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dilakukan pada 11 Mei 2022. Rincian agenda dan keputusannya diuraikan pada tabel di bawah ini.

PREVIOUS YEAR'S GMS

In 2022, the Company held 3 (three) General Meetings of Shareholders (GMS), 1 (one) Annual GMS and 2 (two) Extraordinary GMS.

Agenda, Resolutions, and Realization of the Results of the AGMS

The Annual GMS was held on May 11, 2022. The agenda and resolutions are detailed in the table below.

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 1 Agenda 1			
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.	Setuju: 15.058.109.308 saham atau 99,999%. Tidak Setuju: 600 saham atau 0,000%. Abstain: Nihil	Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk laporan tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya dengan pendapat: "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"; dan	Berlaku saat Keputusan diambil
Approval of the Company's Annual Report, including Ratification of the Annual Financial Report and Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties for the 2021 Financial Year.	Agree: 15,058,109,308 shares or 99.999%. Disagree: 600 shares or 0.000%. Abstain: Nil	Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2021, including the annual report of the Company's Board of Directors, and ratified the Company's Board of Commissioners' supervisory report, as well as the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021, which were audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja. (Member of Ernst & Young Global Limited). The Public Accountant Firm's audit opinion is: "The consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Nusantara Infrastructure Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2021, and consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards"; and	Effective as of the Resolution is made
		Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.	Berlaku saat Keputusan diambil
		Approved the granting of full release and discharge (acquitt et de charge) of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the 2021 financial year, as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report.	Effective as of the Resolution is made

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 2 Agenda 2			
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.	Setuju: 15.058.109.308 saham atau 99,999%. Tidak Setuju: 600 saham atau 0,000%. Abstain: Nihil	Menyetujui penggunaan akumulasi laba hingga akhir tahun 2021 yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp5.989.245.890 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua Rupiah), yang terdiri dari laba bersih sebesar Rp59.892.459 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) dan saldo laba sebesar Rp520.774.232.185 (lima ratus dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut: - Sebesar Rp59.892.459 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; - Sisanya disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial dan pembagian dividen masa depan; dan - Untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang berlangsung, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.	Berlaku saat Keputusan diambil
Approval of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending December 31, 2021.	Agree: 15,058,109,308 shares or 99.999%. Disagree: 600 shares or 0.000%. Abstain: Nil	Approved the use of accumulated profits attributable to the Parent Entity's owners in the amount of Rp 5,989,245,890 (five billion nine hundred eighty-nine million two hundred forty-five thousand eight hundred and ninety Rupiah), consisting of a net profit of Rp 59,892,459 (fifty-nine million eight hundred ninety-two thousand four hundred fifty-nine Rupiah) and retained earnings of Rp 520,774,232,185 (five hundred twenty billion seven hundred seventy-four million two hundred thirty-two thousand one hundred and eighty-five Rupiah) as follows: - According to Article 70 of the Limited Liability Company Law, a mandatory reserve of Rp59,892,459 (fifty-nine million eight hundred ninety-two thousand four hundred fifty-nine Rupiah) is set aside. - The remainder is set aside as other reserves in accordance with Article 70 of the Limited Liability Company Law, which can be used for the Company's needs, such as business development, working capital, social and future dividend distribution; and - For the purpose of the Company's interests and due to the Company's ongoing expansion, the Company will not distribute dividends to its shareholders.	Effective as of the Resolution is made
Mata Acara 3 Agenda 3			
Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	Setuju: 15.058.109.308 saham atau 99,999%. Tidak Setuju: 600 saham atau 0,000%. Abstain: Nihil	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk; dan	Berlaku saat Keputusan diambil
Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2021.	Agree: 15,058,109,308 shares or 99.999%. Disagree: 600 shares or 0.000%. Abstain: Nil	Granted authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm to perform an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, as well as to determine the amount of audit services to be provided by the appointed public accountant; and	Effective as of the Resolution is made
		Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.	
		Granted authority and power to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant Firm if the appointed Public Accountant Firm is unable to carry out its duties for whatever reason based on the provisions of Capital Market regulations or other applicable laws.	

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 4 Agenda 4			
Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2022.	Setuju: 15.058.109.308 saham atau 99,999%. Tidak Setuju: 600 saham atau 0,000%. Abstain: Nihil	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan tugas dan wewenang serta honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.	Berlaku saat Keputusan diambil
Determination of duties and authorities as well as salaries and benefits for members of the Company's Board of Directors, and salaries or honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for 2022.	Agree: 15,058,109,308 shares or 99.999%. Disagree: 600 shares or 0.000%. Abstain: Nil	Approved to authorize the Nomination and Remuneration Committee, in which case the function is carried out by the Company's Board of Commissioners, to determine the duties and authorities, as well as honorarium or salary, as well as other benefits, for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the financial year 2022, considering the Company's financial condition.	Effective as of the Resolution is made
Mata Acara 5 Agenda 5			
Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perseroan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang menggunakan Standar Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020").	Setuju: 15.058.109.308 saham atau 99,999%. Tidak Setuju: 600 saham atau 0,000%. Abstain: Nihil	Menyetujui penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perseroan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang menggunakan Standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020").	Berlaku saat Keputusan diambil
Approval of Adjustment to Article 3 (three) of the Articles of Association In accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, as well as Government Regulation No. 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing, the Company is required to have a Business Identification Number ("NIB") which uses the 2020 Indonesian Business Field Standard Clarification ("KBLI 2020").	Agree: 15,058,109,308 shares or 99.999%. Disagree: 600 shares or 0.000%. Abstain: Nil	Approved the amendment to Article 3 (three) of the Articles of Association. The Company is required to have a Business Identification Number ("NIB") that uses the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields ("KBLI 2020") in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services and Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing.	Effective as of the Resolution is made
		Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.	Berlaku saat Keputusan diambil
		Approved to grant the Board of Directors of the Company the authority and power, with the right of substitution, to declare the meeting's resolutions in a separate deed and to carry out all necessary actions, including amending and restating the Company's Articles of Association, submitting requests for approval, and/or submitting notifications of changes of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and relevant organizations, including but not limited to taking actions deemed necessary by the Company's Board of Directors in accordance with applicable laws and regulations in order to obtain approval from the competent authority.	Effective as of the Resolution is made

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Mata Acara 6 Agenda 6			
Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.	Setuju: 15.058.109.308 saham atau 99,999%. Tidak Setuju: 600 saham atau 0,000%. Abstain: Nihil	Menyetujui pengunduran diri Bapak Farid Harianto dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepadanya atas segala tindakan (kepengurusan/pengawasan) selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.	Berlaku saat Keputusan diambil
Approval of changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.	Agree: 15,058,109,308 shares or 99.999%. Disagree: 600 shares or 0.000%. Abstain: Nil	Approved the resignation of Mr. Farid Harianto from his position as Commissioner of the Company by granting him full release and discharge (<i>Acquit et de Charge</i>) for all actions (management/supervision) while in office and effective as of the closing of the Meeting.	Effective as of the Resolution is made
		Menyetujui untuk mengangkat Bapak Farid Harianto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.	Berlaku saat Keputusan diambil
		Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:	
		DIREKSI - Direktur Utama : Tuan M. Ramdani Basri - Direktur : Tuan Danni Hasan - Direktur : Tuan Benny S. Santoso - Direktur : Tuan Ridwan Irawan - Direktur : Tuan Denn Charly G. Espanola - Direktur : Tuan Amadeo N. Bejec - Direktur : Tuan Christopher Daniel C. Lizo - Direktur : Tuan Francis Emmanuel D. Rojas	
		DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama: Tuan Jose Ma. Kamantigue Lim - Komisaris Independen: Tuan Letnan Jenderal TNI (Purn) Johny J. Lumintang - Komisaris Independen: Tuan Farid Harianto - Komisaris: Tuan Rodrigo E. Franco	
		Approved to appoint Mr. Farid Harianto as the new Independent Commissioner of the Company with a term of office continuing the previous term and effective as of the closing of the Meeting.	Effective as of the Resolution is made
		As a result of the changes made to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners became as follows:	
		BOARD OF DIRECTORS - President Director: Mr. M. Ramdani Basri - Director: Mr. Danni Hasan - Director: Mr. Benny S. Santoso - Director: Mr. Ridwan Irawan - Director: Mr. Denn Charly G. Espanola - Director: Mr. Amadeo N. Bejec - Director: Mr. Christopher Daniel C. Lizo - Director: Mr. Francis Emmanuel D. Rojas	
		BOARD OF COMMISSIONERS - President Commissioner: Mr. Jose Ma. Kamantigue Lim - Independent Commissioner: Mr. Lieutenant General TNI (Ret) Johny J. Lumintang - Independent Commissioner: Mr. Farid Harianto - Commissioner: Mr. Rodrigo E. Franco	

Agenda	Hasil Perhitungan Suara Voting Results	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
		Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Approved to grant authority and power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to state the resolutions of the Meeting in a separate deed and take all necessary actions for the decisions of the Meeting, including to make changes to the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, submit requests and/or submit notifications of changes of the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and related agencies including but not limited to doing matters deemed necessary by the Board of Directors of the Company and the applicable laws and regulations in order to obtain approval from the competent authority.	Berlaku saat Keputusan diambil Effective as of the Resolution is made

Agenda, Keputusan, dan Realisasi Hasil RUPSLB 9 Agustus Tahun 2022

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dilakukan pada 9 Agustus 2022. Rincian agenda dan keputusannya diuraikan pada tabel di bawah ini.

Agenda, Resolutions, and Realization of the Results of the EGMS on August 9, 2022

The Extraordinary GMS was held on August 9, 2022. The agenda and resolutions are detailed in the table below.

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Persetujuan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Menyetujui pengunduran diri Bapak Jose Ma. K. Lim dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepadanya atas segala tindakan pengawasan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.	Berlaku saat keputusan diambil
Approval of changes in the members of the Company's Board of Commissioners.	Approved Mr. Jose Ma. K. Lim's resignation as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of the meeting, by granting him full release and discharge (<i>Acquit et de Charge</i>) for all supervisory actions while in office.	Effective as of the resolution is made
	Menyetujui untuk mengangkat Bapak Manuel V. Pangilinan sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat. Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama: Manuel V. Pangilinan - Komisaris: Rodrigo E. Franco - Komisaris Independen: Johny J. Lumintang - Komisaris Independen: Farid Harianto Approved the appointment of Mr. Manuel V. Pangilinan as the new President Commissioner of the Company, with a term of office that will continue the previous term and will be effective as of the closing of the meeting. As a result of the changes made to the Company's Board of Commissioners, the composition of the Company's Board of Commissioners became as follows: BOARD OF COMMISSIONERS - President Commissioner: Manuel V. Pangilinan - Commissioner: Rodrigo E. Franco - Independent Commissioner: Johny J. Lumintang - Independent Commissioner: Farid Harianto	Berlaku saat keputusan diambil Effective as of the resolution is made

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Approved granting the Board of Directors of the Company authority and power of attorney with substitution rights to state the resolutions of the Meeting in a separate deed and take all necessary actions for the resolutions of the Meeting, including changing the composition of the Company's Board of Commissioners, submitting requests and/or notifications of changes to the Company's Data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and related agencies including but not limited to doing matters deemed necessary by the Board of Directors of the Company and the applicable laws and regulations to obtain approval from the competent authority.	Berlaku saat keputusan diambil Effective as of the resolution is made

Agenda, Keputusan, dan Realisasi Hasil RUPSLB 7 Oktober Tahun 2022

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dilakukan pada 7 Oktober 2022. Rincian agenda dan keputusannya diuraikan pada tabel di bawah ini.

Agenda, Resolutions, and Realization of the Results of the EGMS on October 7, 2022

The Extraordinary GMS was held on October 7, 2022. The agenda and resolutions are detailed in the table below.

Agenda	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
Persetujuan rencana akuisisi oleh entitas anak Perseroan, PT Margautama Nusantara, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Approval of the acquisition plan by the Company's subsidiary, PT Margautama Nusantara, which is a material transaction as defined by OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.	Menyetujui rencana akuisisi oleh entitas anak Perseroan, PT Margautama Nusantara, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Approved the proposed acquisition by the Company's subsidiary, PT Margautama Nusantara, which is a material transaction as defined in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.	Berlaku saat keputusan diambil Effective as of the resolution is made

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Pembentukan Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada berbagai kebijakan dan ketentuan, antara lain Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas menjalankan tanggung jawab secara kolektif dalam bidang pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara optimal dan menyeluruh.

PEDOMAN KERJA (BOARD CHARTER)

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kerja yang acuan dalam memenuhi tanggung jawab, fungsi dan perannya di Perseroan. Penyusunan pedoman kerja dilakukan dengan berlandaskan pada Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman GCG Perseroan. Pedoman tersebut memuat sejumlah hal, seperti komposisi serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, persyaratan, hingga tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki Dewan Komisaris.

PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS

Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya:

1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atas pailitnya suatu perusahaan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
5. Salah satu anggota Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan.

The establishment of the Company's Board of Commissioners refers to various policies and provisions, including the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The Board of Commissioners is the Company's organ in charge of carrying out collective responsibilities in the supervisory and advisory areas to the Board of Directors. The Board of Commissioners also ensures that all levels of the Company's organization implement GCG principles optimally and comprehensively.

WORK GUIDELINES (BOARD CHARTER)

The Board of Commissioners has established work guidelines that they can refer to when carrying out their responsibilities, functions, and roles in the Company. Work guidelines are developed in accordance with the Company's Articles of Association and GCG guidelines. The guidelines cover various issues, including the composition and mechanism for the appointment and dismissal of the Board of Commissioners as well as the Board of Commissioners' requirements, duties, responsibilities, and authorities.

REQUIREMENTS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Candidates for the Board of Commissioners have to meet a number of criteria, including:

1. Having good character and morals;
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Never having been declared bankrupt or a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was found guilty of a company's bankruptcy within five years before appointment;
4. Never having been convicted for committing a crime in the financial sector within 5 (five) years before appointment; and
5. One member of the Independent Commissioner must have a background in accounting and finance.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION AND TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Manuel V. Pangilinan	Komisaris Utama President Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023, made in the presence of Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	2023-RUPST 2028 2023-2028 AGMS
Rogelio L. Singson	Komisaris Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 75 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 75 dated October 30, 2023, made in the presence of Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	2023-RUPST 2028 2023-2028 AGMS
Johny J. Lumintang	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023, made in the presence of Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	2023-RUPST 2028 2023-2028 AGMS
Farid Harianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023, made in the presence of Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	2023-RUPST 2028 2023-2028 AGMS

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas utama yakni:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan; dan
3. Mengawasi efektivitas penerapan GCG, pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian internal (*Internal Control*) yang diimplementasikan oleh Perseroan.

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES

Duties of the Board of Commissioners

The following are the primary duties of the Board of Commissioners:

1. Supervising the Company's management policies carried out by the Board of Directors;
2. Advising the Board of Directors on how to run the Company; and
3. Monitoring the effectiveness of the Company's implementation of GCG, risk management, and internal control.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tanggung jawab yang dimiliki Dewan Komisaris Perseroan adalah:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan;
3. Baik langsung maupun tidak langsung untuk tidak membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat; dan
4. Secara sendiri-sendiri ataupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan ini.

Wewenang Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris didukung oleh wewenang untuk:

1. Setiap waktu dalam jam kerja kantor, Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan;
2. Memeriksa pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya;
3. Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain;
4. Berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; dan
5. Berhak dan dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Kebijakan terkait dengan rapat Dewan Komisaris Perseroan, setidaknya mengacu pada dua hal sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014. Regulasi tersebut mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat paling sedikit satu (1) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Anggaran Dasar Perseroan juga mengatur tentang ketentuan rapat Dewan Komisaris. Pelaksanaannya dilakukan setiap kali dianggap perlu melalui permintaan tertulis oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang anggota Direksi atau 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 10% jumlah saham dengan hak suara yang telah ditempatkan oleh Perseroan.

Responsibilities of the Board of Commissioners

The following are the responsibilities of the Company's Board of Commissioners:

1. Supervising management policies, general management of the Company, and the Company's operations, and advise the Board of Directors;
2. Maintaining the confidentiality of the Company's information and supervise so that confidential information is not disclosed until an announcement about this issue is made public by an approved representative of the Company;
3. Either directly or indirectly, not to make untrue statements about material facts or not disclose material facts so that the statements made are not misleading about the Company's situation at the time the statement was made;
4. Individually or collectively responsible for losses caused by violations of this provision to other parties.

Authorities of the Board of Commissioners

The implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities is supported by the authority as follows:

1. The Board of Commissioners has the right to enter buildings, courtyards, and other places used or controlled by the Company at any time during business hours;
2. Examining bookkeeping, letters, and other proof;
3. Examining and comparing the state of cash and other items;
4. The right to know all actions taken by the Board of Directors; and
5. The right to use independent professional services and/or create committees to help the Board of Commissioners' duties.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Policy

Policies pertaining to the Company's Board of Commissioners meetings refer to at least two issues as follows:

1. The Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 33/POJK.04/2014. This regulation mandates the Board of Commissioners to hold a meeting at least once every 2 (two) months.
2. The Company's Articles of Association govern the provisions for Board of Commissioners meetings. When deemed necessary, implementation is carried out through a written request by 1 (one) member of the Board of Commissioners, 1 (one) member of the Board of Directors, or 1 (one) shareholder or more who collectively represent 10% of the total shares with voting rights that have been granted by the Company.

Agenda

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, dengan agenda seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Agenda

Throughout 2023, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings, with the agenda detailed in the table below.

Tanggal Date	Agenda	Agenda
26 Januari 2023 January 26, 2023	Pembahasan umum kondisi Perseroan dan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan	General Discussion of the Company's Situation and the Annual Report as well as its Financial Statements
15 Maret 2023 March 15, 2023	Pembahasan terkait pengawasan terhadap proyek Perseroan yang berlangsung	Discussion regarding the supervision of the Company's ongoing projects
25 Mei 2023 May 25, 2023	Pembahasan terkait rencana Aksi Korporasi Perseroan	Discussion on the Company's Corporate Action plan
26 Juli 2023 July 26, 2023	Pembahasan umum terkait rencana RUPSLB Perseroan 2023	General discussion regarding the Company's EGMS 2023 plan
21 September 2023 September 21, 2023	Pembahasan umum terkait rencana RUPSLB Perseroan 2023	General discussion regarding the Company's EGMS 2023 plan
23 November 2023 November 23, 2023	Pembahasan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023	Discussion on the Audit of the Company's Financial Statements as of December 31, 2023

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal

Attendance of Members of the Board of Commissioners at Internal Meeting

RAPAT INTERNAL

Internal Meeting

Tanggal Date	Manuel Velez Panglinan Komisaris Utama President Commissioner	Rogelio L. Singson Komisaris Commissioner	Johnny J. Lumintang Komisaris Independen Independent Commissioner	Farid Harianto Komisaris Independen Independent Commissioner	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
26 Januari 2023 January 26, 2023	✓	x	✓	✓	Rogelio L. Singson diangkat pada 30 Oktober 2023 Rogelio L. Singson was appointed on October 30, 2023
15 Maret 2023 March 15, 2023	✓	x	✓	✓	
25 Mei 2023 May 25, 2023	✓	x	✓	✓	
26 Juli 2023 July 26, 2023	✓	x	✓	✓	
21 September 2023 September 21, 2023	✓	x	✓	✓	
23 November 2023 November 23, 2023	✓	✓	✓	✓	

Rincian kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Details of attendance of members of the Board of Commissioners at internal meetings are described in the table below.

FREKUENSI KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT INTERNAL DAN RUPS

Frequency of Attendance of Members of the Board of Commissioners at Internal Meetings and GMS

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting			RUPS GMS		
	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Manuel V. Pangilinan	6	6	100,00%	3	0	0,00%
Rogelio L. Singson	6	1	16,67%	3	0	0,00%
Johny J. Lumintang	6	6	100,00%	3	1	33,33%
Farid Harianto	6	6	100,00%	3	2	66,67%

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Perseroan memastikan komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, serta pengalaman yang dapat menunjang Perseroan mencapai kinerja yang optimal. Komitmen dan upaya Penerapan tersebut sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

The Company ensures that the Board of Commissioners composition has a diverse set of expertise, knowledge, and experience that can assist the Company in achieving optimal performance. The commitment and implementation efforts are in accordance with the Financial Services Authority's recommendations contained in the Appendix to Financial Services Authority Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies.

Nama Name	Warga Negara Nationality	Latar Belakang Akademik Academic Background	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Manuel Velez Pangilinan	Filipina Philippines	Sarjana Ekonomi Magister Administrasi Bisnis Bachelor's Degree in Economics Master's Degree in Business Administration	Manajemen Bisnis dan Investasi, Infrastruktur Jalan Tol, Infrastruktur Pembangkit Listrik Business and Investment Management, Toll Road Infrastructure, Power Plant Infrastructure	77 tahun 77 years old	Laki-laki Male
Rogelio L. Singson	Filipina Philippines	Sarjana Teknik Bachelor's Degree in Engineering	Teknik Industri dan Bisnis Industrial and Business Engineering	75 tahun 75 years old	Laki-laki Male
Johny J. Lumintang	Indonesia	Akademi Militer Military Academy	Kemiliteran Hukum Military Law	77 tahun 77 years old	Laki-laki Male
Farid Harianto	Indonesia	Sarjana Teknik Elektro, Master of Applied Economics dan Managerial Science Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Master's Degree in Applied Economics and Managerial Science	Ekonomi Keuangan Financial Economics	71 tahun 71 years old	Laki-laki Male

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Informasi terkait hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris di Perseroan lain berupa rangkap jabatan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TRANSPARENCY OF CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Information related to the management relations of members of the Board of Commissioners in other companies in the form of concurrent positions is described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Kepengurusan di Perusahaan Lain Management in Other Companies	
		Sebagai Dewan Komisaris As the Board of Commissioners	Sebagai Direksi As the Board of Directors
Manuel V. Pangilinan	Komisaris Utama President Commissioner	- Komisaris Utama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Chairman, Metro Pacific Investment Corporation - Chairman, PLDT, Inc. - Chairman, PLDT Communications and Energy Ventures, Inc. - Chairman, Smart Communications Inc - Chairman, Manila Electric Company - Chairman, Global Business Power Corporation - Chairman, Philex Mining Corporation - Chairman, PXP Energy Corporation - Chairman, Maynilad Water Services, Inc. - Chairman, Metro Pacific Tollways Corporation - Chairman, NLEX Corporation - Chairman, Landco Pacific Corporation - Vice Chairman, Roxas Holdings, Inc. - President Commissioner, PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Chairman, Metro Pacific Investment Corporation - Chairman, PLDT, Inc. - Chairman, PLDT Communications and Energy Ventures, Inc. - Chairman, Smart Communications Inc - Chairman, Manila Electric Company - Chairman, Global Business Power Corporation - Chairman, Philex Mining Corporation - Chairman, PXP Energy Corporation - Chairman, Maynilad Water Services, Inc. - Chairman, Metro Pacific Tollways Corporation - Chairman, NLEX Corporation - Chairman, Landco Pacific Corporation - Vice Chairman, Roxas Holdings, Inc.	Presiden & CEO Metro Pacific Investment Corporation President & CEO of Metro Pacific Investment Corporation
Rogelio L. Singson	Komisaris Commissioner	-	Presiden & CEO Metro Pacific Water President & CEO Metro Pacific Water
Johny J. Lumintang	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Utama PT Borneo Indobara President Commissioner of PT Borneo Indobara	-

Nama Name	Jabatan Position	Kepengurusan di Perusahaan Lain Management in Other Companies	
		Sebagai Dewan Komisaris As the Board of Commissioners	Sebagai Direksi As the Board of Directors
Farid Harianto	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Komisaris Independen PT Unggul Indah Cahaya Tbk. • Komisaris Independen PT Indika Energy Tbk • Komisaris Utama PT Pertamina Bina Medika. • Komisaris PT Tripatra Engineering. • Komisaris Independen PT Toba Bara Sejahtera. • Komisaris Independen PT Sepatu Bata Indonesia Tbk. • Independent Commissioner of PT Unggul Indah Cahaya Tbk. • Independent Commissioner of PT Indika Energy Tbk • President Commissioner of PT Pertamina Bina Medika. • Commissioner of PT Tripatra Engineering. • Independent Commissioner of PT Toba Bara Sejahtera. • Independent Commissioner of PT Sepatu Bata Indonesia Tbk.	-

INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, tidak ada Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, sehingga informasi tidak dapat disampaikan.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas jalannya pengelolaan Perseroan. Kegiatan tersebut, antara lain diwujudkan melalui rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Kebijakan Perseroan terkait dengan pengembangan kompetensi adalah memberikan dukungan sepenuhnya kegiatan tersebut, karena akan menunjang pertumbuhan bisnis yang terus berkelanjutan. Kegiatan pengembangan kompetensi ini dilakukan, baik yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal.

Realisasi Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, tidak ada Dewan Komisaris yang mengikuti pelatihan maupun pengembangan kompetensi, mengingat padatnya penugasan di Perseroan.

INDEPENDENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONER

Until the end of the 2023 financial year, there was no Independent Commissioner who had served more than 2 (two) terms, so information could not be submitted.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2023

Throughout 2023, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities in the supervisory and advisory areas to the Board of Directors on the management of the Company. These activities, among others, were realized through internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings with the Board of Directors.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT

Policy

The Company's policy related to competency development is to fully support these activities, as they will support sustainable business growth. These competency development activities are carried out both by internal and external parties.

Realization of the Board of Commissioners Competency Development

Throughout 2023, none of the Board of Commissioners participated in training or competency development, given the busy assignments in the Company.

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Pelaksanaan kegiatan orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru Perseroan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Perseroan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Adapun program orientasi tersebut, antara lain meliputi visi dan misi Perseroan, kode etik, serta anggaran dasar.

Pada November 2023, Perseroan melaksanakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru. Selain memperkenalkan tentang target usaha, disampaikan juga tentang perkembangan proyek-proyek Perseroan dan entitas anak, baik yang sudah berjalan maupun sedang dalam proses.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui proses evaluasi atau pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan pada tahun buku. Sebagai peningkatan kualitas kinerja, penilaian direalisasikan secara berkala dengan mengkaji hasil pencapaian tugas dan tanggung jawab serta peran serta atau keterlibatannya dalam kinerja Perseroan di sepanjang tahun buku.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) yang dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian diawali oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya, penilaian dalam bentuk evaluasi dilakukan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya, hasil dari penilaian tersebut digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan dan menetapkan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan regulasi dan pedoman kerja, seperti pelaksanaan kegiatan rapat dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Termasuk di dalamnya adalah peran dan fungsi Dewan Komisaris penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Hasil Penilaian

Sepanjang tahun buku 2023, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan regulasi: melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Orientation Program for New Members of the Board of Commissioners

The aim of implementing orientation activities for new members of the Company's Board of Commissioners is to provide an understanding of the Company, allowing them to carry out their duties effectively and efficiently. The orientation program covers the Company's vision and mission, as well as the code of ethics and the articles of association.

The Company held an orientation program for new members of the Board of Commissioners in November 2023. In addition to introducing the business targets, the development of the Company and its subsidiaries' projects, both ongoing and in progress, was also presented.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out through an evaluation process or the implementation of duties and functions carried out in the financial year. As an improvement in the performance quality, the assessment is realized periodically by reviewing the results of the achievement of duties and responsibilities as well as their participation or involvement in the Company's performance throughout the financial year.

Party Conducting the Assessment

The assessment of the Board of Commissioners' performance is carried out independently (*self-assessment*) by the Nomination and Remuneration Committee.

Assessment Procedure

The assessment procedure is initiated by the Nomination and Remuneration Committee. Furthermore, the assessment in the form of evaluation is carried out by shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). Then, the assessment results are used as one of the considerations in determining and setting the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners.

Assessment Criteria

The assessment criteria for the Board of Commissioners relate to regulatory provisions and work guidelines, such as carrying out meeting activities and tasks in accordance with their duties and responsibilities. This encompasses the Board of Commissioners' roles and functions in implementing good corporate governance.

Assessment Results

Throughout the 2023 financial year, the Board of Commissioners has performed its duties and functions well, in accordance with regulatory requirements: supervising and advising the Board of Directors.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh 3 (tiga) komite: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Investasi dan Strategi. Setiap tahun, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap pelaksanaan fungsi komite-komite tersebut sebagai upaya pengembangan yang berkelanjutan.

1. Komite Audit

Berperan membantu Dewan Komisaris untuk memastikan penyusunan laporan keuangan telah dilakukan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, penerapan pengendalian internal telah berjalan baik, proses audit internal dan eksternal telah sesuai dengan standar yang ada, serta hasil temuan audit telah ditindaklanjuti dengan baik.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

Berperan membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan penetapan terkait nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3. Komite Investasi dan Strategi

Berperan membantu Dewan Komisaris untuk memberikan masukan, kajian, serta perencanaan dan pengawasan terhadap inisiatif pengembangan usaha Perseroan dalam upaya penerapan kebijakan investasi Perseroan.

Prosedur Penilaian

Penilaian terhadap komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan secara kolegial oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan realisasi pelaksanaan tugas pada tahun buku.

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan oleh Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian kepada komite di bawah Dewan Komisaris, antara lain tingkat kehadiran dalam rapat internal maupun rapat bersama Dewan Komisaris. Selain itu, pelaksanaan tugas serta masukan atau rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian oleh Dewan Komisaris, komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Komite-komite tersebut telah memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, sehingga mendukung pencapaian kinerja Perseroan.

ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is assisted in carrying out its duties and functions by 3 (three) committees: The Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Investment and Strategy Committee. As part of a continuous development effort, the Board of Commissioners evaluates the implementation of these committees' functions every year.

1. Audit Committee

The role is to assist the Board of Commissioners to ensure that the preparation of the financial statements has been carried out fairly and in accordance with applicable accounting principles, the implementation of internal control has been running well, the internal and external audit process has been in accordance with existing standards, and the results of audit findings have been followed up properly.

2. Nomination and Remuneration Committee

The role is to assist the Board of Commissioners to determine the nomination and remuneration of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

3. Investment and Strategy Committee

The role is to assist the Board of Commissioners in providing input, review, as well as planning and supervision of the Company's business development initiatives in an effort to implement the Company's investment policy.

Assessment Procedure

Assessment of committees under the Board of Commissioners is carried out collegially by the Board of Commissioners, taking into consideration the realization of the implementation of duties during the financial year.

Assessment Criteria

The criteria used by the Board of Commissioners in providing assessments to committees under the Board of Commissioners include the level of attendance at internal meetings and meetings with the Board of Commissioners. In addition, report on the implementation of duties as well as input or recommendations submitted to the Board of Commissioners.

Assessment Results

Based on the results of the Board of Commissioners' evaluation and assessment, the committees under the Board of Commissioners have carried out their functions, duties, and responsibilities properly, resulting in effective and efficient performance. These committees have given input and recommendations to the Board of Commissioners, thereby assisting the accomplishments of the Company's performance.

Direksi

Board of Directors

Pembentukan serta berkenaan dengan peran dan fungsi Direksi Perseroan, mengacu pada berbagai kebijakan dan ketentuan, antara lain Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang terhadap pengurusan dan pengelolaan Perseroan, memastikan aktivitas bisnis usaha Perseroan dapat berjalan dengan baik, serta bertugas menjadi perwakilan Perseroan.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Untuk mendukung Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, Direksi telah memiliki pedoman kerja yang menjadi acuan dalam memenuhi fungsi dan perannya di Perseroan. Pedoman kerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 35 POJK No. 33 tahun 2014 dan telah tercantum dalam Manual GCG Perseroan.

Pedoman kerja tersebut mengatur berbagai hal terkait Direksi, antara lain: komposisi, pengangkatan dan pemberhentian Direksi, persyaratan, tugas, tanggung jawab, wewenang Direksi, serta rapat Direksi.

KOMPOSISI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA PERSYARATAN DIREKSI

Terkait komposisi serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Perusahaan mengacu pada beberapa dasar berikut:

1. Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan;
2. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi Perusahaan yang sahamnya tercatat di pasar modal BEI, proses penilaian calon anggota Direksi dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
4. Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan Perusahaan sehari-hari.

The establishment as well as the role and function of the Company's Board of Directors refers to various policies and provisions, including the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The Board of Directors is an organ of the Company that has the duty, responsibility, and authority for the management of the Company, ensuring the Company's business activities can run well and serving as the Company's representative.

BOARD OF DIRECTORS WORK GUIDELINES

To support the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities optimally, the Board of Directors has work guidelines that serve as a reference in the fulfillment of their functions and roles in the Company. The work guidelines were developed in accordance with the provisions of Article 35 POJK No. 33 of 2014 and are included in the Company's GCG Manual.

The work guidelines govern various aspects of the Board of Directors, such as the composition, appointment, and dismissal of the Board of Directors, the requirements, duties, responsibilities, and authority of the Board of Directors, as well as the Board of Directors meetings.

COMPOSITION, APPOINTMENT AND DISMISSAL, AS WELL AS REQUIREMENTS FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The following basis govern the composition, appointment, and dismissal of the Board of Directors:

1. The number of members of the Board of Directors must be adjusted to the Company's complexity while considering decision-making effectiveness;
2. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS through a transparent process. For companies whose shares are listed on the IDX capital market, the process of assessing prospective members of the Board of Directors is carried out by the Nomination and Remuneration Committee before the holding of the GMS;
3. The GMS dismisses members of the Board of Directors for reasonable reasons and after giving those concerned the opportunity to defend themselves;
4. All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia, in a place that allows to carry out daily Company management duties.

Persyaratan Direksi

Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan wajib, yaitu:

1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atas pailitnya suatu perusahaan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi

Hingga akhir tahun 2023, susunan Direksi Perseroan terdiri dari 8 (delapan) orang dengan salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 yakni paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang.

Informasi terkait komposisi Direksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Masa Akhir Jabatan End of Term of Office
M. Ramdani Basri	Direktur Utama & CEO President Director & CEO	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Akta No. 51 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara Deed of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 51 dated May 24, 2023, made in the presence of Humberg Lie, S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta	24 Mei 2023 May 24, 2023	RUPST 2028 2028 AGMS
Danni Hasan	Direktur Director			
Ridwan Irawan	Direktur Director			
Denn Charly G. Espanola	Direktur Director			
Amadeo N. Bejec	Direktur Director			
Christopher Daniel C. Lizo	Direktur Director			
Francis Emmanuel D. Rojas	Direktur Director			
Benny S. Santoso	Direktur Director			

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas Direksi

Secara kolektif dan umum, Direksi memiliki tugas yakni:

1. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan serta membuat program jangka panjang dan jangka pendek untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
2. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;

Requirements for the Board of Directors

The Company's Board of Directors must meet the following statutory requirements:

1. Having good character and morals;
2. Capable of carrying out legal actions;
3. Never having been declared bankrupt or a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was found guilty of a company's bankruptcy within five years before appointment;
4. Never having been convicted for committing a crime in the financial sector within 5 (five) years before appointment.

Composition and Term of Office of the Board of Directors

Until the end of 2023, the Company's Board of Directors is comprised of 8 (eight) people, with one of them serving as President Director. This number complied with the provisions of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, namely a minimum of 2 (two) people.

The following is information about the composition of the Board of Directors as of December 31, 2023:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties of the Board of Directors

Collectively and generally, the Board of Directors has the following duties:

1. Developing the Company's vision, mission, and values, as well as long-term and short-term programs for discussion and approval by the Board of Commissioners or GMS in accordance with the provisions of the Articles of Association.
2. Effective and efficient control of the Company's resources while taking into consideration the reasonable interests of shareholders and other stakeholders;

- Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko Perusahaan, yang meliputi seluruh aspek kegiatan Perusahaan;
- Memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan; dan
- Membuat perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

- Developing and implementing the Company's risk management system, which covers all aspects of the Company's activities;
- Ensuring smooth communication between the Company and stakeholders by empowering the Corporate Secretary's function;
- Creating a clear and focused written plan for implementing corporate social responsibility.

Pembagian Tugas Masing-Masing Anggota Direksi

Rincian pembagian tugas anggota Direksi diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Allocation of Duties of Each Member of the Board of Directors

The table below describes the allocation of duties for members of the Board of Directors:

No.	Jabatan Position	Tugas	Duties
1	CEO & President Director	- Bertanggung jawab untuk memberikan kepemimpinan strategis dari keseluruhan bisnis dengan bekerja sama dengan Dewan dan manajemen lainnya untuk menetapkan tujuan, rencana dan strategi jangka pendek dan jangka panjang; - Memastikan organisasi yang efektif dan efisien dalam hal struktur, tata kelola dan sumber daya manusia serta kemampuan kepemimpinan; dan - Mewakili Perseroan kepada pemegang saham, Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan lainnya.	- Responsible for providing strategic leadership to the entire business by collaborating with the Board and other management to establish short and long-term objectives, plans, and strategies; - Ensuring that the organization is effective and efficient in terms of structure, governance, human resources, and leadership capabilities; and - Acting as the Company's representative to shareholders, the Board of Commissioners, and other stakeholders.
2	Managing Director	- Mengelola dan mendorong proses pengambilan keputusan strategi Direksi ke seluruh grup bisnis Perseroan; - Bertanggung jawab atas kinerja Perseroan selaras dengan tujuan, rencana, dan strategi jangka pendek dan jangka panjang; - Bertanggung jawab atas hasil keseluruhan pada kapitalisasi pasar, pertumbuhan, profitabilitas, dan keberlanjutan; dan - Mengawasi kinerja Direksi secara keseluruhan dalam peran dan tanggung jawabnya.	- Managing and encouraging the Board of Directors' strategic decision-making process across all business groups of the Company; - Accountable for the performance of the Company in accordance with short and long-term objectives, plans, and strategies; - Accountable for the overall outcomes of market capitalization, growth, profitability, and sustainability; - Supervising the Board of Directors' overall performance in their roles and responsibilities.
3	Operation Director	- Bertanggung jawab penuh untuk memimpin keseluruhan operasi dalam seluruh sektor bisnis dan memastikan bisnis berjalan pada tingkat yang optimal dan efisien, berdasarkan kebijakan, sasaran, dan sasaran Perseroan; dan - Mendorong pertumbuhan organik bisnis dan produktivitas dalam setiap sektor bisnis selaras dengan tujuan Perusahaan.	- Accepting full responsibility for leading the entire operation in all business sectors and ensuring that business runs at an optimal and efficient level in accordance with the Company's policies, goals, and objectives; - Promoting organic business growth and productivity in all business sectors in accordance with the Company's objectives.
4	Finance Director	- Memberikan kepemimpinan pada strategi Keuangan dan Akuntansi kepada Dewan, untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan posisi strategis Perseroan; - Mengambil kontrol keseluruhan dari fungsi akuntansi Perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kebijakan pengelolaan kas Perseroan untuk seluruh sektor bisnis; dan - Bertanggung jawab untuk mencari sumber pendanaan pada kondisi paling optimal untuk proyek-proyek investasi.	- Providing financial and accounting strategy leadership to the Board to optimize the Company's financial performance and strategic position; - Taking overall control of the Company's accounting function and being fully accountable for all business sectors' cash management policies; and - In charge of finding sources of funding at the most optimal conditions for investment projects.
5	Business Development Director	- Mengeksplorasi dan menciptakan peluang bisnis baru yang selaras dengan tujuan dan strategi jangka pendek dan jangka panjang; dan - Mengembangkan kebijakan dan strategi untuk mengembangkan bisnis melalui merger & acquisitions, serta ekspansi aset.	- Exploring and developing new business prospects that are in line with short and long-term goals and strategies; and - Developing policies and strategies to grow the business through mergers & acquisitions and asset expansion.

Tanggung Jawab Direksi

Rincian tanggung jawab Direksi adalah:

1. Menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam bentuk laporan tahunan, yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan, dan laporan pelaksanaan GCG;
2. Meminta persetujuan RUPS atas laporan tahunan dan meminta pengesahan RUPS atas laporan keuangan;
3. Memastikan tersedianya laporan tahunan sebelum RUPS diselenggarakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian;
4. Melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan; dan
5. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal Perseroan yang kompeten dalam rangka menjaga kekayaan dan meningkatkan kinerja Perseroan serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan.

Wewenang Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki sejumlah wewenang, yaitu:

1. Direktur Utama memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak dan mengatasnamakan Direksi untuk mewakili Perseroan;
2. Direksi berwenang memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan Perseroan untuk melaksanakan tugas tertentu, tanpa pelimpahan tanggung jawab;
3. Apabila Direktur Utama tidak hadir, berhalangan hadir, atau berhalangan karena sebab apa pun, dua orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak dan mengatasnamakan Direksi serta mewakili atau melakukan penyertaan modal ke dalam perusahaan lain. Dalam praktiknya, tindakan anggota Direksi tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dari Direktur Utama;
4. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berwenang untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dengan harus memberikan surat kuasa yang menyatakan bahwa telah terjadi pelimpahan wewenang kepada pemegang kuasa tersebut.

Responsibilities of the Board of Directors

The following are the details of the Board of Directors' responsibilities:

1. Preparing accountability for the Company's management in the form of an annual report, which includes namely financial reports, reports on the Company's activities, and reports on GCG implementation;
2. Requesting GMS Approval for the annual report and the financial statements;
3. Ensuring the availability of annual reports before the holding of the GMS, in accordance with applicable regulations, enabling shareholders to make an assessment;
4. Carrying out their duties for the benefit of the Company in achieving its aims and objectives in accordance with applicable laws and regulations, as well as the Company's Articles of Association;
5. Preparing and implementing a competent internal control system for the Company to preserve wealth, enhance the Company's performance, and comply with laws and regulations.

Authorities of the Board of Directors

The Board of Directors has the following authorities in carrying out its duties and responsibilities:

1. The President Director has the right and authority to act and represent the Company on behalf of the Board of Directors;
2. The Board of Directors has the authority to grant power of attorney to committees formed to support the implementation of their duties or to Company employees to carry out specific tasks without delegation of responsibilities;
3. In the event that the President Director is absent, unable to attend, or unable to present for any cause, two members of the Board of Directors have the right and authority to represent or make equity participation in other companies on behalf of the Board of Directors. In practice, actions taken by members of the Board of Directors must be approved in writing by the President Director;
4. Without prejudice to their responsibilities, the Board of Directors has the authority to appoint one or more attorneys to act on their behalf by providing a power of attorney indicating that authority has been delegated to the power holder.

RAPAT DIREKSI

Kebijakan

Rapat Direksi diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 yakni paling sedikit satu kali dalam dua bulan. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, rapat Direksi dilaksanakan setiap kali dianggap perlu melalui permintaan tertulis oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi atau 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 10% jumlah saham dengan hak suara yang telah ditempatkan oleh Perusahaan.

Agenda

Sepanjang tahun 2023, Direksi menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 kali dengan rincian tanggal dan agenda sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Policy

The Board of Directors meeting is implemented at least once every 2 (two) months, in accordance with the provisions of POJK No. 33/POJK.04/2014. According to the Company's Articles of Association, a meeting of the Board of Directors is implemented whenever deemed necessary through a written request by 1 (one) or more members of the Board of Directors or 1 (one) or more members of the Board of Commissioners or 1 (one) or more shareholders who collectively represent 10% of the total shares with voting rights that have been granted by the Company.

Agenda

Throughout 2023, the Board of Directors held 12 internal meetings with detailed dates and agendas as follows:

Tanggal Date	Agenda	Agenda
25 Januari 2023 January 25, 2023	Pembahasan laporan keuangan tahunan tahun 2022 dan kinerja Perseroan	Discussion of the annual financial report for 2022 and the Company's performance
21 Februari 2023 February 21, 2023	Pembahasan Rencana Pelaksanaan RUPST 2023	Discussion of the 2023 AGMS Implementation Plan
14 Maret 2023 March 14, 2023	Pembahasan Rencana Aksi Korporasi Perseroan	Discussion of the Company's Corporate Action Plan
19 April 2023 April 19, 2023	Pembahasan update terkait Penyesuaian tarif jalan tol	Discussion on updates related to toll road tariff adjustments
24 Mei 2023 May 24, 2023	Pembahasan status rencana Aksi Korporasi Perseroan	Discussion of the status of the Company's Corporate Action plan
21 Juni 2023 June 21, 2023	Pembahasan prospek dari proyek setiap sektor anak usaha Perseroan	Discussion of the prospects of each Company's subsidiaries' projects
25 Juli 2023 July 25, 2023	Pembahasan proyek-proyek Perseroan yang sedang berjalan	Discussion of the Company's ongoing projects
23 Agustus 2023 August 23, 2023	Pembahasan proyek dan prospek Perseroan yang sedang berjalan	Discussion of the Company's ongoing projects and prospects
20 September 2023 September 20, 2023	Pembahasan proyek-proyek Perseroan yang sedang berjalan	Discussion of the Company's ongoing projects
19 September 2023 September 19, 2023	Pembahasan rencana pelaksanaan Public Expose	Discussion of Public Expose implementation plan
22 November 2023 November 22, 2023	Pembahasan terkait rencana RUPSLB Perseroan 2023	Discussion related to the Company's EGMS 2023 plan
19 Desember 2023 December 19, 2023	Pembahasan terkait proyeksi perseroan di tahun 2024	Discussion related to the Company's projection in 2024

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Internal

Rincian kehadiran anggota Direksi dalam rapat internal diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Attendance of Members of the Board of Directors at Internal Meetings

Details of attendance of members of the Board of Directors at internal meetings are described in the table below.

RAPAT INTERNAL

Internal Meeting

Tanggal Date	M. Ramdani Basri Direktur Utama & CEO President Director & CEO	Danni Hasan Direktur Director	Ridwan Irawan Direktur Director	Denn Charly G. Espanola Direktur Director	Amadeo N. Bejec Direktur Director	Christopher Daniel C. Lizo Direktur Director	Francis Emmanuel D. Rojas Direktur Director	Benny S. Santoso Direktur Director	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
25 Januari 2023 January 25, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
21 Februari 2023 February 21, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
14 Maret 2023 March 14, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
19 April 2023 April 19, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
24 Mei 2023 May 24, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
21 Juni 2023 June 21, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
25 Juli 2023 July 25, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
23 Agustus 2023 August 23, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
20 September 2023 September 20, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
19 September 2023 September 19, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
22 November 2023 November 22, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
19 Desember 2023 December 19, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

FREKUENSI KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RAPAT INTERNAL DAN RUPS

Frequency of Attendance of Members of the Board of Directors at Internal Meetings and GMS

Nama Name	Rapat Internal Internal Meeting			RUPS GMS		
	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
M. Ramdani Basri	12	12	100%	3	3	100%
Danni Hasan	12	12	100%	3	3	100%
Ridwan Irawan	12	12	100%	3	3	100%
Denn Charly G. Espanola	12	12	100%	3	2	66,67%
Amadeo N. Bejec	12	12	100%	3	3	100%
Christopher Daniel C. Lizo	12	12	100%	3	3	100%
Francis Emmanuel D. Rojas	12	12	100%	3	2	66,67%
Benny S. Santoso	12	12	100%	3	3	100%

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Perseroan memastikan komposisi Direksi memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, serta pengalaman yang dapat menunjang Perseroan mencapai kinerja optimal dari berbagai sisi. Komitmen dan upaya Perseroan tersebut diterapkan sesuai dengan yang tercantum dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

DIVERSITY OF THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

The Company ensures that the Board of Directors composition has a diverse set of skills, knowledge, and experience that can assist the Company in achieving optimal performance from all aspects. The Company's commitment and implementation efforts are in accordance with the Financial Services Authority's recommendations, which are contained in the Appendix to the Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Governance of Public Companies.

Nama Name	Warga Negara Nationality	Latar Belakang Akademik Academic Background	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
M. Ramdani Basri	Indonesia	Magister Kebijakan Publik dan Executive Education bidang Infrastruktur Ekonomi Master's Degree in Public Policy and Executive Education in Economic Infrastructure	Ekspansi dan diversifikasi organisasi, restrukturisasi organisasi, industri keuangan, pasar modal, manajerial Organizational expansion and diversification, organizational restructuring, financial industry, capital market, managerial	62 tahun 62 years old	Laki-laki Male
Danni Hasan	Indonesia	Sarjana Teknik Kimia dan Magister Manajemen Industri Bachelor's Degree in Chemical Engineering and Master's Degree in Industrial Management	Ekspansi dan diversifikasi organisasi, restrukturisasi organisasi, industri keuangan dan perminyakan, pasar modal, manajerial Organizational expansion and diversification, organizational restructuring, finance and petroleum industry, capital market, managerial	60 tahun 60 years old	Laki-laki Male
Ridwan Irawan	Indonesia	Sarjana Ekonomi dan Magister Internasional Banking & Financial Services Bachelor's Degree in Economics and Master's Degree in International Banking & Financial Services	Akademi, peneliti, industri keuangan, pasar modal, restrukturisasi organisasi, manajerial Academician, researchers, financial industry, capital markets, organizational restructuring, managerial	57 tahun 57 years old	Laki-laki Male
Denn Charly G. Espanola	Filipina Philippines	Sarjana Oseanografi Bachelor's Degree in Oceanography	Oseanografi Oceanography	53 tahun 53 years old	Laki-laki Male
Amadeo N. Bejec	Filipina Philippines	Sarjana Akuntansi dan Magister Administrasi Bisnis Bachelor's Degree in Accounting and Master's Degree in Business Administration	Akuntansi, Administrasi Bisnis Accounting, Business Administration	49 tahun 49 years old	Laki-laki Male
Christopher Daniel C. Lizo	Filipina Philippines	Sarjana Akuntansi Bachelor's Degree in Accounting	Akuntansi Accounting	51 tahun 51 years old	Laki-laki Male
Francis Emmanuel D. Rojas	Filipina Philippines	Sarjana Manajemen Bisnis dan Magister Administrasi Bisnis Bachelor's Degree in Business Management and Master's Degree in Business Administration	Manajemen Bisnis, Administrasi Bisnis Business Management, Business Administration	51 tahun 51 years old	Laki-laki Male
Benny S. Santoso	Indonesia	Pendidikan di Ngee Ann College, Singapura Education at Ngee Ann College, Singapore	Business Studies	65 tahun 65 years old	Laki-laki Male

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN DIREKSI

Informasi terkait hubungan kepengurusan anggota Direksi di Perseroan lain berupa rangkap jabatan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TRANSPARENCY OF CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Information related to the management relations of members of the Board of Directors in other companies in the form of concurrent positions is described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Kepengurusan di Perusahaan Lain Management in Other Companies	
		Sebagai Dewan Komisaris As the Board of Commissioners	Sebagai Direksi As the Board of Directors
M. Ramdani Basri	Direktur Utama & CEO President Director & CEO	Komisaris di PT Margautama Nusantara (2007-sekarang) Commissioner at PT Margautama Nusantara (2007-present)	-
Danni Hasan	Direktur Director	-	Direktur Utama di PT Margautama Nusantara (2007-sekarang) President Director at PT Margautama Nusantara (2007-present)
Ridwan Irawan	Direktur Director	-	- Direktur PT Energi Infranasantara (2018-sekarang) - Direktur Utama PT Portco Infranasantara (2020-sekarang) - Director of PT Energi Infranasantara (2018-present) - President Director of PT Portco Infranasantara (2020-present)
Denn Charly G. Espanola	Direktur Director	-	- Country Head di Metro Pacific Tollways Corporation (2018-sekarang) - Direktur Utama PT Metro Pacific Tollways Indonesia (2017-sekarang) - Country Head at Metro Pacific Tollways Corporation (2018-present) - President Director of PT Metro Pacific Tollways Indonesia (2017-present)
Amadeo N. Bejec	Direktur Director	Komisaris di PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (2021-sekarang) Commissioner at PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (2021-present)	- Direktur Keuangan di PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) (2017-sekarang) - Vice President of Corporate Finance di NLEX Corporation (2003-sekarang) - Director of Finance at PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI) (2017-present) - Vice President of Corporate Finance at NLEX Corporation (2003-present)

Nama Name	Jabatan Position	Kepengurusan di Perusahaan Lain Management in Other Companies	
		Sebagai Dewan Komisaris As the Board of Commissioners	Sebagai Direksi As the Board of Directors
Christopher Daniel C. Lizo	Direktur Director	-	- SVP – Chief Finance Officer di Metro Pacific Tollways Corporation (2009-sekarang) - Chief Operating Officer dan Chief Finance Officer di MP Cala Holdings Inc. (2015-sekarang) - Treasurer & Director di Cavitex Infrastructure Corporation (2013-sekarang) - Treasurer & Director di NLEX Corporation (2009-sekarang) - Treasurer & Director di Tollways Management Corporation (2009-sekarang) - SVP – Chief Finance Officer at Metro Pacific Tollways Corporation (2009-present) - Chief Operating Officer and Chief Finance Officer at MP Cala Holdings Inc. (2015-present) - Treasurer & Director at Cavitex Infrastructure Corporation (2013-present) - Treasurer & Director at NLEX Corporation (2009-present) - Treasurer & Director at Tollways Management Corporation (2009-present)
Francis Emmanuel D. Rojas	Direktur Director	-	Vice President of Business Development di Metro Pacific Tollways Corporation (2013-sekarang) Vice President of Business Development at Metro Pacific Tollways Corporation (2013-present)
Benny S. Santoso	Direktur Director	- Komisaris PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2004-sekarang) - Komisaris Utama PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (2010-sekarang) - Komisaris PT Fast Food Indonesia Tbk (1992-sekarang) - Commissioner of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2004-present) - President Commissioner of PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (2010-present) - Commissioner of PT Fast Food Indonesia Tbk (1992-present)	-

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola Perseroan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Anggaran Dasar Perseroan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direksi melakukan koordinasi seperti diwujudkan melalui rapat internal Direksi maupun rapat gabungan bersama Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja Direksi yang hasilnya kemudian akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penetapan remunerasi Direksi. Penilaian dilakukan oleh

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023

Throughout 2023, the Board of Directors has performed its duties well in managing the Company and in accordance with the prevailing laws and regulations, as well as the Company's Articles of Association. In carrying out these duties, the Board of Directors coordinates as realized through internal meetings of the Board of Directors and joint meetings with the Board of Commissioners.

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance of the Board of Directors is evaluated regularly, and the results are used as one of the considerations in determining the Board of Directors' remuneration. The Nomination and Remuneration Committee conducts

Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Pihak yang Melaksanakan Penilaian

Pelaksanaan penilaian Direksi dilaksanakan secara *self-assessment* oleh Perseroan tanpa melibatkan pihak luar.

Prosedur dan Pelaksanaan Penilaian

Prosedur penilaian Direksi berawal dari masukan Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Hasil penilaian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan pada RUPS.

Kriteria Penilaian

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Perusahaan menggunakan sejumlah indikator sebagai kriteria, antara lain:

1. Pengelolaan Sektor Usaha yang Ada Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya mengembangkan kinerja sektor bisnis yang telah berjalan, baik secara vertikal maupun horizontal.
2. Pengembangan Sektor Usaha Baru Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya melihat peluang pengembangan usaha di sektor usaha yang belum dibidangi oleh Perseroan.
3. Kinerja Bisnis Perseroan yang Berkelanjutan Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga dan mengembangkan kinerja bisnis Perseroan yang memiliki proyeksi jangka panjang.
4. Implementasi Tata Kelola Perseroan yang Baik Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya menerapkan pengelolaan organisasi Perseroan yang sesuai dengan prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan asas kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kinerja Saham Perseroan dan Penghargaan atas Kinerja Saham Direksi dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga dan meningkatkan kinerja saham Perseroan, terutama kinerja yang memungkinkan saham Perseroan mendapatkan penghargaan.

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi pada tahun buku 2023, Direksi telah merealisasikannya dengan baik. Penilaian itu, terutama ditunjukkan dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kinerja Perseroan tumbuh positif.

the evaluation, which is then submitted to the Board of Commissioners and Shareholders at the General Meeting of Shareholders.

Party Conducting the Assessment

The implementation of the assessment of the Board of Directors is carried out by self-assessment by the Company without involving external parties.

Assessment Procedures and Implementation

The Board of Directors assessment procedure starts with the input of the Nomination and Remuneration Committee, in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. The results of the assessment are submitted to the Board of Commissioners to be reported at the GMS.

Assessment Criteria

The Company uses a number of indicators as criteria for assessing the performance of the Board of Directors, including:

1. Existing Business Sector Management. The Board of Directors is evaluated based on its ability to develop the performance of the business sector that has been operating, both vertically and horizontally.
2. Development of New Business Sectors. The Board of Directors is evaluated based on their ability to identify business development opportunities in business sectors that the Company has not yet explored.
3. The Company's Sustainable Business Performance. The Board of Directors are evaluated based on their ability to maintain and develop the Company's long-term business performance.
4. Good Corporate Governance Implementation. The Board of Directors is evaluated based on their ability to manage the Company organization in accordance with the principles of good corporate governance and compliance with relevant laws and regulations.
5. Performance of the Company's Shares and Awards for the Share Performance. The Board of Directors is evaluated based on their ability to maintain and improve the performance of the Company's shares, particularly performance that enables the Company's shares to earn awards.

Assessment Results

Based on the results of the evaluation of the implementation of the Board of Directors' duties and functions in the financial year 2023, the Board of Directors has realized this well. This assessment is primarily based on compliance with relevant laws and regulations and the Company's positive performance improvement.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, Direksi tidak membentuk komite untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, perihal ini tidak dapat disampaikan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Kebijakan

Perseroan senantiasa mendukung upaya peningkatan kualitas kinerja Direksi dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Perseroan dan menunjang pertumbuhan bisnis yang terus berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan menjalankan upaya peningkatan kualitas kinerja Direksi melalui pengembangan kompetensi, baik yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal.

Realisasi Pengembangan Kompetensi Direksi

Mengingat padatnya penugasan dalam pengelolaan Perseroan, sepanjang tahun 2023 hanya 1 (satu) anggota Direksi yang mengikuti pelatihan, yaitu Ridwan Irawan. Pada 31 September-2 Oktober 2023, pelatihan yang diikuti adalah "Congress Hydro Power" yang diselenggarakan oleh IHA.

ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Pelaksanaan kegiatan orientasi bagi anggota Direksi baru Perseroan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Perseroan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Adapun program orientasi tersebut, antara lain meliputi visi dan misi Perseroan, kode etik, serta anggaran dasar.

Pada tahun 2023, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena tidak ada anggota Direksi baru.

ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Until the end of the financial year in 2023, the Board of Directors did not form committees to support the implementation of their duties and responsibilities. As a result, this information cannot be submitted.

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT

Policy

The Company always promotes efforts to improve the quality of the performance of the Board of Directors to improve the quality of the Company's performance and support sustainable business growth. As a result, the Company makes efforts to enhance the quality of the Board of Directors' performance through competency development held by both internal and external parties.

Realization of the Board of Directors Competency Development

Given the tight schedule in managing the Company, throughout 2023 only 1 (one) member of the Board of Directors participated in training, namely Ridwan Irawan. On September 31-October 2, 2023, the training attended was "Congress Hydro Power" organized by IHA.

ORIENTATION FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

The implementation of orientation activities for new members of the Company's Board of Directors aims to provide an understanding of the Company so that they can carry out their duties effectively and efficiently. The orientation program includes, among others, the Company's vision and mission, code of ethics, and articles of association.

In 2023, the activity was not carried out due to no new Board of Directors members.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian agenda sebagai berikut:

Throughout 2023, the Board of Commissioners and the Board of Directors implemented 6 (six) joint meetings, with details on the agenda as follows:

Tanggal Date	Agenda	Agenda
23 Februari 2023 February 23, 2023	- Pembahasan laporan keuangan tahunan tahun 2022 dan kinerja Perseroan - Pembahasan update terkait proyek dan kinerja dari setiap sektor Perseroan	- Discussion on the annual financial statements for 2022 and the Company's performance - Discussion on project updates and performance of each sector of the Company
23 Maret 2023 March 23, 2023	- Pembahasan umum terkait proyek dan kinerja dari setiap sektor Perseroan - Pembahasan Rencana Aksi Korporasi Perseroan	- General discussion related to projects and performance of each sector of the Company - Discussion of the Company's Corporate Action Plan
16 Mei 2023 May 16, 2023	Pembahasan prospek dari proyek setiap sektor Perseroan	Discussion on the prospects of the Company's projects in each sector
27 Juli 2023 July 27, 2023	- Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Interim - Pembahasan Umum terkait update proyek dan kinerja dari setiap sektor Perseroan pada tengah tahun - Pembahasan terkait rencana RUPSLB Perseroan 2023	- Discussion of Interim I Financial Statements Performance - General Discussion related to project updates and performance of each sector of the Company at mid-year - Discussion of the Company's EGMS 2023 plan
21 September 2023 September 21, 2023	- Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Interim II - Pembahasan rencana pelaksanaan <i>Public Expose</i>	- Discussion of Interim II Financial Statements Performance - Discussion of Public Expose implementation plan
23 November 2023 November 23, 2023	- Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan Interim III - Pembahasan update terkait proyek dari setiap sektor Perseroan - Pembahasan terkait rencana RUPSLB Perseroan 2023	- Discussion of Interim III Financial Statements Performance - Discussion on project updates from each sector of the Company - Discussion related to the Company's EGMS 2023 plan

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RAPAT GABUNGAN

ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT MEETINGS

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Tanggal Date	Manuel Velez Panglilan Komisaris Utama President Commissioner	Rogelio L. Singson Komisaris Commissioner	Johnny J. Lumintang Komisaris Independen Independent Commissioner	Farid Harianto Komisaris Independen Independent Commissioner	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
23 Februari 2023 February 23, 2023	✓	✓	✓	✓	-	100%
23 Maret 2023 March 23, 2023	✓	✓	✓	✓	-	100%
16 Mei 2023 May 16, 2023	✓	✓	✓	✓	-	100%
27 Juli 2023 July 27, 2023	✓	✓	✓	✓	-	100%
21 September 2023 September 21, 2023	✓	✓	✓	✓	-	100%
23 November 2023 November 23, 2023	✓	✓	✓	✓	-	100%

DIREKSI

Board of Directors

Tanggal Date	M. Ramdani Basri Direktur Utama & CEO President Director & CEO	Danni Hasan Direktur Director	Ridwan Irawan Direktur Director	Denn Charly G. Espanola Direktur Director	Amadeo N. Bejec Direktur Director	Christopher Daniel C. Lizo Direktur Director	Francis Emmanuel D. Rojas Direktur Director	Benny S. Santoso Direktur Director	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
23 Februari 2023 February 23, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	100%
23 Maret 2023 March 23, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	100%
16 Mei 2023 May 16, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	100%
27 Juli 2023 July 27, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	100%
21 September 2023 September 21, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	100%
23 November 2023 November 23, 2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	100%

Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership Reporting Policy

Kebijakan Perseroan terkait dengan pelaporan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Setiap perubahan kepemilikan, laporan disampaikan kepada Perseroan serta OJK.

PELAKSANAAN TAHUN BUKU

Pada tahun 2023, terjadi perubahan kepemilikan saham anggota Direksi terhadap Perseroan. Saham dimaksud adalah milik M. Ramdani Basri, Direktur Utama/*Chief Executive Officer* Perseroan, dari 7.492.379 hingga akhir tahun 2022, berkurang menjadi 302.823 saham pada tahun 2023.

Perseroan telah melakukan melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

The Company's policy on reporting share ownership to the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017, concerning Reports of Ownership or Changes in Ownership of Public Company Shares. When there is a change in ownership, a report is submitted to the Company and OJK.

FINANCIAL YEAR IMPLEMENTATION

In 2023, there was a change in the share ownership of members of the Company's Board of Directors. The shares belonged to M. Ramdani Basri, President Director/*Chief Executive Officer* of the Company, from 7,492,379 by the end of 2022, decreased to 302,823 shares in 2023.

The Company has carried out its reporting obligations as stated in the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.04/2017 concerning Ownership Reports or Any Changes in Share Ownership of Public Companies.

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan

Mekanisme nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, antara lain mengacu pada Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, proses nominasi, Komite tentang Komite Nominasi dan Remunerasi ikut terlibat dalam pemberian rekomendasi.

Prosedur Penetapan Nominasi

Rangkaian proses penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 adalah:

NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Policy

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors are nominated, namely in accordance with OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. With reference to these provisions, the Nomination and Remuneration Committee is involved in providing recommendations during the nomination process.

Nomination Determination Procedure

In accordance with OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014, the following are the series of process to determine the members of the Board of Commissioners and Board of Directors:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

1. Developing the composition and nomination process for Board of Directors and/or Board of Commissioners members;
2. Developing the policies and criteria needed to govern the nomination process of candidates for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
3. Assisting in evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
4. Developing the capacity-building programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
5. Reviewing and recommending to the Board of Commissioners candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dasar Penetapan dan Prosedur

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan dan ditetapkan oleh RUPS dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara berkala Perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi pada kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyesuaikan pada hasil kinerja, beban tugas dan tanggung jawab, kondisi operasional dan keuangan Perseroan, serta tingkat remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis.

Struktur dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dari Direksi

Terkait dengan besaran remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak menjabarkan besaran remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berhak atas struktur remunerasi yang terdiri dari:

- a. Gaji dan bonus;
- b. Tunjangan kesehatan;
- c. Tunjangan kendaraan;
- d. Tunjangan pajak; dan
- e. Tunjangan lainnya.

Pada tahun 2023, total remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp28.141.189.604.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Basis for Determination and Procedures

The GMS determines and stipulates the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with Law No. 40 of 2007 governing Limited Liability Companies. The Company periodically evaluates the policies, amount, and structure of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors through the Nomination and Remuneration Committee by adjusting to performance results, duties and responsibilities, operational and financial conditions of the Company, and the level of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in companies with a similar line of business.

Structure and Amount of Remuneration for the Board of Commissioners from the Board of Directors

In regards to the amount of remuneration for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company has a policy not to specify the amount of remuneration for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors are entitled to a remuneration structure consisting of:

- a. Salary and bonus;
- b. Health benefits;
- c. Vehicle allowance;
- d. Tax allowance; and
- e. Other allowances.

In 2023, total remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors in 1 (one) year was Rp28,141,189,604.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Affiliate Relationships of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with						Hubungan Keluarga dengan Family Relations with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris Board of Commissioners												
Manuel V. Pangilinan	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Rogelio L. Singson	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Johny J. Lumintang	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Farid Harianto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direksi Board of Directors												
M. Ramdani Basri	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Danni Hasan	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ridwan Irawan	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Denn Charly G. Espanola	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Amadeo N. Bejec	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Christopher Daniel C. Lizo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Francis Emmanuel D. Rojas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Benny S. Santoso	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Organs Supporting the Board of Commissioners

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ yang diangkat oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dalam Perseroan, Komite Audit berperan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan telah memiliki aspek-aspek kewajaran dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, kesesuaian dari pelaksanaan dan tindak lanjut dari audit internal dan eksternal berdasarkan standar yang berlaku.

Komite Audit juga bertanggung jawab dalam pemilihan auditor Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pedoman Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan berlandaskan pada pedoman kerja yang terangkum dalam Piagam Komite Audit yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Komisaris. Komite Audit menggunakan Piagam Komite Audit sebagai pedoman dan panduan dalam bekerja dengan isi mencakup antara lain struktur dan posisi Komite Audit, persyaratan keanggotaan, tugas, tanggung jawab, wewenang Komite Audit, mekanisme rapat, pelaporan, masa tugas, serta rencana tahunan Komite Audit.

Kualifikasi Keanggotaan dan Independensi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK No. 55 tahun 2015 tentang jumlah Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan, komposisi Komite Audit di Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan susunan yang terdiri dari 1 orang Komisaris Independen dan 2 (dua) pihak independen dengan keahlian dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Audit

Informasi terkait komposisi dan masa jabatan Komite Audit pada tahun 2023 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is an organ appointed by the Board of Commissioners that is responsible to the Board of Commissioners for the implementation of its duties. The Audit Committee in the Company supports the implementation of the Board of Commissioners' supervisory function and has the responsibility to ensure that the financial reports have the aspects of fairness and conformity with the applicable accounting principles, as well as the implementation and follow-up of internal and external audits based on the applicable standards.

As regulated in POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work, the Audit Committee is also responsible for selecting the Company's auditors.

Work Guidelines

The implementation of duties and responsibilities is guided by the work guidelines outlined in the Audit Committee Charter, which has been approved and ratified by the Board of Commissioners. The Audit Committee Charter serves as a guideline and reference for the Audit Committee's work, which includes, namely, the structure and position, membership requirements, duties, responsibilities, authorities, meeting mechanism, reporting, term of office, and annual plan of the Audit Committee.

Membership Qualifications and Independence

As regulated in Article 4 POJK No. 55 of 2015 regarding the number of Audit Committees consisting of at least 3 (three) members from Independent Commissioners and parties from outside the Company, the Audit Committee in the Company has complied with these provisions with a composition consisting of 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) independent parties with expertise in accounting and/or finance.

Composition and Term of Office of the Audit Committee

Information on the composition and terms of office of the Audit Committee in 2023 are described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Johny J. Lumintang	Ketua Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 24 Mei 2023 Decree of the Board of Commissioners Outside the Meeting dated May 24, 2023	24 Mei 2023 May 24, 2023	RUPST 2028 2028 AGMS
Tavip Santoso	Anggota Member			
Tufrida Hasyim	Anggota Member			
Farid Harianto	Anggota Member			

Profil Komite Audit

Johny J. Lumintang

Ketua Komite Audit

Profil lengkap disajikan pada pembahasan “Profil Dewan Komisaris” dalam bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Farid Harianto

Anggota Komite Audit

Audit Profil lengkap disajikan pada pembahasan “Profil Dewan Komisaris” dalam bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam laporan Tahunan ini.

Tavip Santoso

Anggota Komite Audit

Warga Negara Nationality	Indonesia	
Domisili Domicile	Bekasi	
Usia Age	60 tahun pada tahun buku 2023	60 years old in the 2023 financial year
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018.	Decree of the Board of Commissioners Outside the Meeting dated September 20, 2018.
Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Administrasi Niaga dari Universitas Terbuka (1990) - Master of Business Administration dari Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (1995)	- Bachelor of Business Administration from the Open University (1990) - Master of Business Administration from the Royal Melbourne Institute of Technology, Australia (1995)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Riwayat Pekerjaan Work Experience	Senior Manager, PT DE SUDRAJAT (2015-sekarang)	Senior Manager, PT DE SUDRAJAT (2015-present)

Audit Committee Profile

Johny J. Lumintang

Chairman of the Audit Committee

A complete profile is presented in the review of “Profile of the Board of Commissioners” in the “Company Profile” chapter of this Annual Report.

Farid Harianto

Member of the Audit Committee

A complete profile is presented in the review of “Profile of the Board of Commissioners” in the “Company Profile” chapter of this Annual Report.

Tavip Santoso

Member of the Audit Committee

Tufrida Hasyim

Anggota Komite Audit

Warga Negara Nationality	Indonesia	
Domisili Domicile	Jakarta	
Usia Age	66 tahun pada tahun buku 2023	66 years old in the 2023 financial year
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 20 September 2018.	Decree of the Board of Commissioners Outside the Meeting dated September 20, 2018.
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Statistik dari Institut Pertanian Bogor (1982) • Magister dari Universitas Indonesia (1991) • Certified Financial Planner (CFP) (2013) • Financial Planning Standards Board (FPSB) (2013) • Qualified Internal Auditor (QIA) (2009) • Certified Management Accountant (CMA) dari Institute of Certified Management Accountant (ICMA), Australia (2006)	• Bachelor of Statistics from Bogor Agricultural Institute (1982) • Masters from the University of Indonesia (1991) • Certified Financial Planner (CFP) (2013) • Financial Planning Standards Board (FPSB) (2013) • Qualified Internal Auditor (QIA) (2009) • Certified Management Accountant (CMA) from the Institute of Certified Management Accountants (ICMA), Australia (2006)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Dosen di Perguruan Tinggi Swasta	Lecturer at Private Institutions of Higher Education
Riwayat Pekerjaan Work Experience	Kepala Satuan Pengendalian Internal, PT Medikarya Anugrah Prikasih (2014- 2020)	Head of Internal Control Unit, PT Medikarya Anugrah Prikasih (2014-2020)

Tufrida Hasyim

Member of the Audit Committee

Tanggung Jawab dan Wewenang

Sebagai organ pendukung kinerja Dewan Komisaris, Komite Audit memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengkaji seluruh informasi keuangan yang disusun dan akan dikeluarkan oleh Perusahaan, termasuk Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya;
2. Mengkaji kepatuhan Perusahaan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengatur aktivitas usaha Perusahaan;
3. Mengkaji hasil pemeriksaan audit internal;
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai segala risiko yang mungkin muncul, yang dapat memengaruhi Perusahaan, serta menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi; dan
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, serta informasi lainnya yang merupakan rahasia Perusahaan. Untuk memastikan terpenuhinya tanggung jawab tersebut, maka Komite Audit memiliki wewenang untuk mengakses arsip dan informasi mengenai staf, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite Audit juga memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang telah disetujui untuk melaksanakan audit internal.

Responsibilities and Authorities

The Audit Committee has the following responsibilities and authorities as a supporting organ for the Board of Commissioners performance:

1. Reviewing all financial information prepared and to be issued by the Company, including Financial Statements and other financial information;
2. Reviewing the Company's compliance with applicable laws and regulations, as well as regulating the Company's business activities;
3. Reviewing the results of internal audit examinations;
4. Reporting to the Board of Commissioners on all risks that may arise and have an impact on the Company as well as implementing risk management policies and procedures established by the Board of Directors;
5. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and other classified information. To ensure that these responsibilities are met, the Audit Committee has the authority to access archives and information on the Company's personnel, funds, assets, and resources related to the implementation of its duties. The Audit Committee is also authorized to cooperate with any party that has been approved to conduct internal audits.

Pernyataan Independensi

Independence Statement

Kriteria	Johny J. Lumintang	Farid Harianto	Tavip Santoso	Tufrida Hasyim	Criteria
Bukan merupakan orang dalam di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	✓	✓	✓	✓	Not an insider at a Public Accounting Firm, a Legal Consulting Firm, or any other party that has given audit, non-audit, or other consulting services to the Company in the last six months.
Bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.	-	✓	✓	✓	Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company's activities in the last six months.

Pelaksanaan Rapat

Meeting Implementation

Kebijakan

Komite Audit diwajibkan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seluruh pembahasan dicatat dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Apabila tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil dengan menggunakan pengambilan suara mayoritas anggota Komite Audit yang hadir. Seandainya keputusan masih tidak bisa ditentukan, maka Ketua Komite Audit memiliki wewenang untuk menentukan keputusan yang akan disetujui secara bersama-sama.

Policy

The Audit Committee is obligated to hold a meeting at least once every 3 (three) months or at any time if deemed necessary. Deliberation is used to achieve a consensus during the process of discussing and making decisions in meetings. All discussions are documented in minutes signed by all Audit Committee members present. If no consensus is reached, a decision is made by a majority vote of the Audit Committee members present. If a decision cannot be reached, the Chairman of the Audit Committee has the authority to make a decision that will be mutually agreed upon.

AGENDA RAPAT DAN KEHADIRAN

Meeting Agenda and Attendance

Tanggal Date	Agenda	Johny J. Lumintang	Farid Harianto	Tavip Santoso	Tufrida Hasyim	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
17 Januari 2023 January 17, 2023	Membahas rencana kerja, jadwal rapat dan kunjungan ke lapangan Discussion on work plans, meeting schedules, and site visits	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-
28 Maret 2023 March 28, 2023	Membahas hasil audit eksternal oleh EY tahun buku 2022 Discussion on the external audit results by EY for the 2022 financial year	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-
26 Oktober 2023 October 26, 2023	Membahas Kinerja Audit Internal selama tahun 2023 Discussion on Internal Audit Performance during 2023	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-
21 Desember 2023 December 21, 2023	Membahas kemajuan dan kondisi proyek2 di lingkungan Perusahaan Discussion on the progress and condition of projects within the Company	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-

FREKUENSI KEHADIRAN

Frequency of Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Johny J. Lumintang	Ketua Chairman	4	4	100%
Farid Harianto	Anggota Member	4	4	100%
Tavip Santoso	Anggota Member	4	4	100%
Tufriada Hasyim	Anggota Member	4	4	100%

Pengembangan Kompetensi**Kebijakan**

Peningkatan kualitas kinerja Komite Audit dipandang penting karena dapat menunjang peningkatan kinerja Komite Audit dalam mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris sehingga turut berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris secara khusus dan kinerja Perusahaan secara umum.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

Di sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

REALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Realization of the Audit Committee Competency Development

Nama Peserta Name of Participant	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Tufriada Hasyim	Assurance Based Consulting Assurance Based Consulting	Jakarta, 13 Maret 2023 Jakarta, March 13, 2023	The Institute of Internal Auditors

Competency Development**Policy**

Improving the quality of the Audit Committee's performance is considered important because it can enhance the Audit Committee's performance in supporting the implementation of the Board of Commissioners' functions, which has an impact on improving the quality of the Board of Commissioners' performance in particular and the Company's performance in general.

Realization of Competency Development

Throughout 2023, the Audit Committee has attended education and training with the following details:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat yang diberikan dalam pedoman kerja (*board charter*). Di antaranya, pemantauan tentang proyek-proyek dan koordinasi dengan pihak Internal Audit maupun fungsi lain di Perseroan, tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Seluruh proses audit sudah jelas dan mencakup hal-hal yang penting. Komite Audit tidak memperoleh temuan yang bersifat signifikan selama proses audit. Seluruh hasil pelaksanaan tugas Komite Audit telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang pengangkatannya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Nominasi memiliki tugas utama untuk membantu Dewan Komisaris terkait hal nominasi dan remunerasi yang

Activities Implementation Report

Throughout 2023, the Audit Committee has carried out its duties and functions in accordance with the mandate given in the board charter. Among other things, monitoring of projects and coordination with Internal Audit and other functions in the Company continued to run well and smoothly.

The entire audit process is clear and covers important matters. The Audit Committee did not obtain any significant findings during the audit process. All results of the Audit Committee's duties have been reported to the Board of Commissioners..

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners, and its appointment is carried out in accordance with POJK provisions No.34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies. The main duty of the Nomination Committee is to assist the Board of Commissioners with nomination and remuneration, which

mencakup penetapan kriteria dan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, serta evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang kemudian hasil tersebut diserahkan kepada RUPS untuk ditinjau lebih lanjut dan menjadi salah satu bahan pertimbangan terkait besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki wewenang untuk menyampaikan rekomendasi terkait penentuan dan penetapan imbalan remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pedoman Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan berlandaskan pada pedoman kerja yang terangkum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi menggunakan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai pedoman dan panduan dalam bekerja dengan isi mencakup antara lain struktur dan posisi Komite Nominasi dan Remunerasi, persyaratan keanggotaan, tugas, tanggung jawab, wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi, mekanisme rapat, pelaporan, masa tugas, serta rencana tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Kualifikasi Keanggotaan

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam POJK No. 34 tahun 2014, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang anggota dengan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang menjabat sebagai Komisaris Independen di Perusahaan dengan anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak dari luar Perusahaan, maupun pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Rincian komposisi dan masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Johny J. Lumintang	Ketua Chairman	Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat tertanggal 25 Mei 2023 Decree of the Board of Commissioners Outside the Meeting dated May 25, 2023	25 Mei 2023 May 25, 2023	RUPST 2028 2028 AGMS
Farid Harianto	Anggota Member			
Helda M. Manuhutu	Anggota Member			

includes determining criteria and carrying out fit and proper tests, as well as evaluating and assessing the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the results of which are then submitted to the GMS for further review and become one of the material for consideration regarding the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Nomination and Remuneration Committee is authorized to make recommendations on the determination and stipulation of remuneration for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Work Guidelines

The implementation of duties and responsibilities is guided by the work guidelines outlined in the Nomination and Remuneration Committee Charter, which has been approved by the Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee Charter serves as a guideline and reference for the Nomination and Remuneration Committee works, which included, namely, the structure and position, membership requirements, duties, responsibilities, authority, meeting mechanism, reporting, term of office, and the annual plan of the Nomination and Remuneration Committee.

Membership Qualification

In accordance with POJK No. 34 of 2014, the Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, with 1 (one) chairman concurrently serving as an Independent Commissioner in the Company and other members who may come from members of the Board of Commissioners, parties from outside the Company, and parties holding managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources.

Composition and Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

Details of the composition and term of office of the Nomination and Remuneration Committee in 2023 are as follows:

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Johny J. Lumintang

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil lengkap disajikan pada pembahasan “Profil Dewan Komisaris” dalam bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan tahunan ini.

Farid Harianto

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil lengkap disajikan pada pembahasan “Profil Dewan Komisaris” dalam bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan tahunan ini.

Helda M. Manuhutu

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil disajikan pada pembahasan “Profil Dewan Eksekutif” dalam bab “Profil Perusahaan” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi berperan sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, berikut kebijakan dan sistem remunasinya; dan
2. Membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunasinya.

Pernyataan Independensi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan senantiasa mengutamakan penerapan prinsip independensi dan objektivitas serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan untuk senantiasa menjaga independensinya guna mencegah terjadinya benturan kepentingan akibat intervensi dari pihak lain.

Pelaksanaan Rapat

Kebijakan

Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seluruh pembahasan dicatat dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir. Apabila tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil dengan menggunakan pengambilan suara

Profile of the Nomination and Remuneration Committee

Johny J. Lumintang

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

A complete profile is presented in the review of “Profile of the Board of Commissioners” in the “Company Profile” chapter of this Annual Report.

Farid Harianto

Member of the Nomination and Remuneration Committee

A complete profile is presented in the review of “Profile of the Board of Commissioners” in the “Company Profile” chapter of this Annual Report.

Helda M. Manuhutu

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Profile is presented in the “Executive Board Profile” discussion in the “Company Profile” chapter of this Annual Report.

Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee serves as a supporting organ for the Board of Commissioners with the following duties and responsibilities:

1. Assisting the Board of Commissioners in determining the criteria for selecting candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the policies and remuneration system; and
2. Assisting the Board of Commissioners in preparing candidate members for the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as proposing the amount of remuneration.

Independence Statement

The Nomination and Remuneration Committee implements duties and responsibilities by always prioritizing the application of the principles of independence and objectivity and the interests of the Company. All members of the Nomination and Remuneration Committee are required to maintain their independence at all times to avoid conflicts of interest caused by intervention from other parties.

Meeting Implementation

Policy

The Nomination and Remuneration Committee is obliged to hold a meeting at least once every 3 (three) months, or at any time if deemed necessary. Deliberation is used to achieve a consensus during the process of discussing and making decisions in meetings. All discussions are documented in minutes signed by all Nomination and Remuneration Committee members present. If no consensus is reached, decisions are made by a majority vote of the Nomination and Remuneration Committee members present. In the event

mayoritas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir. Seandainya keputusan masih tidak bisa ditentukan, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki wewenang untuk menentukan keputusan yang akan disetujui secara bersama-sama.

that a decision still cannot be determined, the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee has the authority to determine the decision that will be approved jointly.

AGENDA RAPAT DAN KEHADIRAN

Meeting Agenda and Attendance

Tanggal Date	Agenda	Johny J. Lumintang	Farid Harianto	Helda M. Manuhutu	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
21 Juli 2023 July 21, 2023	Penjelasan Remunerasi Dewan Direksi kepada Dewan KNR Explanation of Board of Directors Remuneration to the KNR Board	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-
22 September 2023 September 22, 2023	Review Struktur Remunerasi antar Direksi Review of Remuneration Structure between Directors	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-
11 Desember 2023 December 11, 2023	Pembahasan Reguler komite KNR Regular Discussion of the KNR committee	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present	-

FREKUENSI KEHADIRAN

Frequency of Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Johny J. Lumintang	Ketua Chairman	3	3	100%
Farid Harianto	Anggota Member	3	3	100%
Helda M. Manuhutu	Anggota Member	3	3	100%

Pengembangan Kompetensi

Perusahaan turut menaruh perhatian pada peningkatan kualitas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Hal tersebut dikarenakan kinerja yang berkualitas dapat menunjang peningkatan kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris yang kemudian berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Dewan Komisaris secara khusus dan kinerja Perusahaan secara umum.

Competency Development

The Company is also concerned with improving the performance quality of the Nomination and Remuneration Committee. It is due to quality performance can support the improvement of the Nomination and Remuneration Committee's performance in supporting the implementation of the Board of Commissioners' functions, which has an impact on improving the quality of the Board of Commissioners' performance in particular and the Company's performance in general.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

Di sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

Realization of Competency Development

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee has attended education and training with the following details:

REALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Realization of the Nomination and Remuneration Committee Competency Development

Nama Peserta Name of Participant	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu dan Tempat Time and Venue	Penyelenggara Organizer
Helda M. Manuhutu	Seminar tentang Efisiensi Biaya dalam menggunakan Jalan Tol Berbayar bagi masyarakat Seminar on Cost Efficiency in using Paid Toll Roads for the community	Makasar, 24 Mei 2023 Makassar, May 24, 2023	PT MMN – PT JTSE
1. Johny L. Lumintang 2. Helda M. Manuhutu 3. Farid Harianto	Seminar “The Art of The Executive Remuneration and Compensation within the company” Seminar “The Art of The Executive Remuneration and Compensation within the company”	Jakarta, 5 Juni 2023 Jakarta, June 5, 2023	PT Mercer Indonesia

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tercantum dalam pedoman kerja. Seluruh kegiatan yang direalisasikan bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam mengkaji skema remunerasi di Perseroan.

Activities Implementation Report

In 2023, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities as stated in the work guidelines. All activities realized aim to assist the implementation of the Board of Commissioners' duties in reviewing the remuneration scheme in the Company.

Di antara yang direalisasikan, yakni melakukan assessment terhadap kebijakan remunerasi, yang hasilnya menegaskan bahwa yang berlaku saat ini masih relevan. Selain selaras dengan peraturan perundang-undangan, juga telah sesuai dengan perkembangan di industri.

Among those realized, namely conducting an assessment of the remuneration policy, the results of which confirm that the current one is still relevant. In addition to being in line with legislation, it is also in line with developments in the industry.

KOMITE INVESTASI DAN STRATEGI

Komite Investasi dan Strategi (KIS) merupakan komite khusus yang pembentukan dan pengangkatannya dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komite ini menjalankan fungsi pengawasan pada aspek pengembangan bisnis usaha melalui pelaksanaan aktivitas investasi serta penyusunan dan penerapan strategi bisnis Perseroan.

INVESTMENT AND STRATEGY COMMITTEE

The Investment and Strategy Committee (ISC) is a special committee formed and appointed by the Board of Commissioners. This committee oversees aspects of business development, such as the implementation of investment activities and the development and implementation of the Company's business strategy.

KIS memiliki tugas utama menyampaikan usulan, meninjau, merencanakan, mengumpulkan, hingga mengawasi setiap inisiatif terkait pengembangan bisnis usaha Perseroan dalam proses penerapan kebijakan investasi Perseroan. Masukan dan usulan tersebut selanjutnya disampaikan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk memastikan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki Perseroan dalam upayanya mencapai target dan tujuan utama.

ISC's main duties are to submit proposals, review, plan, collect, and oversee every initiative associated with the development of the Company's business as part of the process of implementing the Company's investment policy. These inputs and recommendations are then submitted to the Board of Commissioners to ensure the Company's capabilities in its efforts to accomplish the main targets and objectives.

Pedoman Kerja

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan berlandaskan pada pedoman kerja yang terangkum dalam Piagam Komite Investasi dan Strategi yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Komisaris.

Komposisi Komite Investasi dan Strategi

Komposisi dan masa jabatan KIS pada tahun 2023 terangkum dalam tabel sebagai berikut :

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
M. Ramdani Basri	Ketua Chairman	Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk tertanggal 24 Mei 2023 Decree of the Board of Directors of PT Nusantara Infrastructure Tbk dated May 24, 2023	24 Mei 2023 May 24, 2023	RUPST 2028 2028 AGMS
Danni Hasan	Anggota Member			
Ridwan Irawan	Anggota Member			
Benny S. Santoso	Anggota Member			
Denn Charly G. Espanola	Anggota Member			
Amadeo N. Bejec	Anggota Member			
Francis Emmanuel D. Rojas	Anggota Member			
Christopher Daniel C. Lizo	Anggota Member			

Profil Komite Investasi dan Strategi

Profil Ketua dan Anggota Komite Investasi dan Strategi disajikan pada pembahasan "Profil Direksi" dalam bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam laporan tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab yang diemban KIS antara lain sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan Kebijakan Investasi dan Petunjuk Investasi Tahunan;
2. Membantu pengkajian dan analisis usulan investasi/divestasi tertentu baik dari aspek finansial, legal, maupun aspek lainnya dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang pada saat usulan tersebut diajukan;
3. Memberikan rekomendasi atas hasil analisis yang dilakukan terhadap usulan investasi/divestasi dimaksud, dengan disertai latar belakang dan alasan-alasan yang jelas tentang diterima atau ditolaknya usulan suatu investasi/divestasi; dan
4. Memberikan pertimbangan dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi/divestasi sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2.

Work Guidelines

The implementation of duties and responsibilities is governed by the work guidelines outlined in the Investment and Strategy Committee Charter, which has been approved by the Board of Commissioners.

Composition of the Investment and Strategy Committee

The composition and term of office of ISC in 2023 are summarized in the following table:

Profile of the Investment and Strategy Committee

Profile of the Chairman and Members of the Investment and Strategy Committee are presented in the review of "Profile of the Board of Directors" in the "Company Profile" chapter of this annual report.

Duties and Responsibilities

The following are the duties and responsibilities of the ISC:

1. Assisting in the development of Investment Policy and Annual Investment Guidelines;
2. Assisting in the study and analysis of specific investment/divestment proposals from financial, legal, and other aspects, taking into consideration the social, political, economic, and environmental factors that emerged at the time the proposal was submitted;
3. Providing recommendations based on the results of the analysis performed on the investment/divestment proposal in question, accompanied by a clear background and reasons for accepting or rejecting the investment/divestment proposal; and
4. Providing consideration to decide on the implementation of the investment/divestment as referred to in points 1 and 2.

Pernyataan Independensi

Komite Investasi dan Strategi memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan dengan berkomitmen penuh pada penerapan prinsip-prinsip independensi untuk menjaga independensi dan objektivitas KIS di Perseroan. Independensi tersebut diterapkan guna menghindari potensi benturan kepentingan dan dapat tetap mengutamakan kepentingan Perseroan.

Pelaksanaan Rapat

Kebijakan

Komite Investasi dan Strategi diwajibkan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seluruh pembahasan dicatat dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Investasi dan Strategi yang hadir.

Apabila tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil dengan menggunakan pengambilan suara mayoritas anggota Komite Investasi dan Strategi yang hadir. Seandainya keputusan masih tidak bisa ditentukan, maka Ketua Komite Investasi dan Strategi memiliki wewenang untuk menentukan keputusan yang akan disetujui secara bersama-sama.

FREKUENSI KEHADIRAN

Frequency of Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
M. Ramdani Basri	Ketua Chairman	6	6	100%
Danni Hasan	Anggota Member	6	6	100%
Ridwan Irawan	Anggota Member	6	6	100%
Benny S. Santoso	Anggota Member	6	6	100%
Denn Charly G. Espanola	Anggota Member	6	6	100%
Amadeo N. Bejec	Anggota Member	6	6	100%
Francis Emmanuel D. Rojas	Anggota Member	6	6	100%
Christopher Daniel C. Lizo	Anggota Member	6	6	100%

Independence Statement

The Investment and Strategy Committee ensures that all of its duties and responsibilities are carried out with full commitment to the principles of independence to maintain ISC's independence and objectivity in the Company. This independence is implemented to avoid potential conflicts of interest and to continue prioritizing the Company's objectives.

Meeting Implementation

Policy

The Investment and Strategy Committee is obliged to hold a meeting at least once every 3 (three) months or at any time if deemed necessary. Deliberation is used to achieve a consensus during the process of discussing and making decisions in meetings. All discussions are documented in minutes signed by all Investment and Strategy Committee members present.

If no consensus is reached, the decision shall be made by a majority vote of the Investment and Strategy Committee members present. In the event that a decision still cannot be determined, the Chairman of the Investment and Strategy Committee has the authority to determine the decision that will be jointly approved.

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi Komite Investasi dan Strategi telah diuraikan pada bagian “Pengembangan Kompetensi Direksi” yang terdapat dalam bab “Tata Kelola Perusahaan” ini.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Sepanjang tahun 2023, Komite Investasi dan Strategi telah melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya serta rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menganalisis kebijakan dan petunjuk investasi tahunan Perusahaan. Rekomendasi kebijakan dan petunjuk investasi tahunan yang diberikan oleh Komite Investasi dan Strategi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Competency Development

The Investment and Strategy Committee’s competency development has been described in the “Competency Development for the Board of Directors” section of the “Corporate Governance” chapter.

Activities Implementation Report

Throughout 2023, the Investment and Strategy Committee fulfilled its various duties and responsibilities, as well as a series of activities aimed at assisting the Board of Commissioners in implementing its duties in analyzing the Company’s annual investment policies and guidelines. Policy recommendations and annual investment guidelines provided by the Investment and Strategy Committee have been implemented in accordance with relevant laws and regulations.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.04/2014, Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Direksi. Organ ini bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas untuk menjadi pihak yang menghubungkan Perseroan dengan para pemangku kepentingan, mulai dari otoritas terkait hingga masyarakat luas.

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam menghadirkan citra Perseroan yang baik di mata masyarakat luas yang salah satunya diwujudkan melalui pengelolaan program komunikasi yang baik, tepat, efektif, dan efisien dengan berbagai pihak berkepentingan. Sekretaris Perusahaan berhak untuk memperoleh akses pada informasi-informasi terkait Perusahaan yang material dan relevan. Sekretaris Perusahaan diharapkan dapat menguasai berbagai peraturan dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, terutama terkait dengan aspek keterbukaan informasi.

MEKANISME PENUNJUKAN

Mekanisme penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi yang mencakup:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sebagai penghubung dengan pihak-pihak pemegang kepentingan di luar Perusahaan seperti para pemegang saham, lembaga otoritas pasar modal dan keuangan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan;
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS; dan
5. Menjadi juru bicara Perusahaan untuk media.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profil Dahlia Evawani dapat dilihat pada pembahasan "Profil Pejabat Eksekutif" dalam bab "Profil Perusahaan".

In accordance with POJK Number 35/POJK.04/2014, the Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors. This organ is responsible directly to the President Director. The Corporate Secretary has the duty to act as a liaison between the Company and stakeholders ranging from relevant authorities to the wider community.

The Corporate Secretary is also responsible for presenting a positive image of the Company to the wider community, which is manifested through the management of good, appropriate, effective, and efficient communication programs with various interested parties. The Corporate Secretary has the right to gain access to material and relevant information about the Company. The Corporate Secretary is expected to master various laws and regulations in the capital market sector, particularly those on the information disclosure aspect.

APPOINTMENT MECHANISM

The mechanism for nominating and appointing the Corporate Secretary is based on the provisions of POJK No. 35/POJK.04/2014 regarding the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies. According to these provisions, the Corporate Secretary has the following functions:

1. Ensuring that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in accordance with the implementation of GCG principles;
2. Providing information to the Board of Directors and the Board of Commissioners regularly and/or at any time when requested;
3. As a liaison with stakeholders outside the Company, such as shareholders, capital market and financial authorities, and other interested parties;
4. Administering and storing Company documents, including but not limited to the Register of Shareholders, Special Register, and minutes of Board of Directors, Board of Commissioners, and GMS meetings;
5. Acting as the Company's spokesperson for the media.

PROFILE OF THE CORPORATE SECRETARY

Dahlia Evawani profile can be seen in the review of "Profiles of Executive Officers" in the "Company Profiles" chapter.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab yang diemban Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan dan undang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Menjadi koordinator untuk semua kegiatan aksi perusahaan yang dilakukan oleh Perseroan;
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
4. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
5. Menjadi narahubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan masyarakat;
6. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya baik dalam Perseroan maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan;
7. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% saham atau lebih; dan
8. Mengoordinasikan pelaksanaan RUPS.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelaksanaan pengembangan kompetensi bertujuan mendukung pelaksanaan fungsi dan menunjang pencapaian kinerja Sekretaris Perusahaan, kinerja Direksi secara khusus dan kinerja Perseroan secara umum dengan lebih optimal. Sepanjang tahun 2023, kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti adalah:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Following the development of the capital market, particularly the rules and regulations that apply in the area of capital markets;
2. Become the coordinator for all corporate action activities carried out by the Company;
3. Providing services to the public for any information required by investors related to the Company's condition;
4. Providing input to the Company's Board of Directors to comply with the provisions of Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market and its implementing regulations;
5. Acting as a liaison between the Company, the Capital Market Authority, and the public;
6. Preparing a special list on the Board of Directors, Board of Commissioners, and their families in the Company and its affiliates, including share ownership, business relations, and other roles that create a conflict of interest with the Company;
7. Creating a list of shareholders, including ownership of 5% or more of the Company; and
8. Coordinating the GMS implementation.

COMPETENCY DEVELOPMENT

Implementation of competency development aims to support the implementation of functions and the achievement of optimal performance of the Corporate Secretary, the Board of Directors in particular, and the Company in general. The following competency development activities were implemented throughout 2023:

Tanggal Date	Materi Competency Materials	Penyelenggara Organizer
31 Januari 2023 January 31, 2023	Sosialisasi SEOJK No. 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum Socialization of SEOJK No. 33/SEOJK.04/2022 concerning Guidelines for the Implementation of Securities Offerings that are not Public Offerings	BEI, OJK & ICSA
26 Maret 2023 March 26, 2023	Pelatihan Perlaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI GMS Implementation Training through eASY.KSEI	KSEI & ICSA
30 Mei 1023 May 30, 2023	Effective Risk Management for Corporate Secretary	ICSA
13 Juli 2023 July 13, 2023	Pendalaman POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Deepening POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, and POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities	BEI, OJK & ICSA

Tanggal Date	Materi Competency Materials	Penyelenggara Organizer
2 Agustus 2023 August 2, 2023	Strategi Ketahanan Perlindungan Data pada Perusahaan Data Protection Resilience Strategy in the Company	ICSA
8 Agustus 2023 August 8, 2023	Potensi Pertumbuhan Perusahaan Melalui Penerbitan Sukuk Company Growth Potential through Sukuk Issuance	BEI, OJK & ICSA
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Sosialisasi Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik Socialization of Compliance Refreshment for Issuers and Public Companies	OJK & ICSA
24 Agustus 2023 August 24, 2023	Pendalaman SEOJK Nomor 33/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Penawaran Umum Deepening SEOJK Number 33/2022 concerning Guidelines for the Implementation of Securities Offerings that are not Public Offerings	OJK & ICSA
3 Oktober 2023 October 3, 2023	Listed Companies' Compliance Refreshment	OJK & ICSA
23 November 2023 November 23, 2023	Pendalaman POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Deepening POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies	OJK & ICSA
29 November 2023 November 29, 2023	Certified Chief Compliance Officer	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
19 Desember 2023 December 19, 2023	ESG Talks Kolaborasi Lestarkan Bumi untuk Visi Net Zero Emission ESG Talks on Collaboration to Save the Earth for Net Zero Emission Vision	ICSA & BenihBaik.com

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN BUKU

Hingga akhir tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan perannya yang seluruhnya telah disampaikan dalam Laporan Sekretaris Perusahaan dan telah dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Berbagai kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menyenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan;
2. Menyenggarakan pelaksanaan Paparan Publik Tahunan;
3. Menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI);
4. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris sekaligus membuat risalah rapat;
5. Menjadi koordinator dalam kegiatan Komite Audit;
6. Melakukan pelaporan kepatuhan kepada regulator;
7. Melakukan keterbukaan informasi atas setiap aksi korporasi yang dilakukan entitas anak Perseroan; dan
8. Menjalin komunikasi dengan OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan pihak terkait lainnya.

IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL YEAR ACTIVITIES

Until the end of 2023, the Corporate Secretary engaged in a variety of activities in the course of carrying out its functions and roles, all of which were documented in the Corporate Secretary's Report and reported to the Board of Directors and Board of Commissioners. These various activities include the following:

1. Organizing the Company's Annual GMS and Extraordinary GMS;
2. Organizing the implementation of the Annual Public Expose;
3. Submitting the Annual Reports and Audited Financial Statements to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX);
4. Attending Board of Commissioners meetings and joint Board of Directors and Board of Commissioners meetings, as well as taking minutes of meetings;
5. Serving as a coordinator for the Audit Committee's activities;
6. Reporting compliance to regulators;
7. Disclosing information on all corporate actions carried out by the Company's subsidiaries; and
8. Establishing communication with the OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), IDX, Indonesian Central Securities Depository (KSEI), Indonesian Clearing and Guarantee Institution (KPEI), and other related parties.

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Unit Audit Internal merupakan salah satu organ Perseroan yang memiliki fungsi dan peran menjalankan kegiatan *assurance* dan *consulting* secara independen. Tujuannya adalah menghadirkan nilai tambah serta meningkatkan kualitas dari operasional Perseroan.

Audit Internal ikut mendukung Perseroan dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan serta mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara optimal. Untuk tujuan tersebut, Audit Internal melakukannya dengan pendekatan yang sistematis dan teratur pada proses evaluasi dan peningkatan efektivitas pengelolaan risiko serta pengendalian internal dalam proses tata kelola.

PEDOMAN KERJA UNIT AUDIT INTERNAL

Audit Internal telah memiliki pedoman kerja berupa Piagam Audit Internal sebagai panduan untuk Audit Internal menjalankan fungsinya, yakni pelaksanaan proses audit terhadap pelaksanaan sistem operasional di Perseroan. Piagam tersebut disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 dan telah diperbaharui pada tanggal 17 Januari 2020.

Piagam Audit Internal memuat berbagai hal terkait Audit Internal, seperti: tujuan Audit Internal, lingkup pekerjaan, independensi, kedudukan dan struktur, akuntabilitas, tanggung jawab, kewenangan, kualifikasi, serta kode etik dan standar pelaksanaan audit.

Selain Piagam Audit Internal, terdapat dasar atau acuan lain yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja Audit Internal, yaitu kode etik dan *Internasional Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari The Institute of Internal Auditors dan ISO 9001:2015.

INDEPENDENSI, KEDUDUKAN, DAN STRUKTUR AUDIT INTERNAL

Audit Internal merupakan pihak yang bekerja secara independen dengan kedudukan berada di bawah Direktur Utama. Dengan demikian, Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Audit Internal memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit serta memiliki akses yang tidak terbatas namun tetap dalam batas kewajaran pada seluruh kegiatan Perseroan. Audit Internal memegang peranan penting sebagai mitra manajemen dalam upaya pencapaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

The Internal Audit Unit is one of the Company's organs with the function and role of independently carrying out assurance and consulting activities. The objective is to bring added value and improve the overall quality of the Company's operations.

The Internal Audit assists the Company in meeting its targets and goals as well as in achieving the optimal implementation of good corporate governance. Internal Audit uses a systematic and consistent approach in the process of evaluating and improving the effectiveness of risk management and internal control in the governance process.

INTERNAL AUDIT UNIT WORK GUIDELINES

The Internal Audit has work guidelines in the form of an Internal Audit Charter that serves as a guide for Internal Audit to carry out its functions, namely the audit process on the implementation of the Company's operational system. The charter was developed in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 56/POJK.04/2015 and was updated on January 17, 2020.

Internal Audit objectives, scope of work, independence, position and structure, accountability, responsibility, authority, qualifications, and a code of ethics and auditing standards are all included in the Internal Audit Charter.

Other bases or references used to improve Internal Audit performance, in addition to the Internal Audit Charter, are the code of ethics and the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing from The Institute of Internal Auditors, and ISO 9001:2015.

INDEPENDENCE, POSITION, AND STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT

The Internal Audit is an independent party that works under the President Director. Therefore, Internal Audit is responsible directly to the President Director.

The Internal Audit has a direct channel of communication with the Board of Commissioners and the Audit Committee to support the implementation of its duties, and it has unrestricted but reasonable access to all of the Company's activities. The Internal Audit is an essential management partner in achieving good corporate governance.

Pada tahun 2023, unit Audit Internal Perusahaan memiliki komposisi dengan jumlah 3 (tiga) orang dengan salah satunya menjabat sebagai General Manager Audit Internal.

PROFIL KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

Profil Junianto T. Prijono dapat dilihat pada pembahasan "Profil Pejabat Eksekutif" dalam bab "Profil Perusahaan".

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas utama Audit Internal Perseroan secara kolektif mencakup penilaian dari efektivitas dan kecukupan pada proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh manajemen Perusahaan. Pelaksanaan tugas utama tersebut dijalankan untuk memastikan bahwa:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan yang telah disetujui, termasuk penugasan khusus atau proyek yang diminta oleh manajemen atau Komite Audit;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Bekerja sama dengan Komite Audit;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

KUALIFIKASI PROFESI

No	Kualifikasi/Sertifikasi Qualification/Certification	Jumlah Pemilik Sertifikasi Number of Certification Owners
1	Certified Risk Management Specialist (CRMS)	3

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN

Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal dilaporkan kepada OJK.

In 2023, the Company's Internal Audit unit has 3 (three) members, with one of them acting as General Manager of Internal Audit.

PROFILE OF HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

Junianto T. Prijono's profile can be seen in the review of "Profiles of Executive Officers" in the "Company Profiles" chapter.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The main duties of the Company's Internal Audit include evaluating the effectiveness and adequacy of the risk management, internal control, and governance processes implemented and carried out by the Company's management. The implementation of these main duties is carried out to ensure that:

1. Developing and implementing an approved annual internal audit plan, including any special assignments or projects requested by management or the Audit Committee;
2. In accordance with Company policies, test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems;
3. Examining and evaluating the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
4. Providing improvement recommendations and objective information about the activities examined at all levels of management;
5. Preparing a report on the audit's findings and submit it to the President Director and the Board of Commissioners;
6. Collaborating with the Audit Committee;
7. Monitoring, analyzing, and reporting on the implementation of recommended follow-up improvements;
8. Developing a program to evaluate the quality of internal audit activities performed; and
9. Conducting special inspections as needed.

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

PARTIES IN CHARGE OF APPOINTING AND DISMISSING

The President Director appoints and dismisses the Head of the Internal Audit Unit with the approval of the Board of Commissioners. Any appointment, replacement, or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit is submitted to OJK in compliance with OJK Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.

RAPAT UNIT AUDIT INTERNAL

Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal di Pasal 8 poin c menyebutkan kewenangan Audit Internal untuk menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit. Sepanjang tahun 2023 Internal Audit beberapa kali melakukan rapat bersama Direksi Perseroan, Direksi Unit Bisnis, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

REALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Guna menghadirkan pelaksanaan fungsinya di Perusahaan dengan efektif dan efisien serta menunjang pencapaian kinerja Audit Internal, kinerja Direksi secara khusus dan kinerja Perseroan secara umum dengan lebih optimal, Audit Internal mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. Sepanjang tahun 2023, Audit Internal telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Peserta Name of Participant	Jenis Pelatihan Type of Training	Waktu Penyelenggaraan Time of Implementation	Tempat Penyelenggaraan Place of Implementation	Penyelenggara Organizer
Junianto T. Prijono	Risk Management	6-7 Mei 2024 May 6-7, 2024	Jakarta	Hikamah Awdit
Hutari	Risk Management	6-7 Mei 2024 May 6-7, 2024	Jakarta	Hikamah Awdit
Adhitya Suwanda	Risk Management	6-7 Mei 2024 May 6-7, 2024	Jakarta	Hikamah Awdit

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN BUKU

Sepanjang tahun 2023, Internal Audit telah melaksanakan serangkaian kegiatan evaluasi atas pengendalian internal di berbagai entitas perusahaan anak dan melaksanakan audit operasional pada proses operasi, aset manajemen tol dan non tol, keuangan, proyek-proyek perusahaan di unit-unit bisnis.

INTERNAL AUDIT UNIT MEETING

Policy

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Preparing the Internal Audit Unit Charter, Article 8-point c states the authority of Internal Audit to hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or the Audit Committee. Throughout 2023, the Internal Audit held several meetings with the Company's Board of Directors, Business Unit Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee.

REALIZATION OF COMPETENCY DEVELOPMENT

Internal Audit participates in various education and training programs to present the implementation of its functions in the Company effectively and efficiently, as well as to support the achievement of optimal Internal Audit performance, the performance of the Board of Directors in particular, and the performance of the Company in general. Throughout 2023, Internal Audit has engaged in education and training with the following details:

IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL YEAR ACTIVITIES

Throughout 2023, the Internal Audit has carried out a series of evaluation activities on internal controls in various subsidiaries and conducted operational audits on operational processes, toll and non-toll management assets, finance, and corporate projects in business units.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik, antara lain tercermin melalui pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif di seluruh lini Perseroan. SPI bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki sejumlah aspek, seperti laporan dan informasi keuangan yang andal, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kegiatan operasional yang telah berlangsung baik dan optimal.

KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan Perseroan diterapkan dengan melibatkan peran serta jajaran Dewan Komisaris, Direksi, hingga pejabat eksekutif. Penerapannya mengacu pada kerangka Sistem Pengendalian Internal yang diakui secara global, yakni yang diterbitkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization (COSO)*.

Menurut COSO, penerapan pengendalian internal terdiri dari tujuan operasional yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi; tujuan pelaporan yang berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang andal, tepat waktu, transparan, memenuhi kriteria, serta persyaratan lain yang ditetapkan; dan tujuan kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Terdapat beberapa komponen yang ada dalam unsur-unsur pengendalian internal menurut COSO. Di antaranya, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.

Sistem Pengendalian Internal Perseroan mengatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Setiap transaksi keuangan yang dicatat dan disajikan pada laporan keuangan Perseroan harus sesuai dengan prinsip Pedoman Standar Keuangan (PSAK) yang berlaku;
2. Perseroan akan selalu mengumumkan setiap transaksi material dengan nilai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kepada masyarakat pada sedikitnya melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK; dan
3. Dalam rangka menerapkan pengendalian internal yang baik dan kompeten, setiap transaksi yang dicatat harus selalu mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan otoritas yang berlaku.

The Company's commitment to good corporate governance is reflected, namely, by the implementation and application of an effective Internal Control System (SPI) across all business lines. SPI strives to ensure that the Company has several aspects in place, such as reliable financial reports and information, compliance with applicable laws and regulations, and operational activities that are running smoothly and optimally.

INTERNAL CONTROL SYSTEM POLICY

The Company's Internal Control System (SPI) is implemented with the participation of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and executive officers. Its application relates to the internationally recognized Internal Control System framework issued by The Committee of Sponsoring Organizations (COSO).

According to COSO, the implementation of internal control consists of operational objectives relating to the effectiveness and efficiency of operations; reporting objectives relating to the interests of financial reporting that are reliable, timely, transparent, meet the criteria and other requirements set out; and compliance objectives relating to the Company's compliance with applicable regulations and provisions.

According to COSO, the elements of internal control include several components. The control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities are to name a few.

The Internal Control System of the Company governs several provisions, including:

1. Every financial transaction recorded and presented in the Company's financial statements must comply with the principles of the applicable Financial Standards Guidelines (PSAK).
2. The Company will always announce to the public any material transaction with a value of more than 20% of the Company's equity in at least one Indonesian language daily newspaper with national circulation and submit the proof of the announcement to OJK.
3. In order to implement good and competent internal control, every recorded transaction must always obtain approval from the authorized official in accordance with the applicable authority.

Melalui pengendalian internal yang diterapkan dengan tepat dan baik, diharapkan dapat menunjang jalannya aktivitas operasional Perseroan dengan lebih efektif dan efisien, pengamanan aset Perseroan lebih optimal, meningkatnya kepercayaan terhadap laporan keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dapat lebih baik dalam aspek pemenuhan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL

Bidang Keuangan

Implementasi pengendalian internal bidang keuangan berfokus pada akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan, termasuk komitmen, otorisasi, serta penerimaan dan pengeluaran uang.

Bidang Operasional

Implementasi pengendalian internal bidang operasional berfokus pemeriksaan penggunaan sumber daya unit untuk mengevaluasi apakah sumber daya tersebut digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi misi dan tujuan Perseroan.

Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

Implementasi pengendalian internal bidang kepatuhan berfokus peninjauan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Tinjauan dan evaluasi terhadap efektivitas dari penerapan Sistem Pengendalian Internal di seluruh lini Perseroan dilakukan oleh Audit Internal. Organ tersebut juga berperan dalam melakukan pengawasan untuk mendukung Direksi terkait efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

Hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen Perseroan agar dapat ditindaklanjuti dan pelaksanaannya dapat terus dimonitor. Dengan demikian, SPI dapat berjalan efektif dan sesuai yang diharapkan. Untuk tahun 2023, Perseroan melalui Audit Internal telah melakukan evaluasi dan memperoleh hasil bahwa SPI telah berjalan dengan baik. Hal itu, antara lain tergambar dari opini “Wajar Tanpa Pengecualian” pada Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Internal controls that are properly and consistently implemented are expected to support the Company's operational activities more effectively and efficiently, optimize the security of the Company's assets, and increase confidence in the Company's financial statements. Furthermore, the Company can improve in terms of complying with relevant laws and regulations.

INTERNAL CONTROL IMPLEMENTATION

Financial Sector

Internal control implementation in the financial sector focuses on the accounting and reporting of financial transactions, including commitments, authorizations, and cash receipts and disbursements.

Operational Sector

Internal control implementation in the operational sector focuses on examining the use of unit resources to determine whether these resources are being used in the most effective and efficient manner to accomplish the Company's mission and objectives.

Compliance with Legislation

The implementation of internal control in the compliance sector focuses on reviewing compliance with applicable laws, regulations, policies, and procedures.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal Audit conducts a review and evaluation of the effectiveness of the implementation of the Internal Control System across all business lines. This organ also supervises and supports the Board of Directors on the effectiveness of the Company's internal control system.

The evaluation findings are submitted to the Company's management for follow-up and continuous monitoring of their implementation. As a result, SPI can function properly and predictably. For 2023, the Company evaluated Internal Audit and verified that the SPI was performing well. It is demonstrated, namely, by the “Unqualified” opinion in the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023, which have been audited by a Public Accounting Firm (KAP).

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi menilai bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan telah berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik di lingkungan industri. Untuk peningkatannya, Perseroan senantiasa melakukan evaluasi guna memastikan kecukupan SPI dalam kegiatan usaha Perseroan.

Karena itu, Direksi menilai bahwa unit-unit kerja yang berada di bawah Direksi telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik serta memperoleh capaian kinerja yang efektif dan efisien. Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai unit pendukung kinerja Direksi dan telah membantu Direksi menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan Perusahaan di sepanjang tahun 2023.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors considers that the implementation of the Internal Control System in the Company has gone well, in accordance with the applicable laws and regulations as well as best practices in the industrial environment. To guarantee the adequacy of SPI in the Company's business activities, the Company continuously evaluates for improvement.

Therefore, the Board of Directors considers that the work units under the Board of Directors have carried out their functions and roles properly and achieved effective and efficient performance. The Corporate Secretary and Internal Audit have performed admirably as a performance support unit for the Board of Directors, assisting the Board of Directors in carrying out their responsibilities in managing and administering the Company throughout 2023.

Manajemen Risiko

Risk Management

Perseroan memandang bahwa penerapan manajemen risiko merupakan bagian penting dalam upaya dan komitmen Perseroan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan manajemen risiko yang tepat dan komprehensif mampu mendukung Perseroan mencapai kinerja yang optimal dengan menekan potensi risiko dan meminimalisir dampak yang mungkin terjadi akibat risiko tersebut.

Perseroan memastikan bahwa manajemen risiko telah diterapkan di seluruh proses operasional dan seluruh lini Perseroan. Untuk itu, Perseroan menetapkan kebijakan manajemen risiko sebagai salah satu upaya Perseroan mengimplementasikan manajemen risiko yang terintegrasi secara efektif dan efisien. Perseroan secara berkala mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat dipahami dan dievaluasi tingkat efektivitasnya.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan manajemen risiko berfungsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan risiko di setiap unit kerja yang ada di Perseroan. Kebijakan tersebut, antara lain meliputi:

1. Mendeteksi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas;
2. Melakukan pengukuran tingkat dan besaran setiap risiko dengan memperhitungkan skala dampak dan kemungkinan terjadinya risiko;
3. Melakukan evaluasi terhadap sumber risiko sebagai dasar pemetaan dan pengendalian risiko yang signifikan;

The Company believes that risk management is an essential component of the Company's efforts and commitment to implementing good corporate governance. The application of appropriate and comprehensive risk management can assist the Company in reaching optimal performance by reducing potential risks and minimizing the effect that these risks may have.

The Company ensures that risk management is implemented in all operational processes and all business lines. As a result, as part of its efforts to implement integrated risk management effectively and efficiently, the Company establishes a risk management policy. The Company communicates this policy to all stakeholders regularly so that its level of effectiveness can be comprehended and evaluated.

RISK MANAGEMENT POLICY

The risk management policy functions to optimize risk management implementation in each work unit within the Company. These policies include, namely:

1. Detecting risks as early as possible in each activity;
2. Measuring the level and magnitude of each risk by considering the scale of the impact as well as the probability of the risk occurring;
3. Evaluating risk sources as a foundation for mapping and controlling significant risks;

- Menyusun rencana strategi pengendalian terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi;
- Melaksanakan kegiatan pengendalian risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha Perseroan; dan
- Melakukan pemantauan risiko secara berkesinambungan, khususnya yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi usaha Perseroan.

JENIS DAN MITIGASI RISIKO PERUSAHAAN

Dalam proses menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menghadapi beragam risiko. Untuk mencegah potensi dampak buruk yang ditimbulkan dari risiko yang dihadapi, Perseroan melakukan peninjauan secara rutin pada kebijakan *hedge and control* yang berlaku untuk setiap jenis risiko. Dengan adanya peninjauan tersebut, Perseroan dapat menentukan langkah mitigasi yang tepat untuk menekan dampak negatif dari risiko-risiko tersebut.

Berikut, rincian jenis risiko dan mitigasi Perseroan.

- Developing strategic control plans for high-priority risks;
- Implementing control activities of risks that might compromise the Company's business sustainability; and
- Monitoring risks on an ongoing basis, particularly those that have a substantial impact on the Company's business conditions.

TYPES AND MITIGATION OF COMPANY RISKS

The Company confronts a variety of risks while carrying out its business activities. In order to prevent potential adverse impacts arising from the risks it encountered, the Company reviews the hedge and control policies that apply to each type of risk regularly. With this review, the Company will be able to identify suitable risk mitigation measures to reduce the negative impact of these risks.

The following are descriptions of the types of risks and the Company's mitigation measures.

Jenis Risiko Type of Risk	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risiko Suku Bunga bagi Nilai Wajar dan Arus Kas Interest Rate Risk on Fair Value and Cash Flows	
Risiko suku bunga yang berasal dari pinjaman bank dengan tingkat suku bunga yang berbeda-beda dapat memengaruhi arus kas Perseroan. Hal ini juga didorong oleh dana tunai yang disimpan pada berbagai tingkat suku bunga. Interest rate risk originating from bank loans with varying interest rates can have an impact on the Company's cash flow. It is also influenced by cash saved at different interest rates.	Perseroan melakukan evaluasi terhadap tren tingkat suku bunga pasar dan mengkaji tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh berbagai bank dan lembaga keuangan lainnya agar memperoleh suku bunga yang paling menguntungkan. In order to obtain the most favorable interest rates, the Company evaluates market interest rate trends and examines the interest rates provided by different banks and other financial institutions.
Risiko Mata Uang Currency Risk	
Risiko mata uang adalah risiko yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat memengaruhi pendapatan dan pengeluaran untuk perusahaan yang kegiatan usahanya menggunakan mata uang asing. Currency risk refers to the risk posed by fluctuations in foreign currency exchange rates, which can impact revenues and expenses for companies that conduct business in foreign currencies.	Perseroan belum menerapkan kebijakan mengenai risiko mata uang karena pendapatan dan pengeluaran Perseroan dan entitas anak hampir seluruhnya dalam rupiah. The Company has not adopted a currency risk policy because the Company and its subsidiaries' income and expenses are almost entirely in rupiah.
Risiko Kredit Credit Risk	
Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Credit risk is the risk that one party to a financial instrument fails to fulfill its obligations, resulting in a financial loss for the other party.	Perseroan hanya memberikan pembayaran secara kredit dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel serta melakukan pemantauan terhadap saldo piutang secara berkelanjutan agar eksposur Perseroan terhadap piutang yang tidak tertagih tidak signifikan. The Company only provides credit payments to recognized and credible third parties and continuously monitors receivable balances to ensure that the Company's exposure to uncollectible receivables is not significant.
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	
Risiko likuiditas muncul terutama dari perbedaan jatuh tempo aset keuangan dan kewajiban, sehingga suatu pihak mengalami keterlambatan pemenuhan kewajiban keuangan karena kekurangan dana jangka pendek. Liquidity risk comes primarily from the maturity difference between financial assets and liabilities, causing a party to experience delays in meeting financial obligations due to a short-term shortage of funds.	Perseroan secara menyeluruh memantau kebutuhan likuiditas dan terus menelaah kondisi pasar uang untuk memberi peluang bagi optimalisasi biaya-biaya pendanaan. The Company closely monitors liquidity requirements and continues to review money market conditions to provide opportunities for optimization of financing costs.
Risiko Permodalan Capital Risk	
Risiko permodalan disebabkan oleh penurunan kualitas aset baik sebagai dampak kredit macet atau hal lainnya yang memaksa suatu perusahaan untuk menambah setoran modal dan/atau menerbitkan saham baru. Capital risk caused by a decrease in asset quality, either as a result of non-performing loans or other factors, forces a company to increase capital injection and/or issue new shares.	Manajemen Perseroan memperhatikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas. Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menerbitkan saham baru, mengusahakan pendanaan melalui pinjaman, melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada ataupun menjual aset untuk mengurangi pinjaman. The Company management is concerned with maintaining a healthy capital ratio between total liabilities and equity. The Company may issue new shares, seek financing through loans, restructure existing debt, or sell assets to reduce loans to maintain and adjust the capital structure.

TINJAUAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO

Perseroan senantiasa melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko agar dapat menyesuaikan terhadap kondisi terkini dari Perseroan serta regulasi yang berlaku. Sementara peninjauan efektivitas sistem manajemen risiko dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi bersama Unit Audit Internal.

Berdasarkan hasil audit internal yang telah dilakukan selama tahun 2023, Unit Audit Internal percaya bahwa sistem manajemen risiko yang ada cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mitigasi risiko-risiko usaha, operasional dan keuangan yang relevan dengan kondisi usaha Perseroan. Sistem manajemen risiko yang dijalankan saat ini juga dirasa cukup efektif dalam mengidentifikasi dan menyiapkan rencana mitigasi untuk potensi risiko-risiko baru yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi maupun Dewan Komisaris/Komite Audit meyakini bahwa sistem manajemen risiko Perseroan yang diterapkan saat ini sudah cukup efektif dalam mereduksi risiko-risiko usaha, operasional dan keuangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Begitu juga dengan potensi risiko-risiko baru yang mungkin akan timbul dan berdampak signifikan di masa mendatang.

REVIEW OF THE RISK MANAGEMENT EFFECTIVENESS

The Company constantly evaluates risk management to adapt to the most recent Company conditions and applicable regulations. Meanwhile, the Board of Commissioners and Board of Directors, in collaboration with the Internal Audit Unit, conduct a review of the effectiveness of the risk management system.

The Internal Audit Unit believes that the existing risk management system is quite effective in identifying and mitigating business, operational, and financial risks that are pertinent to the Company's business conditions, based on the results of the internal audit performed in 2023. The current risk management system is also considered to be quite effective at identifying and planning mitigation plans for potential new risks that may affect the Company's business activities.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR COMMISSIONERS OR THE AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors and the Board of Commissioners/Audit Committee believe that the Company's current risk management system is effective enough in reducing previously identified business, operational, and financial risks. Similarly, there is the potential for new risks that may arise and have a significant impact in the future.

Perkara Penting dan Sanksi Administratif yang Dihadapi

Important Cases and Administrative Sanctions Faced

Sepanjang tahun 2023, tidak memiliki perkara penting yang dialami oleh Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, serta entitas anak Perseroan. Selain itu, sanksi administrasi dari regulator juga tidak ada.

Throughout 2023, the Company, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Company's subsidiaries, encountered no important cases. Furthermore, there were no administrative penalties imposed by the regulator.

Etika dan Norma Perilaku

Ethical and Behavioural Norms

Perseroan mengutamakan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan yang dibangun dan dipelihara sesuai dengan standar etika bisnis dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Untuk itu, Perseroan memiliki kode etik yang diturunkan ke dalam etika dan norma perilaku sebagai bentuk komitmen Perseroan menjalankan aktivitas usaha yang positif dan memberi nilai tambah.

Etika dan norma perilaku ini terangkum dalam GCG Manual Perseroan dan diterapkan ke seluruh lini. Seluruh individu Perseroan diwajibkan untuk menerapkan etika dan norma perilaku ke dalam aktivitas operasional sehari-hari sebagai dasar pembentukan sikap dan perilaku yang beretika secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

POKOK-POKOK ETIKA DAN NORMA PERILAKU

Perseroan menyusun pokok-pokok yang terkandung dalam etika dan norma perilaku dengan mengacu pada ketentuan dan kebijakan Perseroan serta regulasi berupa perundang-undangan yang berlaku. Etika dan norma perilaku tersebut mencakup:

1. Kepatuhan terhadap Hukum
2. Beradaptasi secara Gesit dan Unggul terhadap Perubahan Lingkungan
3. Menjaga Kerahasiaan Informasi
4. Benturan Kepentingan
5. Pernyataan Palsu
6. Perlindungan terhadap Privasi Individu
7. Pengembangan Masyarakat dan Lingkungan
8. Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pemerintah
9. Hadiah
10. Donasi
11. Keterlibatan dalam Kegiatan Politik

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Sosialisasi dan internalisasi merupakan langkah penting untuk mewujudkan penerapan etika dan norma perilaku secara optimal dan menyeluruh ke semua lini Perseroan. Perseroan menginformasikan kepada seluruh individu Perseroan terkait etika dan norma perilaku dengan memanfaatkan berbagai media internal yang dapat diakses setiap saat dengan mudah oleh seluruh individu.

Beragam media internal yang dimaksud, antara lain memo internal, surel, buletin internal, situs web, hingga berbagai pelatihan yang diadakan internal. Melalui proses ini, setiap individu yang bekerja di Perseroan dapat menjalankan perannya dengan memahami dan menerapkan etika dan norma dalam berperilaku dan bersikap dengan patuh.

The Company prioritizes good relations with stakeholders that are built and maintained in accordance with business ethical standards and do not deviate from applicable regulations. As a result, the Company has a code of ethics, which is translated into ethics and behavioral norms as a form of the Company's commitment to carrying out positive business activities and adding value.

The Company's GCG Manual summarizes these ethics and behavioral norms, which apply to all lines. All Company individuals are expected to incorporate ethical and behavioral norms into their daily operational activities as a foundation for consistently developing ethical attitudes and behavior in compliance with applicable regulations.

KEYS TO ETHICAL AND BEHAVIOURAL NORMS

The Company summarizes the key points contained in the ethical and behavioral norms by referring to the Company's provisions and policies, as well as regulations in the form of applicable laws. The ethical and behavioral norms include:

1. Compliance with Law
2. Adapting to Environmental Changes in an Agile and Superior Manner
3. Maintaining Information Confidentiality
4. Conflict of Interest
5. False Statement
6. Individual Privacy Protection
7. Community and Environmental Development
8. Employee and Government Official Relations
9. Rewards
10. Donation
11. Involvement in Political Activities

SOCIALIZATION AND INTERNALIZATION

Socialization and internalization are critical steps toward achieving the optimal and comprehensive application of ethical and behavioral norms across all business lines. The Company informs all of the Company's individuals about ethical and behavioral norms through various internal media that are readily accessible to all individuals at any time.

Internal memos, e-mails, internal bulletins, websites, and various internally conducted training are among the various internal media in question. Every individual who works in the Company can carry out their role by understanding and implementing ethical and behavioral norms in a compliant manner through this process.

PEMBERLAKUAN ETIKA DAN NORMA PERILAKU

Perseroan memastikan bahwa komitmen penerapan etika dan norma perilaku sebagai kode etik berlaku bagi seluruh individu dalam organisasi Perseroan, dari jajaran manajemen hingga karyawan. Seluruh organisasi diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dan kebijakan yang terangkum dalam etika dan norma perilaku tanpa terkecuali.

Pemberlakuan etika dan norma perilaku ini merupakan bentuk tanggung jawab Perseroan untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum serta etika yang berlaku. Tujuannya adalah menghadirkan lingkungan kerja yang kondusif, sehat, dan nyaman bagi seluruh pihak di dalamnya.

Unit Audit Internal menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hingga penerapan etika dan norma perilaku Perseroan dengan senantiasa mendapat dukungan dari seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, serta jajaran manajemen terkait lainnya.

ENFORCEMENT OF ETHICAL AND BEHAVIORAL NORMS

The Company guarantees that all individuals within the Company's organization, from management to employees, are committed to implementing ethical and behavioral norms as a code of ethics. Without exception, all organizations are obliged to comply with the provisions and policies outlined in ethical and behavioral norms.

The Company's responsibility to always comply with applicable legal and ethical provisions includes the enforcement of ethical and behavioral norms. The aim is to provide a conducive, healthy, and comfortable working environment for all parties involved.

The Internal Audit Unit is the party in charge of implementing and enforcing the Company's ethical and behavioral norms, and it is always supported by all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers, and other pertinent management levels.

Jenis Sanksi	2023	2022	Type of Sanction
Teguran	0	0	Reprimand
Peringatan 1	0	2	1 st Warning
Peringatan 2	0	0	2 nd Warning
Peringatan 3	0	0	3 rd Warning
Pengunduran Diri	9	12	Resignation
Pemutusan Hubungan Kerja	0	0	Work Termination

Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Provision of Performance-Based Long-Term Compensation

Perseroan tidak memberikan kompensasi jangka panjang dalam bentuk *share options* kepada manajemen maupun karyawan.

The Company does not provide long-term compensation in the form of stock options to management or employees.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Komitmen Perseroan untuk menghadirkan kondisi dan lingkungan kerja yang kondusif, bersih, dan sehat diwujudkan melalui penyediaan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Penerapan WBS ini bertujuan untuk mendukung penegakan prinsip-prinsip GCG secara optimal di seluruh lini Perseroan.

Melalui WBS, seluruh pihak berkesempatan untuk dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik, budaya perusahaan, peraturan Perseroan, hingga perundang-undangan yang dilakukan oleh individu Perseroan. Laporan tersebut harus berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan berlandaskan fitnah, serta disampaikan untuk mendukung kepentingan Perseroan.

Perseroan diwajibkan untuk menindaklanjuti laporan dengan pelanggaran dalam bentuk apa pun dan dilakukan oleh siapa pun, yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan dugaan atau kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh individu Perseroan dapat disampaikan menggunakan berbagai jalur komunikasi yang disediakan oleh Perseroan. Laporan tersebut kemudian akan disampaikan dan ditangani oleh Kepala Unit Bisnis terkait dan diteruskan ke Audit Internal dan Departemen Sumber Daya Manusia untuk ditindaklanjuti.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perseroan memastikan bahwa pelapor memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindakan merugikan seperti ancaman, intimidasi, maupun tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan dari pihak mana pun. Perseroan juga merahasiakan identitas pelapor juga sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan yang diberikan Perseroan kepada pelapor.

JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2023

Sepanjang tahun buku 2023 tidak ada pengaduan yang diterima oleh Perseroan.

The provision of a Whistleblowing System (WBS) demonstrates the Company's commitment to providing conducive, clean, and healthy working conditions and environment. The WBS implementation seeks to optimally support the enforcement of GCG principles across all Company lines.

The WBS provides all parties with the opportunity to submit reports on alleged violations of the code of ethics, corporate culture, Company regulations, and legislation committed by individuals of the Company. The report must be based on evidence that can be accounted for, not slander, and submitted to support the Company's interests.

The Company is obligated to follow up on reports of violations of any kind, committed by anyone that violates the stipulated conditions.

MECHANISM FOR REPORT SUBMISSION

Reports of suspected or incidental violations committed by individuals of the Company can be submitted through the Company's different communication channels. The report will then be submitted and handled by the pertinent Business Unit's Head before being forwarded to the Internal Audit and Human Resources Departments for follow-up.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The Company ensures that the reporter is safe from any type of harmful action, such as threats, intimidation, or unpleasant actions from any party. As a form of protection provided by the Company to the reporter, the Company also maintains the reporter's identity confidential.

NUMBER OF COMPLAINTS IN 2023

Throughout 2023, there were no complaints report received by the Company.

Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi

Anti-Corruption and Gratification Policy

PROGRAM DAN PROSEDUR MENGATASI PRAKTIK KORUPSI

Sebagai bagian dari upaya menghindari terjadinya tindakan korupsi di lingkungan Perseroan, seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal diinformasikan tentang Kode Etik yang berlaku di Perseroan. Begitu juga dengan setiap ada pemutakhirannya selalu disosialisasikan, sehingga diharapkan mampu mencegah kemungkinan terjadinya praktik yang mengarah pada kegiatan korupsi.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA KARYAWAN

Perseroan melakukan sosialisasi secara berkala tentang kebijakan anti korupsi dan gratifikasi bersamaan dengan penyampaian kode etik.

PROGRAMS AND PROCEDURES TO OVERCOME CORRUPT PRACTICES

All stakeholders, both internal and external, are informed regarding the Code of Ethics that applies to the Company as part of efforts to prevent acts of corruption within the Company. Similarly, whenever there is an update, it is always disseminated, with the expectation that it will be able to prevent the possibility of practices that contribute to corrupt activities.

ANTI-CORRUPTION TRAINING/SOCIALIZATION TO EMPLOYEES

The Company undertakes regular socialization on anti-corruption and gratuity policies in conjunction with the dissemination of a code of ethics.



06

Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk secara komprehensif telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan terpisah dari Laporan Tahunan.

Comprehensive information on Social and Environmental Responsibility 2023 of PT Nusantara Infrastructure Tbk is presented in the Company's Sustainability Report published separately from this Annual Report.



WAKIL WALIKOTA
TANGGUNGSELATAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Statement Letter Board of Commissioners and the Board of Directors about the Responsibility of Annual Report 2023 PT Nusantara Infrastructure Tbk

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perseroan 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

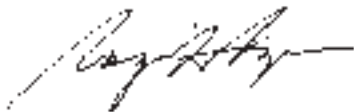
We, the undersigned, hereby confirm that all the information in the Annual Report of the Company for the year 2023 has been presented in full, and the Company accepts full responsibility for all contents.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Dewan Komisaris Board of Commissioners



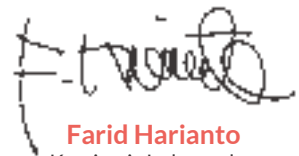
Manuel V. Pangilinan
Komisaris Utama
President Commissioner



Rogelio L. Singson
Komisaris
Commissioner

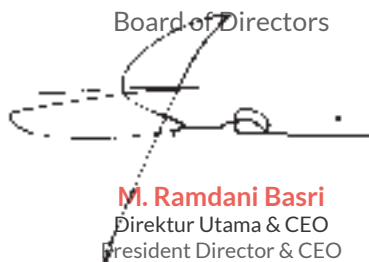


Letjend TNI (Purn) Johnny J. Lumintang
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Farid Harianto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Direksi Board of Directors



M. Ramdani Basri
Direktur Utama & CEO
President Director & CEO



Danni Hasan
Direktur
Director

Ridwan Irawan
Direktur
Director

Benny S. Santoso
Direktur
Director



Denn Charly G. Espanola
Direktur
Director



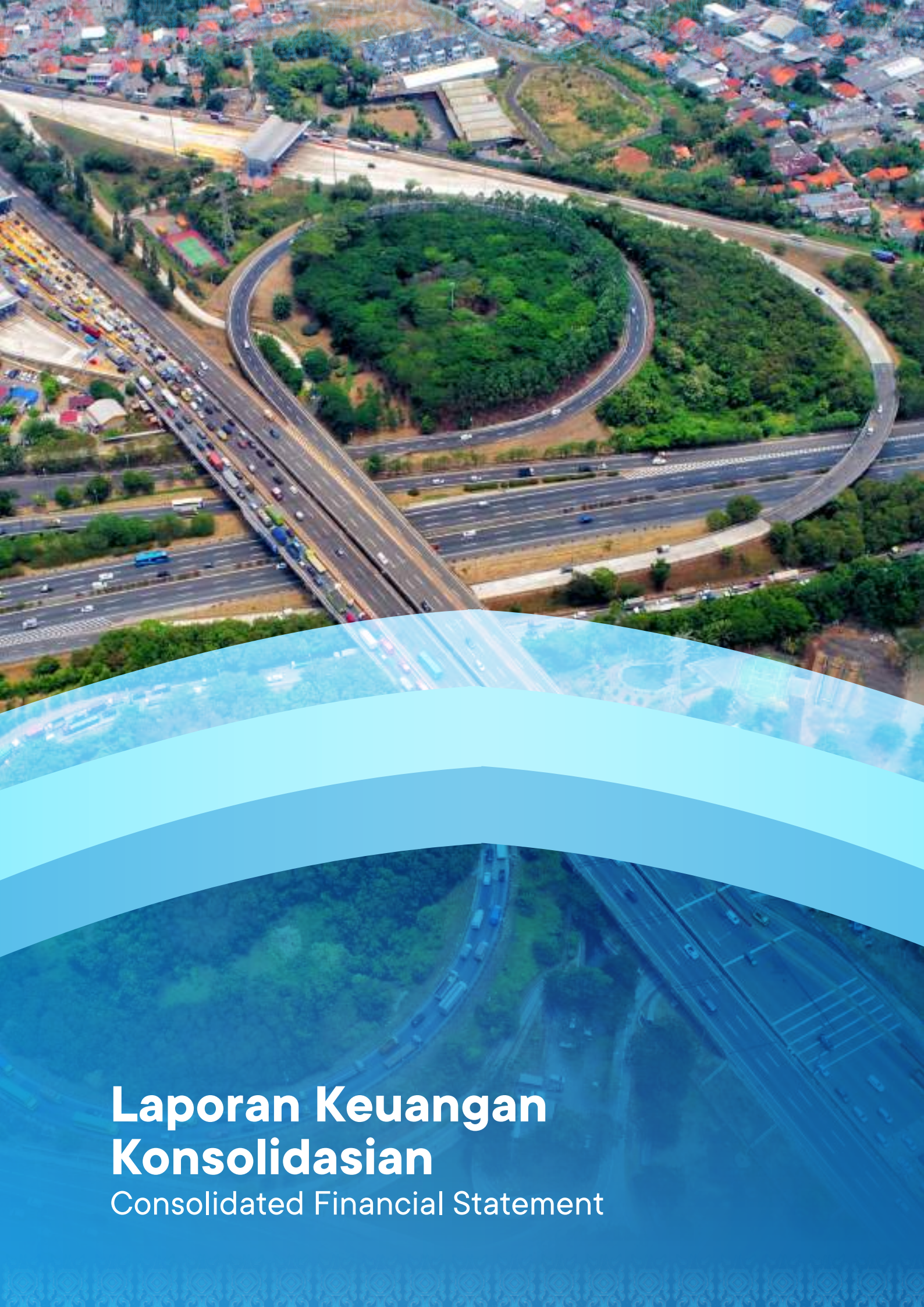
Amadeo N. Bejec
Direktur
Director



Christopher Daniel C. Lizo
Direktur
Director



Francis Emmanuel D. Rojas
Direktur
Director



Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statement

PT Nusantara Infrastructure Tbk
dan entitas anaknya/ *and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements as of December 31, 2023 and
for the year then ended with independent auditor's report*

The original consolidated financial statements
included herein are in Indonesian language.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7-8	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	9-151	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
 TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 PADATANGGAL TERSEBUT**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
 DAN ENTITAS ANAKNYA**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
 REGARDING THE RESPONSIBILITY
 THE CONSOLIDATED
 FINANCIAL STATEMENTS
 AS OF DECEMBER 31, 2023
 AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
 AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| 1. Nama : | Muhammad Ramdani Basri | 1. Name : | |
| Alamat Kantor : | Equity Tower Lantai 38 | Office Address : | |
| | Sudirman Central Business District (SCBD) | | |
| | Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Jakarta 12190 | | |
| Alamat Domisili : | Jl. Mendut No. 3, Menteng, Jakarta Pusat | Residential Address : | |
| Nomor Telepon : | +6221-515 0100 | Telephone Number : | |
| Jabatan : | Direktur Utama/ President Director | Position : | |
| 2. Nama : | Amadeo N. Bejce | 2. Name : | |
| Alamat Kantor : | Equity Tower Lantai 38 | Office Address : | |
| | Sudirman Central Business District (SCBD) | | |
| | Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Lot 9, Jakarta 12190 | | |
| Alamat Domisili : | Kemang Village Residence Unit 2202 | Residential Address : | |
| | Jl. Pangeran Antasari No.36 | | |
| | Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan | | |
| Nomor Telepon : | +6221-515 0100 | Telephone Number : | |
| Jabatan : | Direktur/ Director | Position : | |

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk. |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia | 2. The consolidated financial statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk; and |
| b. Laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The consolidated financial statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk do not contain materially misleading information or facts; and do not conceal any information or material facts; |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Nusantara Infrastructure Tbk. | 4. We are responsible for internal control system of PT Nusantara Infrastructure Tbk. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/ For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta 30 Maret 2024/ Jakarta, March 30, 2024


 Muhammad Ramdani Basri
 Direktur Utama/ President Director




 Amadeo N. Bejce
 Direktur/ Director

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk. ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan/ rugi komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors PT Nusantara Infrastructure Tbk.

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Nusantara Infrastructure Tbk. (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income/loss, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mengakui investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dengan nilai tercatat sebesar Rp2,9 triliun atau sekitar 66% dari total aset konsolidasian. Pada tahun berjalan terdapat hilangnya pengendalian atas PT Margautama Nusantara ("MUN"), dan nilai tercatat sisa kepentingan ekuitasnya diakui sebagai entitas asosiasi.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Accounting for investments in associate and joint venture

Description of key audit matter:

As of December 31, 2023, the Group recognized investments in associates and joint ventures with the carrying amount of Rp2.9 trillion or approximately 66% of the consolidated total assets. In the current year there was a loss of control over PT Margautama Nusantara ("MUN"), and the retained equity interests were accounted for as an associate.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

Penjelasan atas hal audit utama: (lanjutan)

Akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi dan ventura Bersama serta hilangnya pengendalian pada MUN merupakan hal audit utama bagi kami karena nilai tercatat investasi yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian dan akuntansi atas hilangnya pengendalian dan kepentingan ekuitas yang ditahan sebagai entitas asosiasi memerlukan penerapan pertimbangan signifikan dari manajemen, terutama dalam menerapkan akuntansi atas hilangnya kendali, menilai adanya pengaruh signifikan, termasuk pada MUN, serta evaluasi atas indikator penurunan nilai. Pengungkapan atas hal ini diuraikan pada Catatan 1d dan 11 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Respons Audit:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan pengendalian utama atas proses investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Kami memperoleh pemahaman atas transaksi hilangnya pengendalian pada MUN dan menguji kesesuaian perlakuan akuntansinya sesuai standar akuntansi terkait dengan mempelajari dokumen penting yang relevan dan catatan serta data keuangan Grup. Kami mengevaluasi keberadaan pengaruh signifikan pada MUN dengan mengkaji fakta dan kondisi serta dokumen-dokumen penting yang relevan. Kami juga mengevaluasi keberadaan indikator penurunan nilai pada masing-masing entitas asosiasi dan ventura bersama setelah penerapan metode ekuitas dengan mempelajari dan menganalisa dokumen dan catatan keuangan Grup yang relevan. Kami juga mengevaluasi kecukupan pengungkapan atas hal ini pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

Accounting for investments in associate and joint venture (continued)

Description of key audit matter: (continued)

Accounting for investment in associates and joint ventures and the loss of control over MUN is a key audit matter to us because the carrying amount of the investments was significant to the consolidated financial statements and the accounting for the loss of control and the retained equity interests accounted for as associate required the management to apply significant judgments, especially in applying accounting for the loss of control and assessing significant influence in MUN and impairment indicators. Disclosure regarding this matter is described in Notes 1d and 11 to the accompanying consolidated financial statements.

Audit response:

We evaluated and assessed the design of key controls over the investment in associates and joint ventures process. We gained an understanding of the loss of control transaction in MUN and tested the appropriateness of the accounting treatment in accordance with the relevant accounting standards by reviewing relevant key documents and the Group's financial records and data. We evaluated the existence of significant influence in MUN by reviewing the facts and circumstances and the relevant key documents. We also evaluated the existence of impairment indicators for each associate and joint venture after the application of the equity method by reviewing and analyzing the relevant Group's documents and financial records. We also reviewed the adequacy of the related disclosures in the notes to the accompanying consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan PT Nusantara Infrastructure Tbk. ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the Annual Report of PT Nusantara Infrastructure Tbk. ("The Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang kami identifikasi selama audit kami.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, serta mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan dan hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal mana saja yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya merupakan hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00475/2.1032/AU.1/06/1294-3/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

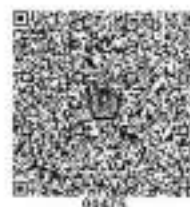
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Said Amru

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294/Public Accountant Registration No. AP.1294

30 Maret 2024/March 30, 2024



**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	248.208.416.540	4	523.370.407.887	Cash and cash equivalents
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		5	29.916.867.592	Financial assets designated at fair value through other comprehensive income
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga	27.147.169.771	6a	29.691.010.127	Third parties
Piutang non-usaha				Non-trade receivables
Pihak ketiga	32.828.527.362	6b	67.024.637.874	Third parties
Pihak berelasi	36.006.249.992	36	51.194.810.945	Related parties
Piutang atas perjanjian konsesi jasa jangka pendek	39.967.350.750	14a	17.626.685.526	Short-term service concession arrangement receivables
Piutang sewa pembiayaan jangka pendek	18.352.838.144	13	16.964.649.504	Finance lease receivables
Pajak dibayar di muka		20a	6.773.270.895	Prepaid tax
Persediaan	11.121.828.277	8	12.892.926.518	Inventories
Uang muka dan beban dibayar di muka	12.286.551.463	7a	15.331.193.470	Advances and prepaid expenses
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	14.836.581.187	9	125.013.806.496	Restricted cash in banks
Aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	10	49.070.027.851	Assets of disposal group classified as held for sale
Aset lancar lainnya	1.868.900.318		1.868.900.318	Other current assets
Jumlah Aset Lancar	442.624.413.804		946.739.195.003	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang atas perjanjian konsesi jasa	284.828.914.109	14a	297.509.253.106	Service concession arrangement receivables
Piutang sewa pembiayaan	339.672.763.969	13	358.025.602.113	Finance lease receivables
Klaim pengembalian pajak penghasilan	13.982.072.842	20a	5.648.674.326	Refundable corporate income taxes
Aset pajak tangguhan - neto	3.276.713.988	20e	6.249.180.402	Deferred tax assets - net
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	2.861.684.806.991	11	5.156.957.320.100	Investment in associates and joint venture
Aset tetap - neto	73.998.204.736	12	113.076.596.498	Fixed assets - net
Aset takberwujud atas perjanjian konsesi - neto	158.012.538.470	14b	4.002.593.024.433	Intangible assets of service concession arrangement - net
Aset hak guna - neto	1.085.211.009	15	6.517.390.804	Right of use assets - net
Uang muka proyek dan pembelian aset tetap	75.080.007.223	7b	204.732.015.281	Advances for projects and purchase of fixed assets
Goodwill	52.361.306.745	16	52.361.306.745	Goodwill
Aset tidak lancar lainnya	12.635.802.865		3.092.381.480	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.876.618.342.947		10.206.762.745.288	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	4.319.242.756.751		11.153.501.940.291	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	4.449.150.468	17	369.595.454.887	Third parties
Pihak berelasi	7.599.269.328	36	-	Related parties
Utang lain-lain - Pihak ketiga	13.469.472.429	18	7.945.077.242	Other payables - Third parties
Beban akrual	12.561.549.364	19	97.418.018.639	Accrued expenses
Utang pajak	21.060.142.094	20b	97.526.790.489	Taxes payables
Pendapatan diterima di muka	1.579.078.296	21	1.160.315.462	Unearned revenues
Dana cerukan	-	38d	6.590.609.240	Bank overdraft
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Liabilitas sewa	1.118.954.660	15	3.609.214.559	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	522.567.687	22	653.588.750	Consumer financing liabilities
Pinjaman jangka panjang	54.994.521.722	23	1.110.084.782.882	Long-term loans
Liabilitas terkait aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	10	4.585.941.503	Liabilities of disposal group classified as held-for-sale
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	10,11	234.000.000.000	Other current liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	117.354.706.048		1.933.169.793.653	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:
Liabilitas sewa	-	15	2.643.626.184	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	591.173.038	22	1.679.080.015	Consumer financing liabilities
Pinjaman jangka panjang	455.960.163.391	23	5.527.731.694.684	Long-term loans
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	-	21	1.003.181.195	Long-term unearned revenues
Utang lain-lain - Pihak ketiga	-	18	42.770.125.540	Other payables - Third parties
Jaminan pelanggan	3.396.622.999		3.190.322.999	Customer deposits
Liabilitas pajak tangguhan	9.084.597.707	20e	84.048.647.249	Deferred tax liabilities
Provisi pemeliharaan jalan tol jangka panjang	-	2s	12.142.431.674	Long-term toll road maintenance provision
Liabilitas imbalan pasca-kerja	41.353.393.525	37	62.576.341.565	Post-employment benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	510.385.950.660		5.737.785.451.105	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	627.740.656.708		7.670.955.244.758	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to the Owners of Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp35 per saham Seri A dan Rp70 per saham Seri B				Share capital - par value of Rp35 per share Series A and Rp70 per share Series B
Modal dasar - 2 saham Seri A dan 80.999.999.999 saham Seri B				Authorized - 2 shares of Series A and 80,999,999,999 shares Series B
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A dan 17.710.708.193 saham Seri B	1.239.749.573.545	24	1.239.749.573.545	Issued and fully paid capital - 1 share Series A and 17,710,708,193 shares Series B
Tambahan modal disetor - neto	1.613.590.923.124	1d, 25	469.155.766.335	Additional paid-in capital - net
Modal saham yang diperoleh kembali	(84.522.927.500)	24	(84.522.927.500)	Treasury stock
Penghasilan komprehensif lain	2.952.569.530		(16.700.185.922)	Other comprehensive income
Komponen ekuitas lainnya	464.301.873.208	26	470.026.595.245	Other equity components
Saldo laba				Retained earnings
Cadangan umum sudah ditentukan penggunaannya	17.784.976.319	26	17.060.586.018	Appropriated for general reserve
Belum ditentukan penggunaannya	341.683.615.113		576.152.676.286	Unappropriated
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3.595.540.603.339		2.670.922.084.007	Total Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity
Kepentingan nonpengendali	95.961.496.704	27	811.624.611.526	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas	3.691.502.100.043		3.482.546.695.533	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.319.242.756.751		11.153.501.940.291	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
PENDAPATAN DAN PENJUALAN				REVENUES AND SALES
Pendapatan usaha dan penjualan	904.162.948.161	29	822.437.884.853	Revenues and sales
Pendapatan konstruksi	769.367.045.191	30	563.995.193.982	Construction revenues
Pendapatan usaha lainnya	13.462.204.808	29	15.937.017.549	Other operating revenues
Jumlah	1.686.992.198.160	39	1.402.370.096.384	Total
BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN				DIRECT COSTS AND COST OF SALES
Beban langsung				
dan beban pokok penjualan	(266.346.910.815)	31	(257.081.786.433)	Direct costs and cost of sales
Beban konstruksi	(769.367.045.191)	30	(563.995.193.982)	Construction costs
Jumlah	(1.035.713.956.006)	39	(821.076.980.415)	Total
LABA BRUTO	651.278.242.154	39	581.293.115.969	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	(260.028.790.010)	32, 39	(226.439.340.800)	General and administrative expenses
Beban operasional lainnya	1.913.514.017	33, 39	(76.665.907.231)	Other operating expenses
LABA USAHA	393.162.966.161		278.187.867.938	PROFIT FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Penghasilan keuangan	8.112.475.044	34, 39	7.635.214.137	Financial income
Beban keuangan	(500.286.442.138)	35, 39	(194.319.386.918)	Financial cost
Keuntungan dari pelepasan entitas anak dan asosiasi	12.038.690.700	1d, 11, 39	-	Gain on disposal of a subsidiary and associate
Bagian (rugi)/laba neto, entitas asosiasi dan ventura bersama	(79.462.388.339)	11, 39	86.697.805.247	Share in net (loss)/profit of associates and joint venture
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK	(166.434.698.572)	2f	178.201.500.404	(LOSS)/PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSES
Kini	(61.064.978.097)	20c	(46.969.489.103)	Current
Tangguhan	(8.373.002.279)	20c, 20e	(8.767.179.523)	Deferred
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(69.437.980.376)	2f	(55.736.668.626)	TOTAL INCOME TAX EXPENSES
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN	(235.872.678.948)		122.464.831.778	(LOSS)/PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	634.412.956	11	142.176.805	Share in other comprehensive income of associates
Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(2.458.920.624)	5	(4.098.201.040)	Unrealized loss on changes in fair value financial asset available-for-sale
(Kerugian)/keuntungan aktuarial dari program imbalan pasca kerja	(676.476.661)	37	3.019.697.554	Actuarial (loss)/gain from defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait	59.385.714	20e	(444.978.799)	Related income tax
RUGI KOMPREHENSIF LAIN	(2.441.598.615)		(1.381.305.480)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(238.314.277.563)		121.083.526.298	TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/ INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	(233.744.670.872)	28	72.439.030.119
Kepentingan nonpengendali	(2.128.008.076)	27	50.025.801.659
	(235.872.678.948)		122.464.831.778
JUMLAH (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	(236.199.712.247)		72.898.953.451
Kepentingan nonpengendali	(2.114.565.316)	27	48.184.572.847
	(238.314.277.563)		121.083.526.298
(Rugi)/laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	(13,20)	28	4,09
			Basic (loss)/profit per share attributable to the owners of the parent (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

		Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to the owners of the parent									
Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Modal saham yang diperoleh kembali/ Treasury stock	Penghasilan/(rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income/(loss)	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saldo Laba/Retained Earnings		Jumlah/ Total	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity	
						Sudah ditentukan penggunaan/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaan/ Unappropriated				
Saldo 31 Desember 2021	1.239.748.573.545	489.155.766.335	(84.522.927.500)	(17.160.109.254)	469.420.386.634	17.000.693.559	503.773.538.626	2.597.416.921.945	764.046.247.290	3.361.463.169.235	Balance as of December 31, 2021
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	606.208.611	-	-	606.208.611	(606.208.611)	-	Change in value of transaction with non-controlling interests
Cadangan umum	-	-	-	-	-	59.892.459	(59.892.459)	-	-	-	General reserves
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	459.923.332	-	-	-	459.923.332	(1.841.228.612)	(1.381.305.480)	Other comprehensive income
Labat tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	72.439.030.119	72.439.030.119	50.025.801.659	122.464.831.778	Profit for the year
Saldo 31 Desember 2022	1.239.748.573.545	489.155.766.335	(84.522.927.500)	(16.700.185.922)	470.026.595.245	17.060.586.018	576.152.676.286	2.670.922.084.007	811.624.611.236	3.482.546.695.533	Balance as of December 31, 2022
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	(5.724.722.037)	-	-	(5.724.722.037)	(39.837.594.163)	(45.562.316.200)	Change in value of transaction with non-controlling interests
Setoran modal entitas anak oleh kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	4.035.000.000	4.035.000.000	Paid up subsidiary capital by non-controlling interests
Pembagian dividen oleh entitas anak kepada non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.321.000.000)	(3.321.000.000)	Dividend distribution from the subsidiaries to non-controlling interests
Cadangan umum	-	-	-	-	-	724.390.301	(724.390.301)	-	-	-	General reserves
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(2.455.041.375)	-	-	-	(2.455.041.375)	13.442.760	(2.441.598.615)	Other comprehensive income
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(233.744.670.872)	(233.744.670.872)	(2.128.008.076)	(235.872.678.948)	Loss for the year
Dekonsolidasi atas entitas anak	-	1.144.435.156.789	-	22.107.796.827	-	-	-	1.166.542.953.616	(674.424.955.343)	492.117.998.273	Deconsolidation of subsidiary
Saldo 31 Desember 2023	1.239.748.573.545	1.613.590.926.124	(84.522.927.500)	2.952.568.530	464.301.873.208	17.784.976.319	341.883.615.113	3.595.540.603.339	95.961.486.704	3.691.502.100.043	Balance as of December 31, 2023

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	942.556.568.403		857.283.278.509	Cash received from customers
Pembayaran ke pemasok dan karyawan	(305.886.788.019)		(363.079.034.972)	Cash paid to suppliers and employees
Pembayaran beban keuangan	(515.457.758.010)	35	(150.149.883.560)	Payment of financial cost
Pembayaran pajak penghasilan	(87.016.651.404)		(10.879.165.795)	Payment of income tax
Penerimaan pendapatan keuangan	6.563.124.794		7.635.214.137	Receipt of financial income
Kenaikan/(penurunan) kas yang dibatasi penggunaannya	76.435.160.941		(70.162.694.669)	Increase/(decrease) in restricted cash
Pengembalian pajak penghasilan	982.818.648		-	Refundable income tax
Pembayaran atas beban operasi lainnya	(11.764.718.704)		(89.562.848.065)	Payment for other operating expenses
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	106.411.756.649		181.084.865.585	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset perjanjian konsesi	(994.788.534.586)	14	(444.711.631.401)	Acquisition of service concession assets
Perolehan aset tetap	(7.227.286.746)	12	(10.683.987.002)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan dividen tunai	52.500.000.000	11	14.000.000.000	Receipt of cash dividend
Peningkatan uang muka	108.919.326.621	7	-	Increase in advances
Penerimaan penjualan entitas anak	7.000.000.000	10	44.000.000.000	Proceeds from disposal of subsidiary
Peningkatan investasi saham pada ventura bersama	-	11	(4.034.596.100.689)	Increase in investment in share of joint venture
Penerimaan dari penjualan Investasi entitas asosiasi	87.951.000.000	11	-	Proceeds from the sale of investments in associate
Penerimaan dari piutang non usaha Pihak berelasi	25.785.842.137	11	-	Receipts of non trade receivable related party
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(719.859.652.574)		(4.431.991.719.092)	Net Cash Used in Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman jangka panjang	949.012.093.564	23	4.209.897.796.371	Drawdowns of long-term loans
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(275.655.895.074)	23	(419.966.491.642)	Payments of long-term loans
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(1.430.843.786)	22	(1.672.577.300)	Payments of consumer financing liabilities
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	671.925.354.704		3.788.258.727.429	Net Cash Received from Financing Activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	58.477.458.779		(462.648.126.078)	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	523.370.407.887		986.018.533.965	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS ENTITAS YANG TIDAK DIKONSOLIDASI	(333.639.450.126)	1d	-	CASH AND CASH EQUIVALENTS DECONSOLIDATED ENTITIES
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	248.208.416.540	4	523.370.407.887	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Sawitia Bersama Darma di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 1 September 1995 dari Abdullah Ashal, S.H., notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.375. HT.01.01.Tahun 1995 tanggal 28 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 15, Tambahan No. 1140 tanggal 20 Februari 2001.

Pada tanggal 13 Maret 2018 telah dibuat Akta Notaris No. 69 dari Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar sehubungan dengan penambahan ketentuan dividen. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0111765 tanggal 15 Maret 2018.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 75 tanggal 30 Oktober 2023 dari Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn, notaris di Jakarta, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0182067 tanggal 6 November 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang jasa, perdagangan dan pembangunan yang berhubungan dengan bidang usaha infrastruktur, pertambangan, minyak dan gas bumi. Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi pada beberapa perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan jalan tol (Tangerang dan Makassar), jasa pelabuhan, jasa telekomunikasi, pengolahan air, perdagangan dan pembangunan. Perusahaan memulai kegiatan operasinya secara komersial pada tanggal 2 Januari 2000.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Menara Equity Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Nusantara Infrastructure Tbk (the "Company") was established under the name of PT Sawitia Bersama Darma in Jakarta based on Notarial Deed No. 3 dated September 1, 1995 of Abdullah Ashal S.H., notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-17.375. HT.01.01.Tahun 1995 dated December 28, 1995 and published in State Gazette No. 15, Supplement No. 1140 dated February 20, 2001.

On March 13, 2018, Notarial Deed No. 69 of Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn Notary in Jakarta has been released, regarding the changes in the Company's Articles of Association concerning addition of dividend policy. The deed has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0111765 dated March 15, 2018.

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 75 dated October 30, 2023 of Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn, notary in Jakarta, regarding the changes of the Company's Directors and Commissioner. The deed has been received and acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0182067 dated November 6, 2023.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is to engage in services, trading and development related to infrastructure, mining, oil and natural gas. Currently the Company's main activity is investing in shares of companies engaged in management of toll roads (Tangerang and Makassar), port services, telecommunication services, water treatment, trading and construction. The Company started its commercial activities on January 2, 2000.

The Company is domiciled in Jakarta and its head office's address is at Equity Tower 38th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ini, yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh direksi Perusahaan pada tanggal 30 Maret 2024.

b. Penawaran umum saham Perusahaan

Pada tanggal 29 Juni 2001, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan Surat No. S-1609/PM/2001 untuk melakukan penawaran umum perdana 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, dengan harga penawaran Rp200 per saham. Pada tanggal 18 Juli 2001, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I

Pada tanggal 14 Juli 2010, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan suratnya No. S-6435/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham terdaftar pada atau sebelum 26 Juli 2010. Melalui HMETD, yang berlaku sampai 3 Agustus 2010, para pemegang saham dapat membeli 8.508.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp70 per saham dengan harga penawaran Rp88 per saham. Pada tahun 2010, 8.476.500.000 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh sehubungan dengan HMETD.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements, which were completed and authorized for issuance by the Company's board of directors on March 30, 2024.

b. Public offering of the Company's shares

On June 29, 2001, the Company obtained an Effective Statement from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) in his Letter No. S-1609/PM/2001 to conduct initial public offering of 60,000,000 shares with par value of Rp100 per share, at an offering price of Rp200 per share. On July 18, 2001, all of these shares were listed in the Indonesia Stock Exchange.

Limited public offering by issuing pre-emptive rights I

On July 14, 2010, the Company obtained an Effective Statement from Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (BAPEPAM-LK) in his letter No. S-6435/BL/2010 to conduct a limited public offering by issuing pre-emptive rights to shareholders registered on or before July 26, 2010. Through the pre-emptive rights, which is applicable until August 3, 2010, the shareholders can purchase 8,508,000,000 Series B shares with par value of Rp70 per share, at an offering price of Rp88 per share. In 2010, 8,476,500,000 Series B shares have been issued and fully paid in relation to the pre-emptive rights.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham Perusahaan (lanjutan)

Penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I (lanjutan)

Seiring dengan penerbitan HMETD, untuk setiap 5 HMETD, Perusahaan menerbitkan 1 (satu) Waran Seri I diberikan secara gratis. Pemegang Waran Seri I bisa membeli saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham dengan harga pelaksanaan Rp88 per saham, yang dapat dilaksanakan mulai 7 Februari 2011 sampai dengan 26 Juli 2013. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan berjumlah 1.695.300.000, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp149.186.400.000. Pada tahun 2012, 4.044.336 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh sehubungan dengan Waran Seri I. Sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan Waran Seri I tanggal 26 Juli 2013, jumlah pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 1.694.886.165 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh. Sisa jumlah Waran Seri I yang tidak dilaksanakan adalah sebanyak 413.835 saham Seri B.

Penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) II

Pada tanggal 3 Desember 2018, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-174/D.04/2018 untuk melakukan penawaran umum terbatas dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham terdaftar pada atau sebelum 21 Desember 2018. Melalui HMETD, yang berlaku sampai 21 Desember 2018, para pemegang saham dapat membeli 2.475.036.314 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp70 per saham dengan harga penawaran Rp200 per saham. Pada tahun 2018, 2.475.036.314 saham Seri B telah diterbitkan dan disetor penuh sehubungan dengan HMETD.

Seiring dengan penerbitan HMETD, setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 13 Desember 2018 berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada Harga Pelaksanaan.

1. GENERAL (continued)

b. Public offering of the Company's shares (continued)

Limited public offering by issuing pre-emptive rights I (continued)

In line with the issuance of pre-emptive rights, for every 5 rights issue, the Company issue 1 (one) Series I Warrant for free. The holders of Series I Warrants could purchase Series B share with par value of Rp70 per share with exercise price of Rp88 per share, which can be exercised from February 7, 2011 to July 26, 2013. Number of Series I Warrants issued totaled to 1,695,300,000, with total amount of Rp149,186,400,000. In 2012, the 4,044,336 shares Series B have been issued and fully paid in relation to Series I Warrants. Until the end of Series I Warrants exercise period on July 26, 2013, total Series I Warrant exercised are 1,694,886,165 Series B shares have been issued and fully paid. Total unexercised Series I Warrant are 413,835 shares Series B.

Limited public offering by issuing pre-emptive rights II

On December 3, 2018, the Company obtained an Effective Statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) in his letter No. S-174/D.04/2018 to conduct a limited public offering by issuing pre-emptive rights to shareholders registered on or before December 21, 2018. Through the pre-emptive rights, which is applicable until December 21, 2018, the shareholders can purchase 2,475,036,314 Series B shares with par value of Rp70 per share, at an offering-price of Rp200 per share. In 2018, 2,475,036,314 Series B shares have been issued and fully paid in relation to the pre-emptive rights.

In line with the issuance of Rights, each holder of 6 (six) existing shares whose names are registered in the Registered Holders of the Company's shares on December 13, 2018 entitled to obtain 1 (one) Rights, whereby every 1 (one) Rights gives the holder the right to buy 1 (one) new share on the Implementation Price.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh saham Perusahaan sejumlah 17.710.708.194 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Perubahan pencatatan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

<u>Tanggal/ Date</u>	<u>Aksi Korporasi/ Corporate Action</u>	<u>Jumlah Saham/ Total Shares</u>	<u>Jumlah Setelah Pencatatan Saham/ Total Shares After Shares Listing</u>	<u>Modal Disetor/ Paid Capital</u>
18 Juli 2001/ July 18, 2001	Penawaran Umum Pedana/ Initial Public Offering	60.000.000	60.000.000	6.000.000.000
18 Juli 2001/ July 18, 2001	Penambahan Pencatatan/ Listing Addition	375.000.000	435.000.000	43.500.000.000
8 November 2006/ November 8, 2006	Penggabungan Usaha/ Merger	9.693.571.429	10.128.571.429	354.500.000.015
20 Juli 2010/ July 20, 2010	Penggabungan Nilai Nominal/ Merger of Nominal Value	(5.064.285.714)	5.064.285.715	354.500.000.050
12 Agustus 2010/ August 12, 2010	Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD I / Limited Public Offering with Preemptive Rights I	8.476.500.000	13.540.785.715	947.855.000.050
7 Februari 2011-26 Juli 2013/ February 7, 2011- July 26, 2013	Konversi Waran Seri 1/ Warrant Series 1	1.694.886.165	15.235.671.880	1.066.497.031.565
28 Desember 2018/ December 28, 2018	Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD II/ Limited Public Offering with Preemptive Rights II	2.475.036.314	17.710.708.194	1.239.749.573.545

1. GENERAL (continued)

b. Public offering of the Company's shares (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, all of the Company's outstanding shares of 17,710,708,194 shares have been listed in the Indonesian Stock Exchange.

Changes in Company's share listing are as follow:

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen kunci dan informasi lainnya

Susunan dewan komisaris dan direksi serta serta komite audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Komisaris Utama :	Manuel Velez Pangilinan	Manuel Velez Pangilinan	President Commissioner
Komisaris :	Rogelio Lazo Singson	Rodrigo Emmanuel Franco	Commissioner
Komisaris Independen :	Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Independent Commissioner
Komisaris Independen :	Farid Harianto	Farid Harianto	Independent Commissioner
Direktur Utama :	Muhammad Ramdani Basri	Muhammad Ramdani Basri	President Director
Direktur :	Omar Danni Hasan	Omar Danni Hasan	Director
Direktur :	Benny Setiawan Santoso	Benny Setiawan Santoso	Director
Direktur :	Ridwan Abdul Chalif Irawan	Ridwan Abdul Chalif Irawan	Director
Direktur :	Denn Charly Gonzales Espanola	Denn Charly Gonzales Espanola	Director
Direktur :	Amadeo Navalta Bejec	Amadeo Navalta Bejec	Director
Direktur :	Christopher Daniel Cabrera Lizo	Christopher Daniel Cabrera Lizo	Director
Direktur :	Francis Emmanuel Dalupan Rojas	Francis Emmanuel Dalupan Rojas	Director
Ketua Komite Audit :	Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang	Chairman of Audit Committee
Anggota Komite Audit :	Tavip Santoso	Tavip Santoso	Member of Audit Committee
Anggota Komite Audit :	Tufrida Murniati Hasyim	Tufrida Murniati Hasyim	Member of Audit Committee
Anggota Komite Audit :	Farid Harianto	Farid Harianto	Member of Audit Committee
Sekretaris Perusahaan :	Dahlia Evawani	Dahlia Evawani	Corporate Secretary
Pelaksana Tugas Ketua Internal Audit dan Governance :	Junianto Tri Prijono	Junianto Tri Prijono	Acting Chairman of Internal Audit and Governance

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah keseluruhan karyawan tetap yang dimiliki oleh Perusahaan dan entitas anaknya adalah sebanyak 155 (2022: 270) orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

c. Key management and other information

The composition of the Company's boards of commissioners and directors and audit committee as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

As of December 31, 2023, the Company and its Subsidiaries' total permanent employees are 155 (2022: 270) employees (unaudited).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-entitas anak yang dikonsolidasi

Selanjutnya Perusahaan dan entitas anaknya disebut sebagai "Grup".

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada entitas-entitas anak berikut ini:

1. GENERAL (continued)

d. The Company's consolidated subsidiaries

The Company and its Subsidiaries will be referred as the "Group".

The Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries:

Entitas anak/ <i>Subsidiaries</i>	Kegiatan usaha/ <i>Business activity</i>	Tempat kedudukan/ <i>Domicile</i>	Tahun Awal kegiatan komersial/ <i>Commencement of commercial operations</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Ownership percentage</i>		Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ <i>Total assets before elimination (in million Rupiah)</i>	
				31 Des./ <i>Dec. 31, 2023</i>	31 Des./ <i>Dec. 31, 2022</i>	31 Des./ <i>Dec. 31, 2023</i>	31 Des./ <i>Dec. 31, 2022</i>
<u>Pemilikan Langsung/<i>Direct ownership:</i></u>							
PT Meta Media Infranasantara (MMI)	Perdagangan, perlengkapan dan telekomunikasi lain/ <i>Trading, supplies and other telecommunications</i>	Jakarta	2014	100,00%	100,00%	11.600	8.226
PT Margautama Nusantara (MUN)	Pembangunan, perdagangan, jasa, dan sub-holding untuk jalan tol/ <i>Construction, trading, services, and sub-holding for toll road</i>	Jakarta	2011	43,39%	76,51%	-	9.770.377
PT Potum Mundi Infranasantara (Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah/ <i>Water and waste management services</i>	Jakarta	2012	99,99%	99,99%	533.625	484.004
PT Energi Infranasantara (EI)	Pembangunan, perdagangan, jasa, dan sub-holding untuk energi/ <i>Construction, trading, services, and sub-holding for energy</i>	Jakarta	2013	99,99%	99,99%	691.524	708.602
PT Portco Infranasantara (Portco)	Manajemen pelabuhan/ <i>Port management</i>	Jakarta	2013	99,99%	99,99%	123.394	119.623
PT Marga Metro Nusantara (Marga)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	70,00%	70,00%	99.761	73.016
PT Metro Tekno Media Infranasantara (MTMI)	Perdagangan, pembangunan perindustrian, pertanian, jasa dan konsultasi/ <i>Trading, construction, industry, Farming, services, and consultation</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	100,00%	100,00%	60	60
<u>Pemilikan Tidak Langsung/<i>Indirect ownership:</i></u>							
PT Makassar Metro Network (MMN) (melalui/through MUN)	Pengelola jalan tol/ <i>Toll road operator</i>	Makassar	1998	-*	76,10%	-	3.142.498
PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (melalui/through MUN)	Pengelola jalan tol/ <i>Toll road operator</i>	Tangerang	1999	-*	66,68%	-	1.866.446
PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) (melalui/through MMN dan/ and MUN)	Pengelola jalan tol/ <i>Toll road operator</i>	Makassar	2008	-*	75,66%	-	801.788
PT Jakarta Metro Ekspresway (JMEX) (melalui/through Marga)	Pengelola jalan tol/ <i>Toll road operator</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Dormant</i>	85,00%	-	26.917	-
PT Metro Jakarta Ekspresway (MJE) (melalui/through JTSE, MMN dan/ and MUN)	Pengelola jalan tol/ <i>Toll road operator</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	-*	64,31%	-	51
PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK) (melalui/through Potum)	Jasa pengelolaan air bersih/ <i>Water management services</i>	Serang	1997	65,00%	65,00%	219.739	213.001
PT Dain Celicani Cemerlang (DCC) (melalui/through Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah/ <i>Water and waste management services</i>	Medan	2014	74,52%	74,52%	147.777	121.862

* Pada tanggal 31 Desember 2023, entitas sudah tidak dikonsolidasi oleh Perusahaan (Catatan 1d)/ As of December 31, 2023, entities are not consolidated by the Company (Note 1d).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada entitas-entitas anak berikut ini: (lanjutan)

Entitas anak/ <i>Subsidiaries</i>	Kegiatan usaha/ <i>Business activity</i>	Tempat kedudukan/ <i>Domicile</i>	Tahun Awal kegiatan komersial/ <i>Commencement of commercial operations</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Ownership percentage</i>		Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ <i>Total assets before elimination (in million Rupiah)</i>	
				31 Des./ Dec. 31, 2023	31 Des./ Dec. 31, 2022	31 Des./ Dec. 31, 2023	31 Des./ Dec. 31, 2022
<u>Pemilikan Tidak Langsung/ Indirect ownership:</u>							
PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) (melalui/through Potum)	Jasa pengelolaan air bersih dan limbah/ <i>Water and waste management services</i>	Jakarta	2013	-	99,99%	-	48.536
PT Sarana Tirta Rejeki (STR) (melalui/through Potum dan/ and SCTK)	Jasa pengelolaan air bersih/ <i>Water management services</i>	Serang	1997	52,00%	52,00%	31.434	31.074
PT Jasa Sarana Nusa Makmur (JSNM) (melalui/through Potum dan/ and SCTK)	Jasa pengelolaan air bersih/ <i>Water management services</i>	Serang	2007	64,97%	64,97%	6.838	7.045
PT Inpolo Meka Energi (IME) (melalui/through EI)	Jasa penyediaan tenaga listrik/ <i>Power supply services</i>	Jakarta	2020	100,00%	61,23%	390.398	416.216
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPST) (melalui/through EI)	Jasa penyediaan tenaga listrik/ <i>Power supply services</i>	Pontianak	2018	79,99%	79,99%	254.037	238.452
PT Auriga Energi (Auriga) (melalui/through EI)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	100%	100%	998	100
PT Energi Surya Infranasantara (ESI) (sebelumnya/formerly PT Energi Parindu Nusantara (EPN)) (melalui/through Auriga dan/and EI)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	100%	100%	100	100
PT Centara Energi (CE) (melalui/through Auriga dan/and EI)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	100%	100%	100	100
PT Eris Serra Energi (ESE) (melalui/through Auriga dan/and EI)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	100%	100%	100	100
PT Eridanusa Energi Nusantara (EEN) (melalui/through Auriga dan/and EI)	Pembangunan, perdagangan dan jasa/ <i>Construction, trading and services</i>	Jakarta	Belum beroperasi/ <i>Pre-operating</i>	100%	100%	100	100

PT Meta Media Infranasantara (MMI)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Telekom Infranasantara yang diaktakan dengan Akta No. 12 tanggal 27 Juni 2022 oleh Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notaris di Karawang, menyetujui penurunan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan masing-masing dari semula berjumlah Rp232.400.000.000 atau setara dengan 232.400 saham dan Rp58.100.000.000 atau setara dengan 58.100 saham menjadi sebesar Rp172.400.000.000, atau setara dengan 172.400 saham dan Rp43.100.000.000 atau setara dengan 43.100 saham. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0061925.AH.01.02 tanggal 29 Agustus 2022.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

The Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries: (continued)

PT Meta Media Infranasantara (MMI)

Based on the Decision of the Shareholders of PT Telekom Infranasantara which was notarized by Deed No.12 dated June 27, 2022, by Eny Sapratila, S.H., M.Kn., a notary in Karawang, approved the reduction of authorized and issued and paid-up capital from Rp232,400,000,000 or equivalent to 232,400 shares and Rp58,100,000,000 or equivalent to 58,100 shares to Rp172,400,000,000 or equivalent to 172,400 shares and Rp43,100,000,000 or equivalent to 43,100 shares. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0061925.AH.01.02 dated August 29, 2022.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

**PT Meta Media Infranasantara (MMI)
(lanjutan)**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Telekom Infranasantara yang diaktakan dengan Akta No. 19 tanggal 30 November 2022 oleh Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., notaris di Jakarta, nama entitas anak, PT Telekom Infranasantara, telah diubah menjadi PT Meta Media Infranasantara (MMI).

Portco melakukan pengalihan kepemilikan saham MMI kepada PT Metro Tekno Media Infranasantara (MTMI), entitas anak Perusahaan, sebesar Rp1.000.000 untuk 1 saham setara dengan 0,01% kepemilikan saham. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0087658.AH.01.02 tanggal 2 Desember 2022.

PT Metro Tekno Media Infranasantara (MTMI)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Infrastruktur Teknologi yang diaktakan dengan Akta No. 6 tanggal 19 September 2022 oleh Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., notaris di Jakarta, nama entitas anak, PT Nusantara Infrastruktur Teknologi (NIT), telah diubah menjadi PT Metro Tekno Media Infranasantara (MTMI).

Portco melakukan pengalihan kepemilikan saham MTMI kepada PT Margautama Nusantara (MUN), entitas anak Perusahaan, sebesar Rp1.000.000 untuk 1 saham setara dengan 1,96% kepemilikan saham. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0087658.AH.01.02 tanggal 2 Desember 2022.

**PT Energi Surya Infranasantara (ESI)/
sebelumnya PT Energi Parindu Nusantara
(EPN)**

Pada tanggal 4 Januari 2022, nama entitas anak EI, PT Energi Parindu Nusantara, telah diubah menjadi PT Energi Surya Infranasantara (ESI) berdasarkan akta Notaris Eny Sapratila, S.H., M.Kn., No. 3 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0005810.AH.01.02 tahun 2022.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

**PT Meta Media Infranasantara (MMI)
(continued)**

Based on the Decision of the Shareholders of PT Telekom Infranasantara which notarized by Deed No. 19 dated November 30, 2022 by Vita Cahyojati, S.H., M. Hum., a notary in Jakarta, the name of a subsidiary, PT Telekom Infranasantara (TI), was changed to PT Meta Media Infranasantara (MMI).

Portco transferred the ownership interest in MMI to PT Metro Tekno Media Infranasantara (MTMI), the Company's subsidiary, in amount of Rp1,000,000 for 1 shares, representing 0.01% share ownership. The deed has been approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0087658.AH.01.02 dated December 2, 2022.

PT Metro Tekno Media Infranasantara (MTMI)

Based on the Decision of the Shareholders of PT Nusantara Infrastruktur Teknologi which notarized by Deed No. 6 dated September 19, 2022, by Vita Cahyojati, S.H., M. Hum., a notary in Jakarta, the name of a subsidiary, PT Nusantara Infrastruktur Teknologi (NIT), was changed to PT Metro Tekno Media Infranasantara (MTMI).

Portco transferred the ownership interest in MTMI to PT Margautama Nusantara (MUN), the Company's subsidiary, in amount of Rp1,000,000 for 1 shares, representing 1.96% share ownership. The deed has been approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0087658.AH.01.02 dated December 2, 2022.

**PT Energi Surya Infranasantara (ESI)/
formerly PT Energi Parindu Nusantara (EPN)**

On January 4, 2022, the name of a subsidiary of EI, PT Energi Parindu Nusantara, was changed to PT Energi Surya Infranasantara (ESI) based on notarial deed No. 3 of Eny Sapratila, S.H., M.Kn., which was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0005810.AH.01.02 year 2022.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT Makassar Metro Network (MMN)

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 14 Juni 2022 dari Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, MMN menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp617.020.000.000 atau setara dengan 617.020 saham menjadi sebesar Rp888.020.000.000 atau setara dengan 888.020 saham. PT Margautama Nusantara (MUN) meningkatkan kepemilikannya di MMN melalui konversi utang sebesar Rp271.000.000.000 atau setara dengan 271.000 saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0042254.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 22 Juni 2022.

PT Auriga Energi (Auriga)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Auriga Energi yang diaktakan dengan Akta No. 7 tanggal 12 Juli 2023 oleh Eny Sapratila, S.H., M.Kn., notaris di Karawang, menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan masing-masing dari semula berjumlah Rp100.000.000 atau setara dengan 1.000 saham menjadi sebesar Rp1.000.000.000, atau setara dengan 10.000 saham. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0017751.AH.01.02 tanggal 23 Maret 2023.

PT Inpola Meka Energi (IME)

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 Desember 2023, PT Pembangunan Perumahan Energi (PPE) mengalihkan kepemilikan saham sebesar 38,77% di IME kepada EI sejumlah 496.645 saham atau senilai Rp.49.664.500.000, sehingga kepemilikan EI di IME menjadi 100%. Transaksi ini menghasilkan selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Makassar Metro Network (MMN)

Based on Notarial Deed No. 13 dated June 14, 2022 from Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, MMN increased its issued and fully paid capital from Rp617,020,000,000 or equivalent to 617,020 shares to Rp888,020,000,000 or equivalent to 888,020 shares. PT Margautama Nusantara increased its ownership amounting to Rp271,000,000,000 or equivalent to 271,000 shares, by converting part of its debts. The Deed has been received and acknowledged by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0042254.AH.01.02 TAHUN 2022 dated June 22, 2022.

PT Auriga Energi (Auriga)

Based on the Decision of the Shareholders of PT Auriga Energi which was notarized by Deed No.7 dated July 12, 2023, by Eny Sapratila, S.H., M.Kn., a notary in Karawang, approved the increased of authorized and issued and paid-up capital from Rp100,000,000 or equivalent to 1,000 shares to Rp1,000,000,000 or equivalent to 10,000 shares. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia through Decision Letter No. AHU-0017751.AH.01.02 dated March 23, 2023.

PT Inpola Meka Energi (IME)

Based on Deed No. 8 dated December 28, 2023, PPE transferred ownership of 38.77% shares in IME to EI, totalling 496,645 shares or amounting to Rp49,664,500,000, therefore, EI's ownership in IME becomes 100%. This transaction resulting in the difference in the value of the transaction with the non-controlling interest.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT Tirta Banqun Nusantara (TBN)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 25 Januari 2023, Potum menyetujui untuk menjual dan mengalihkan kepada PT Bahtera Hijau Mandiri (BHM) sebanyak 26.957.000 saham miliknya atau 99,998% dengan harga jual Rp54.998.883.986.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 25 Januari 2023, Potum menyetujui untuk menjual dan mengalihkan kepada PT Bahtera Utama Sentosa (BHS) sebanyak 547 saham miliknya atau 0,002% dengan harga jual Rp1.116.014.

Dari transaksi divestasi TBN, Potum mencatat laba dari penjualan entitas anak sebesar Rp7.059.541.278.

PT Margautama Nusantara (MUN)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dengan Akta No. 48 tanggal 19 Desember 2023 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor masing-masing dari semula berjumlah Rp321.150.000.000 atau setara dengan 4.593 saham menjadi Rp566.930.000.000 atau setara dengan 8.099 saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0165752 tanggal 29 Desember 2023. Peningkatan modal disetujui diambil oleh pemegang saham baru yaitu PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), entitas sepengendali yang juga merupakan entitas induk Perusahaan, sejumlah 833 lembar saham dengan nilai nominal Rp58.310.000.000 dan Warrington Investment Pte. Ltd sejumlah 2.673 lembar saham dengan nilai nominal Rp187.110.000.000.

Pada tanggal 20 Desember 2023, MPTIS membeli kepemilikan saham di MUN dari CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd., dan CAIF III Infrastructure, entitas sepengendali, masing-masing sebanyak 389 dan 215 lembar saham.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Tirta Banqun Nusantara (TBN)

Based on Deed of Sale and Purchase Agreement No. 17 dated January 25, 2023, Potum approved the sales of its shares to PT Bahtera Hijau Mandiri (BHM) amounting to 26,957,000 shares or equivalent to 99.998% with the total sale price of Rp54,998,883,986.

Based on Deed of Sale and Purchase Agreement No. 18 dated January 25, 2023, Potum approved the sales of its shares to PT Bahtera Utama Sentosa (BHS) amounting to 547 shares or equivalent to 0.002% with the total sale price of Rp1,116,014.

From the sale of TBN, Potum recorded a gain on sale of subsidiaries amounting to Rp7,059,541,278.

PT Margautama Nusantara (MUN)

Based on the Decision of the Shareholders of the Company which was notarized by Deed No. 48 dated December 19, 2023 made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, approved the increased of authorized and issued and paid-up capital from Rp321,510,000,000 or equivalent to 4.593 shares to Rp566,930,000,000 or equivalent to 8.099 shares, respectively. The deed has been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0165752 dated December 29, 2023. Increased in capital agreed to be own by new shareholders are PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), an entity under common control, which also the Company's parent entity, amounting to 833 shares or equivalent to Rp58,310,000,000 and Warrington Investment Pte. Ltd amounting to 2,673 shares or equivalent to Rp187,110,000,000.

On December 20, 2023, MPTIS purchased share ownership in MUN from CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd., and CAIF III Infrastructure, entities under common control of 389 and 215 shares, respectively.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi (lanjutan)

PT Margautama Nusantara (MUN)

Akta peningkatan modal tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-0265025.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023.

Efektif setelah transaksi peningkatan modal ditempatkan dan disetor maka:

- Kepemilikan Perusahaan di MUN terdilusi dari sebelumnya 76,51% menjadi 43,39%.
- MPTIS memiliki kepemilikan saham efektif di MUN sebesar 50,85% dan menjadi entitas pengendali di MUN, setelah tanggal 28 Desember 2023.
- Sejak tanggal 28 Desember 2023, Perusahaan kehilangan pengendalian atas MUN dan tidak lagi mengkonsolidasikan laporan keuangan MUN ke laporan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (dekonsolidasi).
- Perusahaan mencatat sisa kepemilikan saham di MUN sebesar 43,39% sebagai Investasi pada Entitas Asosiasi.

Transaksi ini merupakan transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali, sesuai PSAK 38 Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Selisih antara nilai tercatat neto MUN pada saat kehilangan pengendalian dengan imbalan yang diterima dicatat sebagai bagian dari Ekuitas pada akun Tambahan Modal Disetor.

Rincian proporsional ekuitas neto MUN yang diatribusikan kepada pemilik MUN pada tanggal transaksi sebelum dan setelah transaksi restrukturisasi diatas adalah sebagai berikut:

	MUN
Ekuitas neto sebelum transaksi restrukturisasi (Catatan 11)	2.861.684.807.264
Ekuitas neto setelah transaksi restrukturisasi	1.717.249.650.475
Tambahan modal disetor	1.144.435.156.789

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Margautama Nusantara (MUN)

The deed of the capital increase has been reported and accepted by the Minister of Law and Human Rights through his letter No. AHU-0265025.AH.01.11. Year 2023 dated 29 December 2023.

Effective after the capital increase transaction is issued and paid-up, then:

- The Company's ownership in MUN was diluted from 76.51% to 43.39%.
- MPTIS has an effective share ownership in MUN of 50.85% and become the controlling entity in MUN after December 28, 2023.
- As of December 28, 2023, the Company lost of control over MUN and no longer consolidates MUN's financial statements into the consolidated statements of the Company and its subsidiaries (deconsolidation).
- The Company recorded the remaining 43.39% share ownership in MUN as Investment in Associate Entities.

This transaction is a restructuring transaction between controlling entities, in accordance with PSAK 38 Controlling Entity Restructuring Transactions. The difference between the net carrying value of MUN at the time of loss of control and the rewards received is recorded as part of the Equity in the Additional Paid-up Capital account

The details of proportionate of MUN's net equity attributable to owners of MUN before and after restructuring transaction on the transaction date is as follows:

Net equity before restructuring transaction (Note 11)
Net equity after restructuring transaction
Additional paid-in capital

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi
(lanjutan)**

PT Margautama Nusantara (MUN) (lanjutan)

Berikut merupakan ringkasan informasi keuangan MUN pada tanggal dekonsolidasi:

**28 Desember 2023/
December 28, 2023**

ASET

Aset lancar

Kas dan setara kas	333.639.450.126
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	27.457.946.968
Piutang pihak ketiga	24.370.833.811
Piutang pihak berelasi	422.305
Dana disimpan pada pihak ketiga	365.000.000.000
Uang muka dan beban dibayar di muka	4.913.866.024
Pajak dibayar di muka	10.455.329.150
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	3.701.205.972.989
Aset lancar lainnya	9.927.910.113

Total Aset Lancar

4.476.971.731.486

Aset tidak lancar

Aset tetap - neto	
Aset takberwujud - hak perusahaan	30.331.568.482
jalan tol - neto	4.580.568.434.247
Aset hak guna - neto	2.519.733.233
Aset tidak lancar lainnya	10.104.312.501
Investasi jangka panjang	4.960.128.535.460

Total Aset Lancar

9.583.652.583.923

TOTAL ASET

14.060.624.315.409

LIABILITAS

Liabilitas jangka pendek

Utang usaha - pihak ketiga	77.722.749.283
Utang non-usaha	
Pihak berelasi	36.380.000.000
Pihak ketiga	301.967.957
Utang pajak	36.945.306.963
Beban akrual	75.601.568.261
Pendapatan diterima di muka	3.750.175.383
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	232.800.000
Liabilitas sewa	-
Pinjaman jangka panjang	4.167.232.861.731
Liabilitas jangka pendek lain-lain	190.000.000.000

Total Liabilitas Jangka Pendek

4.588.167.429.578

1. GENERAL (continued)

**d. The Company's Consolidated Subsidiaries
(continued)**

**PT Margautama Nusantara (MUN)
(continued)**

Summary of financial information of MUN at deconsolidation:

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents
Financial assets designated at fair value through other comprehensive income
Third parties receivable
Due from related parties
Funds held by third party
Advances and prepaid expenses
Prepaid taxes

Restricted cash in banks
Other current assets

Total Current Assets

Non-current assets

Fixed assets - net
Intangible assets - toll road concession rights - net
Right-of-use asset - net
Other non-current asset
Long-term investments

Total Current Assets

TOTAL ASSETS

LIABILITIES

Current liabilities

Trade payables - third parties
Non-trade payables
Related parties
Third parties
Taxes payable
Accrued expenses
Unearned revenue

Current maturities of long-term liabilities:
Consumer financing payables
Lease liabilities
Long-term loans
Other current liabilities

Total Non-Current Liabilities

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**d. Entitas-Entitas Anak yang Dikonsolidasi
(lanjutan)**

PT Margautama Nusantara (MUN) (lanjutan)

Berikut merupakan ringkasan informasi keuangan MUN pada tanggal dekonsolidasi : (lanjutan)

**28 Desember 2023/
December 28, 2023**

Liabilitas jangka panjang

Pendapatan diterima di muka	6.646.845.731
Liabilitas jangka panjang- Setelah dikurangi bagian yang Jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	228.850.000
Pinjaman jangka panjang	2.634.566.751.666
Provisi pemeliharaan jalan tol - jangka panjang	14.746.263.628
Liabilitas pajak tangguhan	80.305.199.693
Liabilitas imbalan pasca-kerja	30.416.171.359

Total Liabilitas Jangka Panjang **2.766.910.082.077**

TOTAL LIABILITAS **7.355.077.511.655**

EKUITAS

Modal saham	566.930.000.000
Tambahan modal disetor	5.105.294.843.785
Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(28.940.674.875)
Selisih transaksi dengan pihak non pengendali	3.662.391.507
Saldo laba	949.079.425.305
Penghasilan komprehensif lainnya	(469.567.389)
	6.595.556.418.333
Kepentingan non pengendali	109.990.385.421

TOTAL EKUITAS **6.705.546.803.754**

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS **14.060.624.315.409**

1. GENERAL (continued)

**d. The Company's Consolidated Subsidiaries
(continued)**

**PT Margautama Nusantara (MUN)
(continued)**

Summary of financial information of MUN at deconsolidation: (continued)

Non-current liabilities

Unearned revenue
Long-term liabilities - net of current maturities:
Consumer financing liabilities
Long-term loans
Provision for toll road maintenance - non-current
Deferred tax liabilities
Post-employment benefits liabilities

Total Non-Current Liabilities

TOTAL LIABILITIES

EQUITY

Share capital
Additional paid-in-capital
Unrealized loss on changes in fair value of financial assets designated at fair value through other comprehensive income
Difference in transactions with non-controlling party
Retained earnings
Other comprehensive income

Non-controlling interests

TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing, and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap: Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan";
- Amandemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi";
- Amandemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal";
- Amandemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua".

Amandemen tersebut tidak berdampak secara signifikan pada laporan keuangan Grup.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION POLICIES

b. Changes in accounting principles

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group.

The adoption of the following new and revised standard and interpretation did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements: Disclosure of accounting policies";
- Amendment to PSAK 16: "Fixed Assets: Proceeds before Intended Use";
- Amendment to PSAK 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors: Definition of Accounting Estimates";
- Amendment to PSAK 46: "Income Tax: Deferred Tax Assets and Liabilities arising from a Single Transaction";
- Amendment of PSAK 46: "Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules".

Those amendments had no significant impact on the financial statements of the Group.

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2024**

**Effective beginning on or after January 1,
2024**

- Amandemen PSAK 1: "Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan";
- Amandemen PSAK 73: "Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik".

- Amendment to PSAK 1: "Non-current Liabilities with Covenants";
- Amendment to PSAK 73: "Lease liability in a Sale and Leaseback".

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Financial Accounting Standards Pillars

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

1. Pillar 1 International Financial Accounting Standards,
2. Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),
3. Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and
4. Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Financial Accounting Standards Nomenclature

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

c. Principles of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

- i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

- i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

c. Basis of Consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or
- iv) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

d. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

**d. Current and non-current classification
(continued)**

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

All other liabilities are classified as non-current.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

e. Transactions with Related Parties

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

The Company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

The transactions are made based on terms agreed by the parties.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 36.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 36.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

f. Foreign Currency Transactions and Balances

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai tukar yang digunakan untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("US\$") adalah sebesar Rp15.416 (2022: Rp15.731).

At December 31, 2023, the rate of exchange used for United States Dollar ("US\$") 1 was Rp15,416 (2022: Rp15,731).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

g. Pengukuran Nilai Wajar

g. Fair Value Measurement

Grup mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis pada nilai wajar. Grup juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

The Group also initially measures financial instruments, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- i) In the principal market for the asset or liability, or
- ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) *Level 2* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) *Level 3* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

g. Fair Value Measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) *Level 1* - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- ii) *Level 2* - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- iii) *Level 3* - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

h. Kas dan Setara Kas

h. Cash and Cash Equivalents

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three (3) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

Kas dan setara kas yang ditempatkan pada rekening penampungan (*escrow account*) selama periode tertentu, sesuai dengan persyaratan restrukturisasi pinjaman bank, disajikan sebagai "Kas di bank yang Dibatasi Penggunaannya".

Cash and cash equivalents which are placed in an escrow account for a certain period, in accordance with the requirements of the bank debt restructuring, is presented as the "Restricted Cash in Banks".

i. Persediaan

i. Inventories

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk agar berada pada lokasi dan kondisi siap untuk dijual dicatat sebagai berikut:

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follow:

- i) Bahan baku, suku cadang dan bahan pembantu: harga pembelian;
- ii) Barang jadi dan persediaan dalam proses: biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dan bagian proporsional dari beban overhead berdasarkan kapasitas operasi normal namun tidak termasuk biaya pinjaman;

- i) Raw materials, spare parts and factory supplies: purchase cost;
- ii) Finished goods and work in-process: cost of direct materials and labor and a proportion of manufacturing overheads based on normal operating capacity but excluding borrowing costs.

Sehubungan dengan pembelian bahan baku, biaya perolehan awal persediaan termasuk pengalihan keuntungan dan kerugian atas lindung nilai arus kas kualifikasian, diakui dalam PKL.

Initial cost of inventories includes the transfer of gains and losses on qualifying cash flow hedges, recognized in OCI, in respect of the purchases of raw materials.

Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

The Group provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Beban Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

k. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Grup dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa manfaat (tahun)/ Useful lives (years)	Persentase Depresiasi/ Percentage of Depreciation	Type of Fixed Assets
Bangunan	20	5%	Buildings
Mesin dan peralatan	5	20%	Machinery and equipment
Peralatan kantor	4 - 5	25% - 20%	Office equipment
Kendaraan	5	20%	Vehicles

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

k. Fixed Assets

Fixed assets, except land, are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Subsequent to initial recognition, these assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follow:

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of these assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" atau "Aset Takberwujud" yang bersangkutan pada saat aset tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

l. Aset Kelompok Lepas yang Dimiliki Untuk Dijual

Aset diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual jika nilai tercatatnya akan terpulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut.

Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Dalam hal ini, aset harus berada dalam keadaan dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum untuk penjualan aset tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

k. Fixed Assets (continued)

The asset residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.

Construction in Progress

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" or "Intangible Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

l. Assets of Disposal Group Classified as Held for Sale

Asset is classified as held for sale if their carrying amounts will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use.

Asset classified as held for sale is measured at the lower of its carrying amount and fair value less costs to sell.

For this to be the case, the asset must be available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such assets and its sale must be highly probable.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Sewa

Grup menilai pada saat inisiasi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai (Note 2r).

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

m. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment (Note 2r).

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah.

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

The Group as Lessee (continued)

Lease liabilities (continued)

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets.

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

n. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2t.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

m. Leases (continued)

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

n. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2t.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

n. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Initial Recognition and Measurement (continued)

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Pengukuran Selanjutnya

Subsequent Measurement

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- Fair value through profit or loss (FVTPL).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

**Aset keuangan pada biaya perolehan
diamortisasi (instrumen utang) (lanjutan)**

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, aset keuangan yang tersedia untuk dijual, piutang usaha, piutang non-usaha, kas di bank yang dibatasi penggunaannya.

**Aset keuangan pada NWPKL dengan
pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen
utang)**

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Grup tidak memiliki aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

**Financial assets at amortized cost (debt
instruments) (continued)**

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalent, financial asset available for sale, trade receivables, non-trade receivables, and restricted cash in bank.

**Financial assets at FVOCI with recycling of
cumulative gains and losses (debt
instruments)**

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Group has no financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses..

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

n. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Subsequent Measurement (continued)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

Grup tidak memiliki aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas).

The Group has no at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

n. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Subsequent Measurement (continued)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR") (lanjutan)

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") (continued)

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

Grup tidak memiliki aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR").

The Group has no financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir; atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

- The rights to receive cash flows from the asset have expired;
- or
- The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

n. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Derecognition (continued)

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Penurunan Nilai

Impairment

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Grup menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Grup mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 30 hari dari tanggal jatuh tempo.

Instrumen utang Grup pada NWPKL hanya terdiri dari obligasi kuotasi yang dinilai dalam kategori investasi terbatas (Sangat Baik dan Baik) oleh Lembaga Pemeringkat Kredit dan, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi dengan risiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur KKE pada instrumen tersebut setiap 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak diterbitkan, penyisihan akan didasarkan pada KKE sepanjang umurnya. Grup menggunakan peringkat dari Lembaga Pemeringkat Kredit baik untuk menentukan apakah instrumen utang telah meningkat secara signifikan dalam risiko kredit dan untuk mengestimasi KKE.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 30 days past due.

The Group's debt instruments at FVOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category (Very Good and Good) by the Good Credit Rating Agency and, therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL. The Group uses the ratings from the Good Credit Rating Agency both to determine whether the debt instrument has significantly increased in credit risk and to estimate ECLs.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang usaha dan non-usaha, beban akrual, utang sewa, utang pembiayaan konsumen, pinjaman dan liabilitas jangka pendek lainnya.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as trade payables, non-trade payables, accrued expenses, lease liabilities, consumer financing liabilities, loans and other current liabilities.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

n. Financial Instruments (continued)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Financial Liabilities (continued)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Subsequent Measurement (continued)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 71 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman) (lanjutan)

(ii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

n. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings) (continued)

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**o. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura
bersama**

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah salah satu tipe pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Investasi Grup pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

o. Investments in associates and joint venture

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**o. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura
bersama (lanjutan)**

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

p. Perjanjian konsesi jasa

Grup telah menerapkan ISAK 16: "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22: "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22) sehubungan dengan hak konsesi.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

**o. Investments in associates and joint venture
(continued)**

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

p. Service concession arrangements

The Group has adopted ISAK 16: "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22: "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22) related to the concession rights.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

p. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Aset takberwujud

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") tanpa syarat.

Grup mengakui aset takberwujud yang berasal dari perjanjian jasa konsesi sejauh menerima hak untuk membebankan pengguna sarana konsesi. Aset takberwujud yang diperoleh dari penyediaan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan dalam perjanjian jasa konsesi diukur pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal.

Pengakuan setelah pengakuan awal, aset takberwujud diukur pada nilai perolehannya, termasuk kapitalisasi biaya pinjaman, dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai.

Estimasi umur manfaat dari aset takberwujud pada perjanjian jasa konsesi adalah periode ketika Grup mampu membebankan kepada pengguna jasa publik atas pemanfaatan sarannya hingga berakhirnya masa konsesi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

**p. Service concession arrangements
(continued)**

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

Intangible assets

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are toll road concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of the toll road. During the construction period, the accumulated toll road construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Indonesia Toll Road Authority ("BPJT") for no consideration.

The Group recognized an intangible assets arising from a service concession arrangement when it has a right to charge for usage of the concession infrastructure. An intangible asset received as consideration for providing construction or upgrade services in a service concession arrangement is measured at fair value on initial recognition.

Subsequent to initial recognition, the intangible asset is measured at cost, which includes capitalized borrowing costs, less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

The estimated useful life of an intangible asset in a service concession arrangement is the period from when the Group is able to charge the public for the use of the infrastructure to the end of the concession period.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

p. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Aset takberwujud (lanjutan)

	Tahun/Years
Hak Pengusahaan Jalan Tol	
Ruas Jalan Tol Tallo - Bandara Hasanuddin ("JTSE")	35
Ruas Jalan Tol Pelabuhan Soekarno Hatta – Pettarani ("MMN")	45*
Ruas Jalan Tol Serpong - Pondok Aren ("BSD")	42*
Hak Pengusahaan Pengolahan Air Bersih	43*

*) maksimum (termasuk perpanjangan periode konsesi)

Aset keuangan non-derivatif

Grup mengakui aset keuangan yang terjadi akibat adanya perjanjian konsesi jasa ketika memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari atau atas diskresi pemberi konsesi untuk jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan.

Pada pengakuan awalnya, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajarnya dan diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang. Pengakuan setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diakui pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan

Pendapatan yang berasal dari jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan berdasarkan perjanjian jasa konsesi diakui berdasarkan persentase penyelesaian dari pekerjaan yang dilakukan, konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup dalam mengakui pendapatan atas jasa konstruksi. Pendapatan operasi atau jasa diakui pada periode dimana jasa telah diberikan oleh Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

**p. Service concession arrangements
(continued)**

Intangible assets (continued)

**Akhir masa konsesi/
End of concession
term**

30 September 2041/
September 30, 2041

12 April 2043/
April 12, 2043

30 September 2040/
September 30, 2040

24 Desember 2039/
December 24 2039

*) maximum (including extended concession period)

Toll Road Concession Rights
Tallo - Bandara Hasanuddin
Toll Road ("JTSE")
Soekarno Hatta Port
- Pettarani Toll Road
("MMN")
Serpong - Pondok Aren
Toll Road ("BSD")

**Water-Treatment
Concession Rights**

Non-derivative financial assets

The Group recognizes a financial asset arising from a service concession arrangement when it has an unconditional contractual right to receive cash or other financial assets from or at the direction of the grantor for the construction or upgrade services provided.

Such financial assets are measured at fair value on initial recognition and classified as loan and receivables. Subsequent to initial recognition, the financial assets are measured at amortized cost.

Revenue

Revenue related to construction or upgrade services under a service concession arrangement is recognized based on the percentage of completion of the project, consistent with the Group's accounting policy on revenue recognition on construction services. Operation or services revenue is recognized in the period in which the services are provided by the Group.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

p. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan dari penyerahan tenaga listrik kepada pelanggan berdasarkan perjanjian konsesi jasa sejauh komponen investasi dari transaksi pendapatan diperhitungkan sebagai transaksi jasa konsesi menggunakan model aset keuangan. Pendapatan yang berkaitan dengan komponen lain dari harga tenaga listrik yang dikirimkan diakui sebagai pendapatan penjualan pada saat penyerahan tenaga listrik ke pelanggan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan

Beban pemeliharaan dan perbaikan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya, kecuali jika besar kemungkinan akan meningkatkan manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur secara handal.

q. Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa

Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa merupakan jumlah piutang dari pemberi jasa untuk jasa yang diberikan oleh Grup sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa dimana Grup memiliki hak kontraktual tanpa syarat untuk menerima uang tunai dari pemberi jasa. Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa diukur pada nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, yaitu jumlah awal yang diakui ditambah dengan bunga kumulatif atas jumlah yang dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif dikurangi pembayaran. Aset keuangan yang timbul dari perjanjian konsesi jasa diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak, mereka diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

**p. Service concession arrangements
(continued)**

Revenue (continued)

Revenue from delivery of electric power to the customer to the extent of the investment component of the revenue transaction is accounted for as service concession transaction using financial assets model. Revenue related to the other components of the price of electric power delivered is recognized as sales revenue upon delivery of electric power to customer.

Maintenance and repair expense

The cost of maintenance and repair services in connection with the concession agreement is charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred, except when it is likely to increase in the future economic benefits and can be measured reliably.

q. Financial assets arising from service concession arrangement

Financial assets arising from service concession arrangements represent the amounts due from the grantor for services provided by the Group in connection with service concession arrangements where the Group has an unconditional contractual right to receive cash from the grantor. Financial assets arising from service concession arrangements are measured initially at fair value and subsequently measured at amortized cost, i.e. the amount initially recognised plus the cumulative interest on that amount calculated using the effective interest method minus repayments. Financial assets arising from service concession arrangements are classified as current assets if they are expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Grup mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Grup atas aset individual yang dialokasikan.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)

r. Impairment of Non-financial Assets

The Group assesses at the end of each reporting year whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Group's CGUs to which the individual assets are allocated.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan
(lanjutan)**

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap akhir tahun pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

**r. Impairment of Non-financial Assets
(continued)**

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually (as at December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future years.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non financial assets at financial statement date.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas.

Kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan, ketika pendiskontoan digunakan.

Provisi pemeliharaan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk menjaga standar kualitas jalan tol sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala akan diprovisi berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

s. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability.

When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

Provision for toll road maintenance

In operating toll roads, the Group is obliged to maintain the quality in accordance with the Minimum Service Standards that have been established by the Ministry of Public Works that is by performing overlay regularly. The cost of this overlay will periodically be recognized based on estimation with the utilization of toll road by customers. This provision is measured using the present value of management's estimate of expenditures required to settle present obligation at the reporting date.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban

Grup menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Harga transaksi merupakan angka yang ditagihkan kepada pelanggan setelah mengeluarkan pajak pertambahan nilai.

Kriteria spesifik berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan tol

Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol Grup diakui pada suatu titik waktu saat penjualan karcis tol. Imbalan kas yang diterima sehubungan dengan pengalihan hak atas pendapatan tol masa datang dicatat sebagai pendapatan tangguhan dan diakui sebagai pendapatan pada suatu periode waktu berdasarkan aktual jumlah traffic selama masa jangka waktu pengalihan hak atas pendapatan tol tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)

t. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses

The Group has adopted PSAK 72: "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessments as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promises in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

The transaction price is based on the amount billed to customer excluding value added taxes

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

Toll revenues

The Group's revenues from toll road operations are recognized point in time upon the sale of toll tickets. Cash consideration received in connection with the transfer of the rights on future toll revenue are recorded as deferred revenue and recognized as revenue over time based on actual traffic volume over the term of transfer of the rights on future toll revenues.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**t. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan pada saat diperoleh. Uang muka sewa yang diterima di muka disajikan sebagai "Pendapatan Diterima di Muka" dan diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus sesuai masa sewanya.

Pendapatan dari usaha kelistrikan

Pendapatan dari penyerahan tenaga listrik kepada pelanggan sejauh komponen investasi dari transaksi pendapatan diperhitungkan sebagai transaksi sewa pembiayaan dimana Perusahaan adalah lessor.

Pendapatan yang berkaitan dengan komponen lain dari harga tenaga listrik yang dikirimkan (biaya tenaga listrik *non-take or pay*) diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan risiko dan manfaat ekonomik dari tenaga listrik diterima oleh pelanggan. Pendapatan dari operasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa diberikan.

Pendapatan konstruksi

Grup mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Grup mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi.

Pendapatan konstruksi dicatat bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

Penjualan air bersih

Pendapatan dari penjualan penyediaan air bersih diakui berdasarkan volume yang diserahkan kepada pelanggan, baik yang secara khusus dibaca dan ditagih maupun yang diestimasi berdasarkan *output* dari jaringan penyediaan air bersih dan kemungkinan besar Grup akan menerima pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

**t. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses (continued)**

Rent revenues

Rental income from operating lease is recognized as revenue when earned. Rental received in advance are presented as "Unearned Revenue" and recognized as income on straight-line basis over the lease term.

Revenue from power business

Revenue from delivery of electric power to the customer to the extent of the investment component of the revenue transaction is accounted for as finance lease transaction whereby the Company are the lessors.

Revenue related to the other components of the price of electric power delivered (cost of non-take or pay electricity power) is recognized as revenue upon delivery the risk and benefit economic of electric power is received by the customer. Revenue from operations and maintenance is recognized when services are rendered.

Construction revenues

The Group recognizes intangible assets of construction services and increased capacity in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Group recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction.

Construction revenues are recorded simultaneously with the recognition of an intangible asset during the construction phase.

Sales of water

Revenue from sales of water is recognized based on the provision of clean water volume delivered to the customers, either specifically read and billed or estimated based on the output of the network of water supply and most likely the Group will receive payments previously agreed.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**t. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu tingkat suku bunga digunakan mendiskontokan secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan arus kas di masa yang akan datang selama umur ekspektasi dari instrumen keuangan, atau jika lebih sesuai, selama periode yang lebih singkat, untuk jumlah tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan sewa iklan, lahan dan tempat peristirahatan diakui sesuai periode yang sudah berjalan dalam tahun yang bersangkutan. Pendapatan diterima di muka untuk periode yang belum berjalan diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas.

Beban konstruksi

Beban konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol dan pembangunan sarana pengelolaan air bersih. Konstruksi pembangunan jalan tol termasuk peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Beban konstruksi dicatat bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

**t. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses (continued)**

Interest Income/Expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Other operating revenues

Revenues from advertisement, space and rest area rental are recognized when earned. Advances received not yet earned are recognized as unearned revenue and are presented in the consolidated statement of financial position as a liability.

Construction costs

Construction cost represents the entire cost of construction of toll road and construction of water management facilities. Construction of toll road includes the increasing of capacity toll roads which includes land acquisition, feasibility studies and other costs directly related to the construction of toll roads, including the cost of construction of access roads to toll roads, alternative roads and public roads required plus other borrowing costs which are directly used to fund the construction of the asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

Construction costs are recorded simultaneously with the recognition of an intangible asset during the construction phase.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)

u. Taxation

Income tax expenses comprises current and deferred income tax. Taxes are recognized in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to item recognized in other comprehensive income or directly in equity.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i. *where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;*
- ii. *in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

- i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)

u. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

- i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or
- ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: "Pajak Penghasilan".

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

u. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
- Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: "Income Tax".

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan Pasca-kerja

Grup mencatat penyisihan manfaat pensiun untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Undang-undang Cipta Kerja No. 6/2023 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui PKL pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada kewajiban manfaat pasti neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)

v. Post-employment Benefits

The Group provides provisions of pension benefit in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Company Regulation and Job Creation Law No. 6/2023 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and
- ii) the date the Group recognizes related restructuring costs.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit liability under "Cost of Goods Sold" and "General and Administrative Expenses" account as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and
- ii) Net interest expense or income.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

w. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2023.

x. Saham Tresuri

Instrumen ekuitas sendiri yang diperoleh kembali (saham tresuri) diakui pada harga perolehan kembali dan dikurangi dari ekuitas. Tidak ada laba atau rugi yang diakui pada laba rugi atas perolehan, penjualan kembali, penerbitan atau pembatalan dari instrumen ekuitas Grup. Selisih antara jumlah tercatat dan penerimaan, bila diterbitkan kembali, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor pada ekuitas.

y. Informasi Segmen

Untuk tujuan manajemen, Grup dibagi menjadi dua segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen Perusahaan yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 39, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION POLICIES (continued)**

w. Basic Earnings per share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2023.

x. Treasury Shares

Own equity instruments that are reacquired (treasury shares) are recognized at reacquisition cost and deducted from equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Group's own equity instruments. Any difference between the carrying amount and the consideration, if reissued, is recognized as part of additional paid-in capital in the equity.

y. Segment Information

For management purposes, the Group is organized into two operating segments based on their products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance.

Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 39, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 20.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 20.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgement

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

Further details regarding taxation are disclosed in Note 20.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. Further explanations regarding this account are provided in Note 20.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Sewa pembiayaan

Perusahaan menetapkan bahwa kesepakatan mengenai komponen A ("Capital Cost Recovery") penjualan listrik sesuai dengan *Power Purchase Agreement* memenuhi kriteria untuk mengakui Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro ("PLTMH") sebagai aset sewa. Dengan demikian, setelah dimulainya produksi listrik berdasarkan *Commercial Date*, Perusahaan mengakui piutang sewa pembiayaan atas nilai investasi bersih untuk membangun PLTMH tersebut.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Grup mengadakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Grup termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol (Catatan 2p).

Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol.

Grup berpendapat bahwa PPJT memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Grup diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun/periode berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp769.367.045.191 dan Rp563.995.193.982 (Catatan 30).

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgement (continued)

Finance lease

The Company determined that the arrangement concerning component A ("Capital Cost Recovery") the electricity sales in accordance with the *Power Purchase Agreement* fulfilled the criteria to recognize the Mini-Hydro Electric Power Plant ("MHEPP") as leased assets. Accordingly, upon commencing of the electricity production based on the *Commercial Date*, the Company recognized a finance lease receivable over the net investment to construct the MHEPP.

Service concession agreement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

The Group entered into Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) with BPJT granted the Group the rights, obligations and privileges including the authority to finance, design, construction, operate and maintain the toll roads (Note 2p).

Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the toll roads to the BPJT without cost, fully operational and in good working condition, including any and all existing land, works, toll road facilities and equipment found therein directly related to, and in connection with, the operation of the toll road facilities.

The Group has made judgment that the PPJT met the criteria under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year/period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Group recognized construction revenue amounting to Rp769,367,045,191 and Rp563,995,193,982 respectively (Note 30).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Grup mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Grup mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima. Mengingat bahwa pekerjaan konstruksi telah disubkontrakkan ke kontraktor luar, pendapatan konstruksi yang diakui mendekati biaya konstruksi.

Estimasi dan Asumsi

Penyisihan atas penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi akun tertentu yang mana diketahui bahwa pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak-pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang, guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Penjelasan lebih rinci atas aset pajak tangguhan diungkapkan dalam Catatan 20e.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgement (continued)

Service concession agreement (continued)

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received. Given that the construction works have been subcontracted to outside contractors, the recognized construction revenue roughly approximates the construction costs.

Estimates and Assumptions

Allowance for impairment of accounts receivable

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific allowances for customers against amounts due, to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific allowances are reevaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of receivable.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Further details on deferred tax assets are disclosed in Note 20e.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 30 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat neto atas aset tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp73.998.204.736 (2022: Rp113.076.596.498) Penjelasan lebih rinci atas aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

Aset takberwujud

Nilai wajar dari perolehan aset takberwujud atas penyediaan jasa konstruksi pada perjanjian jasa konsesi diestimasi berdasarkan referensi nilai wajar dari pengadaan jasa konstruksi tersebut. Nilai tercatat aset takberwujud diungkapkan pada Catatan 14 atas laporan keuangan konsolidasian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 30 years, which are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

The net carrying amount of the Group's fixed assets as of December 31, 2023 was Rp73,998,204,736 (2022: Rp113,076,596,498). Further details on fixed asset are disclosed in Note 12.

Intangible assets

The fair value of intangible assets received as consideration for providing construction services in a service concession arrangement is estimated by reference to the fair value of the construction service provided. The carrying value of the Group's intangible assets is disclosed in Note 14 to the consolidated financial statements.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi volume lalu lintas dan amortisasi hak
pengusahaan jalan tol

Dalam menentukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif dan volume kendaraan.

Manajemen melakukan penilaian secara berkala terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Perusahaan akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

Imbalan pasca kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimation of traffic volume and amortization of toll
road concession rights

In determining amortization of toll road concession rights, the management has to project traffic volume after current year for the remaining years of the concession agreement. Traffic volume is projected based on the number of vehicles and adjusted by comparison to actual vehicle volume. However, the actual vehicle volume in the future could differ from the estimate depending upon changes in external factor that may affect toll rates and vehicle volume.

The management performs periodic assessment on the total projected traffic volume. The Company will appoint an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies and make an appropriate adjustment if there is a material difference between projected and actual volume.

Post-employment benefits

The measurement of the Group's employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the period in which they occur.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Nilai tercatat neto liabilitas imbalan kerja Grup pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.353.393.525 (2022: Rp62.576.341.565). Penjelasan lebih rinci atas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 37.

Piutang sewa pembiayaan

Penentuan nilai wajar dari piutang sewa pembiayaan tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang antara lain meliputi, tingkat suku bunga diskonto dan periode sewa. Walaupun Grup berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah wajar dan sesuai, perbedaan yang signifikan dalam hasil aktual Grup atau perubahan signifikan dalam asumsi Grup mungkin dapat mempengaruhi nilai wajar secara material dari piutang sewa pembiayaan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 13.

Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental dari Suatu Sewa

Dalam menentukan liabilitas sewa Grup, suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan sebagai tingkat diskonto dalam mendiskontokan pembayaran sewa telah ditetapkan berdasarkan pendekatan konsisten yang mencerminkan tingkat pinjaman yang relevan dengan bisnis perusahaan atau jenis aset sewa, mata uang liabilitas, panjang masa sewa, dan spread kredit untuk badan hukum yang bersepakat dalam kontrak sewa.

Uji Penurunan Nilai Aset Tidak Lancar dan Goodwill

Penerapan metode akuisisi dalam suatu kombinasi bisnis mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan goodwill, yang tidak diamortisasi namun diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya dan setiap terdapat indikasi penurunan nilai.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Post-employment benefits (continued)

The net carrying amount of the Group's employee benefits liability as of December 31, 2023 was Rp41,353,393,525 (2022: Rp62,576,341,565). Further details on employee benefits are disclosed in Note 37.

Finance lease receivable

The determination of the fair value of finance lease receivable is dependent on its selection of certain assumptions which include among others, discount rates and lease periods. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual result or significant changes in the Group's assumptions may materially affect the fair value of the finance lease receivable. Further details are disclosed in Note 13.

Estimating the Incremental Borrowing Rate of a Lease

In determining the Group's lease liabilities, the incremental borrowing rates used as discount factors in discounting lease payments have been established based on a consistent approach reflecting the borrowing rate that relevant to the Company's business or the type of lease asset, the currency of the liabilities, the duration of the lease term, and the credit spread for the legal entity entering into the lease contract.

Impairment Test of Non-current Assets and Goodwill

Application of acquisition method on a business combination requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities acquired, including intangible assets. Certain business acquisitions of the Group have resulted in goodwill, which is not amortized but subject to an annual impairment testing and whenever indicators of impairment exist.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Uji Penurunan Nilai Aset Tidak Lancar dan Goodwill
(lanjutan)

Perhitungan arus kas masa depan dalam menentukan nilai wajar aset tetap dan aset tidak lancar lainnya dari entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi melibatkan estimasi yang signifikan. Walaupun manajemen berkeyakinan bahwa asumsi yang digunakan adalah tepat dan memiliki dasar yang kuat, perubahan signifikan pada asumsi tersebut dapat mempengaruhi secara material evaluasi atas nilai terpulihkan dan dapat menimbulkan penurunan nilai sesuai PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan jika terdapat indikasi penurunan nilai, sedang aset tidak lancar dalam lingkup PSAK 48 hanya diuji untuk penurunan nilai bila terdapat identifikasi atas indikasi penurunan nilai. Manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi jumlah terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai diestimasi berdasarkan arus kas masa depan neto yang didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas UPK terkait.

Jumlah terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas neto yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Input utama yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan UPK masing-masing dijelaskan lebih rinci dalam Catatan 16.

Nilai tercatat goodwill dan aset tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp52.361.306.745 dan Rp73.998.204.736 (2022: masing-masing sebesar Rp52.361.306.745 dan Rp113.076.596.498).

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATION AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment Test of Non-current Assets and Goodwill
(continued)

Computation of future cash flows in determining the fair values of fixed assets and other non-current assets of the acquirees at the dates of acquisitions involves significant estimations. While the management believes that the assumptions are appropriate and reasonable, significant changes of those assumptions used may materially affect its assessment of recoverable values and may lead to future impairment charges under PSAK 48: Impairment of Assets.

Goodwill is subject to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired, while non-current assets under the scope of PSAK 48 are only tested for impairment whenever there is identification of impairment indicators. Management uses its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell and the value in use are estimated based on the net future cash flows discounted to their present values using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the related CGU.

The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected net future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. The key inputs used to determine the recoverable amount for the CGU are further explained in Note 16.

The carrying amounts of the Group's goodwill and fixed assets as of December 31, 2023 were Rp52,361,306,745 and Rp73,998,204,736, respectively (2022: Rp52,361,306,745 and Rp113,076,596,498, respectively).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Kas - Rupiah	131.487.285	598.832.728
Bank		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	68.312.951.492	85.720.052.363
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.767.420.153	4.700.871.689
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3.795.483.748	3.339.913.897
PT Bank BTPN Syariah Tbk	2.958.147.225	380.588.096
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	151.895.426	2.121.485.153
PT Bank ICBC Indonesia	34.182.715	37.318.675
PT Bank Pan Indonesia Tbk	34.070.843	33.526.692
PT Bank Mega Tbk	11.155.449	22.869.602
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	11.409.133	11.709.133
PT Bank BTPN Tbk	6.730.540	67.170.540
PT Bank Oke Indonesia Tbk	2.636.067	-
PT Bank Victoria International Tbk	2.296.041	163.288.368
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	793.652.422
PT BPD Sulselbar	-	1.117.048.383
PT Bank DKI	-	46.196.000
PT Bank UOB Indonesia	-	41.469.371
PT Bank KEB Hana Indonesia	-	17.334.308
Sub-jumlah	85.089.378.832	98.614.494.692
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Central Asia Tbk	81.731.750	233.899.322
Sub-jumlah	81.731.750	233.899.322
Jumlah Bank	85.171.110.582	98.848.394.014
Deposito		
Rupiah		
PT Bank BTPN Syariah Tbk	100.000.000.000	-
PT Bank BTPN Tbk	39.156.592.422	8.986.085.274
PT Bank Central Asia Tbk	17.009.226.251	406.937.095.871
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.140.000.000	4.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.600.000.000	-
PT Bank Mega Tbk	-	4.000.000.000
Jumlah Deposito	162.905.818.673	423.923.181.145
Jumlah	248.208.416.540	523.370.407.887

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand - Rupiah
Cash in banks
Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT BPD Sulselbar
PT Bank DKI
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank KEB Hana Indonesia
Sub-total
United States Dollar
PT Bank Central Asia Tbk
Sub-total
Total Cash in Banks
Time deposits
Rupiah
PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk
Total Time Deposits
Total

Tingkat bunga deposito berjangka pada tahun 2023 dan 2022 berkisar antara 2,25% - 9,75% dan 1,90% - 5,50% per tahun. Deposito berjangka termasuk kelompok "Kas dan setara kas" dengan jangka waktu penempatan tiga bulan atau kurang.

Annual interest rates of time deposits for the year 2023 and 2022 ranged between 2.25% - 9.75% and 1.90% - 5.50% per annum, respectively. The time deposits included as part of "Cash and cash equivalents" with original maturities of three months or less.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

5. ASET KEUANGAN YANG DIUKUR PADA NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Biaya perolehan	-	60.000.000.000
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar	-	(30.083.132.408)
Jumlah	-	29.916.867.592

Mutasi akun selama 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal	29.916.867.592	34.015.068.632
Kerugian yang belum direalisasi Atas perubahan nilai wajar Dekonsolidasi (Catatan 1d)	(2.458.920.624) (27.457.946.968)	(4.098.201.040) -
Saldo akhir	-	29.916.867.592

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain merupakan investasi BSD, entitas anak tidak langsung, dalam bentuk saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.

Seluruh investasi digolongkan sebagai aset yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan nilai efek ekuitas ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan.

Sejak tanggal 31 Desember 2023, BSD, tidak lagi dikonsolidasi oleh Perusahaan.

5. FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account consists of:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Acquisition cost	-	60.000.000.000
Unrealized loss on changes in fair value	-	(30.083.132.408)
Total	-	29.916.867.592

The mutation of the account during 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022
Beginning balance	29.916.867.592	34.015.068.632
Unrealized loss on changes in fair value Deconsolidation (Note 1d)	(2.458.920.624) (27.457.946.968)	(4.098.201.040) -
Ending balance	-	29.916.867.592

As of December 31, 2022, financial assets designated at fair value through other comprehensive income represents an indirect subsidiary, BSD's investments in shares of PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.

All investments are classified as financial assets designated at fair value through other comprehensive income with the fair value determined based on market value issued by the Indonesia Stock Exchange at the date of statement of financial position.

Since December 31, 2023, BSD is no longer consolidated by the Company.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG

a. Piutang usaha - Pihak ketiga

Berdasarkan pelanggan

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Pihak ketiga		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	15.624.295.302	18.607.460.708
PT Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani	2.977.704.000	2.982.136.064
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2.832.822.582	1.152.000.000
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	354.148.000	482.575.000
PT. Berkah Manis Makmur	345.339.000	72.945.000
PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	288.325.000	351.365.000
Kartu tol elektronik	-	3.066.328.355
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp250.000.000)	4.724.535.887	2.976.200.000
Piutang usaha, neto	27.147.169.771	29.691.010.127

Berdasarkan umur

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Belum jatuh tempo	23.734.400.500	18.607.460.708
1 - 30 hari	-	8.269.619.129
31 - 60 hari	110.988.774	400.775.046
Lebih dari 60 hari	3.301.780.497	2.413.155.244
Piutang usaha, neto	27.147.169.771	29.691.010.127

Berdasarkan telaah atas status dari masing-masing akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha diatas.

6. RECEIVABLES

a. Trade receivables - Third parties

By customers

	Third parties
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani	PT Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	PT Kawasan Industri Medan (Persero)
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Berkah Manis Makmur	PT Berkah Manis Makmur
PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk	PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
E-toll cards	E-toll cards
Others (each below Rp250,000,000)	Others (each below Rp250,000,000)
Trade receivables, net	Trade receivables, net

By aging

The aging analysis of trade receivables are as follows:

Not yet due	
1 - 30 days	
31 - 60 days	
More than 60 days	
Trade receivables, net	

Based on the result of review for the status of each accounts receivable at the end of the year, the management believes that the allowance for impairment losses of trade receivables is considered not necessary.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG (lanjutan)

a. Piutang usaha - Pihak ketiga (lanjutan)

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha tersebut.

b. Piutang non-usaha

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Pihak ketiga		
PT Niscala Utama Cemerlang (Catatan 38)	30.408.961.275	30.908.961.275
PT Dahan Karya Bertunas	11.000.000.000	11.000.000.000
Piutang bunga	4.832.624.680	5.237.006.465
PT Tagora Green Energy	652.635.228	1.305.270.468
Piutang iklan dan sewa lahan	-	21.417.958.464
PT Langgeng Sukses Mandiri	-	1.403.214.166
Lain-lain	26.680.856.577	27.167.106.140
	73.575.077.760	98.439.516.978
Dikurangi penyisihan penurunan nilai	(40.746.550.398)	(31.414.879.104)
Piutang non-usaha, neto	32.828.527.362	67.024.637.874
Pihak berelasi (Catatan 36)	36.006.249.992	51.194.810.945
Jumlah	68.834.777.354	118.219.448.819

6. RECEIVABLES (continued)

a. Trade receivables - Third parties (continued)

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk on the trade receivables.

b. Non-trade receivables

Third parties
PT Niscala Utama Cemerlang (Note 38)
PT Dahan Karya Bertunas
Interest receivables
PT Tagora Green Energy
Advertisement income
and land rent receivables
PT Langgeng Sukses Mandiri
Others
Less allowance for impairment
Non-trade receivables, net
Related parties (Note 36)
Total

7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

a. Uang muka dan beban dibayar di muka

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Uang muka		
Jaminan	538.728.434	1.114.832.975
Lain-lain	5.308.136.995	5.671.823.707
Beban dibayar di muka		
Tunjangan fasilitas	4.917.326.597	3.825.323.487
Asuransi	1.328.024.623	2.972.120.483
Sewa	140.128.094	239.969.934
Pemeliharaan dan keamanan	54.206.720	1.507.122.884
Jumlah	12.286.551.463	15.331.193.470

7. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

a. Advances and prepayments

Advances
Deposits
Others
Prepaid expenses
Facility allowance
Insurances
Rent
Maintenance and security
Total

b. Uang muka pembelian aset tetap dan penambahan aset takberwujud

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Proyek dan pembelian aset tetap	75.080.007.223	204.732.015.281

b. Advance payments for purchase of fixed assets and addition of intangible assets

Projects and purchase of fixed assets

Pada tanggal 31 Desember 2023, uang muka proyek sebagian besar merupakan uang muka dan biaya-biaya yang dibayarkan terkait proyek jalan tol di Marga.

As of December 31, 2023, advances on projects mostly represents advances and costs paid in relation to toll road project Marga.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

8. PERSEDIAAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, akun ini merupakan persediaan atas bahan-bahan untuk perbaikan, pemeliharaan dan penggantian pengelolaan air bersih milik SCTK dan DCC, pembangkit listrik tenaga *biomass* yang dimiliki oleh RPSL, dan perlengkapan milik IME, masing-masing merupakan entitas anak tidak langsung sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Suku cadang	10.205.352.974	8.977.391.011
Kayu gelondongan	313.402.063	3.048.317.549
Bahan kimia	94.248.128	-
Cangkang sawit	-	344.862.614
Lain-lain	508.825.112	522.355.344
Jumlah	11.121.828.277	12.892.926.518

8. INVENTORIES

As of December 31, 2023 and 2022, this account represents supplies of materials for repair, maintenance and replacement of the water treatment plant owned by SCTK and DCC, biomass power plant owned by RPSL, other equipment owned by IME, an indirect subsidiary, each, as follows:

Spareparts
Wooden logs
Chemical
Palm shells
Others
Total

**9. KAS DI BANK YANG DIBATASI
PENGUNAANNYA**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Bank Central Asia Tbk	10.440.756.432	122.609.979.839
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.391.824.755	2.403.826.657
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.000.000	-
Jumlah	14.836.581.187	125.013.806.496

9. RESTRICTED CASH IN BANKS

PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total

Saldo pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) pada tanggal 31 Desember 2023, merupakan rekening milik SCTK dan RPSL sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh.

Balance in PT Bank Central Asia Tbk (BCA) as of December 31, 2023, represents accounts of SCTK and RPSL related to the acquired loans.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 merupakan rekening penampungan dan pencadangan utang bank milik MUN dan entitas anaknya yang pada tanggal 31 Desember 2023 telah didekonsolidasi (Catatan 1d).

Balance as of December 31, 2022 represents MUN and its subsidiaries' escrow account and debt service account which as of December 31, 2023 has been deconsolidated (Note 1d).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, IME, entitas anak tidak langsung, memiliki rekening *escrow* yang ditempatkan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh IME (Catatan 23c).

As of December 31, 2023 and 2022, IME, an indirect subsidiary, has escrow accounts that are placed with PT Bank Syariah Indonesia in relation with loans acquired by IME (Note 23c).

Pada tanggal 31 Desember 2023, DCC, entitas anak tidak langsung, memiliki rekening *escrow* yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri Tbk sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh DCC (Catatan 23a).

As of December 31, 2023, DCC, an indirect subsidiary, has escrow accounts that are placed with PT Bank Mandiri Tbk in relation with loans acquired by DCC (Note 23a).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**10. ASET DAN LIABILITAS KELOMPOK LEPASAN
YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL**

Berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 30 November 2022, Potum, entitas anak langsung, telah setuju untuk melakukan penjualan atas seluruh saham entitas anaknya di PT Tirta Bangun Nusantara (TBN), kepada PT Bahtera Hijau Mandiri (BHM).

Berdasarkan rencana tersebut, tanggal 31 Desember 2022, dalam laporan posisi konsolidasian, aset TBN disajikan sebagai akun "Aset Kelompok Lepas yang Dimiliki untuk Dijual", dan liabilitas TBN disajikan sebagai akun "Liabilitas Terkait Aset Kelompok Lepas yang Dimiliki untuk Dijual". Tidak terdapat penilaian wajar atas saham TBN pada tanggal 31 Desember 2022.

Pada tanggal 23 Desember 2022, Potum menerima pembayaran tahap pertama dari PT Bahtera Hijau Mandiri atas penjualan saham TBN senilai Rp44.000.000.000 dan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek lainnya.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 17 dan 18 tanggal 25 Januari 2023, Potum telah mengalihkan dan menyerahkan kepada BHM seluruh saham miliknya di TBN dengan nilai penjualan sebesar Rp55.000.000.000 dan Potum mencatat keuntungan dari penjualan TBN sebesar Rp7.059.541.278.

**10. ASSETS AND LIABILITIES OF DISPOSAL
GROUP CLASSIFIED AS HELD FOR SALE**

Based on Notarial Deed No. 21 dated November 30, 2022, Potum, a direct subsidiary, agreed to sell all of its shares in its subsidiary PT Tirta Bangun Nusantara (TBN), to PT Bahtera Hijau Mandiri (BHM).

Based on the plan above, in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2022, assets of TBN were presented as "Assets of Disposal Group Classified as Held for Sale" account and liabilities of TBN was presented as "Liabilities of Disposal Group Classified as Held for Sale" account. There is no valuation of fair value for TBN's share as of December 31, 2022.

On December 23, 2022, Potum received the first phase payment from PT Bahtera Hijau Mandiri for the sale of TBN's shares worth Rp44,000,000,000 and classified as other current liabilities.

Based on Deed of Sale and Purchase Agreement No. 17 and 18 dated January 25, 2023, Potum has transferred and handed over to BHM all of its shares in TBN with selling price amounting to Rp55,000,000,000 and Potum recorded gain on sale of TBN amounting to Rp7,059,541,278.

**11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA**

Penyertaan saham pada entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE**

Investment in associates and joint venture entities as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Dividen/ Dividend	Bagian atas laba(rugi)/ Equity in net profit(loss)	Pengakuan atas bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi/ Recognition of share in other comprehensive income of an associates company	Dekonsolidasi dan Pelepasan/ Deconsolidation and Disposals	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Metode ekuitas/ Equity method									
PT Margautama Nusantara	Pengelola jalan tol/ Toll road operator	43.39%	-	2.861.684.806.991	-	-	-	-	2.861.684.806.991
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Pengelola jalan tol/ Toll road operator	40.00%	4.238.270.688.782	-	-	(169.675.796.354)	(12.800.000)	(4.068.582.092.428)	-
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pengelola jalan tol/ Toll road operator	35.00%	836.593.440.855	-	(35.000.000.000)	89.302.789.220	647.212.956	(891.543.443.031)	-
PT Intisentra Alam Bahtera	Pengusahaan jasa pelabuhan/ Port services	39.00%	82.093.190.463	-	-	910.618.795	-	(83.003.809.258)	-
Jumlah/Total			5.156.957.320.100	2.861.684.806.991	(35.000.000.000)	(79.462.388.339)	634.412.956	(5.043.129.344.717)	2.861.684.806.991

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Penyertaan saham pada entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

Investment in associates and joint venture entities as of December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Penambahan/ Addition	Dividen/ Dividend	Bagian atas laba(rugi)/ Equity in net profit(loss)	Pengakuan atas Bagian penghasilan komprehensif lain perusahaan asosiasi/ Recognition of share in other comprehensive income of an associates company	Reklasifikasi / Reclassification	31 Desember 2022/ December 31, 2022
<i>Metode ekuitas/ Equity method</i>									
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Pengelola jalan tol/ Toll road operator	40.00%	-	4.240.578.456.325	-	(2.307.767.543)	-	-	4.238.270.688.782
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Pengelola jalan tol/ Toll road operator	35.00%	777.153.095.153	-	(17.500.000.000)	76.798.168.897	142.176.805	-	836.593.440.855
PT Intisentos Alam Bahtera	Pengusahaan jasa pelabuhan/ Port services	39.00%	78.948.926.825	-	-	3.144.263.638	-	-	82.093.190.463
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Instalasi air bersih/ Water installation	28.00%	29.286.384.872	-	-	9.063.140.255	-	(38.349.525.127)	-
Jumlah/Total			885.388.406.850	4.240.578.456.325	(17.500.000.000)	86.697.805.247	142.176.805	(38.349.525.127)	5.156.957.320.100

*Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh investasi pada saham JLB dan JJC dijaminkan untuk pinjaman bank (Catatan 23)/As of December 31, 2023 and 2022, all JLB and JJC shares were pledged as collateral for bank loans (Note 22).

PT Margautama Nusantara (MUN)

Pada tanggal 28 Desember 2023, Perusahaan kehilangan pengendalian atas MUN karena terdilusi dari sebelumnya sebesar 76,51% menjadi 43,39%. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan mencatat sisa kepemilikan saham di MUN sebagai investasi pada Entitas Asosiasi (Catatan 1d)

PT Margautama Nusantara (MUN)

On December 28, 2023, the Company lost of control over MUN due to diluted from 76.51% to 43.39%. As of December 31, 2023, the Company recorded the remaining 43.39% share ownership in MUN as Investment in Associate Entities (Note 1d).

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)

Pada tanggal 30 Juni 2022, PT Margautama Nusantara ("MUN"), entitas anak, menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk mengakuisisi 40% saham yang diterbitkan JJC.

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)

On June 30, 2022, PT Margautama Nusantara ("MUN"), a subsidiary, entered into a Conditional Sale and Purchase Agreement with PT Jasa Marga, Tbk (Jasa Marga) to acquire 40% of the issued shares of JJC.

JJC adalah pemegang konsesi jalan tol layang Jakarta-Cikampek, yang merupakan jalan tol layang penuh sepanjang 38 km yang merupakan bagian dari jaringan trans-jawa, yang berfungsi sebagai gerbang masuk/keluar dari Jakarta (ibukota) ke Jawa Barat, Tengah, dan Jawa Timur. Japex sudah beroperasi sejak 12 Desember 2019.

JJC is the concession holder of Jakarta-Cikampek Elevated toll road, which is a 38 km fully elevated toll road forming part of the trans-java network, which serves as an entry/exit gate from Jakarta (capital city) to West, Central, and East Java. Japex has been in operation since December 12, 2019.

MUN menandatangani Perjanjian untuk mengakuisisi 2.265.778 saham, mewakili 40% dari saham yang diterbitkan JJC, dengan nilai imbalan sebesar Rp4.389.000.000.000.

MUN entered into the Agreement to acquire a total of 2,265,778 shares, representing 40% of the issued shares of JJC, for a total consideration of up to Rp4,389,000,000,000.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) (lanjutan)

Imbalan dasar transaksi adalah Rp4.030.000.000.000, yang diselesaikan sebagai berikut:

- (i) Rp15.000.000.000 setelah penandatanganan perjanjian pembelian saham bersyarat ("CSPA") pada tanggal 30 Juni 2022;
- (ii) Rp200.000.000.000 melalui escrow pada tanggal 10 Agustus 2022;
- (iii) Rp591.000.000.000 pada saat penutupan tanggal 10 Oktober 2022 dan;
- (iv) Rp3.224.000.000.000 pembayaran akhir pada tanggal 19 Desember 2022.

Imbalan tambahan (*earn-out*) maksimum sebesar Rp359.000.000.000 dibayarkan sesuai target tingkat penyesuaian tarif yang telah disepakati sebelumnya, paling lambat 31 Desember 2024. Per 31 Desember 2022, MUN memperkirakan imbalan tambahan sebesar Rp190.000.000.000 dan dicatat dalam liabilitas jangka pendek lainnya.

Pada tanggal akuisisi, komposisi kepemilikan saham di JJC adalah sebagai berikut:

1. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memiliki 2.265.778 lembar saham atau setara dengan Rp2.266 miliar yang merupakan 40% dari total saham yang diterbitkan;
2. PT Margautama Nusantara (MUN) memiliki 2.265.778 lembar saham atau setara dengan Rp2.266 miliar yang merupakan 40% dari total saham yang diterbitkan;
3. PT Ranggi Sugironperkasa memiliki 1.132.889 lembar saham atau setara dengan Rp1.133 miliar yang merupakan 20% dari total saham yang diterbitkan.

Berdasarkan perjanjian antar pemegang saham JJC tanggal 10 Oktober 2022, JJC dikendalikan secara bersama antara JTT dan MUN.

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) (continued)

The base consideration of the transaction is Rp4,030,000,000,000, which was settled as follows:

- (i) Rp15,000,000,000 upon signing of conditional share purchase agreement ("CSPA") on June 30, 2022;
- (ii) Rp200,000,000,000 via escrow on August 10, 2022;
- (iii) Rp591,000,000,000 upon closing on October 10, 2022 and;
- (iv) Rp3,224,000,000,000 final payment on December 19, 2022.

An additional consideration (*earn-out*) up to Rp359,000,000,000 shall be paid subject to pre-agreed target level of tariff adjustment, with a long-stop date of December 31, 2024. As of December 31, 2022, MUN estimated the *earn-out* to be at Rp190,000,000,000 and recorded under other current liability.

At the acquisition date, the composition of share ownership in JJC is as follows:

1. PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) has 2,265,778 shares or equivalent to Rp2,266 billion representing 40% of the total issued shares;
2. PT Margautama Nusantara (MUN) has 2,265,778 shares or equivalent to Rp2,266 billion representing 40% of the total issued shares;
3. PT Ranggi Sugironperkasa has 1,132,889 shares or equivalent to Rp1,133 billion representing 20% of the total issued shares.

Based on the agreement between JJC's shareholders dated October 10, 2022, JJC is jointly controlled between JTT and MUN.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

**PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)
(lanjutan)**

Setelah penyelesaian transaksi pada tanggal 19 Desember 2022, MUN mencatat 40% saham sebagai investasi pada ventura bersama.

Sejak tanggal 28 Desember 2023, Perusahaan kehilangan pengendalian atas MUN dan tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan MUN dan entitas anaknya ke laporan konsolidasi Perusahaan dan entitas anaknya (catatan 1d).

Perubahan penyertaan saham berdasarkan metode ekuitas di JJC adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Saldo awal	4.238.270.688.782	-
Penambahan	-	4.240.578.456.325
Pengakuan atas bagian rugi neto	(169.675.796.354)	(2.307.767.543)
Pengakuan atas bagian penghasilan komprehensif lain	(12.800.000)	-
Dekonsolidasi	(4.068.582.092.428)	-
Saldo akhir	-	4.238.270.688.782

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

Pada tanggal 31 Juli 2009, MUN mengakuisisi 25% kepemilikan saham di PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) dengan nilai perolehan sebesar Rp218.080.000.000. Penyertaan saham tersebut efektif pada tanggal 31 Juli 2009.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JLB yang diaktakan dengan Akta No. 72 oleh Notaris Kartono S.H., tanggal 26 Oktober 2011, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor JLB. MUN menyeter penuh sebesar Rp40.500.000.000 atau setara dengan 40.500 saham. Kenaikan investasi pada JLB tidak merubah persentase kepemilikan MUN di JLB.

Berdasarkan akta notaris No. 502 tanggal 29 Agustus 2018 oleh Kartono, S.H., notaris di Jakarta, MUN disetujui untuk mengakuisisi 94.800 lembar saham PT Jalan Lingkar Baratsatu (JLB) milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp338.284.320.000. Saham yang diperoleh mewakili 10% dari total modal saham JLB. Dengan demikian, setelah proses akuisisi, kepemilikan MUN di JLB menjadi 35%.

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

**PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)
(lanjutan)**

Following the completion of the transaction as of December 19, 2022, MUN recorded 40% interest in JJC equity accounted as an investment in joint venture.

As of December 28, 2023, the Company loss of its control over MUN and no longer consolidates MUN's consolidated financial statements to the consolidated statements of the Company and its subsidiaries (note 1d).

The changes in the investment in shares based on equity method in JJC is as follows:

Beginning balances
Addition
Recognition of share in net losses
Recognition of share in other comprehensive income
Deconsolidation
Ending balance

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

On July 31, 2009, MUN acquired 25% shares ownership in PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) with acquisition cost of Rp218,080,000,000. The acquisition was effective on July 31, 2009.

Based on Extraordinary Stockholders' General Meeting of JLB as notarized by Deed No. 72 of Kartono S.H., dated October 26, 2011, the stockholders approved to increase issued and fully paid-in capital of JLB. MUN made a subscription of Rp40,500,000,000 or equivalent to 40,500 shares. The additional investment in JLB did not change MUN ownership interest in JLB.

Based on notarial deed No. 502 dated August 29, 2018 by Kartono, S.H., notary in Jakarta, MUN agreed to acquire 94,800 shares of PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk amounted Rp338,284,320,000. Such shares acquired represent 10% of total JLB share capital. Thus, after the acquisition, the ownership of the MUN in JLB becoming 35%.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) (lanjutan)

PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) (continued)

Perubahan penyertaan saham berdasarkan metode ekuitas di JLB adalah sebagai berikut:

The changes in the investment in shares based on equity method in JLB is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal	836.593.440.855	777.153.095.153	Beginning balances
Pengakuan atas bagian laba neto	89.302.789.220	76.798.168.897	Recognition of share in net earning
Distribusi dividen	(35.000.000.000)	(17.500.000.000)	Dividend distribution
Pengakuan atas bagian penghasilan komprehensif lain	647.212.956	142.176.805	Recognition of share in other comprehensive income
Dekonsolidasi	(891.543.443.031)	-	Deconsolidation
Saldo akhir	-	836.593.440.855	Ending balance

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2022, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 76 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., pada tanggal yang sama antara lain pemegang saham JLB menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun 2021 sebesar Rp50.000.000.000. Pada 31 Desember 2022, MUN mencatat piutang dividen sebesar Rp17.500.000.000. Dividen telah dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2023.

In the Shareholders' Annual General Meeting held on June 23, 2022, which was notarized in Notarial Deed No. 76 of Karin Christiana Basoeki, S.H., of the same date, the shareholders of JLB approved the distribution of cash dividends for the year 2021 of Rp50,000,000,000. As of December 31, 2022, MUN recorded dividend receivable amounting to Rp17,500,000,000. Dividend has been paid on June 15, 2023.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 pada tanggal 16 Juni 2023, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 44 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., pada tanggal 16 Juni 2023, pemegang saham menyetujui akumulasi cadangan umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.071.450.376 dan pembagian dividen untuk tahun 2022 sebesar Rp100.000.000.000. MUN mendapatkan dividen sebesar Rp35.000.000.000. Dividen telah dibayarkan pada tanggal 11 Desember 2023.

Based on Shareholders' Annual General Meeting for the financial year 2022 dated June 16, 2023, which has been legalized by Notarial Deed No. 44 of Karin Christiana Basoeki, S.H., dated June 16, 2023, the shareholders approved the accumulated general reserve amounting up to December 31, 2023 amounting to Rp8,071,450,376 and dividend distribution for 2022 amounting to Rp100,000,000,000. MUN has received payment of dividend amounted to Rp35,000,000,000. Dividend was paid on December 11, 2023.

Sejak tanggal 28 Desember 2023, Perusahaan kehilangan pengendalian atas MUN dan tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan MUN dan entitas anaknya ke laporan konsolidasi Perusahaan dan entitas anaknya (catatan 1d).

As of December 28, 2023, the Company loss of its control over MUN and no longer consolidates MUN's consolidated financial statements to the consolidated statements of the Company and its subsidiaries (note 1d).

PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM)

PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri (TKCM)

Pada tanggal 23 Desember 2022, investasi TBN pada TKCM direklasifikasi ke dalam aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual (Catatan 10).

As of December 23, 2022, investment of TBN in TKCM is reclassified into assets of disposal group classified as held for sale (Note 10).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE (continued)

PT Intisentosa Alambahtera (ISAB)

PT Intisentosa Alambahtera (ISAB)

Pada tanggal 7 Februari 2023, Portco melakukan Perjanjian Jual Beli dengan PT LDC Indonesia untuk menjual dan mengalihkan 39% saham PT Intisentosa Alambahtera (ISAB), yang dimiliki Portco. Harga jual saham tersebut adalah sebesar USD5.700.000 atau setara dengan Rp87.951.000.000 yang efektif pada tanggal 10 Maret 2023. Dari transaksi penjualan ini, Portco mencatat laba dari penjualan investasi di ISAB sebesar Rp4.979.149.422

On February 7, 2023, Portco, a direct subsidiary, entered into a Sale Purchase Agreement with PT LDC Indonesia to sell and transfer 39% of PT Intisentosa Alambahtera's (ISAB) shares owned by Portco. The selling price is USD5,700,000 or equivalent to Rp87,951,000,000 which effective on March 10, 2023. From this sale transaction, Portco recorded gain from the sale of investment in ISAB of Rp4.979.149.422.

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan pada entitas asosiasi dan ventura bersama:

Summary of financial information of associate entity and joint venture:

31 Desember 2023/December 31, 2023						
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Pendapatan/ Revenue	(Rugi)/laba tahun berjalan/ (Loss)/profit for the year	(Rugi)/laba komprehensif lain/Other comprehensive (loss)/income	
JJC	15.289.796.000.000	11.148.876.000.000	893.421.000.000	(407.840.000.000)	(407.872.000.000)	JJC
JLB	2.194.392.473.892	249.694.254.092	534.044.380.807	265.635.684.062	1.849.179.872	JLB
MUN	14.060.624.315.409	7.355.077.511.655	1.399.109.235.361	(261.121.218.520)	(1.931.556.862)	MUN
31 Desember 2022/December 31, 2022						
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Pendapatan/ Revenue	(Rugi)/laba tahun berjalan/ (Loss)/profit for the year	(Rugi)/laba komprehensif lain/Other comprehensive (loss)/income	
JJC	15.505.220.000.000	10.956.428.000.000	869.239.000.000	(391.952.000.000)	(391.941.000.000)	JJC
JLB	2.602.307.259.162	825.093.903.295	503.917.691.109	230.433.738.581	406.9219.442	JLB

12. ASET TETAP

12. FIXED ASSETS

Rincian dan mutasi dari aset tetap adalah sebagai berikut:

The details and movement of fixed assets are as follows:

31 Desember 2023	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Dekonsolidasi*/ Deconsolidation*	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2023
Biaya perolehan						Cost
Pemilik langsung						Direct acquisition
Tanah dan hak atas tanah	15.767.423.093	77.580.000	-	-	15.845.003.093	Land and landrights
Bangunan dan prasarana	112.960.726.023	2.457.082.952	-	(34.427.124.884)	80.990.684.091	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	39.417.572.433	2.084.585.259	(7.440.000)	(32.041.742.596)	9.452.975.096	Machinery and equipment
Peralatan kantor	54.459.579.843	2.346.270.519	-	(31.002.957.839)	25.802.892.523	Office equipment
Kendaraan	33.044.003.098	1.058.705.533	(2.882.626.475)	(16.522.083.018)	14.697.999.138	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	1.280.789.415	-	-	(1.280.789.415)	-	Construction in progress
	256.930.093.905	8.024.224.263	(2.890.066.475)	(115.274.697.752)	146.789.553.941	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pemilik langsung						Direct acquisition
Bangunan dan prasarana	43.778.668.075	5.580.934.336	-	(14.937.638.573)	34.421.963.838	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	32.923.527.581	3.631.669.448	-	(26.740.146.207)	9.815.050.822	Machinery and equipment
Peralatan kantor	45.937.517.777	3.185.084.021	-	(28.101.181.920)	21.021.419.878	Office equipment
Kendaraan	21.213.783.974	3.542.225.757	(2.058.932.187)	(15.164.162.877)	7.532.914.667	Vehicles
	143.853.497.407	15.939.913.562	(2.058.932.187)	(84.943.129.577)	72.791.349.205	
Neto	113.076.596.498				73.998.204.736	Net

*) Merupakan pengurangan akibat dekonsolidasi MUN sebesar Rp30.331.568.175 (Catatan 1d)/Represents deduction from the deconsolidation of MUN amounting to Rp30,331,568,175 (Note 1d)

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2022	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2022
Biaya perolehan						Cost
<u>Pemilik langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Tanah dan hak atas tanah	15.143.673.093	623.750.000	-	-	15.767.423.093	Land and landrights
Bangunan dan prasarana	108.699.899.341	536.882.000	-	3.723.944.682	112.960.726.023	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	43.282.562.727	4.786.190.532	(9.253.642.644)	602.461.818	39.417.572.433	Machinery and equipment
Peralatan kantor	52.658.090.324	1.916.823.869	(115.334.350)	-	54.459.579.843	Office equipment
Kendaraan	29.121.041.070	5.314.588.986	(1.391.626.958)	-	33.044.003.098	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	4.922.843.805	684.352.110	-	(4.326.406.500)	1.280.789.415	Construction in progress
	253.828.110.360	13.862.587.497	(10.760.603.952)	-	256.930.093.905	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Pemilik langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Bangunan dan prasarana	38.463.488.871	5.315.179.204	-	-	43.778.668.075	Buildings and infrastructures
Mesin dan peralatan	33.327.169.078	6.693.190.639	(7.096.832.136)	-	32.923.527.581	Machinery and equipment
Peralatan kantor	45.800.835.769	246.936.895	(110.254.887)	-	45.937.517.777	Office equipment
Kendaraan	18.594.835.275	3.722.197.690	(1.103.248.991)	-	21.213.783.974	Vehicles
	136.186.328.993	15.977.504.428	(8.310.336.014)	-	143.853.497.407	
Neto	117.641.781.367				113.076.596.498	Net

Manajemen tidak melihat adanya peristiwa yang akan menghambat penyelesaian aset dalam penyelesaian tersebut.

Management has no reason to believe that any events may occur that would prevent completion of the construction in progress.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai potensial atas nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of fixed assets as of December 31, 2023 and 2022.

Pada 31 Desember 2023, aset tetap berupa tanah, kendaraan, dan peralatan (alat berat) sejumlah masing-masing Rp9.153.695.389, Rp11.181.431.568 dan Rp3.206.000.000 dijamin untuk utang pembiayaan konsumen (Catatan 22) dan pinjaman bank (Catatan 23).

As of December 31, 2023, fixed assets in the form of land, vehicles and equipment (heavy equipment) amounting to Rp9,153,695,389, Rp 11,181,431,568, and Rp3,206,000,000, respectively, were pledged as collateral for consumer financing liabilities (Note 22) and bank loans (Note 23).

Nilai penyusutan aset tetap yang dibebankan pada operasi adalah sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets was charged to operations as follows:

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Beban umum dan administrasi (Catatan 32)	11.123.474.317	11.079.630.442	General and administrative expenses (Note 32)
Pengumpul pendapatan tol (Catatan 31a)	2.258.997.043	2.541.365.535	Toll revenue collector (Note 31a)
Pelayanan pemakai jalan tol (Catatan 31c)	2.204.508.452	2.003.574.701	Toll user services (Note 31c)
Pemeliharaan jalan tol (Catatan 31b)	352.933.750	352.933.750	Toll road maintenance (Note 31b)
Jumlah	15.939.913.562	15.977.504.428	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

13. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Piutang sewa pembiayaan sehubungan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), Badan Usaha Milik Negara, sebagai pembeli tunggal penjualan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air IME, entitas anak tidak langsung.

Penerimaan sewa minimum masa depan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Berdasarkan tanggal jatuh tempo:		
Kurang dari 1 tahun	45.950.580.000	45.950.580.000
Antara 1-2 tahun	45.173.918.400	45.950.580.000
Antara 2-5 tahun	183.153.204.000	191.696.481.600
Lebih dari 5 tahun	363.253.854.600	399.884.495.400
Jumlah penerimaan sewa pembiayaan masa depan	637.531.557.000	683.482.137.000
Dikurangi: pembayaran bunga masa depan	(279.505.954.887)	(308.491.885.383)
Nilai kini piutang sewa pembiayaan	358.025.602.113	374.990.251.617
Dikurangi: Bagian lancar	(18.352.838.144)	(16.964.649.504)
Bagian jangka panjang	339.672.763.969	358.025.602.113

Berdasarkan penelaahan status akun piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2023, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang sewa pembiayaan dapat direalisasikan dan tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian yang dibutuhkan.

Piutang sewa pembiayaan dikenakan tingkat diskonto 7,89% per tahun. Jangka waktu sewa adalah selama 20 tahun sampai dengan tahun 2040.

Pendapatan bunga selama tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp28.985.930.496 dan Rp30.269.118.060, yang dicatat sebagai bagian dari pendapatan (Catatan 29).

13. FINANCE LEASE RECEIVABLE

Finance lease receivable related to the sale and purchase agreement of electricity with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"), a state-owned company, as the single off-taker of the electricity sales generated by the IME's, an indirect subsidiary, hydro electric power plant.

The future minimum lease payments are as follows:

Based on due date:
Less than 1 year
Between 1-2 years
Between 2-5 years
More than 5 years
Total future financial lease payments
Less: future interest payments
Present value of finance lease receivable
Less: Current portion
Non-current portion

Based on the review of finance lease receivables as of December 31, 2023, management is of the opinion that all finance lease receivables are realizable and no provision for expected credit losses is necessary to be provided.

The finance lease receivable is subject to a discount rate of 7.89% per annum. The lease term is for 20 years until 2040.

Interest income during 2023 and 2022 amounted to Rp28,985,930,496 and Rp30,269,118,060, respectively, which was recorded as component of revenues (Note 29).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

14. KONSESI JASA

a. Piutang atas Perjanjian Konseksi Jasa

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	194.221.630.997	199.011.316.523
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	130.574.633.862	116.124.622.109
Jumlah	324.796.264.859	315.135.938.632
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(39.967.350.750)	(17.626.685.526)
Piutang konseksi jangka Panjang	284.828.914.109	297.509.253.106

Berdasarkan penelaahan status akun piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2023, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang atas perjanjian konsensi jasa dapat direalisasikan dan tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian yang dibutuhkan.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Piutang dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL"), entitas anak tidak langsung, yang dicatat sebagai jasa konseksi. Pergerakan dari aset konseksi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Saldo awal	199.011.316.523	203.253.890.844
Penambahan		
Pendapatan bunga	23.999.626.126	24.546.737.331
dari jasa konseksi	(28.789.311.652)	(28.789.311.652)
Penerimaan dari PLN		
Saldo akhir	194.221.630.997	199.011.316.523
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(5.407.350.750)	(4.789.685.526)
Piutang konseksi jangka panjang	188.814.280.247	194.221.630.997

Aset keuangan konseksi digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh RPSL untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Pontianak (Catatan 2p).

14. SERVICE CONCESSIONS

a. Service Concession Arrangement Receivables

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	
Total	
Current maturities	
Long-term portion of concession receivables	

Based on the review of finance lease receivables as of December 31, 2023, management is of the opinion that all service concession arrangement receivables are realizable and no provision for expected credit losses is necessary to be provided.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Receivable from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") related to the Power Purchase Agreement with PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL"), an indirect subsidiary, that is accounted for as service concession arrangement. The movements in the concession financial assets are as follows:

Beginning balance	
Additions:	
Finance income	
from service concession	
Received from PLN	
Ending balance	
Current maturities	
Long-term portion of concession receivables	

Concession financial assets are used as collateral to the loan obtained by RPSL for construction of Biomass Powerplant (PLTBm) in Pontianak (Note 2p).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

14. KONSESI JASA (lanjutan)

a. Piutang atas Perjanjian Konsesi Jasa (lanjutan)

PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM)

Piutang dari KIM terkait Perjanjian Jual Beli Air dengan PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC"), entitas anak tidak langsung, yang dicatat sebagai jasa konsesi. Pergerakan dari aset konsesi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Saldo awal	116.124.622.109	112.441.294.927
Penambahan:		
Pendapatan bunga		
dari jasa konsesi	11.243.446.036	8.426.397.156
Pendapatan jasa konsesi	8.619.388.364	4.626.602.844
Pendapatan konstruksi	14.450.011.756	3.683.327.182
Ditagihkan ke KIM		
(direklasifikasi ke piutang usaha)	(19.862.834.400)	(13.053.000.000)
Saldo akhir	130.574.633.865	116.124.622.109
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(34.560.000.000)	(12.837.000.000)
Piutang konsesi jangka panjang	96.014.633.865	103.287.622.109

14. SERVICE CONCESSIONS (continued)

a. Service Concession Arrangement Receivables (continued)

PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM)

Receivable from KIM related to the Water Purchase Agreement with PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC"), an indirect subsidiary, that is accounted for as service concession arrangement. The movements in the concession financial assets are as follows:

Beginning balance
Additions:
Finance income from service concession
Concession service revenue
Construction revenue Billed to KIM
(reclassified to Trade receivables)
Ending balance
Current maturities
Long-term portion of concession receivables

b. Aset Takberwujud atas Perjanjian Konsesi

b. Intangible Assets of Service Concession Arrangement

31 Desember 2023	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Dekonsolidasi/ Deconsolidation	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2023
Hak pengusahaan jalan tol (Catatan 38)						Toll road concession rights (Note 38)
Biaya perolehan	4.830.969.546.975	815.225.627.405	-	(5.646.195.174.380)	-	Cost
Akumulasi amortisasi	998.408.798.876	67.217.941.257	-	(1.065.626.740.133)	-	Accumulated amortization
Neto	3.832.560.748.099				-	Net
Hak pengelolaan air bersih (Catatan 38)						Water treatment concession rights (Note 38)
Biaya perolehan	239.660.768.546	1.064.049.850	-	-	240.724.818.396	Cost
Akumulasi amortisasi	69.628.492.212	13.083.787.714	-	-	82.712.279.926	Accumulated amortization
Neto	170.032.276.334				158.012.538.470	Net
Jumlah	4.002.593.024.433				158.012.538.470	Total
31 Desember 2022	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2022
Hak pengusahaan jalan tol (Catatan 38)						Toll road concession rights (Note 38)
Biaya perolehan	4.214.285.681.856	619.402.350.909	(2.718.485.790)	-	4.830.969.546.975	Cost
Akumulasi amortisasi	934.749.420.246	63.659.378.630	-	-	998.408.798.876	Accumulated amortization
Neto	3.279.536.261.610				3.832.560.748.099	Net
Hak pengelolaan air bersih (Catatan 38)						Water treatment concession rights (Note 38)
Biaya perolehan	235.173.330.515	4.487.438.031	-	-	239.660.768.546	Cost
Akumulasi amortisasi	56.592.108.435	13.036.383.777	-	-	69.628.492.212	Accumulated amortization
Neto	178.581.222.080				170.032.276.334	Net
Jumlah	3.458.117.483.690				4.002.593.024.433	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

14. KONSESI JASA (lanjutan)

b. Aset Takberwujud atas Perjanjian Konsesi (lanjutan)

Beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol dan hak pengusahaan pengolahan air yang dibebankan kepada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp80.301.728.971 dan Rp76.695.762.407 (Catatan 31).

Penjabaran lebih lanjut dari nilai buku neto aset takberwujud setiap perjanjian konsesi jalan tol dan perjanjian konsesi pengolahan air adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Hak pengelolaan air bersih		
Serang, Banten	158.012.538.470	170.032.276.334
Hak pengusahaan jalan tol		
Pelabuhan Soekarno-Hatta		
- Pettarani	-	2.307.338.727.467
Pondok Aren - Serpong	-	897.775.938.963
Tallo - Bandara Hasanuddin	-	627.446.081.669
		3.832.560.748.099
Jumlah	158.012.538.470	4.002.593.024.433

Aset-aset hak pengelolaan air bersih pada tanggal 31 Desember 2023 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp325.939.600.000. Manajemen entitas anak berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas risiko tersebut.

Selama tahun 2023, terdapat kapitalisasi atas bunga pinjaman ke aset pengusahaan jalan tol sebesar Rp61.810.505.016.

Berdasarkan penelaahan manajemen entitas anak, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

14. SERVICE CONCESSIONS (continued)

b. Intangible Assets of Service Concession Arrangement (continued)

Amortization expenses of toll road concession rights and water treatment concession rights that were charged to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year then ended December 31, 2023 and 2022 amounted Rp80,301,728,971 and Rp76,695,762,407, respectively (Note 31).

Further breakdown of intangible assets' net book value per toll road concession rights' toll area and water treatment concession rights are as follows:

Water treatment concession rights
Serang, Banten
Toll road concession rights
Soekarno-Hatta Harbor - Pettarani
Pondok Aren - Serpong
Tallo - Airport Hasanuddin

Total

Water treatment concession rights assets as of December 31, 2023 were insured against fire, theft, and other possible risks under insurance policies amounting to Rp325,939,600,000. The subsidiaries' managements believe that insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

During 2023, there was a capitalization of loan interest to toll road concession rights amounting to Rp61,810,505,016.

Based on review of the subsidiaries' management, there were no events or changes in circumstances which indicate an impairment of intangible assets as of December 31, 2023 and 2022.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

15. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS SEWA

15. RIGHT OF USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

Aset Hak Guna - Neto

Right of Use Assets - Net

31 Desember 2023	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi*/ Reclassifications*	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2023
Biaya perolehan						Acquisition cost
Tanah	4.139.112.960	-	-	(4.139.112.960)	-	Land
Ruang kantor	14.468.398.428	4.340.844.038	(4.340.844.038)	(3.519.422.158)	10.948.976.270	Office spaces
Kendaraan	734.079.233	-	(182.563.977)	-	551.515.256	Vehicles
Total biaya perolehan	19.341.590.621	4.340.844.038	(4.523.408.015)	(7.658.535.118)	11.500.491.526	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Tanah	965.793.024	827.822.592	-	(1.793.615.616)	-	Land
Ruang kantor	11.490.205.996	6.059.178.877	(4.340.844.038)	(3.345.186.268)	9.863.354.567	Office spaces
Kendaraan	368.200.797	275.156.503	(91.431.350)	-	551.925.950	Vehicles
Total akumulasi penyusutan	12.824.199.817	7.162.157.972	(4.432.275.388)	(5.138.801.884)	10.415.280.517	Total accumulated depreciation
Neto	6.517.390.804				1.085.211.009	Net

*) Termasuk pengurangan akibat dekonsolidasi MUN sebesar Rp2.519.733.234 (Catatan 1d)/Including deduction from the deconsolidation of MUN amounting to Rp2,519,733,234 (Note 1d)

31 Desember 2022	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2022
Biaya perolehan						Acquisition cost
Tanah	-	4.139.112.960	-	-	4.139.112.960	Land
Ruang kantor	8.961.044.168	7.234.573.877	(1.727.219.617)	-	14.468.398.428	Office spaces
Kendaraan	619.379.353	596.439.377	(481.739.497)	-	734.079.233	Vehicles
Total biaya perolehan	9.580.423.521	11.970.126.214	(2.208.959.114)	-	19.341.590.621	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Tanah	-	965.793.024	-	-	965.793.024	Land
Ruang kantor	6.328.850.282	6.541.955.160	(1.380.599.446)	-	11.490.205.996	Office spaces
Kendaraan	516.149.460	333.790.834	(481.739.497)	-	368.200.797	Vehicles
Total akumulasi penyusutan	6.844.999.742	7.841.539.018	(1.862.338.943)	-	12.824.199.817	Total accumulated depreciation
Neto	2.735.423.779				6.517.390.804	Net

Penyusutan

Depreciation

Beban penyusutan yang dibebankan ke operasi sebagai bagian dari berikut ini:

Depreciation expenses were charged to operations as part of the following:

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Beban umum dan administrasi (Catatan 32)	7.162.157.972	7.841.539.018	General and administrative expenses (Note 32)

Liabilitas Sewa

Lease Liabilities

Mutasi liabilitas sewa sehubungan dengan aset hak guna adalah sebagai berikut:

The movement of lease liabilities in relation to the right of use assets are as follows:

	1 Januari January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Beban bunga/ Interest expenses	Penyesuaian*/ Adjustment*	Pembayaran/ Payments	31 Desember/ December 31, 2023	
Kelas aset pendasar							Underlying assets
Tanah	2.812.253.376	-	149.233.888	(2.961.487.264)	-	-	Land
Ruang kantor	3.070.573.952	4.340.844.038	273.544.279	(1.325.143.361)	(5.240.864.248)	1.118.954.660	Office Space
Kendaraan	370.013.415	-	6.262.959	-	(376.276.374)	-	Vehicles
Jumlah	6.252.840.743	4.340.844.038	429.041.126	(4.286.630.625)	(5.617.140.622)	1.118.954.660	Total

*) Termasuk pengurangan akibat dekonsolidasi MUN (Catatan 1d)/Including deduction from the deconsolidation of MUN (Note 1d)

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**15. ASET HAK GUNA DAN LIABILITAS SEWA
(lanjutan)**

Liabilitas Sewa (lanjutan)

Mutasi liabilitas sewa sehubungan dengan aset hak guna adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	1 Januari 2022 January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Beban bunga/ Interest expenses	Pembayaran/ Payments	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Kelas aset pendasar					
Tanah	-	4.139.112.960	-	(1.326.859.584)	2.812.253.376
Ruang kantor	2.683.975.968	7.234.573.877	397.659.206	(7.245.635.099)	3.070.573.952
Kendaraan	103.605.793	596.439.377	18.968.245	(349.000.000)	370.013.415
Total	2.787.581.761	11.970.126.214	416.627.451	(8.921.494.683)	6.252.840.743

Underlying assets
Land
Office spaces
Vehicles

Total

Liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu:

Lease liabilities based on time basis:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Jangka pendek	1.118.954.660	3.609.214.559	Current portion
Jangka panjang	-	2.643.626.184	Non-current portion
Total	1.118.954.660	6.252.840.743	Total

16. GOODWILL

Goodwill dialokasikan ke masing-masing entitas anak tidak langsung berikut pada tanggal akuisisi:

16. GOODWILL

Goodwill was allocated to the following individual indirect subsidiaries as at the acquisition dates:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Goodwill			Goodwill
dari akuisisi:			from acquisition:
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ('RPSL')	38.099.655.530	38.099.655.530	PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ('RPSL')
PT Sarana Catur Tirta Kelola ('SCTK')	6.217.234.883	6.217.234.883	PT Sarana Catur Tirta Kelola ('SCTK')
PT Jasa Sarana Nusa Makmur ('JSNM')	6.032.065.491	6.032.065.491	PT Jasa Sarana Nusa Makmur ('JSNM')
PT Dain Celicani Cemerlang ('DCC')	1.419.338.247	1.419.338.247	PT Dain Celicani Cemerlang ('DCC')
PT Inpol Meka Energi ('IME')	593.012.594	593.012.594	PT Inpol Meka Energi ('IME')
Saldo akhir	52.361.306.745	52.361.306.745	Ending balance

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai tersebut, jumlah terpulihkan semua UPK di atas ditentukan berdasarkan "nilai wajar dikurangi biaya pelepasan" dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan, kecuali bagi RPSL yang pengujian penurunan nilainya menggunakan "nilai pakai".

For impairment testing purposes, the recoverable amounts of all the CGU above were determined based on FVLCD using discounted cash flows method, except RPSL which the goodwill impairment testing used "value-in-use" calculation.

Asumsi signifikan yang digunakan adalah tingkat diskonto sebesar antara 10,00%-12,00% dan tingkat pertumbuhan sebesar antara 4,5%-5,3%.

Significant assumptions used were the discount rates ranging from 10.00%-12.00% and growth rates ranging from 4.5% to 5.3%.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

16. GOODWILL (lanjutan)

Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan, khususnya tingkat diskonto, harga dan tingkat pertumbuhan, dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa asumsi utama tersebut di atas dapat berubah sehingga nilai tercatat *goodwill* masing-masing entitas menjadi lebih tinggi dari nilai terpulihkannya secara signifikan.

16. GOODWILL (continued)

The changes to the assumptions used by the management to determine the recoverable value, in particular the discount rate, prices and terminal growth rates, can have significant impact on the results of the assessment.

Management believes that there was no reasonably possible change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the goodwill allocated to each of the entity to significantly exceed their respective recoverable value.

17. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Berdasarkan pemasok

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-	336.629.079.586
PT Perkasa Adiguna Sembada	-	19.568.915.941
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	-	4.577.707.266
PT Sarma Raya Cipta	-	3.948.100
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	4.449.150.468	8.815.803.994
Jumlah	4.449.150.468	369.595.454.887

17. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

By suppliers

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Perkasa Adiguna Sembada
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Sarma Raya Cipta
Others (each below
Rp500,000,000)

Total

Berdasarkan umur

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
1 - 30 hari	3.818.344.293	362.033.494.438
31 - 60 hari	-	1.474.572.398
Lebih dari 60 hari	630.806.175	6.087.388.051
Jumlah	4.449.150.468	369.595.454.887

By ages

1 - 30 days
31 - 60 days
Over 60 days

Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

18. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7.309.401.656	7.309.401.656
PT Acset Indonusa Tbk	3.654.700.828	3.654.700.828
PT Pembangunan Perumahan Energi	-	31.806.023.056
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	5.726.487.705
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	2.505.369.945	2.218.589.537
Jumlah	13.469.472.429	50.715.202.782
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(13.469.472.429)	(7.945.077.242)
Bagian jangka panjang	-	42.770.125.540

Pada tanggal 10 November 2017, IME menandatangani perjanjian hutang piutang dengan PT Ilyas Pratama Abadi ("Ilyas") yang mana IME menerima dana pinjaman sebesar Rp18.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 1% di atas bunga kredit dari PT Bank Central Asia Tbk per tahun dan jatuh tempo pada 9 November 2018. Perjanjian tersebut diamandemen pada tanggal 9 November 2018 dengan jatuh tempo diperpanjang hingga 10 November 2019. Pada tanggal 12 Maret 2019, sesuai dengan Perjanjian Novasi atas Perjanjian Hutang Piutang, Ilyas mengalihkan hutang IME kepada PT Pembangunan Perumahan Energi ("PPE"). Jatuh tempo perjanjian pinjaman ini menjadi 18 Desember 2025.

Utang kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP") merupakan pinjaman konstruksi masing-masing untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Lau Gunung di Sumatera Utara oleh IME.

Pada 11 Desember 2023, IME melakukan pelunasan atas hutang non usaha kepada PP dan PPE senilai Rp37.532.510.761.

Utang kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Acset Indonusa Tbk merupakan utang atas uang muka investasi pada konsorsium MMN - ADHI - ACSET untuk proyek Jalan Tol JORR Elevated ruas Cikunir - Ulujami.

18. OTHER PAYABLES - THIRD PARTIES

PT Adhi Karya (Persero) Tbk	
PT Acset Indonusa Tbk	
PT Pembangunan Perumahan Energi	
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	
Others (each below Rp500,000,000)	
Total	
Current maturities	
Long-term portion	

On November 10, 2017, IME signed a loan agreement with PT Ilyas Pratama Abadi ("Ilyas") whereas IME obtained loan amounting to Rp18,000,000,000 with interest rate 1% above the credit interest rate from PT Bank Central Asia Tbk per annum and will be due on November 9, 2018. The agreement was amended on November 9, 2018 with the due date has been extended to November 10, 2019. On March 12, 2019, in accordance with a Novation Agreement on the Loan Agreement, Ilyas transferred IME's loan to PT Pembangunan Perumahan Energi ("PPE"). The maturity date of the loan agreement become December 18, 2025.

Loan to PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP") represent of construction loan, each pertaining to the construction of the Minihidro Power Plant (PLTM) in Lau Gunung, North Sumatra by IME.

On December 11, 2023, IME settled non-trade payables to PP and PPE amounting to Rp37,532,510,761.

Payable to PT Adhi Karya (Persero) Tbk and PT Acset Indonusa Tbk represents advances in investment to MMN - ADHI - ACSET Consortium for the JORR Elevated Toll Road Project Cikunir - Ulujami.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

19. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Bonus	4.381.938.072	11.955.426.515
Jasa professional	997.966.224	19.711.778.084
Beban bunga	525.440.313	13.955.530.917
Jasa pengoperasian tol bersama	-	8.062.595.535
Perangkat lunak	-	7.687.747.156
Lain-lain	6.656.204.755	36.044.940.432
Jumlah	12.561.549.364	97.418.018.639

19. ACCRUED EXPENSES

Bonus
Professional fees
Interest expenses
Joint operation toll fees
Software
Others
Total

20. PERPAJAKAN

20. TAXATION

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Tax

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
<u>Aset lancar</u>		
Entitas anak:		
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	-	6.773.270.895
<u>Aset tidak lancar</u>		
Perusahaan:		
Klaim pengembalian pajak penghasilan	1.520.000.000	-
Entitas anak:		
Klaim pengembalian pajak penghasilan	12.462.072.842	5.648.674.326

<u>Current assets</u>
Subsidiaries:
Value Added Tax - Input

<u>Non-current assets</u>
Company:
Refundable corporate income taxes
Subsidiaries:
Refundable corporate income taxes

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

b. Utang Pajak

b. Taxes Payables

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	7.621.391.018	7.145.600.612	Value Added Tax - Out
Pajak Penghasilan			Income Taxes
Pasal 21	1.445.150.721	1.455.168.606	Article 21
Pasal 4 (2)	34.958.610	24.416.783	Article 4 (2)
Pasal 23	20.243.597	5.161.408	Article 23
Pasal 26	-	317.113.627	Article 26
Sub jumlah	9.121.743.946	8.947.461.036	Sub total
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	102.440.306	7.405.596.684	Value Added Tax - Out
Pajak Penghasilan			Income Taxes
Pasal 23	6.558.322.804	15.811.891.874	Article 23
Pasal 29	4.436.638.814	35.252.194.750	Article 29
Pasal 21	556.494.744	1.260.744.621	Article 21
Pasal 4 (2)	283.601.380	2.084.857.650	Article 4 (2)
Pasal 26	900.100	-	Article 26
Pasal 25	-	56.172.956	Article 25
Pajak lainnya (catatan 20g)	-	26.707.870.918	Other taxes (Note 20g)
Sub jumlah	11.938.398.148	88.579.329.453	Sub total
Jumlah	21.060.142.094	97.526.790.489	Total

c. Beban Pajak

c. Taxes Expenses

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Beban pajak kini			Current tax
Entitas anak			Subsidiaries
Tahun berjalan	60.671.805.097	46.588.905.066	- Current year
- Kekurangan pajak penghasilan tahun sebelumnya	393.173.000	380.584.037	- Under provision for prior year corporate income tax
	61.064.978.097	46.969.489.103	
Beban pajak tangguhan			Deferred tax expense
Perusahaan	-	-	Company
Entitas anak	8.373.002.279	8.767.179.523	Subsidiaries
	8.373.002.279	8.767.179.523	
Jumlah	69.437.980.376	55.736.668.626	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perhitungan Fiskal

Rekonsiliasi antara (rugi)/laba sebelum pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan estimasi rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2023	2022
(Rugi)/laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(166.434.698.572)	178.201.500.404
Dikurangi:		
Rugi entitas anak sebelum pajak penghasilan	(168.651.259.869)	169.657.980.013
Laba sebelum pajak Perusahaan	2.216.561.297	8.543.520.391
Beda temporer:		
Beban imbalan pasca kerja	3.782.225.032	3.758.621.658
Penyusutan aset tetap	(156.202.442)	50.495.000
Penyusutan aset hak guna	4.340.844.036	4.334.811.754
Beban sewa	(4.536.635.248)	(4.013.882.042)
Beban bunga atas liabilitas sewa	195.791.210	197.709.153
Bonus	2.817.056.691	5.438.754.447
Jumlah beda temporer	6.443.079.279	9.766.509.970
Beda tetap:		
Pegawai	1.607.996.891	8.342.850.278
Sumbangan	1.396.058.964	1.407.935.830
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(798.097.058)	(149.693.350)
Dividend	(28.764.845.987)	-
Lain-lain	14.738.523.127	(28.206.137.065)
Jumlah beda tetap	(11.820.364.063)	(18.605.044.307)
Taksiran rugi fiskal tahun berjalan	(3.160.723.487)	(295.013.946)
Kompensasi kerugian fiskal	-	-
Taksiran rugi fiskal setelah kompensasi kerugian fiskal	-	-
Akumulasi kerugian fiskal terdiri atas:		
2023	(3.160.723.487)	-
2022	(295.013.946)	(295.013.946)
Akumulasi rugi fiskal	(3.455.737.433)	(295.013.946)

20. TAXATION (continued)

d. Fiscal Computation

A reconciliation between (loss)/profit before tax as shown in the consolidated statement profit or loss and other comprehensive income, and estimated fiscal loss of the Company is as follows:

(Loss)/profit before tax as stated in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Less:
Loss before tax of subsidiaries
Profit before tax of the Company
Temporary differences:
Post-employment benefits expenses
Depreciation of fixed assets
Depreciation of right of use asset
Rent expenses
Interest expenses of lease liabilities
Bonus
Total temporary differences
Permanent differences:
Employees
Donations
Income already subjected to final tax
Dividend
Others
Total permanent differences
Estimated fiscal loss - current year
Compensation of fiscal loss
Estimated fiscal loss after compensated current period
Accumulated fiscal loss carried forward consists of:
2023
2022
Accumulated fiscal losses

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Perhitungan Fiskal (lanjutan)

Taksiran laba fiskal selama tahun berjalan, sebagaimana disebutkan di atas, akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ("SPT PPh Badan") tahun 2023 yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Perusahaan telah melaporkan taksiran laba fiskal untuk tahun 2022, sebagaimana disebutkan di atas, dalam SPT PPh Badan tahun 2022.

e. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan sebesar Rp1.427.837.095 yang berasal dari rugi fiskal karena tidak memenuhi syarat pengakuan.

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

20. TAXATION (continued)

d. Fiscal Computation (continued)

Estimated taxable profit the year, as stated above, will be reported in the Corporate Income Tax Returns ("SPT PPh Badan") reported to the tax office in 2023. The Company has reported taxable profit for 2022, as stated above, in 2022 SPT PPh Badan.

e. Deferred Taxes

As of December 31, 2023, the Company did not recognize deferred tax assets amounting to Rp1.427,837,095 which came from fiscal losses that do not fulfill recognition criteria.

The deferred tax arising from the significant temporary differences between commercial and tax purpose for the year ended December 31, 2023 and 2022, are as follows:

31 Desember 2023	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Dekonsolidasi*/ Deconsolidation*	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2023
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
<u>Entitas Anak</u>						<u>The Subsidiaries</u>
Rugi fiskal	5.131.844.925	(765.758.345)	-	-	4.366.086.580	Fiscal losses
Imbalan pasca-kerja	2.436.208.198	113.009.339	68.407.897	-	2.617.625.434	Post-employment benefits
Bonus	176.604.723	129.280.536	-	-	305.885.259	Bonus
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	(1.221.269.631)	-	-	(1.221.269.631)	Allowance for impairment of receivables
Aset tetap dan aset takberwujud	(1.495.477.444)	(1.296.136.210)	-	-	(2.791.613.654)	Fixed assets and Intangible assets
Jumlah	6.249.180.402	(3.040.874.311)	68.407.897	-	3.276.713.988	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
<u>Entitas Anak</u>						<u>The Subsidiaries</u>
Rugi fiskal	34.661.936.721	17.313.723.753	-	(52.948.873.948)	(973.213.474)	Fiscal loss
Imbalan pasca kerja	5.681.431.873	323.593.937	(9.022.183)	(5.328.500.245)	667.503.382	Post-employment benefits
Provisi pemeliharaan jalan tol	2.671.334.967	572.843.031	-	(3.166.190.747)	77.987.251	Toll road maintenance provision
Beban akrual	125.429.304	-	-	-	125.429.304	Accrued expenses
Penyisihan penurunan nilai piutang	18.269.916	(737.344.555)	-	-	(719.074.639)	Allowance for impairment of receivables
Provisi pinjaman bank	40.677.503	157.750.639	-	(198.428.142)	-	Bank loan provision
Bonus	646.876.897	979.304.737	-	(1.560.259.519)	65.922.115	Bonus
Aset tetap dan aset takberwujud	(127.889.176.640)	(24.028.183.227)	-	143.622.178.568	(8.295.181.299)	Fixed assets and intangible assets
Aset hak guna	(5.427.790)	86.183.717	-	(114.726.274)	(33.970.347)	Right of use asset
Jumlah	(84.048.647.249)	(5.332.127.968)	(9.022.183)	80.305.199.693	(9.084.597.707)	Total

*) Merupakan pengurangan akibat dekonsolidasi MUN sebesar Rp80.305.199.693 (Catatan 1d)/Represents deduction from the deconsolidation of MUN amounting to Rp80,305,199,693 (Note 1d)

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Tangguhan (lanjutan)

31 Desember 2022	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ Credited to other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustments	Saldo akhir/ Ending balance	December 31, 2022
Aset pajak tangguhan						Deferred tax assets
<u>Entitas Anak</u>						<u>The Subsidiaries</u>
Rugi fiskal	6.370.022.194	(1.238.177.269)	-	-	5.131.844.925	Fiscal losses
Imbalan pasca-kerja	3.174.830.381	(522.015.400)	(216.606.783)	-	2.436.208.198	Post-employment benefits
Provisi pinjaman bank	808.062.335	(808.062.335)	-	-	-	Bank loan provision
Bonus	-	176.604.723	-	-	176.604.723	Bonus
Aset tetap dan aset takberwujud	(475.831.624)	(1.019.645.820)	-	-	(1.495.477.444)	Fixed assets and intangible assets
Jumlah	9.877.083.286	(3.411.296.101)	(216.606.783)	-	6.249.180.402	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
<u>Entitas Anak</u>						<u>The Subsidiaries</u>
Rugi fiskal	15.027.856.374	19.634.080.347	-	-	34.661.936.721	Fiscal loss
Imbalan pasca kerja	6.151.383.087	(241.579.198)	(228.372.016)	-	5.681.431.873	Post-employment benefits
Provisi pemeliharaan jalan tol	2.101.024.722	570.310.245	-	-	2.671.334.967	Toll road maintenance provision
Beban akrual	125.429.304	-	-	-	125.429.304	Accrued expenses
Penyisihan penurunan nilai piutang	18.269.916	-	-	-	18.269.916	Allowance for impairment of receivables
Provisi pinjaman bank	(30.566.295)	71.243.798	-	-	40.677.503	Bank loan provision
Bonus	-	646.876.897	-	-	646.876.897	Bonus
Aset tetap dan aset takberwujud	(101.857.788.919)	(26.031.387.721)	-	-	(127.889.176.640)	Fixed assets and intangible assets
Aset hak guna	-	(5.427.790)	-	-	(5.427.790)	Right of use asset
Jumlah	(78.464.391.811)	(5.355.883.422)	(228.372.016)	-	(84.048.647.249)	Total

f. Rekonsiliasi Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara (rugi)/laba sebelum pajak penghasilan, sebagaimana tercantum pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

f. Reconciliation of Corporate Income Tax

A reconciliation between (loss)/profit before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and taxable profit is as follows:

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2023	2022	
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(166.434.698.572)	178.201.500.404	(Loss)/profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku	(36.615.633.686)	39.204.330.089	Income tax expense at the applicable tax rate
Pengaruh pajak atas beda tetap: Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(3.454.742.456)	(7.652.349.513)	Tax effects of permanent differences: Income already subjected to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak-neto	95.002.813.444	24.080.991.447	Non-deductible expenses-net
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya	393.173.000	380.584.037	Adjustments in respect of corporate income tax of the previous years
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan penyesuaian	14.112.370.074	(276.887.434)	Unrecognized deferred tax assets and adjustments
Beban pajak penghasilan	69.437.980.376	55.736.668.626	Income tax expense

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain

PT Makassar Metro Network ("MMN")

Lebih Bayar PPh Badan tahun 2021

Pada tanggal 19 Januari 2023, MMN menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Badan untuk tahun 2021 sebesar Rp748.851.126. MMN menerima SKPLB tersebut. Jumlah tersebut sudah sama dengan yang dicatat sebagai klaim pengembalian pajak tahun 2021.

Pada tanggal 2 Februari 2023, MMN telah menerima pembayaran atas Lebih Bayar Pajak Badan untuk tahun 2021 sebesar Rp748.851.126.

Kurang Bayar PPh 23 tahun 2021

Pada tanggal 19 Januari 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh 23 periode Januari - Desember untuk tahun 2021 dan denda terkait sebesar Rp8.862.503.356. Perusahaan telah membayar sebesar Rp8.862.503.356 pada tanggal 17 Maret 2023.

MMN mengajukan surat keberatan atas ketetapan pajak tersebut kepada kantor pajak pada tanggal 17 April 2023. Pada tanggal 12 Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan dari MMN. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, MMN masih dalam proses pengajuan surat banding atas hasil keberatan.

PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")

Kurang Bayar PPN Juni 2012

Pada tanggal 26 April 2017, JTSE menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PPN periode Juni 2012 dan denda terkait sebesar Rp20.036.035.966. JTSE mengajukan surat keberatan atas ketetapan pajak tersebut kepada kantor pajak pada tanggal 19 Juli 2017. Pada tanggal 14 Desember 2017, Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan dari JTSE. Atas keputusan tersebut, JTSE tidak melakukan pembayaran atas jumlah kurang bayar tersebut.

20. TAXATION (continued)

g. Others

PT Makassar Metro Network ("MMN")

2021 Corporate Income Tax Overpayment

On January 19, 2023, MMN has received an overpayment of corporate tax assessment letter for 2021 amounting to Rp748,851,126. MMN accepted the SKPLB. The amount is the same as refundable corporate income tax 2021.

On February 2, 2023, the MMN has received an overpayment of corporate income tax for 2021 amounting to Rp748,851,126.

2021 Withholding Tax Art 23 Underpayment

On January 19, 2023, the Company has received a tax assessment of Withholding Tax Art 23 of January - December Period 2021 reflecting underpayment and penalty of Rp8,862,503,356. The Company has paid amounted to Rp8,862,503,356 on March 17, 2023.

MMN submitted an objection letter to the tax determination to the tax office on April 17, 2023. On January 12, 2024, the Directorate General of Taxes rejected the MMN's objection. As of the date of completion of the MMN's financial statements, MMN is still in the process of filing an appeal letter against the tax objection result.

PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")

June 2012 VAT Underpayments

On April 26, 2017, JTSE received a tax assessment of VAT for period June 2012 reflecting underpayment and penalty of Rp20,036,035,966. JTSE filed an objection letter to the tax office on July 19, 2017. On December 14, 2017, Director General of Taxation rejected the objection from JTSE. Upon the decisions, JTSE did not make any payment of the assessed underpayment.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") (lanjutan)

Kurang Bayar PPN Juni 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 26 Januari 2018, JTSE mengajukan surat banding atas keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada 19 September 2019, Pengadilan Pajak menerima banding JTSE tersebut. Atas keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung pada 26 Desember 2019.

Untuk menanggapi peninjauan kembali tersebut, JTSE mengajukan surat kontra memori kepada Mahkamah Agung pada 5 Februari 2020.

Pada tanggal 16 Agustus 2021, JTSE menerima Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PPN periode Juni 2012. Berdasarkan surat putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan banding JTSE, sehingga pajak dan denda yang masih harus dibayar JTSE sebesar Rp20.036.035.966.

JTSE telah membayar kekurangan bayar pajak dan denda tersebut pada tanggal 25 Oktober 2021 senilai Rp20.036.035.966.

Pada tanggal 11 Oktober 2021 Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) denda sebesar Rp10.018.017.983. Pada tanggal 21 Oktober 2021 JTSE mengirimkan surat penolakan atas surat tagihan pajak (STP) kepada Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp10.018.017.983. Tanggal 30 Maret 2022 Direktorat Jenderal Pajak menolak surat yang dikirimkan JTSE.

20. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

**PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")
(continued)**

June 2012 VAT Underpayments (continued)

On January 26, 2018, JTSE filed an appeal letter on Director General of Taxation's decision to the Tax Court. On September 19, 2019, the Tax Court accepted the JTSE's appeals. Upon the decision, the Director General of Taxation submitted a judicial review to the Supreme Court on December 26, 2019.

To counter the judicial review, JTSE filed a contra memory letter to the Supreme Court on February 5, 2020.

On August 16, 2021, JTSE received the Decision Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding the appeal of the Tax Underpayment Assessment Letter for the June 2012 VAT period. Based on the decision letter, the Supreme Court rejected JTSE's appeal, so that the tax and penalties should be paid by JTSE amounted to Rp20,036,035,966.

JTSE has paid the underpayment tax and penalty on October 25, 2021 amounted to Rp20,036,035,966.

On October 11, 2021 Director General of Taxation issued Tax Collection Letter (STP) for penalty to JTSE amounting to Rp10,018,017,983. On October 21, 2021, JTSE sent the cancellation application of Tax Collection Letter (STP) to the Director General of Taxation regarding the decision of penalty amounted to Rp10,018,017,983. On March 30, 2022, Director General of Taxation rejected JTSE's cancellation application.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") (lanjutan)

Kurang Bayar PPN Juni 2012 (lanjutan)

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan hitungan revisi atas surat tagihan pajak menjadi Rp20.036.035.966 pada tanggal 17 Maret 2022.

JTSE mengirimkan surat penolakan atas surat tagihan pajak yang kedua sebesar Rp20.036.035.966 pada tanggal 8 April 2022 kepada Direktorat Jenderal Pajak, namun ditolak kembali pada tanggal 8 Juni 2022.

JTSE membayar denda sebesar Rp20.036.035.966 (dikurangi dengan klaim tagihan pajak penghasilan tahun 2020 sebesar Rp1.681.552.403) dengan cara dicicil mulai tanggal 17 Oktober 2022 hingga 10 Agustus 2023. Sampai dengan 31 Desember 2022, JTSE telah membayar sebesar Rp4.950.000.000, sehingga sisa Rp13.404.483.563 dicatat pada akun utang pajak pada 31 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Maret 2023, JTSE melunasi pembayaran denda sebesar Rp13.404.483.563.

Kurang Bayar PPN Januari-November 2016

Pada tanggal 21 Desember 2018, JTSE menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas PPN periode Januari-November 2016 dan denda terkait sebesar Rp19.122.737.388. JTSE tidak melakukan pembayaran atas pokok ataupun denda. JTSE mengajukan surat keberatan atas ketetapan pajak tersebut kepada kantor pajak pada tanggal 8 Maret 2019. Pada tanggal 24 Juli 2019 Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan JTSE. Pada tanggal 8 Agustus 2019, JTSE mengajukan surat banding atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut ke Pengadilan Pajak.

20. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

**PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")
(continued)**

June 2012 VAT Underpayments (continued)

The Director General of Taxation issued the new calculation to revised the amount of Tax Collection Letter amounted to be Rp20,036,035,966 on March 17, 2022.

JTSE sent the second cancellation application of tax collection letter amounted to Rp20,036,035,966 on April 8, 2022 to the Director General of Taxation, however it was rejected on June 8, 2022.

JTSE pay the penalty amounted to Rp20,036,035,966 (deducted by refundable corporate income tax amounted to Rp1,681,552,403) through installments started October 17, 2022 to August 10, 2023. As of December 31, 2022 JTSE has paid amounted to Rp4,950,000,000, therefore the remaining balance recorded on tax payable amounting to Rp13,404,483,563 as of December 31, 2022.

As of Mar 31, 2023, JTSE has fully paid the penalty amounted to Rp13,404,483,563.

January-November 2016 VAT Underpayments

On December 21, 2018, JTSE, received a tax assessment of VAT for period January-November 2016 reflecting underpayment and penalty of Rp19,122,737,388. JTSE did not make any payment of principal or penalty. JTSE filed an objection letter against the tax assessment to the tax office on March 8, 2019. On July 24, 2019, Director General of Taxation rejected JTSE's objection. On August 8, 2019, JTSE filed appeal letters on the Director General of Taxation's decisions to the Tax Court.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") (lanjutan)

Kurang Bayar PPN Januari-November 2016
(lanjutan)

Pada tanggal 21 Desember 2020, Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan menerima banding JTSE tersebut. Atas keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung pada 18 Maret 2021. Untuk menanggapi peninjauan kembali tersebut, JTSE mengajukan surat kontra memori kepada Mahkamah Agung pada 20 April 2021.

Pada tanggal 11 Juli 2022, Mahkamah Agung mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas kurang bayar JTSE sebesar Rp19.917.046.366.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, JTSE telah menerima Surat Tagihan Pajak atas SKPKB PPN Masa Januari - November 2016 dan telah membayar sebesar Rp19.122.737.388. JTSE belum menerima Surat Tagihan Pajak atas SKPKB PPN Masa Desember 2016 sebesar Rp794.308.978 dan dicatat di akun utang pajak. JTSE telah mencatat provisi atas denda pajak sebesar Rp11.950.227.820 dicatat pada akun utang pajak.

Pada tanggal 14 Februari 2023, JTSE telah menerima surat tagihan pajak atas denda PPN Masa Januari - November 2016 sebesar Rp11.473.642.433 dan telah dilunasi pada tanggal 15 Maret 2023 dan 31 Maret 2023 masing-masing sebesar Rp568.701.077 dan Rp10.904.941.356.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, JTSE belum menerima surat tagihan pajak atas SKPB dan denda PPN Masa Desember 2016.

Kurang Bayar PPh Badan 2018

Pada tanggal 5 Januari 2023, JTSE menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Badan untuk tahun 2018 sebesar Rp380.584.037. JTSE menerima SKPKB dan mencatat kurang bayar sebesar Rp380.584.037 sebagai beban pajak penghasilan tahun 2022.

20. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

**PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")
(continued)**

January-November 2016 VAT Underpayments
(continued)

On December 21, 2020, the Tax Court accepted JTSE's appeals. Upon the decision, the Director General of Taxation submitted a judicial review to the Supreme Court on March 18, 2021. To counter the judicial review, JTSE filed a contra memory letter to the Supreme Court on April 20, 2021.

On July 11, 2022, Supreme Court granted civil review sent by the Director General of Taxation regarding to JTSE's underpayment amounted to Rp19,917,046,366.

As of December 31, 2022 JTSE has received tax collection letter of underpayment of VAT period January - November 2016 and has paid amounted to Rp19,122,737,388. JTSE has received tax collection letter of VAT period January - November and has paid amounted to Rp11,473,642,433. JTSE has not received tax collection letter of underpayment of VAT period December 2016 amounting to Rp794,308,978 and recorded on tax payable. JTSE has recorded provision of tax penalty amounted to Rp11,950,227,820 recorded on tax payable.

On February 14, 2023, JTSE has received tax collection letter of tax penalty of VAT period January - November 2016 amounted to Rp11,473,642,433 and has been paid on March 15, 2023 and March 31, 2023 amounting to Rp568,701,077 and Rp10,904,941,356, respectively.

As of the completion date of the financial statements, JTSE has not received tax collection letter of SKPKB and tax penalty period December 2016.

2018 Corporate Income Tax Underpayments

On January 5, 2023, JTSE received an underpayment of corporate tax assessment letter for 2018 amounted to Rp380,584,037. JTSE accepted the SKPKB and recorded underpayment amounted to Rp380,584,037 as income tax expense for 2022.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") (lanjutan)

Kurang Bayar PPh Badan 2018 (lanjutan)

Pada tanggal 3 Februari 2023, JTSE telah membayar SKPKB tersebut sebesar Rp380.584.037.

PT Inpolo Meka Energi

Pajak penghasilan badan 2021

Pada tanggal 19 Juni 2023, IME menerima surat ketetapan pajak dari DJP atas kelebihan pembayaran sebesar Rp486.827.668 dari yang dilaporkan senilai Rp570.502.565 atas pajak penghasilan badan tahun 2021. Selisih sebesar Rp83.674.897 dicatat sebagai beban pajak tahun 2023 (Catatan 20c). Pengembalian pajak yang diterima oleh IME senilai Rp486.827.668 dikompensasikan untuk melunasi berbagai surat ketetapan kurang bayar pajak.

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari

Pajak penghasilan badan 2021

Pada tanggal 12 Juni 2023, RPSL menerima surat ketetapan pajak dari DJP atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.025.554.073 dari yang dilaporkan senilai Rp1.335.052.176 atas pajak penghasilan badan tahun 2021. Selisih sebesar Rp309.498.103 dicatat sebagai beban pajak tahun 2023 (Catatan 20c). Pada tanggal 6 Juli 2023, RPSL menerima pengembalian pajak senilai Rp982.818.648 dan selisihnya senilai Rp42.735.425 dikompensasikan untuk melunasi berbagai surat ketetapan kurang bayar pajak.

20. TAXATION (continued)

e. Others (continued)

**PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")
(continued)**

2018 Corporate Income Tax Underpayments
(continued)

As of February 3, 2023, JTSE has paid the underpayment amounted to Rp380,584,037.

PT Inpolo Meka Energi

Corporate income tax 2021

On June 19, 2023, IME received a tax assessment letter from the Tax Office (DJP) regarding an overpayment amounting to Rp486,827,668 compared to the reported amount of Rp570,502,565 for the corporate income tax for the year 2021. The difference of Rp83,674,897 is recorded as a tax expense in 2023 (Note 20c). Tax refund received by IME amounted Rp486,827,668 is compensated to settle with various taxes that are underpayment assesment.

PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari

Corporate income tax 2021

On June 12, 2023, RPSL received a tax assesment letter for overpaid of Rp1,025,554,073, which differs from the reported value of Rp1,335,052,176 for corporate income tax in 2021. The difference of Rp309,498,103 was recorded as a tax expense for the year 2023 (Note 20c). On July 6, 2023, RPSL received a tax refund of Rp982,818,648 and the difference of Rp42,735,425 was compensated to settle with various taxes that are underpayment assesment.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

21. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Iklan	1.579.078.296	2.163.496.657
Dikurangi:		
Bagian jangka pendek	(1.579.078.296)	(1.160.315.462)
Bagian jangka panjang	-	1.003.181.195

Pendapatan iklan diterima di muka merupakan penyewaan papan iklan di ruas jalan tol oleh MMI.

21. UNEARNED REVENUES

Advertising
Less:
Short-term portion
Long-term portion

Unearned advertising revenue represents billboard rentals on toll roads owned by MMI.

22. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Caterpillar Finance Indonesia	658.119.616	987.007.325
PT BCA Finance	455.621.109	714.881.440
PT Astra Auto Finance	-	361.660.000
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	-	173.760.000
PT Astra Sedaya Finance	-	65.600.000
PT Toyota Astra Financial Service	-	29.760.000
Jumlah	1.113.740.725	2.332.668.765
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(522.567.687)	(653.588.750)
Bagian jangka panjang	591.173.038	1.679.080.015

Perusahaan dan entitas anaknya mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance, PT Cilipan Finance, PT Mandiri Tunas Finance, dan PT Astra Sedaya Finance untuk membiayai pembelian kendaraan.

Utang pembiayaan konsumen dikenakan suku bunga tetap untuk masing-masing perjanjian dengan kisaran tingkat suku bunga mulai 7,09%-15,69% (2022: 4,08%-15,00%) dengan jangka waktu pembayaran selama 3-4 tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang dibeli.

22. CONSUMER FINANCING LIABILITIES

PT Caterpillar Finance Indonesia
PT BCA Finance
PT Astra Auto Finance
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia
PT Astra Sedaya Finance
PT Toyota Astra Financial Service

Total

Current maturities

Long-term portion

The Company and its subsidiaries entered into consumer financing agreements with PT BCA Finance, PT Cilipan Finance, PT Mandiri Tunas Finance, and PT Astra Sedaya Finance to finance purchase of vehicle.

Consumer financing liabilities are subject to fixed interest rate for each agreement with interest rates ranging from 7.09%-15.69% (2022: 4.08%-15.00%) with a payment term of 3-4 years.

This facility is guaranteed with the vehicles purchased.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG

23. LONG-TERM LOANS

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pinjaman bank			Bank loans
PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")			PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")
Time Loan Non-Revolving (TLNR)			Time Loan Non-Revolving (TLNR)
PT Margautama Nusantara ("MUN")			PT Margautama Nusantara ("MUN")
Fasilitas 1 (TLNR)	-	806.000.000.000	Facility 1 (TLNR)
Fasilitas 2 (TLNR)	-	3.224.000.000.000	Facility 2 (TLNR)
Kredit Investasi			Investment Credit
PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL")			PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL")
Fasilitas (KI)	46.976.117.566	55.784.139.610	Facility (KI)
PT Makassar Metro Nusantara ("MMN")			PT Makassar Metro Network ("MMN")
Fasilitas 2 (KI 2)	-	20.533.535.272	Facility 2 (KI 2)
PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")			PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")
Fasilitas 3 (KI 3)	-	23.744.644.103	Facility 3 (KI 3)
Fasilitas 4 (KI 4)	-	142.496.311.907	Facility 4 (KI 4)
PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")			PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")
Fasilitas 3 (KI 3)	-	2.652.989.096	Facility 3 (KI 3)
Fasilitas 3 (KI 4)	-	611.111.111.111	Facility 3 (KI 4)
Total BCA	46.976.117.566	4.886.322.731.099	BCA Total
PT Bank Panin Indonesia Tbk ("Panin")			PT Bank Panin Indonesia Tbk ("Panin")
Kredit Investasi			Investment Credit
Perusahaan			The Company
Fasilitas (KI)	4.851.671.482	13.907.016.466	Facility (KI)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")
Kredit Pinjaman Berjangka			Loan Credit Facility
PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC")			PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC")
Fasilitas Pinjaman	100.000.000.000	-	Loan Facility
PT Sarana Catur Tirtakelola ("SCTK")			PT Sarana Catur Tirtakelola ("SCTK")
Fasilitas Pinjaman	107.393.346.490	-	Loan Facility
Total Mandiri	207.393.346.490	-	Mandiri Total
Pinjaman bank, neto	259.221.135.538	4.900.229.747.565	Bank loans, net
Pinjaman sindikasi (Catatan 23b)	-	1.457.869.683.796	Syndicated loan (Note 23b)
Lembaga keuangan (Catatan 23c)	254.332.777.018	294.455.767.054	Financial institution (Note 23c)
Sub-jumlah	513.553.912.556	6.652.555.198.415	Sub-total
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(2.599.227.443)	(14.738.720.849)	Unamortized transaction costs
Jumlah	510.954.685.113	6.637.816.477.566	Total
Dikurangi: Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(54.994.521.722)	(1.110.084.782.882)	Less: Current maturities
Pinjaman bank jangka panjang	455.960.163.391	5.527.731.694.684	Long-term portion of bank loans

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

23. LONG-TERM LOANS (continued)

Kreditur/ Creditor	Peminjam/ Debtor	Fasilitas/ Facilities	Jatuh tempo pinjaman/ Maturity date	Tingkat suku bunga efektif/Effective rate		Jumlah fasilitas/ Total facilities
				2023	2022	
BCA	MUN	TLR	Oct 2022/ Okt 2022	-	8,50%	650.000.000.000
BCA	MUN	TLNR	Des 2023/ Dec 2023	7,75%	7,75%	1.000.000.000.000
BCA	MUN	TLNR	Jun 2024/ Jun 2024	7,57%	7,57%	3.224.000.000.000
BCA	MMN	KI 2	Jul 2024/ Jul 2024	8,25%	8,25%	69.640.000.000
BCA dan Sulselbar	MMN	KI Sindikasi	Jul 2030/ Jul 2030	7,21% - 8,65%	7,21% - 8,65%	1.547.487.000.000
BCA	JTSE	KI 3	Nov 2023/ Nov 2023	8,25%	8,25%	120.558.000.000
BCA	JTSE	KI 4	Sept 2035/ Sept 2035	8,25%	8,25%	143.370.874.240
BCA	JTSE	KI 5	Okt 2035/ Oct 2035	8,25%	-	96.000.000.000
BCA	BSD	KI 3	Mei 2024/ May 2024	8,25%	8,25%	9.384.000.000
BCA	BSD	KI 4	Mei 2024/ May 2024	7,50%	7,50%	750.000.000.000
BCA	BSD	KI 5	Feb 2036/ Feb 2036	8,25%	-	637.315.777.777
BCA	RPSL	KI	Mar 2028/ Mar 2028	8,75%	8,50%	138.600.000.000
SMI	IME	KI	Des 2030/ Dec 2030	8,5%	10,38%	375.000.000.000
IIF	SCTK	KI	Apr 2023/ Apr 2023	-	9,52%	95.000.000.000
Panin	NI	KI	Jun 2024/ Jun 2024	9,00%	9,75%	61.000.000.000
Mandiri	SCTK	KI	Des 2029/ Dec 2029	8,70%	-	130.000.000.000
Mandiri	DCC	KI	Des 2029/ Dec 2029	8,70%	-	100.000.000.000

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

i. PT Margautama Nusantara (MUN)

Time loan revolving (TLR)

Pada tanggal 20 Oktober 2017, MUN, entitas anak langsung, memperoleh fasilitas kredit *Time Loan Revolving* ("TLR") dari BCA sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No. 20369/GBK/2017 sebesar Rp500.000.000.000 untuk pembelian saham PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB), pembiayaan proyek Jalan Tol milik PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dan pembiayaan proyek Jalan Tol Pettarani. Pada tanggal 1 Agustus 2018, sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No. 20302/GBK/2018, fasilitas tersebut ditambahkan sebesar Rp150.000.000.000 sehingga total fasilitas menjadi Rp650.000.000.000.

Pinjaman ini telah dilunasi oleh MUN pada tanggal 20 Oktober 2022.

Pinjaman dijamin oleh seluruh saham JLB, pernyataan kesanggupan dari PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), dan PT Makassar Metro Network (MMN), dan *Escrow Account*, *Operating Account*, *Debt Service Account*, *Rekening Penyelesaian Dividen*, dan *Rekening Penampungan Pendapatan Sementara JTSE dan MMN*.

Beban bunga selama tahun 2023 sebesar RpNil (2022: Rp11.348.653.431)

23. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

i. Margautama Nusantara (MUN)

Time loan revolving (TLR)

On October 20, 2017, MUN, a direct subsidiary, obtained *Time Loan Revolving* ("TLR") credit facility from BCA based on *Letter of Credit Agreement* No.20369/GBK.2017 amounting to Rp500,000,000,000 to purchase of shares of PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB), the financing of the Tollroad project owned by PT Bintaro Serpong Damai (BSD) and the financing of the Pettarani Tollroad project. On August 1, 2018, based on *Letter of Approval for Credit* No. 20302/GBK/2018, the facility received an additional amount of Rp150,000,000,000 resulting a total facility of Rp650,000,000,000.

The loans have been fully repaid by MUN in October 20, 2022.

The loan is secured by all JLB shares, *letter of undertaking* from PT Bintaro Serpong Damai (BSD), PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE), and PT Makassar Metro Network (MMN), and *escrow accounts*, *Operating Accounts*, *Debt Service Accounts*, *Dividend Settlement Accounts*, and *Temporary JTSE and MMN Revenue Shelter Account*.

Interest expenses during 2023 amounted RpNil (2022: Rp11,348,653,431)

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

**i. PT Margautama Nusantara (MUN)
(lanjutan)**

Time loan non-revolving ("TLNR")

Pada tanggal 29 Juni 2022, MUN memperoleh fasilitas kredit dari BCA berdasarkan Akta Notaris Karin Christiana Basoeki No. 115 sebesar Rp1.000.000.000.000 untuk pembelian 40% saham PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. MUN telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp806.000.000.000.

Pada tanggal 6 Desember 2022, MUN memperoleh fasilitas kredit dari BCA sesuai dengan Akta Notaris dari Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 06 sebesar Rp2.859.000.000.000 untuk pembelian 40% saham PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. MUN telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp2.859.000.000.000.

Pada tanggal 6 Desember 2022, MUN memperoleh fasilitas kredit dari BCA Digital sesuai dengan Akta Notaris dari Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 07 sebesar Rp365.000.000.000 untuk pembelian 40% saham PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. MUN telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp365.000.000.000.

Pinjaman ini dijamin oleh seluruh saham JLB, pernyataan kesanggupan dari BSD, JTSE, dan MMN, dan escrow accounts, Operating Accounts, Debt Service Accounts, Rekening Penampungan, Rekening Giro MMN, JTSE, BSD, 25% saham MUN yang dimiliki oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk dan seluruh saham JJC.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

**i. Margautama Nusantara (MUN)
(continued)**

Time loan non-revolving ("TLNR")

On June 29, 2022, MUN obtained credit facility from BCA based on Notarial Deed No. 115 of Karin Christiana Basoeki, amounting to Rp1,000,000,000,000 to purchase of 40% shares of PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk. MUN has make a drawdown of loan amounting to Rp806,000,000,000.

On December 6, 2022, MUN obtained credit facility from BCA based on Notarial Deed No. 06 of Karin Christiana Basoeki, S.H., amounting to Rp2,859,000,000,000 to purchase of 40% shares of PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk. MUN has make a drawdown of loan amounting to Rp2,859,000,000,000.

On December 6, 2022, MUN obtained credit facility from BCA Digital based on Deed No. 07 by Karin Christiana Basoeki, S.H., notary in Jakarta amounting to Rp365,000,000,000 to purchase of 40% shares of PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek owned by PT Jasa Marga (Persero) Tbk. MUN has make a drawdown of loan amounting to Rp365,000,000,000.

The loans are secured by all JLB shares, unlimited corporate guarantees from BSD, JTSE, and MMN, and escrow accounts, Operating Accounts, Debt Service Accounts, Revenue Shelter accounts, Current accounts of MMN, JTSE, and BSD, and 25% of MUN's shares owned by NI, and all JJC shares.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

**i. PT Margautama Nusantara (MUN)
(lanjutan)**

***Time loan non-revolving ("TLNR")
(lanjutan)***

Pinjaman fasilitas 2 TLNR ini dijamin oleh standby letter of credit (SBLC) dari Prime Bank yang memiliki peringkat investasi minimum oleh Lembaga Pemeringkat berdasarkan penilaian prospek usaha jangka panjang dan/atau *Non-Prime Bank* yang memenuhi syarat.

Jumlah beban bunga selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp314.013.679.323 dan Rp10.826.499.723.

ii. PT Makassar Metro Network (MMN)

Pada tanggal 17 April 2017, MMN memperoleh fasilitas Kredit Investasi 1 dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan plafon maksimal sebesar Rp69.640.000.000 untuk membiayai pelapisan jalan tol dan pengadaan *Traffic Information System* (TIS).

Jumlah beban bunga selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.213.549.946 dan Rp2.246.677.214.

iii. PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

Pada tanggal 21 Desember 2015, JTSE memperoleh fasilitas Kredit Investasi 3 dari BCA dengan plafon maksimal sebesar Rp120.558.000.000 untuk membiayai pembangunan Jembatan Tallo, perbaikan *frontage* dan investasi lainnya. Pinjaman ini telah dilunasi oleh JTSE pada tanggal 22 Desember 2023.

Pada tanggal 19 Oktober 2022, JTSE memperoleh Fasilitas Kredit Investasi 4 dari BCA sebesar tidak lebih dari Rp143.370.874.240 untuk pembiayaan piutang kepada PT Margautama Nusantara (MUN) yang akan digunakan untuk melunasi utang fasilitas *Time Loan Revolving* milik MUN.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

**i. Margautama Nusantara (MUN)
(continued)**

***Time loan non-revolving ("TLNR")
(continued)***

Facility 2 of TLNR is secured by standby letter of credit (SBLC) from Prime Bank which has the investment minimum rating by Rating Agency based on assessment of its long term business prospect and/or Non-Prime Bank which comply with the requirements.

Total interest expenses during 2023 and 2022 amounted to Rp314,013,679,323 and Rp10,826,499,723, respectively.

ii. Makassar Metro Network (MMN)

On April 17, 2017, MMN obtained an Investment Credit Facility 1 from PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") with a maximum amount of Rp69,640,000,000 to refinance the overlay of toll road and the construction of Traffic Information System (TIS).

Total interest expense during 2023 and 2022 amounting to Rp1,213,549,946 and Rp2,246,677,214, respectively.

iii. Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

On December 21, 2015, JTSE obtained an Additional Investment Credit Facility 3 from BCA with a maximum amount of Rp120,558,000,000 to refinance the construction of Tallo Bridge, frontage repairment and other investments. The loan has been fully repaid by the JTSE on December 22, 2023.

On October 19, 2022, JTSE obtained an Additional Investment Credit Facility 4 from BCA with a maximum amount of Rp143,370,874,240 to receivable refinance to PT Margautama Nusantara (MUN) which will be used for MUN's fully loan payment Time Loan Revolving Facility.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

**iii. PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)
(lanjutan)**

Pada tanggal 16 Oktober 2023, JTSE memperoleh Fasilitas Kredit Investasi 5 dari BCA dengan plafon maksimal sebesar Rp96.000.000.000 untuk pembiayaan sebagian denda dan kewajiban atas kasus kurang bayar PPN piutang 2012 dan 2016 serta membiayai *Heavy Maintenance* untuk pekerjaan *upgrading* atau pembenahan perkerasan Jalan Tol Seksi IV.

Beban bunga selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.195.866.513 dan Rp5.514.772.136.

iv. PT Bintaro Serpong Damai (BSD)

Berdasarkan perubahan kedua Perjanjian Kredit yang dinyatakan dalam Akta No. 11 tanggal 17 September 2012, BSD memperoleh Kredit Investasi dari BCA sebesar Rp22.125.000.000. Pada tanggal 17 April 2017, BSD memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BCA dengan plafon maksimal sebesar Rp9.384.000.000 untuk membiayai pembelian ruang kantor di Associate Tower Intermark, Serpong.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 berdasarkan amandemen Akta Perjanjian Kredit No. 69, BSD, memperoleh Fasilitas Kredit Investasi 4 dari BCA sebesar tidak lebih dari Rp750.000.000.000 untuk pembiayaan pengembangan bisnis proyek jalan tol milik BSD.

Pada tanggal 23 Februari 2023, berdasarkan Perubahan Ketigabelas Akta Perjanjian Kredit No. 71, BSD memperoleh Fasilitas Kredit Investasi 5 dari BCA sebesar tidak lebih dari Rp637.315.777.777 untuk pembiayaan pengembangan bisnis proyek jalan tol milik BSD.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

**iii. Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)
(continued)**

On October 16, 2023, the JTSE obtained an Additional Investment Credit Facility 5 from BCA amounting to no more than Rp96,000,000,000 for financing part of the fines and obligations from the underpayment case of VAT receivables 2012 and 2016, and to finance Heavy Maintenance for the upgrading or improvement work on the toll road paving for Section IV.

Interest expense during 2023 and 2022 amounted to Rp18,195,866,513 and Rp5,514,772,136.

iv. Bintaro Serpong Damai (BSD)

Based on the second Amendment of Credit Agreement in Notarial Deed No. 11 dated September 17, 2012, BSD obtained Investment Credit from BCA amounting to Rp22,125,000,000. On April 17, 2017, BSD obtained Investment Credit facility from BCA with a maximum amount Rp9,384,000,000 to finance purchase of office room at Associate Tower Intermark, Serpong.

On August 30, 2021, based on Amendment of Credit Agreement Notarial Deed No. 69, BSD, obtained an extension of Credit Facility 4 from BCA amounting to no more than Rp750,000,000,000 to finance the development of BSD's toll road project business.

On February 23, 2023, based on the Thirteenth Amendment of Credit Agreement Notarial Deed No. 71, BSD obtained an extension of Credit Facility 5 from BCA amounting to no more than Rp637,315,777,777 to finance the development of BSD's toll road project business.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

**iv. PT Bintaro Serpong Damai (BSD)
(lanjutan)**

Perjanjian ini dibuat di hadapan Notaris Hukum, Karim Christina Basoeki, Sarjana Hukum di Jakarta, atas:

- Fasilitas Kredit Investasi 4 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp750.000.000.000. Perubahan tenor menjadi 13 tahun hingga 23 Februari 2036 dengan tingkat suku bunga tetap 7,5% berlaku hingga 30 Agustus 2026 dan untuk periode selanjutnya dikenakan bunga *floating* mengikuti suku bunga Kredit Investasi 5 hingga 29 Januari 2036.
- Penerimaan Fasilitas Kredit Investasi 5 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp637.315.777.777. Tenor terhitung 13 tahun mulai dari penarikan pertama dengan tingkat suku bunga *floating* sampai dengan 29 Februari 2036. Tingkat suku bunga saat awal penarikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 8,25%.

Fasilitas Kredit Investasi 4 dan Fasilitas Kredit Investasi 5, untuk selanjutnya disebut sebagai Fasilitas Kredit Investasi digunakan oleh BSD untuk membiayai proyek penanganan banjir (*flood mitigation*), persimpangan jalan (*weaving area*), dan jalan akses Makassar New Port (MNP), dengan total biaya investasi diluar *Interest During Construction (IDC)* dan *financing fees* sesuai dengan PPJT yang telah disetujui oleh BPJT.

Jumlah bunga yang dikenakan selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp61.960.199.505 dan Rp72.110.295.859. Beban bunga yang dikapitalisasi ke aset takberwujud selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp61.810.505.016 dan Rp71.808.449.077. Bunga yang dicatat sebagai beban pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp149.694.489 dan Rp301.846.782.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

**iv. Bintaro Serpong Damai (BSD)
(continued)**

This agreement made in front of Notary, Karin Christina Basoeki, Bachelor of Law in Jakarta, regarding:

- *Kredit Investasi 4 Facility with the principal amount no more than Rp750,000,000,000, tenor becomes 13 years until February 23, 2036, with fixed interest rate of 7.5% until August 30, 2026 and for the next period subject to floating interest following the interest rate of Kredit Investasi 5 Facility until January 29, 2036.*
- *Acceptance of Kredit Investasi 5 Facility with principal amount no more than Rp637,315,777,777. Tenor becomes 13 years starting from the initial drawdown with floating interest rate of 8.25%. The interest rate at the beginning of the withdrawal to December 31, 2023 is 8.25%.*

Kredit Investasi Facility 4 and Kredit Investasi Facility 5, hereafter stated as Kredit Investasi Facility that used by BSD for financing flood mitigation project, weaving area project, and access road to Makassar New Port (MNP) project, with total investment exclude Interest During Construction (IDC) and financing fees based on PPJT that agreed by BPJT.

The total interest charges during 2023 and 2022 amounted to Rp61,960,199,505 and Rp72,110,295,859 respectively. The interest expenses capitalized to intangible assets for 2023 and 2022 amounted to Rp61,810,505,016 and Rp71,808,449,077 respectively. The interest that charged as expense in 2023 and 2022 amounted to Rp149,694,489 and Rp301,846,782, respectively.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

**iv. PT Bintaro Serpong Damai (BSD)
(lanjutan)**

Keseluruhan pinjaman ini dijamin oleh hak perusahaan jalan tol, seluruh hasil tagihan jalan tol, saham BSD yang dimiliki oleh MUN, penerimaan dari ganti rugi asuransi dari Pemerintah atau Badan Usaha Jalan Tol sesuai ketentuan PPJT, Rekening Penampungan, Rekening Operasi dan *Debt Service Account*, *Letter of Undertaking* (LoU), ruang kantor dan gadai rekening milik BSD.

Perjanjian hutang antara Grup MUN dan BCA memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan Grup MUN memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, terutama untuk:

- a. Mendapatkan pinjaman baru;
- b. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan;
- c. Menjaminkan hutang, harta kekayaan atau *Corporate Guarantee* ke pihak lain.

Selama masa berlaku perjanjian tersebut, Grup harus mempertahankan rasio utang terhadap modal maksimum sebesar 2 kali untuk MUN, MMN, JTSE dan BSD dan *debt service coverage ratio* sebesar minimum 1 kali.

v. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

Pada tanggal 28 November 2016, RPSL, entitas anak EI, mendapat Fasilitas Kredit Investasi dari BCA sebesar Rp138.600.000.000 yang digunakan untuk proyek PLTBm Pontianak dan modal kerja.

Pada tanggal 3 Juli 2020, RPSL mendapat perpanjangan jatuh tempo pembayaran hingga 27 Maret 2028 dan suku bunga berubah menjadi 8,75%.

Agunan pinjaman berupa tanah dan bangunan PLTBm x 15 MW, termasuk mesin dan peralatan, seluruh saham RPSL, piutang dan persediaan.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

**iv. Bintaro Serpong Damai (BSD)
(continued)**

All of loans are secured by the toll road concession right, all revenues from the toll road, shares of BSD owned by MUN, receipt of indemnity insurance from Government or Toll Road Regulator Agency in accordance with PPJT, Escrow Account, the Operating Account and Debt Service Account, a Letter of Undertaking (LoU), office room and the pledge of the account of BSD.

The loan agreement between MUN Group and BCA contains several restrictive covenants which require the MUN Group to obtain prior written consent from BCA, mainly to:

- a. Obtain new loan;
- b. Divest or merge and give guarantees;
- c. Secure debt, property or Corporate Guarantee to other parties.

During the effective period of the agreement, the subsidiaries shall maintain debt to equity ratio at a maximum of 2 times for MUN, JTSE, MMN, and BSD, and a minimum debt service coverage ratio of 1 time.

v. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL)

On November 28, 2016, RPSL, a subsidiary of EI, received an Investment Credit Facility from BCA amounting to Rp138,600,000,000 which was used to PLTBm Pontianak's project and working capital.

On July 3, 2020, RPSL received extension of the maturity date to March 27, 2028 and interest rate has changed to 8.75%.

Loan collateral represents of PLTBm x 15 MW land and building, including machinery and equipment, all RPSL's shares, receivables and inventories.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

v. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) (lanjutan)

Beban bunga selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.742.007.966 dan Rp5.754.826.352.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Jangka Panjang dari Panin dengan maksimum pinjaman sebesar Rp61.000.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan pembelian 3 (tiga) unit ruang kantor dengan total luas 674,6 m² yang terletak di Equity Tower Lantai 38, Jakarta. Pinjaman ini dijamin dengan ruang kantor yang dibeli melalui pinjaman ini.

Perjanjian utang antara Perusahaan dan Panin memuat beberapa pembatasan yang mengharuskan Perusahaan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin untuk:

- a) menggunakan fasilitas kredit selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya;
- b) melakukan perluasan atau penyempitan usaha.

Beban bunga selama tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp921.199.475 dan Rp1.819.561.295.

PT Bank Mandiri (Persero) ("Mandiri") Tbk

Pada tanggal 18 Desember 2023, PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC") dan PT Sarana Catur Tirtakelola ("SCTK") memperoleh fasilitas kredit pinjaman berjangka dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") sesuai dengan Akta No. 17 dari Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., MKn., notaris di Jakarta dengan maksimum pinjaman sebesar Rp230.000.000.000.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

v. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari (RPSL) (continued)

Interest expenses during 2023 and 2022 amounting to Rp4,742,007,966 and Rp5,754,826,352, respectively.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin)

On June 13, 2014, the Company obtained a long-term loan facility from Panin with a maximum loan of Rp61,000,000,000. The loan was used to finance the purchase of 3 (three) units of office space with a total area of 674.6 m² located in Equity Tower 38th floor, Jakarta. The loan is secured by office space purchased through this loan.

Loan agreement between the Company and Panin imposes several restrictions that require the Company to obtain prior written approval from Panin for:

- a) using the credit facility not in accordance with the agreed loan purpose;
- b) make a business expansion or reduction.

Interest expense for 2023 and 2022 amounted to Rp921,199,475 and Rp1,819,561,295, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) ("Mandiri") Tbk

On December 18, 2023, PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC") and PT Sarana Catur Tirtakelola ("SCTK") obtained a term loan credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") based on Deed No. 17 by Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., MKn. notary in Jakarta with a maximum loan of Rp230,000,000,000.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman Bank (lanjutan)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)
(lanjutan)**

Fasilitas tersebut terdiri dari:

- Tranche A sebesar Rp130.000.000.000 yang wajib digunakan SCKT untuk pembayaran kembali utang bank, membiayai kebutuhan belanja modal, dan membayar pinjaman pemegang saham.
- Tranche B sebesar Rp100.000.000.000 yang wajib digunakan DCC untuk membayar pinjaman pemegang saham dan membiayai belanja modal.

Jangka waktu pinjaman adalah 72 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan + margin 1,75% per tahun setiap 3 bulan.

Pinjaman ini dijamin oleh seluruh piutang usaha masing-masing Debitur, seluruh saham milik Potum dalam SCKT dan DCC, seluruh saham milik Tuan Agus Rahardja Madjiah dan Nyota Hajjah Ratna Dewi Panduwinata dalam SCKT, seluruh saham milik Tuan David Suryabara dalam DCC, seluruh rekening yang dimiliki SCKT dan DCC, Water Treatment Plant (WTP) milik SCKT dan JSNM, pipa milik STR, *letter of undertaking (LoU)*, tanah milik SCKT, jaminan perusahaan dari Potum, dan jaminan perorangan dari Tuan Agus Rahardja Madjiah dan Nyonya Hajjah Ratna Dewi Panduwinata.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, DCC dan SCKT telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp100.000.000.000 dan Rp107.393.346.490.

DCC dan SCKT telah melakukan pembayaran biaya provisi bank masing-masing sebesar Rp1.000.000.000 dan Rp1.300.000.000.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

a. Bank Loans (continued)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)
(continued)**

The facility consists of:

- Tranche A of Rp130,000,000,000 which should be used by SCKT to repay the remaining bank loan (refinancing), to finance SCKT's capital expenditure, and to repay the shareholder's loan.
- Tranche B of Rp100,000,000,000 which should be DCC to repay the shareholder's loan and finance DCC's capital expenditure.

The term of the loan is 72 months from the date of signing of the Credit Agreement This facility is subjected to an interest rate of 3-months JIBOR + margin 1.75% per year every 3 months.

This loan is secured by all trade receivables of each Debtor, all shares owned by Potum in SCKT and DCC, all shares owned by Mr. Agus Rahardja Madjiah and Mrs. Hajjah Ratna Dewi Panduwinata in SCKT, all shares owned by Mr. David Suryabara in DCC, all accounts owned by SCKT and DCC, Water Treatment Plant (WTP) owned by SCKT and JSNM, pipes owned by STR, *letter of undertaking (LoU)*, land owned by SCKT, company guarantee from Potum, and individual guarantee from Mr. Agus Rahardja Madjiah and Mrs. Hajjah Ratna Dewi Panduwinata.

As of December 31, 2023, DCC and SCKT has make a drawdown of loan amounting to Rp100,000,000,000 and Rp107,393,346,490.

DCC and SCKT has paid bank provision fee amounting to Rp1,000,000,000 and Rp1,300,000,000, respectively.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Pinjaman Sindikasi

PT Makassar Metro Network (MMN)

Pada tanggal 30 Juli 2018, MMN, entitas anak tidak langsung, memperoleh Fasilitas Kredit Investasi dari sindikasi BCA dan Sulselbar (Kreditur) dengan jumlah plafon sebesar Rp1.547.487.000.000 dengan komponen KI pokok sebesar maksimum Rp1.451.378.000.000 dan KI-Interest During Construction sebesar maksimum Rp96.109.000.000.

Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembangunan proyek jalan tol layang Pettarani yang merupakan perpanjangan jalan tol MMN yang sudah ada. Fasilitas ini berjangka waktu maksimal 12 (dua belas) tahun, dengan suku bunga pinjaman yang dihitung berdasarkan suku bunga deposito tertimbang periode 1 bulanan ditambah margin per tahun sebesar masing-masing 5,051% selama masa konstruksi dan 4,901% ketika sudah beroperasi. Pembayaran Fasilitas Kredit dilakukan secara bulanan setelah masa tenggang sampai dengan 3 tahun, dengan persentase pembayaran pokok Fasilitas Kredit sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati.

Pinjaman ini dijamin oleh hak pengusahaan jalan tol, seluruh hasil tagihan jalan tol seksi I, II, dan III saham entitas anak yang dimiliki oleh MMN, penerimaan dari ganti rugi asuransi dari Pemerintah atau Badan Usaha Jalan Tol yang baru sesuai ketentuan PPJT, Rekening Escrow, Operating Account dan Debt Service Account dan Letter of Undertaking (LoU) MMN.

Perjanjian pinjaman antara MMN dan Kreditur memuat beberapa pembatasan, yang mengharuskan entitas anak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, terutama untuk:

1. Mendapatkan pinjaman baru;
2. Melakukan divestasi atau merger dan memberikan jaminan;
3. Menjaminkan utang, harta kekayaan atau Corporate Guarantee.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

b. Syndicated Loan

PT Makassar Metro Network (MMN)

On July 30, 2018, MMN, an indirect subsidiary, obtained Credit Investment from syndication BCA and Sulselbar (Creditor) with a maximum amount of Rp1,547,487,000,000 with component of principal Investment Credit with a maximum amount of Rp1,451,378,000,000 and Investment Credit-Interest During Construction with a maximum of Rp96,109,000,000.

This facility aims to finance the construction of elevated toll road Pettarani which is an extension of existing MMN toll road. This facility has a maximum period of 12 (twelve) years, with loan interest rates calculated based on the one-month weighted average of time deposit added with margin rate per year of 5.051% during construction and 4.901% when already in operation. Payment of Credit Facilities is carried out every month after a grace period of up to 3 years, with the percentage of payment of the Credit Facility principal in accordance with the agreed installment schedule.

The loan is secured by the toll road concession rights, all revenues from toll road section I, II and III, subsidiary shares owned by MMN, receipt of indemnity insurance from Government or new Toll Road in accordance with PPJT, Escrow Account, the Operating Account and Debt Service Account and a Letter of Undertaking (LoU) of MMN.

The loan agreement between MMN and Creditor contains several restrictive covenants which require subsidiary to obtain prior written consent from BCA, mainly to:

1. Obtain new loan;
2. Divest or merge and give guarantees;
3. Secure debt, property or Corporate Guarantee to other parties.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

**PT Makassar Metro Network (MMN)
(lanjutan)**

Selama masa berlakunya perjanjian tersebut, MMN harus mempertahankan *debts to equity ratio* maksimum sebesar 2 kali dan *debt service coverage ratio* sebesar minimum 1 kali.

Jumlah beban bunga selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp121.633.786.398 dan Rp106.070.198.295.

c. Lembaga Keuangan

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

Pada tanggal 29 Desember 2020, Potum, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melalui PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Penjamin dengan jumlah pokok tidak lebih dari Rp95.000.000.000.

Fasilitas tersebut terdiri dari:

- Tranche A Rp67.500.000.000 untuk melunasi sisa fasilitas kredit ICBC termasuk pembayaran bunga, penalti, dan biaya lain terkait pelunasan Fasilitas Kredit ICBC.
- Tranche B Rp22.750.000.000 untuk melunasi sebagian pinjaman pemegang saham SCTK kepada Potum.
- Tranche C Rp3.000.000.000 untuk mendanai sebagian jumlah minimal *debt service reserve account*.
- Tranche D Rp1.750.000.000 untuk membayar seluruh biaya dan pengeluaran terkait pemberian Fasilitas.

Perjanjian pinjaman antara Potum dan IIF memiliki tingkat bunga sebesar 8,85% (JIBOR 3 bulan dan margin 5,1%) dan dengan jaminan sebagai berikut:

- Gadai saham
- Surat Kesanggupan
- Jaminan perusahaan
- Jaminan gadai rekening atas rekening transaksi
- Hak Tanggungan
- Dokumen Jaminan Fidusia
- Perjanjian Pengalihan

23. LONG-TERM LOANS (continued)

b. Syndicated Loan (continued)

**PT Makassar Metro Network (MMN)
(continued)**

During the effective period of the agreement, MMN shall maintain *debts to equity ratio* at a maximum of 2 times and a minimum *debt service coverage ratio* of 1 time.

Total interest expense during 2023 and 2022 amounting to Rp121,633,786,398 and Rp106,070,198,295, respectively.

c. Financial Institution

PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)

On December 29, 2020, Potum, a subsidiary, obtained a loan facility from PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) through PT Bank Central Asia Tbk as the Guarantor Agent with a principal amount of no more than Rp95,000,000,000.

The facility consists of:

- Tranche A Rp67,500,000,000 to repay the remaining ICBC credit facilities including interest payments, penalties, and other costs related to the repayment of ICBC Credit Facility.
- Tranche B Rp22,750,000,000 to repay a portion of SCTK shareholders' loans to Potum.
- Tranche C Rp3,000,000,000 to fund a portion of the minimum amount of *debt service reserve account*.
- Tranche D Rp1,750,000,000 to pay all costs and expenses related to the provision of facilities.

The loan agreement between Potum and IIF has bear interest at 8.85% (3-month JIBOR and a margin of 5.1%) with the following guarantees:

- Mortgage shares
- Letter of Ability
- Company guarantee
- Mortgage guarantee of account on transaction account
- Dependent Rights
- Fiduciary Guarantee Document
- Transfer Agreement

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Lembaga Keuangan (lanjutan)

**PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)
(lanjutan)**

Pada tanggal 6 Januari 2021, sesuai dengan Perjanjian Novasi atas Pinjaman, Potum mengalihkan pinjaman tersebut kepada SCTK, entitas anak tidak langsung. Maka segala hak dan kewajiban beralih secara hukum kepada SCTK sejak tanggal efektif sampai dengan 10 tahun ke depan. Tanggal efektif tersebut diartikan saat setelah syarat-syarat perjanjian novasi terpenuhi dan tidak boleh lebih dari 12 bulan setelah tanggal perjanjian tersebut.

Perjanjian ini berlaku efektif dalam hal syarat-syarat di bawah ini telah terpenuhi:

- i. Penyerahan semua persetujuan korporasi SCTK,
- ii. Penyerahan SIPA (Izin Pengusahaan SDA berdasarkan keputusan menteri Pekerjaan umum dan perumahan rakyat no 364/KPTS/M/2019) yang telah diperbarui mengambil air baku minimal 350 liter/sec dari sungai Cijung,
- iii. Penyerahan semua persetujuan korporasi dari Pemilik Kewajiban,
- iv. Pemberi Pinjaman telah menerima pendapat hukum,
- v. Pembukaan rekening-rekening BCA oleh SCTK yang akan menggantikan rekening pembayaran kewajiban dan rekening cadangan pembayaran kewajiban setelah terjadinya novasi pinjaman.

Beban bunga selama tahun 2023 sebesar Rp10.448.120.931 (2022 : Rp8.323.169.770)

Pinjaman ini telah dilunasi oleh SCTK pada bulan 21 Desember 2023.

PT Inpola Meka Energi (IME)

Pada tanggal 22 November 2021, IME, entitas anak tidak langsung, memperoleh fasilitas pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) dengan jumlah pokok pembiayaan tidak lebih dari Rp375.000.000.000.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

c. Financial Institution (continued)

**PT Sarana Catur Tirta Kelola (SCTK)
(continued)**

On January 6, 2021, in accordance with the Novation Loan Agreement, Potum transferred the loan to SCTK, an indirect subsidiary. Therefore, all rights and obligations are legally transferred to SCTK from the effective date up to the next 10 years. The effective date shall be defined as after the terms of the novation agreement are fulfilled and no longer than 12 months after the date of such agreement.

The agreement is effective in the event that the following conditions have been fulfilled:

- i. Submission of all SCTK corporate approvals,
- ii. Submission of SIPA (SDA Business License based on the decree of the Minister of Public Works and Public Housing no. 364/KPTS/M/2019) which has been updated to take raw water at least 350 litre/sec from Cijung river,
- iii. Submission of all corporate approvals from the Liability Owner,
- iv. The Lender has received a legal opinion,
- v. Opening of BCA accounts by SCTK that will replace the payment account obligations and reserve account payment obligations after the occurrence of loan novation.

Interest expense during 2023 amounted to Rp10,448,120,931 (2022: Rp8,323,169,770)

The loans have been fully repaid by SCTK in December 21, 2023.

PT Inpola Meka Energi (IME)

On November 22, 2021, IME, an indirect subsidiary, obtained a loan facility from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) based on Musyarakah Mutanaqisah Principle with a principal amount of no more than Rp375,000,000,000.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Lembaga Keuangan (lanjutan)

PT Inpolo Meka Energi (IME) (lanjutan)

Fasilitas tersebut terdiri dari:

- (i) Tranche A Rp222.049.000.000 untuk refinancing fasilitas pembiayaan eksisting di Bank BCA;
- (ii) Tranche B Rp19.581.000.000 untuk pelunasan biaya konstruksi proyek dan pembangunan sarana dan prasarana proyek;
- (iii) Tranche C Rp67.370.000.000 untuk refinancing utang kepada pemegang saham sebagai komposisi pembiayaan maksimum 77% dari RAB Proyek atau realisasi biaya proyek.
- (iv) Tranche D Rp66.000.000.000 untuk pembangunan jalur transmisi menuju Gardu Induk 150 kV.

Pada tanggal 31 Desember 2023, IME telah menggunakan fasilitas dari Tranche A dan C.

Perjanjian pinjaman antara IME dan SMI memiliki jangka waktu 9 tahun dan nilai bagi hasil yang dihitung sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin sebesar 4,25%, dan dengan jaminan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan berikut mesin dan perlengkapannya yang tertanam di atas lahan proyek.
- Seluruh tagihan dan pendapatan usaha yang dimiliki nasabah dari PT PLN (persero).
- Hasil klaim asuransi.
- Seluruh saham IME yang dimiliki oleh pemegang saham.
- Sejumlah dana pada rekening pengumpulan.
- Akta Pernyataan Kesanggupan dari PT Nusantara Infrastructure Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Imbalan bagi hasil selama tahun 2023 adalah sebesar Rp18.424.368.381 (2022: Rp18.445.263.357)

Kepatuhan atas Syarat Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup telah memenuhi persyaratan pinjaman jangka panjang seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

23. LONG-TERM LOANS (continued)

c. Financial Institution (continued)

PT Inpolo Meka Energi (IME) (continued)

These facilities consist of:

- (i) Tranche A Rp222,049,000,000 for refinancing existing financing facilities at Bank BCA;
- (ii) Tranche B Rp19,581,000,000 for the settlement of project construction costs and the construction of project facilities and infrastructure;
- (iii) Tranche C Rp67,370,000,000 for refinancing debt to shareholders as a maximum financing composition of 77% of the Project RAB or project cost realization.
- (iv) Tranche D Rp66,000,000,000 for the construction of a transmission line to the "Gardu Induk" 150 kV.

On December 31, 2023, IME has utilized facilities from Tranche A and C.

The loan agreement between IME and SMI has a term of 9 years and the value for profit sharing is calculated at 3 months JIBOR plus a margin of 4.25%, and with the following guarantees:

- Land and buildings along with machinery and equipment embedded on the project land.
- All bills and operating income owned by customers from PT PLN (Persero).
- Insurance claim results.
- All IME shares owned by shareholders.
- Amount of funds in the collection account.
- Deed of Commitment Statement from PT Nusantara Infrastructure Tbk and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Profit sharing for 2023 amounted to Rp18,424,368,381 (2022: Rp18,445,263,357).

Compliance with Loan Covenants

As of December 31, 2023, the Group has fulfilled the long-term loan requirements as stated in the credit agreement.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

24. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Adimitra Transferindo (Biro Administrasi Efek) adalah sebagai berikut:

24. SHARE CAPITAL

The composition of Company's shareholders as of December 31, 2023 and 2022 based on the Shareholders List provided by PT Adimitra Transferindo (Securities Administration Agency) is as follows:

31 Desember 2023/December 31, 2023

Pemegang saham	Seri/ Series	Saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Bosowa Utama	A	1	0,00%	35	PT Bosowa Utama
	B	2.727.291	0,01%	190.910.370	
		2.727.292	0,01%	190.910.405	
PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS)	B	13.220.263.850	74,65%	925.418.469.500	PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS)
PT Indonesia Infrastructure Finance	B	1.451.267.500	8,20%	101.588.725.000	PT Indonesia Infrastructure Finance
Lain-lain (masing-masing kurang dari 5%, termasuk masyarakat)	B	3.036.449.552	17,14%	212.551.468.640	Others (each below 5%, including public)
Jumlah		17.710.708.194	100,00%	1.239.749.573.545	Total

31 Desember 2022/December 31, 2022

Pemegang saham	Seri/ Series	Saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Bosowa Utama	A	1	0,00%	35	PT Bosowa Utama
	B	2.727.291	0,01%	190.910.370	
		2.727.292	0,01%	190.910.405	
PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI)	B	13.220.263.850	74,65%	925.418.469.500	PT Metro Pacific Tollways Indonesia (MPTI)
PT Indonesia Infrastructure Finance	B	1.771.071.131	10,00%	123.974.979.170	PT Indonesia Infrastructure Finance
Lain-lain (masing-masing kurang dari 5%, termasuk masyarakat)	B	2.716.645.921	15,34%	190.165.214.470	Others (each below 5%, including public)
Jumlah		17.710.708.194	100,00%	1.239.749.573.545	Total

Pada 13 Desember 2023, berdasarkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham Bersyarat (CSPA) yang dilaksanakan oleh PT Metro Pacific Tollways Indonesia (penjual atau MPTI) dan PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (pembeli atau MPTIS), MPTI menyetujui untuk menjual dan mentransfer seluruh sahamnya sebanyak 13.220.263.850 lembar saham kepada MPTIS. Pengalihan saham ini diselesaikan melalui Bursa Efek Indonesia (IDX) pada 22 Desember 2023.

On December 13, 2023, based on the Conditional Share Sale and Purchase Agreement (CSPA) executed by PT Metro Pacific Tollways Indonesia (the seller or MPTI) and PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (the purchaser or MPTIS), MPTI agreed to sell and transfer its entire stake of 13,220,263,850 shares to MPTIS. The share transfer was completed through the Indonesia Stock Exchange (IDX) on December 22, 2023.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pada tahun 2013, Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham biasa sebanyak 385.454.000 saham melalui IDX senilai Rp84.522.927.500. Pembelian kembali saham ini ditujukan untuk menstabilkan harga saham Perusahaan akibat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1-2/SEOJK.04/2013. Perusahaan memiliki hak untuk menerbitkan kembali saham-saham tersebut di masa mendatang. Seluruh saham yang diterbitkan Perusahaan telah disetor penuh. Pembelian ini dicatat pada akun "Modal saham yang diperoleh kembali".

24. SHARE CAPITAL (Continued)

In 2013, the Company repurchased its common shares totaling to 385,454,000 shares through IDX amounting to Rp84,522,927,500. The transaction has a purpose to stabilize the Company's shares price which was caused by a significant fluctuation of market condition according to the Command Letter of Financial Service Authority (OJK) No. 1-2/SEOJK.04/2013. The Company has rights to reissue the treasury stock in the future. All shares are issued and fully paid by the Company. This transaction has recorded in account "Treasury stock".

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR - NETO

25. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL - NET

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Agio saham	1.958.166.045	1.958.166.045	Additional paid-in capital
Agio saham dari penawaran umum perdana pada tahun 2001	6.000.000.000	6.000.000.000	Additional paid-in capital from the initial public offering in 2001
Biaya emisi efek dari penawaran umum perdana tahun 2001	(1.298.793.524)	(1.298.793.524)	Shares issuance costs on initial public offering in 2001
Agio saham dengan HMETD sebesar 8.476.500.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham dan harga pelaksanaan Rp88 per saham pada tahun 2010	183.084.950.970	183.084.950.970	Additional paid-in capital 8,476,500,000 series B shares through issue shares with pre-emptive rights with par value of Rp70 per share at offering price of Rp88 per share in 2010
Biaya emisi efek dari penawaran umum terbatas tahun 2010	(1.306.306.218)	(1.306.306.218)	Shares issuance costs on initial public offering in 2010
Agio saham dengan HMETD sebesar 2.475.036.314 saham Seri B dengan nilai nominal Rp70 per saham dan harga pelaksanaan Rp200 per saham pada tahun 2018	321.754.720.820	321.754.720.820	Additional paid-in capital 2,475,036,314 series B shares through issue shares with pre-emptive rights with par value of Rp70 per share at offering price of Rp200 per share in 2018
Biaya emisi efek dari penawaran umum terbatas tahun 2018	(8.237.236.338)	(8.237.236.338)	Shares issuance costs on the limited public offering in 2018
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tahun 2018	(32.799.735.420)	(32.799.735.420)	Difference in transaction value with entities under common control in 2018
Selisih nilai transaksi entitas Sepengendali tahun 2023 (catatan 1d)	1.144.435.156.789	-	Difference in transaction value with entities under common control in 2023 (notes 1d)
Jumlah	1.613.590.923.124	469.155.766.335	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

26. DIVIDEN, PENCADANGAN SALDO LABA, DAN KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Dividen dan pencadangan saldo laba

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang telah disahkan dalam Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 51 tanggal 24 Mei 2023, para pemegang saham menyetujui penyisihan saldo laba sebesar Rp724.390.301 sebagai dana cadangan wajib dan tidak adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021 yang telah disahkan dalam Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 3 tanggal 11 Mei 2022, para pemegang saham menyetujui penyisihan saldo laba sebesar Rp59.892.459 sebagai dana cadangan wajib dan tidak adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan.

Komponen ekuitas lainnya

Komponen ekuitas lainnya merupakan selisih atas nilai transaksi dengan entitas nonpengendali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp464.301.873.208 dan Rp470.026.595.245.

Perubahan nilai transaksi dengan entitas nonpengendali selama tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Saldo awal	470.026.595.245	469.420.386.634
Mutasi tahun berjalan:		
Efek perubahan komposisi ekuitas di IME (entitas anak EI) (Catatan 1d)	(5.724.722.037)	-
Efek perubahan komposisi ekuitas di MMN (entitas anak MUN) (Catatan 1d)	-	606.208.611
Total mutasi	(5.724.722.037)	606.208.611
Saldo akhir	464.301.873.208	470.026.595.245

26. DIVIDEND, OTHER EQUITY COMPONENT, AND APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

Dividend and appropriation of retained earnings

Based on Shareholders' Annual General Meeting for the financial year 2022 which has been legalized by Notarial Deed No.51 of Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., dated May 24, 2023, the shareholders approved the appropriation of retained earnings to general reserve amounting to Rp724,390,301 and no distribution of dividends to the Company's shareholders.

Based on Shareholders' Annual General Meeting for the financial year 2021 which has been legalized by Notarial Deed No.3 of Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., dated May 11, 2022, the shareholders approved the appropriation of retained earnings to general reserve amounting to Rp59,892,459 and no distribution of dividends to the Company's shareholders.

Other equity components

Other equity component represents difference in value transactions with non-controlling interests as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp464,301,873,208 and Rp470,026,595,245, respectively.

Changes in value transactions with non-controlling interests on 2023 and 2022 are as follow:

Beginning balance
Movement for the year:
Effect from changes in equity composition in IME (EI's subsidiary) (Notes 1d)
Effect from changes in equity composition in MMN (MUN's subsidiary) (Notes 1d)
Total movement
Ending balance

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

27. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

27. NON-CONTROLLING INTERESTS

31 Desember 2023/December 31, 2023

Penyertaan langsung	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan modal disetor dari kepentingan non-pengendali/ Additional paid in capital from non-controlling interest	Dampak perubahan komposisi ekuitas/ Effect from changes in equity composition	Dividen	Bagian laba (rugi) entitas anak/ Equity in net income (loss) of subsidiaries	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income	Dekonsolidasi*/ Deconsolidation*	Saldo akhir/ Ending Balance	Direct ownership
PT Margautama Nusantara*	687.917.097.021	-	-	(3.321.000.000)	(10.183.724.011)	12.582.333	(674.424.955.343)	-	PT Margautama Nusantara*
PT Potum Mundi Infranasantara	40.839.816.356	-	-	-	1.703.584.633	1.117.290	-	42.544.528.279	PT Potum Mundi Infranasantara
PT Energi Infranasantara	64.023.731.097	-	(39.837.594.163)	-	6.352.031.220	(256.863)	-	30.537.911.291	PT Energi Infranasantara
PT Marga Metro Nusantara	18.843.967.052	4.035.000.000	-	-	90.082	-	-	22.879.057.134	PT Marga Metro Nusantara
Jumlah	811.624.611.526	4.035.000.000	(39.837.594.163)	(3.321.000.000)	(2.128.008.076)	13.442.760	(674.424.955.343)	95.961.496.704	Total

*) Termasuk pengurangan akibat dekonsolidasi MUN (Catatan 1d)/Including deduction from the deconsolidation of MUN (Note 1d)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Penyertaan langsung	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan modal disetor dari kepentingan pengendali/ Additional paid in capital from controlling interest	Dampak perubahan komposisi ekuitas/ Effect from changes in equity composition	Dividen/ Dividend	Bagian laba (rugi) entitas anak/ Equity in net income (loss) of subsidiaries	Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	Direct ownership
PT Margautama Nusantara*	645.544.634.782	-	(606.208.611)	-	44.644.782.497	(1.666.111.647)	687.917.097.021	PT Margautama Nusantara
PT Potum Mundi Infranasantara	39.612.889.808	-	-	-	1.376.723.949	(149.797.401)	40.839.816.356	PT Potum Mundi Infranasantara
PT Energi Infranasantara	60.244.673.014	-	-	-	3.804.377.847	(25.319.764)	64.023.731.097	PT Energi Infranasantara
PT Marga Metro Nusantara	18.644.049.686	-	-	-	199.917.366	-	18.843.967.052	PT Marga Metro Nusantara
Jumlah	764.046.247.290	-	(606.208.611)	-	50.025.801.659	(1.841.228.812)	811.624.611.526	Total

*Dampak perubahan komposisi ekuitas sebesar Rp606.208.611 merupakan dampak perubahan kepemilikan saham MUN di MMN (Catatan 1d)/ Effect from changes in equity composition of Rp606,208,611 is Effect from changes of MUN's share ownership in MMN.

28. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

28. NET EARNING PER SHARE

Rincian perhitungan laba tahun berjalan per saham adalah sebagai berikut:

Details of profit for the year per share computation are as follows:

	(Rugi)/laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ (Loss)/profit for the year attributable to the owner of the parent	Jumlah rata- rata tertimbang saham/ Weighted average number of shares	(Rugi)/laba per saham/ (Loss)/Earning per share	For the year ended
Tahun yang berakhir				Desember 31, 2023
31 Desember 2023	(233.744.670.872)	17.710.708.194	(13,20)	Desember 31, 2022
31 Desember 2022	72.439.030.119	17.710.708.194	4,09	

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal-tanggal pelaporan. Oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

The Company has no outstanding potential dilutive ordinary shares at reporting dates. Accordingly, no diluted earnings per share are calculated and presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

29. PENDAPATAN DAN PENJUALAN

29. REVENUES AND SALES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2023	2022	
<u>Pendapatan usaha dan penjualan</u>			<u>Revenues and sales</u>
Pendapatan jalan tol			Toll road revenues
Ruas Pondok Aren - Serpong	296.266.539.500	258.119.517.500	Section Pondok Aren - Serpong
Ruas Tallo - Bandara Hasanuddin	134.771.068.000	127.961.837.500	Section Tallo - Hasanuddin Airport
Ruas Pelabuhan Soekarno Hatta - Pettarani	203.846.348.500	196.745.866.000	Section Soekarno Hatta Port- Pettarani
Penjualan listrik	194.799.044.874	171.265.440.601	Electricity sales
Penjualan air bersih	74.479.947.287	65.587.181.365	Treated water sales
Pendapatan jasa manajemen	-	2.758.041.887	Management fee income
Jumlah	904.162.948.161	822.437.884.853	Total
<u>Pendapatan usaha lainnya:</u>			<u>Other operating revenue:</u>
Pendapatan iklan dan sewa lahan	13.462.204.808	15.937.017.549	Advertisement and land rent income

Pendapatan Jalan Tol

Toll Road Revenues

Pendapatan jalan tol dihitung dari jumlah kendaraan yang lewat dikalikan dengan tarif menurut golongan kendaraan. Tarif tol yang ditetapkan didasarkan pada:

Toll road revenue is calculated from total passing vehicles multiply with the vehicles group tariff. Toll tariff is set based on:

- Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005 sebagai pengganti PP No. 8 Tahun 1990 dan PP No. 40 Tahun 2001.

- Law No. 38 Year 2004 which superseded Law No. 13 Year 1980 concerning on Roads.
- The Government Regulation (PP) No. 15 Year 2005 which superseded PP No. 8 Year 1990 and PP No. 40 Year 2001.

Undang-undang dan PP tersebut merupakan landasan hukum perhitungan/penyesuaian tarif tol yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

The above Law and PP are the legal basis for calculation/adjustment of the toll tariff which then issued by the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia.

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2005. Pasal 66 Ayat (1) dinyatakan: "Tarif dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan unsur-unsur kelayakan investasi" dan Pasal 66 Ayat (2): "Besar keuntungan biaya operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan pada selisih biaya operasi kendaraan dan nilai waktu pada jalan tol dengan lintas alternatif jalan umum yang ada".

Under PP No. 15 year 2005. Article 66 Paragraph (1) stated: "The tariff is calculated based on the ability to pay by the toll road users, gains in vehicle operating costs, and feasibility of investment" and Article 66 Paragraph (2): "Gain in vehicles operating costs referred to in Paragraph (1) shall be calculated based on the difference in vehicle operating costs and the value of time on the toll road with an alternative cross existing public road".

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

29. PENDAPATAN DAN PENJUALAN (lanjutan)

Pendapatan Jalan Tol (lanjutan)

Rincian tarif tol terjauh pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Ruas Jalan Tol/Toll Road Section	31 Desember 2023 dan 2022/December 31, 2023 and 2022				
	Golongan/Class				
	I	II	III	IV	V
Biringkanaya (Makassar)	10.000	17.000	17.000	25.000	25.000
Ujung Pandang Seksi I dan II	10.000	14.000	14.000	19.000	19.000
Pondok Ranji dan Pondok Aren	7.000	13.500	13.500	16.000	16.000

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

Pada 15 Desember 2021, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 1485/KPTS/M/2021 tentang "Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Seksi IV", menetapkan penyesuaian tarif tol pada ruas tol JTSE, entitas anak tidak langsung.

PT Makassar Metro Network (MMN)

Pada 6 Mei 2021, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 552/KPTS/M/2021 tentang "Tarif Tol Pada Jalan Tol Layang Pettarani", menetapkan tarif tol pada ruas tol layang Pettarani milik MMN, entitas anak tidak langsung.

PT Bintaro Serpong Damai (BSD)

Pada 31 Januari 2020, Menteri Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 1233/KPTS/M/2019 tentang "Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Pondok Aren dan Pondok Ranji", menetapkan penyesuaian tarif tol pada ruas tol BSD, entitas anak tidak langsung.

Pendapatan Air Bersih

Penjualan air bersih merupakan penjualan air bersih dari SCTK dan DCC, entitas-entitas anak tidak langsung.

29. REVENUES AND SALES (continued)

Toll Road Revenues (continued)

The details of the farthest toll tariffs as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE)

On December 15, 2021, the Minister of Public Works through his Decision Letter No. 1485/KPTS/M/2021. on "Adjustment Rate Toll Road in Section IV", set the adjustment of toll rates on toll roads of JTSE, an indirect subsidiary.

PT Makassar Metro Network (MMN)

On May 6, 2021, the Minister of Public Works through his Decision Letter No. 552/KPTS/M/2021. on "Toll Rates on Elevated Toll Road Pettarani", set the toll rates on elevated toll roads Pettarani of MMN, an indirect subsidiary.

PT Bintaro Serpong Damai (BSD)

On January 31, 2020, the Minister of Public Works through his Decision Letter No. 1233/KPTS/M/2019. on "Adjustment Rate Toll Road Pondok Aren and Pondok Ranji", set the adjustment of toll rates on toll roads of BSD, an indirect subsidiary.

Treated Water Sales

Treated water sales represent the sale of treated water from SCTK and DCC, indirect subsidiaries.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

29. PENDAPATAN DAN PENJUALAN (lanjutan)

Penjualan Listrik

Penjualan listrik merupakan penjualan listrik dari RPSL dan IME.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, rincian penjualan dari pelanggan dengan total penjualan kumulatif individual melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2023		2022	
	Total/ Total	Persentase terhadap Total Penjualan Konsolidasian/ Percentage to Total Consolidated Sales	Total/ Total	Persentase terhadap Total Penjualan Konsolidasian/ Percentage to Total Consolidated Sales
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	194.799.044.874	11,55%	171.265.440.601	12,21%

PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero)

Penjualan di atas dilakukan oleh RPSL dan IME.

29. REVENUES AND SALES (continued)

Electricity Sales

Electricity sales represent the sale of electricity from RPSL and IME.

During the year ended December 31, 2023, the details of sales from customers with individual cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated sales are as follows:

The sales above were made by RPSL and IME.

30. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh entitas anak dalam pembangunan jalan tol baru dan peningkatan kapasitas jalan tol serta untuk peningkatan kapasitas produksi air bersih. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yang mana seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

30. CONSTRUCTION REVENUES AND COSTS

Construction revenues are the compensation of the service recognized by the subsidiaries for building new toll roads and to upgrade toll roads capacity and upgrade production capacity of clean water. Construction revenues measured using cost method, which added up to all costs directly attributable to the acquiring costs of the assets.

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Pendapatan konstruksi			Construction revenues
Penyelenggara jalan tol	753.415.122.389	556.500.602.599	Toll road operator
Hak penyediaan air bersih	15.951.922.802	7.494.591.383	Water supply concession rights
Sub-jumlah	769.367.045.191	563.995.193.982	Sub-total
Beban konstruksi			Construction costs
Penyelenggara jalan tol	(753.415.122.389)	(556.500.602.599)	Toll road operator
Hak penyediaan air bersih	(15.951.922.802)	(7.494.591.383)	Water supply concession rights
Sub-jumlah	(769.367.045.191)	(563.995.193.982)	Sub-total
Jumlah	-	-	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

31. BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN

31. DIRECT COSTS AND COST OF SALES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Beban langsung jalan tol			Direct costs of toll road
Beban pengumpul pendapatan jalan tol	37.050.751.063	34.871.435.984	Toll road revenue collector cost
Beban pemeliharaan jalan tol	24.087.008.343	23.214.153.185	Toll road maintenance cost
Beban pelayanan pemakai jalan tol	14.371.329.584	13.297.383.988	Toll road user services cost
Sub-jumlah	75.509.088.990	71.382.973.157	Sub-total
Beban pokok penjualan tenaga listrik	92.566.406.507	91.623.273.987	Cost of sales of electricity
Amortisasi aset takberwujud	80.301.728.971	76.695.762.407	Amortization of intangible assets
Beban pokok pengolahan air	17.969.686.347	17.379.776.882	Cost of water treatment
Jumlah	266.346.910.815	257.081.786.433	Total

Rincian beban langsung dan beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

Detail of direct costs and cost of sales are as follow:

a. Beban pengumpul pendapatan tol

a. Toll road revenue collector expenses

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Gaji, tunjangan, dan jasa pengumpul tol	15.887.075.453	14.724.899.140	Salaries, allowance, and collector toll fee
Beban pengoperasian gerbang tol Pondok Ranji	14.596.071.864	13.322.360.509	Operating expenses of Pondok Ranji toll gate
Bahan bakar, listrik, dan air	3.101.266.306	3.105.797.383	Fuel, electricity, and water
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	2.258.997.043	2.541.365.535	Depreciation of fixed assets (Notes 12)
Pemeliharaan dan perbaikan Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	601.790.422	867.615.044	Maintenance and repairment
	605.549.975	309.398.373	Others (each below Rp500,000,000)
Jumlah	37.050.751.063	34.871.435.984	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

31. BEBAN LANGSUNG DAN BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

Rincian beban langsung dan beban pokok penjualan adalah sebagai berikut (lanjutan):

b. Beban pemeliharaan jalan tol

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2023	2022
Pemeliharaan dan perbaikan	12.410.825.410	12.234.441.831
Pajak bumi dan bangunan	7.705.823.495	7.989.404.753
Asuransi	2.562.930.768	2.216.858.807
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	1.407.428.670	773.447.794
Jumlah	24.087.008.343	23.214.153.185

31. DIRECT COSTS AND COST OF SALES (continued)

Detail of direct costs and cost of sales are as follow: (continued)

b. Toll road maintenance expenses

Maintenance and repairment
Land and building tax
Insurance
Others (each below Rp500,000,000)

Total

c. Beban pelayanan pengguna jalan tol

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2023	2022
Gaji, tunjangan, dan jasa pelayanan tol	5.461.175.727	5.114.616.491
Beban pengoperasian gerbang tol Pondok Ranji	4.324.186.762	4.068.691.521
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	2.204.508.452	2.003.574.701
Pemeliharaan dan perbaikan	1.477.881.610	1.521.698.766
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	903.577.033	588.802.509
Jumlah	14.371.329.584	13.297.383.988

c. Toll road user services cost

Salaries, allowance, and toll service fee
Operating expenses of Pondok Ranji toll gate
Depreciation of fixed assets (Note 12)
Maintenance and repairment
Others (each below Rp500,000,000)

Total

d. Beban pokok penjualan tenaga listrik

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2023	2022
Material energi biomassa	76.527.630.531	77.336.103.801
Gaji dan tunjangan	7.109.481.182	5.224.428.638
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	8.929.294.794	9.062.741.548
Jumlah	92.566.406.507	91.623.273.987

d. Cost of sales of electricity

Material biomass energy
Salaries and allowances
Others (each below Rp500,000,000)

Total

e. Beban pokok pengolahan air

Akun ini merupakan beban untuk pengolahan air yang berasal dari PT SCKT dan PT DCC.

e. Cost of water treatment

This account represents direct costs of water treatment from PT SCKT and PT DCC.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Gaji dan tunjangan	136.777.644.278	131.427.644.298	Salaries and allowances
Jasa profesional	46.796.647.738	24.267.016.189	Professional fees
Penyusutan (Catatan 12)	11.123.474.317	11.079.630.442	Depreciation (Note 12)
Imbalan pasca kerja	8.286.433.640	2.573.968.450	Post-employment benefit
Penyusutan aset hak guna (Catatan 15)	7.162.157.972	7.841.539.018	Depreciation of right of use assets (Note 15)
Jamuan dan sumbangan	5.287.370.741	7.068.584.716	Entertainments and donations
Beban rumah tangga	4.858.213.184	4.085.981.613	Household expenses
Perbaikan dan pemeliharaan	4.734.104.923	931.380.393	Repair and maintenance
Promosi dan iklan	3.471.469.333	1.845.563.562	Promotions and advertising
Akomodasi, rapat dan keanggotaan	3.098.103.917	2.110.569.940	Accommodation, meeting and membership
Transportasi dan perjalanan dinas	2.359.237.922	1.702.895.801	Transportation and travelling
Listrik, air dan telekomunikasi	2.108.992.677	1.555.528.417	Electricity, water and telecommunication
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	23.964.939.368	29.949.037.961	Others (each below Rp500,000,000)
Jumlah	260.028.790.010	226.439.340.800	Total

**33. PENDAPATAN/(BEBAN) OPERASIONAL
LAINNYA**

33. OTHER OPERATING INCOME/(EXPENSES)

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Penghasilan usaha lainnya			Other operating income
Laba dari selisih perubahan kurs mata uang asing, neto	-	2.686.937.149	Profit from foreign exchange, net
Lain-lain	25.188.224.125	1.185.995.831	Others
	25.188.224.125	3.872.932.980	
Beban usaha lainnya			Other operating expenses
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	(11.469.532.066)	(12.896.940.834)	Provision for impairment loss of receivables
Denda pajak	(8.938.047.993)	(61.537.193.263)	Tax penalties
Iklan dan sewa lahan	(2.459.253.151)	(3.800.802.721)	Advertisement and land rent
Rugi dari selisih perubahan kurs mata uang asing, neto	(407.876.898)	-	Loss from foreign exchange, net
Lain-lain	-	(2.303.903.393)	Others
	(23.274.710.108)	(80.538.840.211)	
Jumlah	1.913.514.017	(76.665.907.231)	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

34. PENGHASILAN KEUANGAN

34. FINANCIAL INCOME

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Bunga piutang non-usaha dan investasi	3.809.085.054	3.875.065.817	Interest on non-trade receivables and investments
Bunga deposito dan jasa giro	4.303.389.990	3.760.148.320	Interest on time deposits and current account service
Jumlah	8.112.475.044	7.635.214.137	Total

35. BEBAN KEUANGAN

35. FINANCIAL COST

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Bunga pinjaman bank dan lembaga keuangan	492.041.013.315	185.974.337.402	Interest on bank loans and financial institution
Provisi pinjaman	6.234.577.911	5.705.158.604	Loan provision
Beban administrasi bank	1.448.881.033	2.175.905.619	Bank charges
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 15)	429.041.126	416.627.451	Interest expenses on lease liabilities (Note 15)
Bunga utang pembiayaan konsumen	132.928.753	47.357.842	Interest on consumer financing liabilities
Jumlah	500.286.442.138	194.319.386.918	Total

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

36. RELATED PARTIES INFORMATION

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Nature of transactions with related parties

Dalam kegiatan usaha normal. Grup melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi tertentu. Sifat dari hubungan Grup dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

In the normal course of business, the Group made business and financial transactions with certain related parties. The nature of the relationships of the Group with its related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transactions
PT Margautama Nusantara	Entitas asosiasi/ Associate entity Entitas sepengendali dalam MPTIS Grup/ Entity under common control of MPTIS Group	Utang lain-lain/ Others payables
PT Bintaro Serpong Damai	Entitas sepengendali MUN/ Entity under common-control of MUN	Utang lain-lain/ Others payables
PT Makassar Metro Network	Entitas sepengendali MUN/ Entity under common-control of MUN	Piutang non-usaha/ Non-trade receivables
PT Jalan Tol Seksi Empat	Entitas sepengendali MUN/ Entity under common-control of MUN	Piutang non-usaha/ Non-trade receivables
PT Jakarta Lingkar Baratsatu	Entitas asosiasi MUN/ Associate entity of MUN	Piutang non-usaha/ Non-trade receivables
PT Intisentosa Alambahtera	Entitas asosiasi tidak langsung/ Indirect associate entity	Piutang non-usaha (modal kerja)/ Non-trade receivables (working capital)
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	Entitas asosiasi tidak langsung/ Indirect associate entity	jasa manajemen/ Management fee

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	Persentase terhadap total aset/ Percentage from total assets			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Piutang non-usaha				
JTSE	0,528%	-	22.800.000.000	-
MMN	0,301%	-	13.000.000.000	-
Direktur	0,005%	-	206.249.992	-
ISAB	-	0,302%	-	33.694.810.945
JLB	-	0,157%	-	17.500.000.000
Jumlah	0,834%	0,459%	36.006.249.992	51.194.810.945

Non-trade receivables
JTSE
MMN
Director
ISAB
JLB

Total

	Persentase terhadap total liabilitas/ Percentage from total liabilities			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Utang lain-lain				
BSD	0,052%	-	324.192.996	-
MUN	0,000%	-	422.305	-
Jumlah	0,052%	-	324.615.301	-

Others payables
BSD
MUN

Total

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pendapatan jasa manajemen			
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri	-	2.758.041.887	

Management fee income
PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri

Piutang kepada ISAB merupakan piutang modal kerja berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 3 April 2012 yang dikenakan bunga sesuai dengan USD LIBOR ditambah 3,5% per tahun dan memiliki tanggal jatuh tempo sampai 10 Januari 2020.

Due from ISAB working capital receivable based on Shareholder Loan Agreement dated April 3, 2012, bears interest at USD LIBOR plus 3.5% per annum and have maturity date until January 10, 2020. As of the issuance date of consolidated financial statements.

Seluruh piutang dari ISAB telah dilunasi pada tanggal 10 Maret 2023.

The non-trade receivables from ISAB has been fully repaid on March 10, 2023.

Piutang dari JTSE dan MMN merupakan transaksi atas jasa manajemen.

Due from JTSE and MMN represents management fee transaction.

Manajemen tidak melakukan pembentukan penyisihan penurunan nilai atas piutang tersebut karena manajemen berkeyakinan bahwa piutang tersebut akan tertagih.

Management does not provide any allowance for impairment of this receivable due to the management believes that such receivable is collectible.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Kompensasi jangka pendek manajemen kunci

Grup memberikan kompensasi jangka pendek kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp47.512.153.762 dan Rp37.170.078.921 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

36. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Key management's short-term compensation

The Group provided compensation short-term benefits for the Boards of Commissioners and Directors amounting to Rp47,512,153,762 and Rp37,170,078,921 for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

37. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Grup menghitung dan mengakui cadangan imbalan pasca-kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.

Imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh KKA Steven & Mourits, aktuaris independen dengan laporannya masing-masing bertanggal 5 Januari 2024 dan 2023. Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

37. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

The Group calculated and recognized post-employment benefit liabilities in accordance with The Company Regulation and applicable Labour Law.

Post-employment benefits for the year ended December 31, 2023 and 2022 were calculated by an independent actuary, KKA Steven & Mourits based on their reports dated January 5, 2024 and 2023, respectively. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Tingkat diskonto per tahun	6,75%	7,10%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	10,00%	10,00%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	TMI - 2019	TMI - 2019	Mortality rate
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	Normal retirement age
Pensiun dini/pengunduran diri	5% pada usia 40 tahun ke bawah dan berkurang secara proporsional menjadi 0% pada usia 55 tahun/ 5% below 40 years and will linearly decrease until 0% at 55 years of age	5% pada usia 40 tahun ke bawah dan berkurang secara proporsional menjadi 0% pada usia 55 tahun/ 10% below 40 years of age and will linearly decrease until 0% at 55 years of age	Early retirement/resignation
Tingkat cacat	5% of mortality rate	5% of mortality rate	Disability rate

Liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Post-employment benefit liabilities recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	41.353.393.525	62.576.341.565	Present value of defined benefit obligation

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

37. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Beban imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Biaya jasa kini	7.487.392.203	7.621.163.230
Biaya bunga	3.973.424.770	3.633.638.603
Dampak penerapan siaran pers IAI	-	(4.858.071.409)
Kelebihan pembayaran	253.462.295	165.253.871
Penyesuaian kewajiban akibat pengakuan masa kerja lalu (Keuntungan)/kerugian aktuarial yang diakui	(441.006.861)	(157.241.712)
	1.907.783.633	(211.569.843)
Jumlah	13.181.056.040	6.193.172.740

37. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

Current service costs
Interest costs
Adoption of IAI Press Release
Excess payment
Adjustment due to past service
Actuarial (gain)/loss recognized

Total

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Change in the post-employment benefits liability is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Saldo awal	62.576.341.565	67.601.077.889
Beban tahun berjalan dicatat ke laba rugi	13.181.056.040	6.193.172.740
Rugi komprehensif lain	676.476.661	(3.019.697.554)
Pembayaran tahun berjalan	(4.410.847.087)	(4.028.583.550)
Kelebihan pembayaran	(253.462.295)	(165.253.871)
Liabilitas terkait aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	(4.004.374.089)
Dekonsolidasi (Catatan 1d)	(30.416.171.359)	-
Saldo akhir	41.353.393.525	62.576.341.565

Beginning balance
Expenses during the year to profit or loss
Other comprehensive loss
Payment during the year
Excess payment
Liabilities of disposal group classified as held-for-sale
Deconsolidation (Note 1d)

Ending balance

Dampak akibat dari setiap satu persen perubahan dari asumsi tingkat diskonto dan kenaikan gaji terhadap nilai kini kewajiban pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

A one percentage change in the assumption of discount rate and wages and salary increase to the present value of benefit obligation at December 31, 2023 would have the following effects:

	Kenaikan 1%/ Increase 1%	Penurunan 1%/ Decrease 1%
Tingkat diskonto	(2.350.554.379)	2.364.914.418
Kenaikan gaji	2.204.260.485	(2.251.334.448)

Discount rate
Wages and salary increase

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan dari nilai kini dari liabilitas program imbalan pasti di tahun-tahun mendatang:

The following payments are expected contributions to the present value of defined benefit plan in future years:

	2023
Dalam waktu 12 bulan mendatang	10.963.245.255
Antara 2 hingga 5 tahun	13.556.565.445
Antara 6 hingga 10 tahun	15.191.333.898
Lebih dari 10 tahun	45.545.953.321

Within the next 12 months
Between 2 and 5 years
Between 6 and 10 years
Beyond 10 years

Pada tanggal 31 Desember 2023, rata-rata tertimbang durasi atas liabilitas imbalan pasca kerja karyawan adalah 12,16 tahun.

As of December 31, 2023 the weighted average duration of the post-employment benefit liabilities is 12.16 years.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

Perusahaan

Pada tanggal 15 April 2020, Perusahaan dan PT Dahan Karya Bertunas mengadakan perjanjian pinjaman dengan total pinjaman sebesar Rp5.000.000.000, tanpa bunga. Perjanjian ini diamandemen pada 1 Oktober 2021 dengan menambah fasilitas pinjaman menjadi Rp8.000.000.000. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2026.

Pada tanggal 10 Desember 2021, Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Niscala Utama Cemerlang dengan total pinjaman sebesar Rp33.000.000.000, tingkat bunga 11% per tahun. Perjanjian pinjaman berlaku sampai dengan 30 Desember 2023.

Entitas anak

a. PT Makassar Metro Network ("MMN")

- (i) Dalam keputusannya No. 276/KPTS/1994 tanggal 26 Agustus 1994, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah memberikan izin kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) untuk menyelenggarakan tol Ujung Pandang dalam ikatan usaha patungan dengan MMN.

Berdasarkan Akta No. 322 tanggal 29 Agustus 1994 dari Notaris Mestariy Habibie, S.H., MMN mengoperasikan jalan tol selama 30 (tiga puluh) tahun untuk tahap pertama sedangkan tahap kedua akan diatur kemudian dengan ketentuan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sejak dioperasikannya jalan tol baik sebagian atau seluruhnya.

MMN setuju bahwa setelah berakhirnya masa penyelenggaraan jalan tol, maka jalan tol dan fasilitas yang berada dalam daerah milik jalan langsung dengan serta merta kembali kepada Jasa Marga. Jasa Marga berhak untuk mengoperasikan dan memelihara jalan tol tanpa wajib menyerahkannya atau membayarkannya kepada MMN.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY

The Company

On April 15, 2020, the Company and PT Dahan Karya Bertunas entered into a loan agreement with a total loan of Rp5,000,000,000, bears no interest. This Agreement is amended on October 1, 2021 by increasing the loan facility to Rp8,000,000,000. The loan will mature on April 15, 2026.

On December 10, 2021, the Company provided loan to PT Niscala Utama Cemerlang with a total loan amounting to Rp33,000,000,000, an interest rate of 11% per annum. This loan is valid until December 30, 2023.

Subsidiaries

a. PT Makassar Metro Network ("MMN")

- (i) In its decision No. 276/KPTS/1994 dated August 26, 1994, the Minister of Public Working of the Republic of Indonesia has given permission to PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga) to have a joint venture with MMN pertinent to the operational of Ujung Pandang toll road.

Based on Deed No. 322 dated August 29, 1994 of Mestariy Habibie, S.H., MMN has the rights to operate toll road for 30 (thirty) years for the first phase and the second phase will be rearranged later on that it will be less than 30 (thirty) years since one or the whole part of the toll road operation.

MMN agreed that after the end period of toll operation, then all the toll road and its facilities in the area will be handed over to Jasa Marga. Jasa Marga has the right to operate and to maintain the toll road without any obligation to hand over or pay to the MMN.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

a. PT Makassar Metro Network ("MMN") (lanjutan)

Perjanjian kontrak kerjasama tersebut berlaku untuk tol seksi I, II dan III. Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 402/KPTS/M/2010 tanggal 12 Juli 2010 menetapkan dan menyetujui untuk mengeluarkan tol seksi III dari ruang lingkup kewajiban MMN tanpa merubah tarif awal dan masa konsesi.

Berdasarkan surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor JL. 01.03-Mn/518 tanggal 21 September 2005, dan pengumuman pemenang tender investasi jalan tol dari Departemen Pekerjaan Umum nomor JL.01.03-PB/69 tanggal 27 September 2005, MMN ditetapkan sebagai pemenang tender investasi jalan tol ruas Makassar seksi IV.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 tentang jalan tol, Pemerintah telah menyerahkan sebagian wewenang jalan tol kepada Departemen Pekerjaan Umum diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan yang sebelumnya dikelola oleh Jasa Marga. Atas hal tersebut, MMN diwajibkan untuk mengganti Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Pada tanggal 31 Agustus 2010, MMN mengadakan PPJT dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian No. 02/PPJT/VIII/KE/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dinyatakan dalam Akta No. 23 dari Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2010. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada MMN hak melaksanakan jalan tol ruas Ujung Pandang Seksi I dan II dengan masa konsesi hingga tanggal 12 April 2028.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

a. PT Makassar Metro Network ("MMN") (continued)

The joint contract agreement applied for the toll section I, II, and III, respectively. According to the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. 402/KPTS/M/2010 dated July 12, 2010 determined and agreed to take out the toll road section III from the scope of MMN's liability without changes the initial tariff and concession.

Based on the letter from the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. JL. 01.03-Mn/518 dated September 21, 2005, and the tender bid winner announcement from Public Works Department No. JL. 01.03-PB/69 dated September 27, 2005, MMN was appointed as the winner for Makassar toll road section IV investment tender.

Under Law No. 38 year 2004 concerning roads and Government Regulation No. 15 concerning toll roads, the Government has transferred part of the toll road authority to the Department of Public Works which is represented by the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) relating to the regulation, concessionaire and control that previously conducted by Jasa Marga. Above this matter, MMN is required to replace Operational Authority Agreement (PKP) to Toll Road Concessionaire Agreement (PPJT).

On August 31, 2010, MMN entered into PPJT with BPJT of the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia with Agreement Letter No. 02/PPJT/VIII/KE/2010 dated August 31, 2010 with notary Deed No. 23 of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta, dated August 31, 2010. In this agreement, BPJT appointed and granted MMN to operate Ujung Pandang Section I and II toll road with concession period until April 12, 2028.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

a. PT Makassar Metro Network ("MMN") (lanjutan)

Bersamaan dengan ini, MMN dan BPJT melakukan amandemen terhadap Akta Perjanjian Jalan Tol Ujung Pandang Seksi I dan II, nomor 23, tanggal 31 Agustus 2010. Pada tanggal 23 Oktober 2017, MMN mendapatkan Keputusan Menteri dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. JL.03.04-Mn/1132 tanggal 23 Oktober 2017. Dalam Surat Keputusan ini, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia menetapkan perubahan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol ruas Ujung Pandang Seksi I dan II dengan masa konsesi hingga tanggal 12 April 2043.

Berdasarkan amandemen terakhir terdapat beberapa perubahan yaitu:

- menghapus pasal terkait iklan dan utilitas, perjanjian tentang usaha-usaha lain.
- menambah ketentuan dalam perjanjian terkait pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol (TIP):
MMN dapat memanfaatkan dan mengusahakan ruang milik jalan tol sebagai TIP dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. MMN bertanggung jawab atas pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pada akhir masa konsesi lahan dan/atau fasilitas TIP wajib diserahkan kepada Pemerintah.
- menambah pasal terkait pemanfaatan ruang milik jalan tol:
MMN dapat menempatkan iklan, utilitas, dan bangunan setelah mendapat izin. Biaya yang terkait dengan layanan jalan tol ditentukan oleh MMN kecuali yang tidak terkait langsung ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Pendapatan yang diperoleh atas pemanfaatan jalan tol yang tidak terkait dengan layanan jalan tol disetorkan ke negara sebagai pendapatan negara.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

a. PT Makassar Metro Network ("MMN") (continued)

Along with this agreement, MMN and BPJT amended the previous Deed of Agreement for Ujung Pandang Section I and II Toll Roads, number 23, dated August 31, 2010. On October 23, 2017, MMN obtained Minister Decree from Ministry of Public Works Republic Indonesia with Minister Decree No. JL.03.04-Mn/1132 dated October 23, 2017. Based on the decree, Ministry of Public Works Republic Indonesia granted an amendment of Toll Road Concession Plans for Ujung Pandang Section I and II with concession period until April 12, 2043.

Based on the last amendment there are several changes:

- removed the article related to advertising and utility, agreement related to other businesses.
- added the provisions in the agreement related to the operation of rest areas and services on toll roads (TIP):
MMN can utilize and exploit the toll road space as TIP by cooperating with third parties. MMN are responsible for meeting the minimum service standards (SPM) and at the end of the services concession period the TIP area and/or facilities must be handed over to the Government.
- added articles related to the utilization of toll road property space:
MMN can place advertisements, utilities and buildings after obtaining permission. Costs related to toll road services are determined by MMN except those that are not directly related are determined by the Minister of Public Works. Income from the utilized of toll roads that are not related to toll road services are remitted to the state income.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

b. PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")

- (i) JTSE mengadakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (DPU), sebagai pemegang hak Jalan Tol Ruas Makassar Seksi IV, dengan Surat Perjanjian bernomor 190/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006. Dalam perjanjian ini, DPU menunjuk dan memberikan kepada JTSE, hak untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol atas nama pemerintah dan menyelenggarakan manajemen jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh JTSE dengan masa konsesi selama 35 tahun, termasuk masa pembangunannya. Selama masa operasi, JTSE wajib melaksanakan pemeliharaan dan menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol. Selain hal tersebut, JTSE selama masa konsesi dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan tol, JTSE akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Berdasarkan amandemen terakhir terdapat beberapa perubahan yaitu:

- menghapus pasal terkait iklan dan utilitas, perjanjian tentang usaha-usaha lain,
- menambah perjanjian terkait pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol (TIP): JTSE dapat memanfaatkan dan mengusahakan ruang milik jalan tol sebagai TIP dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. JTSE bertanggung jawab atas pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pada akhir masa konsesi lahan dan/atau fasilitas TIP wajib diserahkan kepada Pemerintah.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

b. PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE")

- (i) JTSE entered into a Toll Road Concessionaire Agreement with the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia (DPU) as the right holder of Makassar Section IV Toll Road through Agreement Letter No. 190/PPJT/V/Mn/2006 dated May 29, 2006. In this agreement, DPU appointed and assigned JTSE to develop and to operate the toll road on behalf of the government and to conduct toll road management at its own risk and cost for a concession period of 35 years including construction period. During the operation period, JTSE has to maintain and to provide insurance coverage to the toll road. Moreover, during the concession period, JTSE was entitled to place an advertisement, utilities and/or utilities building in the toll road area. At the expiry of the concession period, JTSE should hand-over the toll road to The Toll Road Authority (BPJT).

Based on the last amendment there are several changes:

- removed the article related to advertising and utility, agreement related to other businesses,
- added the articles related to the operation of rest areas and services on toll roads (TIP): JTSE can utilize and exploit the toll road space as TIP by cooperating with third parties. JTSE is responsible for meeting the minimum service standards (SPM) and at the end of the services concession period the TIP area and/or facilities must be handed over to the Government.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

b. PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") (lanjutan)

Berdasarkan amandemen terakhir terdapat beberapa perubahan yaitu: (lanjutan)

- menambah pasal terkait pemanfaatan ruang milik jalan tol:
JTSE dapat menempatkan iklan, utilitas, dan bangunan setelah mendapat izin. Biaya yang terkait dengan layanan jalan tol ditentukan oleh JTSE kecuali yang tidak terkait langsung ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Pendapatan yang diperoleh atas pemanfaatan jalan tol yang tidak terkait dengan layanan jalan tol disetorkan ke negara sebagai pendapatan negara.

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")

- (i) BSD mengadakan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan Jalan Tol dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Jasa Marga"), sebagai pemegang hak Jalan tol jalur Pondok Aren-Serpong, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 183 tanggal 19 Desember 1996 dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, Jasa Marga menunjuk dan memberi wewenang kepada BSD sebagai pengembang tunggal untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol atas nama Jasa Marga serta menyelenggarakan manajemen jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh BSD selama 28 tahun, termasuk masa pembangunannya.

Selama masa operasi, BSD wajib membayar kepada Jasa Marga sejumlah persentase tertentu dari hasil jalan tol setiap bulannya. Jasa Marga telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. S543/MK.16/1996 tanggal 25 Oktober 1996 untuk mengadakan perjanjian tersebut.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

b. PT Jalan Tol Seksi Empat ("JTSE") (continued)

Based on the last amendment there are several changes: (continued)

- added articles related to the utilization of toll road property space:
JTSE can place advertisements, utilities and buildings after obtaining permission. Costs related to toll road services are determined by JTSE except those that are not directly related are determined by the Minister of Public Works. Income from the utilized of toll roads that are not related to toll road services are remitted to the state income.

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD")

- (i) BSD entered into a Toll Road Operational Authority Agreement with PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Jasa Marga") as the right holder of the Pondok Aren - Serpong toll road lane, which was notarized by Deed No. 183 dated December 19, 1996 of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta. Based on the agreement, Jasa Marga appointed and authorized BSD to develop and operate the toll road on behalf of Jasa Marga and to manage the toll road operation for 28 years, including the construction period, at BSD's own risk and cost.

During the operation of the toll road, BSD has to pay to Jasa Marga a certain percentage from the monthly toll road revenues. Jasa Marga has received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. S543/MK.16/1996 dated October 25, 1996 to arrange that agreement.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang jalan tol, Pemerintah telah menyerahkan sebagian wewenang jalan tol kepada Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan yang sebelumnya dikelola oleh Jasa Marga. Atas hal tersebut, BSD diwajibkan untuk mengganti PKP menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Pada tanggal 31 Agustus 2010, BSD mengadakan PPJT (Perjanjian Pengusaha Jalan Tol) dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian bernomor 01/PPJT/VIII/KE/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang dinyatakan dalam Akta No. 22 tanggal 31 Agustus 2010 dari Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada BSD hak melaksanakan jalan tol ruas Pondok Aren - Serpong dengan masa konsesi hingga tanggal 1 Oktober 2028.

Selama masa operasi, BSD wajib melakukan:

- 1) Pemeliharaan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh BPJT.
- 2) Pelebaran jalan dan pembangunan simpang susun sesuai dengan rencana bisnis BSD atau permintaan BPJT (dengan syarat dan kondisi tertentu).
- 3) Pembangunan jalan akses sesuai dengan permintaan BPJT (dengan kondisi tertentu).
- 4) Menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol.

Selain hal tersebut, BSD, selama masa konsesi, dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan tol, BSD akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada BPJT.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

Based on Law No. 38 year 2004 concerning the roads and Government Regulation No. 25 on the toll roads, the Government has submitted part of the toll road authority to the Ministry of Public Works is represented by the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) relating to the regulation, concessionaire and control that were previously managed by Jasa Marga. On this matter, BSD is required to replace the PKP into Toll Road Concessionaire Agreement (PPJT).

On August 31, 2010, BSD entered into PPJT (Perjanjian Pengusaha Jalan Tol) with the BPJT of the Ministry of Public Works of Republic of Indonesia with Agreement Letter No. 01/PPJT/VIII/KE/2010 dated August 31, 2010 with Notarial Deed No. 22 dated August 31, 2010 from Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta. In this agreement, BPJT appoints and grants BSD rights to operates Pondok Aren toll road - Serpong with concession period until October 1, 2028.

During the operation, BSD has the obligations to conduct:

- 1) Maintenance in accordance with minimum service standards set by BPJT.
- 2) Road widening and construction of interchanges in accordance with BSD business plan or request from BPJT (with certain terms and conditions).
- 3) Construction of access roads in accordance with the request from BPJT (with certain conditions).
- 4) Provides insurance as a toll road asset protection.

In addition, BSD, during the concession period, is able to use toll road's space for advertisement, utility and/or utility building. At the end of the concession period, BSD will hand over the toll road to BPJT.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

Pada tanggal 18 Januari 2022, BSD diberikan tambahan masa konsesi penguasaan Jalan tol Pondok Aren - Serpong selama dua belas tahun berdasarkan Berita Acara Kesepakatan no.04/BA/Pt.6 mengenai Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Pondok Aren - Serpong. Sesuai Berita Acara Kesepakatan tentang perubahan Perjanjian Kuasa Penyelenggara (PKP) menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk Ruas Pondok Aren - Serpong) No. BA.264/BPJT/K/HK.02.03/2030 tanggal 29 April 2010, masa konsesi ditambahkan mulai 1 Oktober 2028 hingga 30 September 2040.

Pada 7 Oktober 2022, BSD mengadakan PPJT (Perjanjian Pengusaha Jalan Tol) dengan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan Surat Perjanjian No. 01/PPJT/VIII/KE/2010 yang dinyatakan dalam Akta Notaris No. 01 tanggal 7 Oktober 2022 dari Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, BPJT menunjuk dan memberikan kepada BSD hak melaksanakan jalan tol ruas Pondok Aren - Serpong dengan masa konsesi hingga tanggal 30 September 2040.

Berdasarkan amandemen terakhir terdapat beberapa perubahan yaitu:

- menambah pasal terkait pekerjaan tambah untuk membangun simpang susun dan jalan akses dan/atau pekerjaan tambah lainnya sesuai dengan permintaan Pemerintah.
- menghapus pasal terkait iklan dan utilitas, perjanjian tentang usaha-usaha lain.
- menambah perjanjian terkait pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol (TIP): BSD dapat memanfaatkan dan mengusahakan ruang milik jalan tol sebagai TIP dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. BSD bertanggung jawab atas pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan pada akhir masa konsesi lahan dan/atau fasilitas TIP wajib diserahkan kepada Pemerintah.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

On January 18, 2022, BSD was granted an additional concession period for the control of the Pondok Aren - Serpong toll road for twelve years based on the Minutes of Agreement no.04/BA/Pt.6 regarding Changes in Business Plans for the Concession of the Pondok Aren - Serpong Toll Road. In accordance with the Minutes of Agreement concerning the changes in Perjanjian Kuasa Penyelenggara (PKP) to the Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) for the Pondok Aren - Serpong area No. BA.264/BPJT/K/HK.02.03/2030 dated April 29, 2010, the concession period was extended starting October 1, 2028 to September 30, 2040.

On October 7, 2022, BSD entered into PPJT (Perjanjian Pengusaha Jalan Tol) with the BPJT of the Ministry of Public Works of Republic of Indonesia with Agreement Letter No. 01/PPJT/VIII/KE/2010 stated in Notarial Deed No. 01 dated October 7, 2022 from Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta. In this agreement, BPJT appoints and grants BSD rights to operates Pondok Aren toll road - Serpong with concession period until September 30, 2040.

Based on the last amandment there are several changes:

- adding articles related to additional works to build interchanges and access roads and/or other additional works in accordance with the Government's request.
- removed the article related to advertising and utility, agreement related to other businesses.
- added the articles related to the operation of rest areas and services on toll roads (TIP): BSD can utilize and exploit the toll road space as TIP by cooperating with third parties. BSD are responsible for meeting the minimum service standards (SPM) and at the end of the services concession period the TIP area and/or facilities must be handed over to the Government.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

Berdasarkan amandemen terakhir terdapat beberapa perubahan yaitu: (lanjutan)

- menambah pasal terkait pemanfaatan ruang milik jalan tol:
BSD dapat menempatkan iklan, utilitas, dan bangunan setelah mendapat izin. Biaya yang terkait dengan layanan jalan tol ditentukan oleh BSD kecuali yang tidak terkait langsung ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Pendapatan yang diperoleh atas pemanfaatan jalan tol yang tidak terkait dengan layanan jalan tol disetorkan ke negara sebagai pendapatan negara.
- menambah pasal terkait Pengadaan Tanah dimana dalam rangka melaksanakan Pekerjaan Tambah, Pengadaan Tanah merupakan tanggung jawab Pemerintah yang akan dilaksanakan dan diselesaikan berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah ("Batas Akhir Penyerahan Tanah").
- menambah pasal terkait Pendanaan Pekerjaan Tambah dimana besaran bagian utang minimal sebesar 70% dan bagian ekuitas maksimal 30% dari total biaya pelaksanaan Pekerjaan Tambah.
- menambah pasal terkait Perencanaan Teknik dimana Perusahaan Jalan Tol harus memulai Perencanaan Teknik sejak tanggal penandatanganan amandemen dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan atau jangka waktu yang ditetapkan Pemerintah.
- menambah pasal terkait Konstruksi dimana Perusahaan Jalan Tol wajib menunjuk perusahaan konsultan pengendalian mutu independen.
- menambah pasal terkait asuransi dimana Perusahaan Jalan Tol Wajib atas biayanya sendiri menyediakan asuransi terhadap risiko tanggung jawab kepada pihak ketiga, asuransi atas segala risiko kontraktor, dan harus menyerahkan satu salinan polis asuransi kepada Pemerintah selambat-lambatnya 2 hari sebelum dimulainya konstruksi.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

Based on the last amendment there are several changes: (continued)

- added articles related to the utilization of toll road property space:
BSD can place advertisements, utilities and buildings after obtaining permission. Costs related to toll road services are determined by BSD except those that are not directly related are determined by the Minister of Public Works. Income from the utilized of toll roads that are not related to toll road services are remitted to the state income.
- adding an article related to Land Acquisition where in the framework of carrying out Additional Work, Land Acquisition is the responsibility of the Government which will be carried out and completed based on the Minutes of Land Acquisition ("Deadline for Land Acquisition").
- added articles related to Funding for Additional Works and the amount of the debt is at least 70% and the share of equity is a maximum of 30% of the total cost of implementing Added Works.
- added an article related to Engineering Planning where the Toll Road Company must start the Engineering Planning from the date the amendment was signed and must be completed within 12 months or the timeframe determined by the Government.
- added an article related to Construction where the Toll Road Company are required to appoint an independent quality control consultant.
- added an article related to insurance where the Toll Road Company is required to provide insurance against the risk of liability to third parties, insurance for all risks of the contractor, and must submit one copy of the insurance policy to the government no later than 2 days before the start of construction.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

- (ii) Berdasarkan "Berita Acara Kesepakatan Atas Perubahan Lingkup Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Pondok Aren - Serpong" No 73/BA-DIRR/2008 tanggal 15 Mei 2008, BSD dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sepakat untuk menunjuk penilai independen untuk menentukan besaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Pondok Aren - Serpong yang harus dibayarkan oleh BSD kepada Jasa Marga. Berdasarkan notulen rapat tanggal 6 April 2010 yang dihadiri perwakilan dari BSD dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, disepakati terhitung mulai Maret 2010, BSD akan melakukan pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol kepada Jasa Marga sesuai tingkat prosentase bagi hasil sebesar 5,98% dari pendapatan tol untuk ruas jalan tol Pondok Aren - Serpong. Tingkat presentase bagi hasil tersebut ditetapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Hutama Penilai, berdasarkan laporannya tanggal 2 November 2009.

Sejak Februari 2023, BSD sudah tidak lagi melakukan pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol kepada Jasa Marga sesuai tingkat prosentase bagi hasil sebesar 5,98% dari pendapatan tol, melainkan melakukan Kesepakatan Kerja Sama Pengoperasian Gerbang Tol Pondok Ranji Utama dan Pelalayan Lalu Lintas Ruas Pondok Aren - Serpong dengan porsi beban operasi 50:50. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perjanjian ini sedang dalam proses amandemen.

- (iii) Pada tanggal 17 April 1997, BSD dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") mengadakan perjanjian sewa tanah milik KAI seluas 43.088,41 m² selama 5 tahun dari tanggal 17 April 1997 sampai dengan tanggal 17 April 2002. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan *addendum* perpanjangan perjanjian sewa tanah tanggal 23 Maret 2007, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

- (ii) Based on the "Berita Acara Kesepakatan Atas Perubahan Lingkup Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Pondok Aren - Serpong" No. 73/BA-DIRR/2008 dated May 15, 2008, BSD and PT Jasa Marga (Persero) Tbk agreed to assign an independent appraiser to determine fees of operation and maintenance of toll road section Pondok Aren - Serpong which should be pay by BSD to Jasa Marga. Based on the minutes of meeting dated April 6, 2010, which was attended by representatives of BSD and PT Jasa Marga (Persero) Tbk, it is agreed that, starting from March 2010, BSD will pay to Jasa Marga for toll road operation and toll road maintenance fees, based on profit sharing percentage, at rate of 5.98% of toll road revenue for section Pondok Aren - Serpong. Such profit sharing percentage was determined based on the calculation from PT Hutama Penilai, on its report dated November 2, 2009.

Since February 2023, BSD has ceased making payments for toll road operation and maintenance costs to Jasa Marga according to the profit-sharing percentage of 5.98% of toll revenue. Instead, it has entered into a Cooperation Agreement for the Operation of the Pondok Ranji Utama Toll Gate and Traffic Service on the Pondok Aren - Serpong Toll Road, with a 50:50 operational cost sharing ratio. As of the financial report completion date, this agreement is currently undergoing an amendment process.

- (iii) On April 17, 1997, BSD and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") has entered into land rental agreement for an area of 43,088.41 m² land for 5 years commencing on April 17, 1997 until April 17, 2002. The agreement can be extended according to both parties' agreement. Based on addendum of rent agreement dated March 23, 2007, both parties agreed to extend the maturity of rental until October 16, 2011.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

Berdasarkan "Perjanjian Sewa Lahan di Jalur Kereta Api" No. 22/BSDT/PKS/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, BSD dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") menyepakati harga dari sewa lahan milik KAI sebesar Rp3.530.931.250 dan berdasarkan perjanjian "Pengawasan Keamanan Operasional Jalur Kereta Api" No. 023/BSDT/PKS/VI/2016, BSD dikenakan biaya pengawasan operasional pada lahan milik KAI sebesar Rp564.506.250. Harga sewa tersebut untuk masa pemanfaatan tanggal 17 Oktober 2011 sampai tanggal 31 Maret 2016 dan masa perjanjian ini berakhir pada tanggal 16 Oktober 2016.

Berdasarkan kontrak nomor KL01/IV/15/KA-2017 dan nomor KL701/IV/13/KA-2017 tanggal 11 April 2017, BSD dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") menyepakati untuk memperpanjang masa sewa lahan mulai 17 Oktober 2016 sampai 16 Oktober 2021. BSD dikenakan biaya untuk sewa lahan sebesar Rp4.316.070.001 dan terkait biaya pengawasan operasional sebesar Rp683.930.000 untuk keseluruhan periode sewa.

Berdasarkan kontrak nomor KL.701/X/9/KA-2022 dan nomor KL.701/IX/161/DO.1-2022 tanggal 19 September 2022 dan 6 Oktober 2022, BSD dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") menyepakati untuk memperpanjang masa sewa lahan mulai 17 Oktober 2021 sampai 16 Oktober 2026. BSD dikenakan biaya untuk sewa lahan sebesar Rp4.218.000.000 dan terkait biaya pengawasan operasional sebesar Rp841.377.188 untuk keseluruhan periode sewa.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

Based on agreement "Perjanjian Sewa Lahan di Jalur Kereta Api" No. 22/BSDT/PKS/VI/2016 dated June 27, 2016, BSD and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") agreed the cost of rental land amounted to Rp3,530,931,250 and based on agreement "Pengawasan Keamanan Operasional Jalur Kereta Api" No. 023/BSDT/PKS/VI/2016, BSD was charged for supervision operational cost on PT KAI rented land amounted Rp564,506,250. Cost of rental for the period started at October 17, 2011 until March 31, 2016 and this agreement period ended at October 16, 2016.

Based on contract number KL01/IV/15/KA-2017 and KL701/IV/13/KA-2017 dated April 11, 2017, BSD and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") agreed to extend rental of land period from October 17, 2016 to October 16, 2021. As of the completion date of financial statement, this agreement is still in the process of being extended. BSD is charged for land rental of Rp4,316,070,001 and related supervision operational cost of Rp683,930,000 for the whole rental period.

Based on contract number KL.701/X/9/KA-2022 and KL.701/IX/161/DO.1-2022 dated September 19, 2022 and October 6, 2022 respectively, BSD and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") agreed to extend rental of land period from October 17, 2021 to October 16, 2026. BSD is charged for land rental of Rp4,218,000,000 and related supervision operational cost of Rp841,377,188 for the whole rental period.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (lanjutan)

- (iv) Pada tanggal 22 Maret 2021, BSD dan PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Pengoperasian Bersama dengan porsi beban operasi 50:50 dan Bagi Hasil Pendapatan Tol pada Gerbang Tol Serpong 6 dan 7. Perjanjian ini berlaku hingga berakhirnya salah satu dari PPJT BSD maupun CSJ.
- (v) Pada tanggal 23 Maret 2021, BSD dan PT Marga Trans Nusantara (MTN), menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Pengoperasian Bersama dengan porsi beban operasi 50:50 dan Bagi Hasil Pendapatan Tol pada Gerbang Tol Serpong 2 dan 3. Perjanjian ini berlaku hingga berakhirnya salah satu dari PPJT BSD maupun MTN.
- (vi) Pada tanggal 31 Januari 2022, BSD mengadakan perjanjian dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang merupakan kontraktor utama untuk konstruksi penanganan banjir (peninggian) KM 8 dan konstruksi tidak sebidang *ramp junction* Serpong dengan *Exit Ramp* Pamulang dan Pelebaran Jalan Arteri Pamulang dengan nilai kontrak sebesar Rp465.844.417.292.

Pada tanggal 31 Januari 2022, BSD mengadakan perjanjian dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang merupakan kontraktor utama untuk struktur pembangunan Akses Tol Makassar New Port dengan nilai kontrak sebesar Rp475.150.000.000.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

c. PT Bintaro Serpong Damai ("BSD") (continued)

- (iv) On March 22, 2021, BSD and PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), signed Cooperation Agreement for Joint Operation Services with 50:50 portion of operating expenses and Toll Revenue Sharing at Serpong 6 and 7 Toll Gates. This agreement is valid until the expiration of either PPJT BSD or CSJ.
- (v) On March 23, 2021, BSD and PT Marga Trans Nusantara (MTN), signed Cooperation Agreement for Joint Operation Services with 50:50 portion of operating expenses and Toll Revenue Sharing at Serpong 2 and 3 Toll Gates. This agreement is valid until the expiration of either PPJT BSD or MTN.
- (vi) On January 31, 2022, BSD entered into an agreement with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the primary contractor for construction of KM 8 flood mitigation (elevation) and non-level construction of Serpong ramp junction with Pamulang Exit Ramp and Widening of Pamulang Arterial Road with contract value of Rp465,844,417,292.

On January 31, 2022, BSD entered into an agreement with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the primary contractor for the structure of the construction of toll access to Makassar New Port with contract value of Rp475,150,000,000.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

d. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL")

- (i) Pada tanggal 5 September 2016, RPSL melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat dengan perjanjian No.0085.PJ/HKM.00.01/ WKB/2016 atau No.006/RPSL/PNK/IX/2016.

RPSL akan membangun PLTBm 10 MW Siantan dengan kapasitas terpasang sebesar 1x10 MW, yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian, pelaksanaan, fasilitas interkoneksi, titik transaksi, fasilitas khusus, sistem pengukuran, dan pengamanan.

Selanjutnya, RPSL setuju untuk menjual 10 MW tenaga listrik yang diproduksi atau dihasilkan dari PLTBm PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari kepada PLN sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati. Kerjasama ini akan berlangsung sampai dengan 20 tahun sejak tanggal operasi komersial.

- (ii) Pada tanggal 27 Desember 2023, RPSL memperoleh fasilitas dana cerukan dari PT Bank Central Asia dengan jumlah maksimal Rp15.000.000.000 dan dikenakan bunga sebesar 8,25% per tahun. JTSE harus mempertahankan persyaratan pada laporan keuangan untuk rasio utang terhadap modal dan *debt service coverage ratio* (DSCR). Per 31 Desember 2023, dana cerukan yang terutang sebesar RpNil (2022: Rp6.590.609.240).

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

d. PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari ("RPSL")

- (i) On September 5, 2016, RPSL made an Electrical Power Purchase Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) for Biomass Power Plant (PLTBm) at Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Pontianak, West Kalimantan, No.0085.PJ/HKM.00.01/WKB/2016 or No.006/RPSL/PNK/IX/2016.

RPSL will build PLTBm 10 MW Siantan with 1x10 MW of installed capacity, which includes the design, engineering, supply costs, construction, testing, commissioning, interconnection facility, transaction point, special facility, measurement system, and secure.

Furthermore, RPSL agrees to sell 10 MW power which produced or generated from PLTBm PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari to PLN accordance with the terms and conditions agreed. This cooperation will take up to 20 years since generating commercial operation date.

- (ii) On December 27, 2023, RPSL obtained overdraft facility from PT Bank Central Asia with a maximum amount of Rp15,000,000,000 and is subject to interest at the rate of 8.25% per annum. JTSE shall maintain the covenant on their financial statement, for debt to equity ratio (DER) and debt service coverage ratio (DSCR). As of December 31, 2023, the outstanding bank overdraft is amounting to RpNil (2022: Rp6,590,609,240).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Entitas anak (lanjutan)

Subsidiaries (continued)

e. PT Inpolo Meka Energi ("IME")

e. PT Inpolo Meka Energi ("IME")

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Power Purchase Agreement

Pada tanggal 28 Desember 2009, IME melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Lau Gunung, Sumatera Utara, dengan perjanjian No. 021/PT. IME.PLN/X11/2009 atau No. 14. PJ/043/WSU/2009.

On December 28, 2009, IME entered into an Electrical Power Sales Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) for Minihydro Power Plant (PLTM) at Lau Gunung, North Sumatera, No. 021/PT.IME.PLN/X11/2009 or No. 14. PJ/ 043/WSU/2009.

Dalam perjanjian tersebut, IME akan membangun PLTM Lau Gunung dengan kapasitas terpasang sebesar 2x5 MW, yang meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya untuk pembangunan, pengujian dan commissioning serta pengoprasian dan pemeliharaan.

In the agreement, IME shall build PLTM Lau Gunung with installed capacity of 2x5 MW which includes design, engineering, cost of construction, testing and commissioning as well as operation and maintenance.

Selanjutnya IME setuju untuk menjual seluruh tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTM Lau Gunung kepada PLN sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati. Kerjasama ini akan berlangsung sampai dengan 20 tahun, terhitung dari pertama kali energi listrik disalurkan dari PLTM Lau Gunung kepada PLN yang telah dimulai pada tanggal 16 Desember 2020.

Furthermore, IME agrees to sell the entire power which is generated by PLTM Lau Gunung to PLN in accordance with the agreed terms and conditions. This co-operation will take place until 20 years, valid from the first time the power is channeled from PLTM Lau Gunung to PLN which has started on December 16, 2020.

Berdasarkan PPA, rata-rata tertimbang (levelized) harga jual beli tenaga listrik adalah sebesar Rp787,2/kWh dengan rincian tahapan pemberlakuan harga sebagai berikut:

Based on the PPA Amendment, the weighted average (levelized) purchase price of electricity is Rp787.2/kWh with details of the stages of price application as follows:

Tahun 1-5: Rp878/KWh
Tahun 6-20: Rp714,32/KWh

Year 1-5: Rp878/KWh
Year 6-20:Rp714.32/KWh

f. PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC")

f. PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC")

Pada tanggal 24 April 2012, DCC menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Air Bersih dengan PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM) dengan jangka waktu 20 tahun (belum termasuk waktu pembangunan). Dalam perjanjian tersebut, DCC akan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di atas tanah KIM seluas 8.873,68 m² dengan bentuk kerjasama *Build Operate Transfer* (BOT) dengan kesepakatan volume air bersih yang disalurkan di titik penyerahan minimum sebesar 250.000 m³/bulan dengan harga Rp5.800 per m³ (tidak termasuk PPN).

On April 24, 2012, DCC entered into Cooperation Agreement regarding Treated Water Supply to PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM) for period of 20 years (excluding construction phase). The agreement states that DCC shall build a Water Treatment Plant (WTP) on the land owned by KIM of 8,873.68 m² under Build Operate Transfer (BOT) scheme. Both parties agree the minimum supply of treated water volume at transfer point is 250,000 m³/month at price of Rp5,800 per m³ (excluding VAT).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

f. PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC") (lanjutan)

Selanjutnya, DCC wajib membangun IPA jika kebutuhan air KIM telah melebihi 250.000 m³/bulan dengan harga yang akan dievaluasi dan disesuaikan sebesar 10% setiap 3 tahun atau setiap terjadinya kenaikan tarif listrik, BBM dan lainnya yang mempengaruhi langsung biaya produksi. DCC dan KIM sepakat untuk hanya menggunakan air permukaan sungai Deli dan sumber air permukaan lainnya di area KIM dengan kapasitas maksimum sebesar 1.000 liter/detik.

Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang namun jika tidak diperpanjang, DCC harus secara otomatis menyerahkan seluruh sarana dan prasarana serta IPA kepada KIM.

Perjanjian ini tidak memasukkan adanya opsi pembaharuan perjanjian kecuali terjadinya keadaan kahar sesuai yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut. Pengakhiran perjanjian dapat dilakukan jika KIM tidak melaksanakan pembayaran, DCC tidak menyalurkan air bersih atau salah satu pihak mengalami kepailitan sesuai yang dijelaskan dalam perjanjian.

Pada tanggal 19 Oktober 2022, DCC menandatangani amandemen kedua Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Air Bersih dengan PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM) terkait pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dua yang dilakukan oleh DCC dengan kapasitas 100 liter/detik dengan nilai pembangunan sebesar Rp8.578.006.350 dan bank garansi sebesar 5% dari nilai pembangunan. Terdapat juga perubahan tarif menjadi Rp7.200 per m³ yang berlaku efektif sejak tanggal 24 Januari 2022.

Selanjutnya, setelah ditandatangani berita acara penyelesaian pembangunan, terdapat peningkatan penyerahan minimum sebesar 400.000 m³/bulan dengan harga Rp7.200 per m³ per bulan dan akan naik kembali menjadi Rp7.920 per m³ per bulan pada 24 Januari 2025.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

f. PT Dain Celicani Cemerlang ("DCC") (continued)

Furthermore, DCC is obliged to build WTP when KIM water demand has exceeded 250,000 m³/month. The price will be evaluated and adjusted at 10% in every 3 years or at the time of the increase in electricity, fuel and other tariffs which affect production costs directly. DCC and KIM agreed to use surface water from Deli river and other surface sources around KIM area with a maximum capacity of 1,000 liters/seconds.

The term of this agreement can be prolonged, but if it is not, DCC will transfer all of its assets to KIM, automatically.

The agreement is excluded of any agreement renewal option unless the corresponding force majeure described in the agreement. The agreement shall terminated if KIM does not made payment, DCC does not deliver treated water or one of the parties is insolvent as described in the agreement.

On October 19, 2022, DCC entered into the second amendment to the Cooperation Agreement on Clean Water Supply with PT Kawasan Industri Medan (Persero) (KIM) regarding the construction of two Water Treatment Plants (WTP) carried out by DCC with a capacity of 100 liters/second with a construction value of Rp.8,578,006,350 and a bank guarantee of 5% of the construction value. There is also a change in the tariff to Rp7,200 per m³ which is effective from January 24, 2022.

Furthermore, after the construction completion memo were signed, there will be an increase in the minimum delivery of 400,000 m³/month at a price of Rp7,200 per m³ per month and will increase again to Rp7,920 per m³ per month starting on January 24, 2025.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")

- (i) Perjanjian Pertahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pendistribusian Air Bersih.

Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 1995 perihal Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) II Serang dan SCTK yang diwakili oleh STR, yang telah diubah pada tanggal 24 Desember 2013, tentang Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi meliputi pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan, dan Pendistribusian Air Bersih, SCTK dan PDAM sepakat untuk/bahwa:

- 1) Memanfaatkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 100 liter/detik yang akan diserap hingga tahun 2015.
- 2) Membangun IPA berkapasitas 175 liter/detik pada tahun 2014 yang akan terserap habis hingga tahun 2018.
- 3) Membangun IPA berkapasitas 100 liter/detik pada tahun 2018 yang akan terserap habis hingga tahun 2021.
- 4) Jangka waktu Perjanjian Konsesi untuk pembangunan IPA yang ada dengan kapasitas 100 liter/detik adalah 30 tahun, dimulai tanggal 1 Juni 1996 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2026.
- 5) Jangka waktu Amandemen Perjanjian Konsesi adalah selama 25 tahun sejak selesainya pembangunan IPA tahap I pada tahun 2014 dan akan berakhir pada tahun 2039.
- 6) SCTK wajib membayar pajak air baku kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp100,98 per m³.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK")

- (i) Agreement on work phasing out of the Development, Operation, Management System for Water Supply and Distribution.

Based on the agreement dated November 29, 1995 regarding to Cooperation Agreement between the Regional Water Company (PDAM) II Serang and SCTK, which represented by STR, which has been amended on December 24, 2013, concerning on implementation stage on concession development such as Construction, Operation, Management System, and distribution of Water Supply, SCTK and PDAM agreed to/that:

- 1) Utilize Water Treatment Plant (WTP) capacity of 100 litres/second and absorb the capacity until 2015.
- 2) Build WTP with capacity of 175 litres/second in 2014 and fully absorb the capacity until 2018.
- 3) Build a WTP with capacity of 100 litres/second in 2018 and fully absorb the capacity until 2021.
- 4) The Concession Agreement period for the existing WTP with capacity of 100 litres/second is for 30 years, began on June 1, 1996 and will expires on May 31, 2026.
- 5) The Amendment of Concession Agreement period is for 25 years valid from the completion of first phase WTP in 2014 and will expire in 2039.
- 6) SCTK shall pay raw water tax to Regency Government amounting to Rp100.98 per m³.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian tanggal 29 November 1995 perihal Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) II Serang dan SCTK yang diwakili oleh STR, yang telah diubah pada tanggal 24 Desember 2013, tentang Pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konsesi meliputi pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, Pengelolaan Sistem Penyediaan, dan Pendistribusian Air Bersih, SCTK dan PDAM sepakat untuk/bahwa: (lanjutan)

- 7) SCTK memberikan bagian air yang terjual setiap bulannya kepada PDAM sebesar 2% dari setiap meter kubik air yang terjual.
- 8) PDAM berhak menerima royalti air berupa curah secara Cuma-Cuma sebesar 7,5% dari volume penjualan ke industri.
- 9) Menyerahkan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan seluruh fasilitas sistem penyediaan air minum SCTK kepada PDAM saat perjanjian kerjasama ini berakhir.
- 10) Mengelola sumber air baku untuk diproduksi dan didistribusikan untuk memenuhi kapasitas produksi sebesar 375 liter/detik, dan dapat ditingkatkan atas persetujuan para pihak apabila kapasitas dan ketersediaan air baku memungkinkan.
- 11) Tarif air minum ditetapkan Bupati Serang berdasarkan usulan SCTK dan rekomendasi dari PDAM.
- 12) Pengalihan saham SCTK pada perusahaan baru, ke afiliasi SCTK atau ke pihak lain yang menyebabkan kepemilikan saham SCTK secara keseluruhan berkurang dari 51%, harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PDAM.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK") (continued)

Based on the agreement dated November 29, 1995 regarding to Cooperation Agreement between the Regional Water Company (PDAM) II Serang and SCTK, which represented by STR, which has been amended on December 24, 2013, concerning on implementation stage on concession development such as Construction, Operation, Management System, and distribution of Water Supply, SCTK and PDAM agreed to/that: (continued)

- 7) SCTK shall provide grants to PDAM on monthly basis, 2% from each cubic meter of water sold.
- 8) PDAM entitled to receive royalty in bulk water for free, 7.5% from sales volume to industrial customers.
- 9) Hand over in good condition and fully operating the entire of SCTK's water treatment system facility to PDAM when the agreement expires.
- 10) Manages the source of raw water to be produced and distributed to meet production capacity of 375 liters/second and can be increased based on all parties approval if the capacity and availability of raw water are possible.
- 11) Drinking water tariff is determined by Serang Regent based on SCTK proposal and PDAM recommendation.
- 12) Transfer of SCTK's shares to new entity, to SCTK affiliated or other parties which will cause SCTK ownership to be less than 51%, must obtain written approval first from PDAM.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK") (lanjutan)

- (ii) Perjanjian Pengembangan Penyediaan Air Bersih Serang Timur

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 14 Januari 1999 antara STR dan JSNM tentang Pengembangan Penyediaan Air Bersih di Serang Timur dengan kapasitas sampai dengan 100 liter per detik, STR dan JSNM menyepakati kerjasama dalam pengolahan dan pendistribusian air bersih di Serang Timur sesuai dengan ketentuan-ketentuan di perjanjian kerjasama.

Pada tanggal 2 Desember 2013, SCTK dan STR sepakat untuk mengakhiri perjanjian pelimpahan wewenang atas pengolahan air di Serang. Dengan berakhirnya perjanjian pelimpahan wewenang tersebut, maka Perjanjian Kerjasama antara STR dan JSNM juga berakhir. Selanjutnya, pengolahan dan pendistribusian air bersih di Serang Timur menjadi wewenang SCTK.

- (iii) Amandemen Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Air Olahan

Pada tanggal 13 April 2023, SCTK dan Perumda Tirta Al Bantani melakukan amandemen perjanjian kerjasama terkait dengan perubahan tarif air olahan menjadi sebesar Rp3.120 per m³.

- (iv) Perjanjian Kerja Sama tentang Bagi Hasil dalam Pelayanan Bidang Pemasaran dan Sosialisasi kepada Masyarakat Industri

Pada tanggal 13 April 2023, SCTK dan Perumda Tirta Al Bantani menandatangani perjanjian kerjasama bagi hasil dalam pelayanan bidang pemasaran dan sosialisasi kepada masyarakat industri. SCTK sepakat untuk memberikan bagi hasil sebesar Rp600 per m³ dari air yang terjual kepada Perumda Tirta Al Bantani atas kinerjanya yang terukur dalam memastikan perolehan alokasi air baku dan penyelenggaraan pemasaran serta sosialisasi kepada masyarakat industri SCTK.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

g. PT Sarana Catur Tirta Kelola ("SCTK") (continued)

- (ii) Water Supply Development Agreement East Serang

Based on the Cooperation Agreement dated January 14, 1999 between STR and JSNM regarding to Development of Water Supply in East Serang with capacity up to 100 litres per second, STR and JSNM agreed to cooperate in management and distribution of treated water in East Serang Timur with terms as stated in cooperation agreement.

As of December 2, 2013, SCTK and STR agreed to terminate the right transfer agreement of water management in Serang. With the termination of transfer agreement, Cooperation Agreement between STR and JSNM was also terminated. Then, right of management and distribution of treated water in East Serang was transferred to SCTK.

- (iii) Amendment to the Cooperation Agreement for the Distribution of Treated Water.

On April 13, 2023, SCTK and Perumda Tirta Al Bantani entered into an amendment to the cooperation agreement regarding the changes in treated water tariff to Rp3,120 per m³.

- (iv) Cooperation Agreement on Profit Sharing in Marketing and Socialization Services to Industrial Community

On April 13, 2023, SCTK and Perumda Tirta Al Bantani signed a profit sharing cooperation agreement in marketing and socialization services to the industrial community. SCTK agreed to provide a profit share of Rp600 per m³ of water sold to Perumda Tirta Al Bantani for its measurable performance in ensuring the supply of raw water allocation and organizing marketing and outreach to the SCTK's industrial community.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

38. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

h. PT Tirta Bangun Nusantara ("TBN")

Berdasarkan Akta Notaris Vita Cahyojati, S.H., M.Hum No. 21 tanggal 30 November 2022, PT Potum Mundi infranusantara telah setuju untuk melakukan penjualan atas seluruh saham PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) kepada PT Bahtera Hijau Mandiri, pihak ketiga.

Sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 23 Desember 2022, harga pembelian yang akan dibayarkan kepada PT Potum Mundi Infranusantara adalah sebesar Rp51.000.000.000.

i. PT Jakarta Metro Ekspresway ("JMEX")

JMEX mengadakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia (DPU), sebagai pemegang hak Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), dengan Surat Perjanjian bernomor 190/PPJT/V/Mn/2006 tanggal 29 Mei 2006. Dalam perjanjian ini, DPU menunjuk dan memberikan kepada JMEX, hak untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol atas nama Pemerintah dan menyelenggarakan manajemen jalan tol dengan risiko dan biaya yang ditanggung sendiri oleh JMEX dengan masa konsesi selama 45 tahun, termasuk masa pembangunannya. Selama masa operasi, JMEX wajib melaksanakan pemeliharaan dan menyediakan asuransi sebagai perlindungan aset jalan tol. Selama masa konsesi, JMEX dapat memanfaatkan ruang milik jalan tol untuk penempatan iklan, utilitas dan/atau bangunan utilitas. Pada akhir masa pengusahaan jalan tol, JMEX akan menyerahkan jalan tol tersebut kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCY (continued)

Subsidiaries (continued)

h. PT Tirta Bangun Nusantara ("TBN")

Based on Notarial Deed Vita Cahyohati, S.H., M.Hum No. 21 dated November 30, 2022, PT Potum Mundi Infranusantara agreed to sell all shares of PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) to PT Bahtera Hijau Mandiri, a third party.

In accordance with the Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dated December 23, 2022, purchase price which shall be paid to PT Potum Mundi Infranusantara in the amount of Rp51,000,000,000.

i. PT Jakarta Metro Ekspresway ("JMEX")

JMEX entered into Toll Road Concessionaire Agreement with the Department of Public Working of the Republic of Indonesia (DPU) as the right holder of Jakarta Outer Ring Road (JORR) Toll Road through Agreement Letter No. 190/PPJT/V/Mn/2006 dated May 29, 2006. Moreover, In this agreement, DPU appointed and assigned the JMEX to develop and to operate the toll road on behalf of the Government and to conduct toll road management at its own risk and cost for a concession period of 45 years including construction period. During the operation period, the JMEX has to maintain and to provide insurance coverage to the toll road. During the concession period, JMEX is entitled to place an advertisement, utilities and/or utilities building in the toll road area. At the expiry of the concession period, JMEX should hand-over the toll road to The Toll Road Authority (BPJT).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

39. INFORMASI SEGMENT

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, Grup menggunakan segmen usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki enam segmen operasi yang dilaporkan berupa jasa pengelola jalan tol, investasi, pelabuhan, air bersih, energi dan media.

Informasi konsolidasian berdasarkan segmen usaha dan segmen geografis adalah sebagai berikut:

39. SEGMENT INFORMATION

Based on the financial information used by management in evaluating segment performance and determining the allocation of its resources, the Group uses business segments based on products and services and has six operating segments are reported in the form of toll road management services, investment, ports, water, energy and telecommunications towers.

Consolidated information based on business segments and geographical segments are as follows:

31 Desember 2023/December 31, 2023									
Segmen Usaha	Jasa pengelola jalan tol/ Toll road operator services	Investasi/ Investment	Pelabuhan/ Port	Penyediaan air/ Water supply	Energi/ Energy	Media/ Media	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	Business Segment
Pendapatan dan penjualan	1.399.109.235.362	-	-	90.431.870.089	194.799.044.874	2.652.047.835	-	1.686.992.198.160	Revenues and sales
Beban segmen	(895.393.631.256)	-	-	(47.005.396.863)	(92.566.406.507)	(748.521.378)	-	(1.035.713.956.006)	Segment cost and expenses
Hasil segmen (Bruto)	503.715.604.104	-	-	43.426.473.226	102.232.638.367	1.903.526.457	-	651.278.242.154	Segment results (Gross)
Beban umum dan administrasi	(158.842.127.743)	(92.777.481.982)	(3.576.310.832)	(37.626.039.817)	(42.639.097.487)	(503.814.790)	75.936.082.641	(260.028.790.010)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan	2.316.208.473	871.083.027	2.338.566.755	1.846.633.475	663.489.589	76.493.725	-	8.112.475.044	Finance income
Beban keuangan	(460.714.096.173)	13.748.142.471	(16.536.605)	(12.081.101.913)	(26.277.980.972)	(6.749.106)	(14.938.119.840)	(500.286.442.138)	Finance cost
Bagian atas laba entitas asosiasi	(80.373.007.173)	-	846.701.435	-	-	-	63.917.359	(79.462.388.339)	Equity in net income of associates
Laba atas penjualan entitas anak	-	-	4.979.149.422	7.059.541.278	-	-	-	12.038.690.700	Gain on disposal of investment
Pendapatan/(beban) lain-lain	(12.400.946.490)	66.548.090.919	(409.039.073)	(16.007.534)	889.547.322	173.929.336	(52.872.060.463)	1.913.514.017	Other operating income/(expense)
Laba sebelum pajak	(206.298.364.962)	(11.610.165.565)	4.162.531.102	2.609.498.715	34.868.596.819	1.643.385.622	8.189.819.697	(166.434.698.572)	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	(55.173.752.398)	-	(3.881.979.480)	(2.461.774.133)	(7.920.474.365)	-	-	(69.437.980.376)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	(261.472.117.360)	(11.610.165.565)	280.551.622	147.724.582	26.948.122.454	1.643.385.622	8.189.819.697	(235.872.678.948)	Profit for the year
Informasi lainnya:									Other information:
Aset segmen	99.760.993.745	3.587.171.241.677	123.394.559.813	533.525.165.693	689.734.687.746	11.600.429.838	(725.944.321.761)	4.319.242.756.751	Segment assets
Liabilitas segmen	34.121.998.665	163.567.949.130	4.450.584.480	237.864.782.954	375.153.753.366	1.904.790.357	(189.323.202.244)	627.740.656.708	Segment liabilities
Perolehan/(pelepasan) aset tetap	3.526.046.228	638.074.033	-	945.794.543	3.729.891.736	-	-	8.839.806.540	Acquisition/(disposal) of fixed assets
31 Desember 2023/December 31, 2023									
Segmen Geografis	Jabodetabek	Makassar	Medan	Serang	Pontianak	Eliminasi	Konsolidasian		Geographic Segment
Pendapatan	1.033.082.118.782	368.679.164.415	89.105.716.048	56.119.023.933	140.006.174.982	-	1.686.992.198.160		Revenues
Aset segmen	2.351.044.358.312	-	537.962.237.079	214.532.949.909	243.046.859.284	972.656.352.167	4.319.242.756.751		Segment assets
Aset pajak tangguhan	622.586.336	-	493.176.548	1.499.114.980	-	661.836.124	3.276.713.988		Deferred tax assets
Liabilitas segmen	237.792.169.515	-	379.295.956.370	123.711.959.367	89.062.257.215	(202.121.685.759)	627.740.656.708		Segment liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	710.788.715	-	8.074.858.913	298.950.078	9.084.597.706		Deferred tax liabilities
31 Desember 2022/December 31, 2022									
Segmen Usaha	Jasa pengelola jalan tol/ Toll road operator services	Investasi/ Investment	Pelabuhan/ Port	Penyediaan air/ Water supply	Energi/ Energy	Telekomunikasi/ Telecommunication	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	Business Segment
Pendapatan dan penjualan	1.155.264.841.148	-	-	75.839.814.635	171.265.440.601	-	-	1.402.370.096.384	Revenues and sales
Beban segmen	(691.542.954.387)	-	-	(37.910.752.041)	(91.623.273.987)	-	-	(821.076.980.415)	Segment cost and expenses
Hasil segmen (Bruto)	463.721.886.761	-	-	37.929.062.594	79.642.166.614	-	-	581.293.115.969	Segment results (Gross)
Beban umum dan administrasi	(129.960.161.865)	(93.810.603.713)	(3.264.943.857)	(36.684.260.926)	(32.437.645.896)	(827.988.451)	70.546.263.908	(226.439.340.800)	General and administrative expenses
Penghasilan keuangan	2.264.918.335	175.587.184	2.350.858.429	2.379.663.693	217.024.504	247.161.992	-	7.635.214.137	Finance income
Beban keuangan	(155.268.081.695)	107.071.695.238	(1.541.255)	(8.790.159.526)	(28.224.405.862)	22.776.889	(109.129.670.707)	(194.319.386.918)	Finance cost
Bagian atas laba entitas asosiasi	74.490.401.354	-	1.111.735.428	11.095.668.465	-	-	-	86.697.805.247	Equity in net income of associates
Pendapatan/(beban) lain-lain	(65.254.032.676)	104.236.511.550	2.625.042.952	(2.589.535.428)	(549.957.838)	248.311.793	(115.382.247.584)	(76.665.907.231)	Other operating income/(expense)
Laba sebelum pajak	189.994.930.214	117.673.190.259	2.821.151.697	3.340.438.872	18.647.181.522	(309.737.777)	(153.965.654.383)	178.201.500.404	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	(50.311.128.189)	-	-	(3.048.106.250)	(2.377.434.186)	-	-	(55.736.668.626)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	139.683.802.025	117.673.190.259	2.821.151.696	292.332.622	16.269.747.336	(309.737.777)	(153.965.654.383)	122.464.831.778	Profit for the year
Informasi lainnya:									Other information:
Aset segmen	9.842.686.434.099	2.664.101.681.696	119.276.974.059	485.322.277.306	712.786.086.403	8.192.976.422	(2.678.864.489.694)	11.153.501.940.291	Segment assets
Liabilitas segmen	7.160.401.398.275	123.676.152.018	959.807.200	160.651.175.938	379.113.113.955	187.455.898	(154.033.858.526)	7.670.955.244.758	Segment liabilities
Perolehan/(pelepasan) aset tetap	3.576.703.250	939.552.587	-	999.676.220	7.259.153.184	-	-	12.775.085.241	Acquisition/(disposal) of fixed assets
31 Desember 2022/December 31, 2022									
Segmen Geografis	Jabodetabek	Makassar	Medan	Serang	Pontianak	Eliminasi	Konsolidasian		Geographic Segment
Pendapatan	796.166.838.316	361.113.336.452	70.272.251.619	56.345.445.566	117.729.516.164	(1.257.291.733)	1.402.370.096.384		Revenues
Aset segmen	22.827.189.341.552	3.142.498.321.879	537.145.461.445	213.001.280.482	235.859.858.958	(15.802.192.324.025)	11.153.501.940.291		Segment assets
Aset pajak tangguhan	1.042.570.387	-	3.707.495.035	1.499.114.980	-	-	6.249.180.402		Deferred tax assets
Liabilitas segmen	6.015.919.661.156	1.881.487.074.423	284.092.431.719	124.589.469.057	55.750.658.960	(16.032.794.540.073)	7.670.955.244.758		Segment liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	15.053.171.910	63.166.555.100	-	-	5.828.920.239	-	84.048.647.249		Deferred tax liabilities

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja Grup, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Grup dalam menjalankan usahanya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Grup adalah untuk menjaga dan melindungi Grup melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh manajemen Grup.

Grup memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas.

a. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus Kas

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar dan arus kas masa datang dari instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur Grup terhadap suku bunga timbul dari pinjaman bank. Pinjaman bank pada suku bunga variabel tersebut mempengaruhi arus kas Grup atas risiko suku bunga yang sebagian saling hapus dengan kas yang ditempatkan pada suku bunga variabel. Untuk meminimalisir risiko suku bunga, Grup mengatur biaya bunga dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen melakukan penilaian terhadap suku bunga yang ditawarkan bank untuk memperoleh suku bunga yang paling menguntungkan sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan penempatan dan mengadakan perjanjian pinjaman baru.

b. Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Selain itu, pendapatan dan pengeluaran Grup hampir seluruhnya diterima dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah.

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Considering that good risk management practice implementation could better support the performance of the Group, hence, risk management would always be an important supporting element for the Group in operating its business. The target and main purpose of the implementation of risk management practices in the Group is to maintain and protect the Group through managing the risk of losses, which might arise from its various activities as well as maintaining risk level in order to match with the direction already established by the management of the Group.

The Group has exposure to the following risk from financial instruments, such as: credit risk, interest risk, and liquidity risk.

a. Interest Rate Risk on Fair Value and Cash Flow

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Group exposure to the interest rate risk arises from bank loans. Bank loans at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk which is partially offset by cash held at variable rates. To minimize interest rate risk, the Group manages interest cost by evaluating market rate trends. Management conducts assessments among interest rates offered by banks to obtain the most favorable interest rate before taking any decision in relation to its placements and to enter a new loan agreement.

b. Currency Risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates. Revenues and expenditures of the Group almost entirely received and paid in Rupiah.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit dihadapi Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan tertentu. Grup memberikan pembayaran secara kredit hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel.

Selain itu, saldo piutang dimonitor secara berkelanjutan dengan tujuan bahwa eksposur Grup terhadap piutang yang tidak tertagih tidak signifikan.

Kas dan setara kas ditempatkan pada lembaga keuangan yang teratur dan bereputasi. Eksposur maksimal atas risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat dari setiap jenis aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Credit Risk

Credit risk is the risk where one of the parties on a financial instrument will fail to meet its obligations, leading to a financial loss. Credit risk faced by the Group was derived from credits granted to certain customers. The Group only provides credit terms with recognized and credible third parties.

In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

Cash and cash equivalents are placed in financial institutions which are regulated and reputable. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statement of financial position.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

	31 Desember 2023/December 31, 2023		31 Desember 2022/December 31, 2022		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Maksimum eksposur/ Maximum exposure	Nilai tercatat/ Carrying value	Maksimum eksposur/ Maximum exposure	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	248.208.416.540	248.208.416.540	523.370.407.887	523.370.407.887	Cash and cash equivalents
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	29.916.867.592	29.916.867.592	Financial assets designated at fair value through other comprehensive income
Piutang usaha - Pihak ketiga	27.147.169.771	27.147.169.771	29.691.010.127	29.691.010.127	Trade receivables - Third parties
Piutang non-usaha - Pihak berelasi	36.006.249.992	36.006.249.992	51.194.810.945	51.194.810.945	Trade receivables - Related parties
Piutang non-usaha - Pihak ketiga	32.828.527.362	32.828.527.362	67.024.637.874	67.024.637.874	Non-trade receivables - Related parties
Piutang atas perjanjian konsesi jasa	324.796.264.859	324.796.264.859	315.135.938.632	315.135.938.632	Service concession arrangement receivables
Piutang sewa pembiayaan	358.025.602.113	358.025.602.113	374.990.251.617	374.990.251.617	Finance lease receivables
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	14.836.581.187	14.836.581.187	125.013.806.496	125.013.806.496	Restricted cash in banks
Jumlah	1.041.848.811.824	1.041.848.811.824	1.516.337.731.170	1.516.337.731.170	Total

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas

Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan cadangan yang memadai dan dengan terus memantau rencana dan realisasi arus kas dengan cara pencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2023:

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun/ <i>More than 1 year</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Utang usaha	12.048.419.796	-	12.048.419.796	Trade payables
Utang lain-lain	13.469.472.429	-	13.469.472.429	Others payables
Beban akrual	12.561.549.364	-	12.561.549.364	Accrued expenses
Utang sewa	1.118.954.660	-	1.118.954.660	Lease liabilities
Utang pembiayaan konsumen	522.567.687	591.173.038	1.113.740.725	Consumer financing liabilities
Pinjaman jangka panjang	54.994.521.722	455.960.163.391	510.954.685.113	Long-term loans
Jumlah	94.715.485.658	456.551.336.429	551.266.822.087	Total

e. Risiko Permodalan

Tujuan utama Grup dalam mengelola permodalan adalah melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Dengan demikian, Grup dapat memberikan imbal hasil yang memadai kepada para pemegang saham serta juga sekaligus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mengelola permodalan tersebut, manajemen senantiasa memperhatikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas. Penyesuaian terhadap struktur keuangan dilakukan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Di samping itu, kebijakan diarahkan untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat guna mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Liquidity Risk

The management has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves and by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below represents the maturity schedule of the Group financial liabilities based on undiscounted contractual payments as of December 31, 2023:

e. Capital Risk

The primary objective of the Group in managing capital is to protect the Group's ability to maintain business continuity. Accordingly, the Group can provide adequate returns to shareholders as well as providing benefits to other stakeholders.

In managing capital, management always pay attention to maintain a healthy capital ratio between the total liabilities and equity. Adjustments to the financial structure are based on changing economic conditions and risk characteristics of the underlying asset. In addition, a policy geared to maintain a healthy capital structure for securing access to funds at reasonable cost.

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Risiko Permodalan (lanjutan)

Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menerbitkan saham baru, mengusahakan pendanaan melalui pinjaman, melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada ataupun menjual aset untuk mengurangi pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses terhadap manajemen permodalan selama periode penyajian.

Berikut adalah *gearing ratio* yang merupakan perbandingan antara jumlah liabilitas (dikurangi kas dan setara kas) terhadap jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Pinjaman	512.068.425.838	6.640.149.146.331
Kas dan setara kas	(248.208.416.540)	(523.370.407.887)
Pinjaman - bersih	263.860.009.298	6.116.778.738.444
Ekuitas	3.691.502.100.043	3.482.546.695.533
Rasio pinjaman - bersih terhadap modal	0,07	1,76

In maintaining and adjusting its capital structure, the Group may issue new shares, seek financing through loans, restructuring of existing debt or sell assets to reduce borrowing. There was no change in the objectives, policies and processes to capital management during the presentation.

The following is a *gearing ratio* which is the ratio between the total debt (net of cash and cash equivalents) to total equity as of December 31, 2023 and 2022:

Debts
Cash and cash equivalents
Net debt
Equity
Net debt to equity

Estimasi Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 68, "Pengakuan Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Pengukuran nilai wajar Tingkat 1 yang diperoleh dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;

Pengukuran nilai wajar Tingkat 2 yang diperoleh dari input selain dari harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

Pengukuran nilai wajar Tingkat 3 yang diperoleh dari teknik penilaian yang memasukkan input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Fair Value of Financial Instruments Estimation

The fair value of financial assets and liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purpose.

PSAK 68, "Fair Value Measurement" requires disclosures of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

40. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
ASET		
Kas dan setara kas	248.208.416.540	523.370.407.887
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual	-	29.916.867.592
Piutang usaha	27.147.169.771	29.691.010.127
Piutang non-usaha	68.834.777.354	118.219.448.819
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	14.836.581.187	125.013.806.496
Jumlah	359.026.944.852	826.211.540.921
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
LIABILITAS		
Utang usaha	12.048.419.796	369.595.454.887
Utang lain-lain	13.469.472.429	50.715.202.782
Beban akrual	12.561.549.364	97.418.018.639
Utang pembiayaan konsumen	1.113.740.725	2.332.668.765
Utang sewa	1.118.954.660	6.252.840.743
Pinjaman jangka panjang	510.954.685.113	6.637.816.477.566
Jumlah	551.266.822.087	7.164.130.663.382

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (lanjutan)

The fair value of financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant, are as follows:

ASSETS
Cash and cash equivalent
Financial assets available for sale
Trade receivables
Non-trade receivables
Restricted cash in banks
Total
LIABILITIES
Trade payables
Others payables
Accrued expenses
Consumer financing liabilities
Lease liabilities
Long-term loans
Total

41. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payments	Non Kas*/ Non-cash*	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Pinjaman bank jangka panjang	6.637.816.477.566	949.012.093.564	(275.655.895.074)	(6.800.217.990.943)	510.954.685.113	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2.332.668.765	-	(1.430.843.786)	211.915.746	1.113.740.725	Consumer financing liabilities
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payments	Non Kas/ Non-cash	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pinjaman bank jangka panjang	2.858.327.329.199	4.209.897.796.371	(419.966.491.642)	(10.442.156.362)	6.637.816.477.566	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2.061.998.740	-	(1.672.577.300)	1.943.247.325	2.332.668.765	Consumer financing liabilities

*Termasuk dalam kolom non-kas pinjaman jangka panjang adalah dampak dekonsolidasi MUN sebesar Rp6.801.799.613.397 (Catatan 1d)/ Including in non-cash of long-term bank loans the deconsolidation effect of MUN amounting to Rp6,801,799,613,397 (Note 1d).

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun
Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

**41. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS
(lanjutan)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:		
Penambahan aset takberwujud melalui beban akrual, utang usaha, dan kapitalisasi bunga	-	218.308.138.350
Penambahan aset tetap dan aset tak berwujud melalui uang muka dan utang	796.937.517	1.235.353.170
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen (Catatan 22)	-	1.943.247.325

41. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS (continued)

Significant activities not affecting cash flows:
Addition of asset under construction through accrual, trade payable, and interest capitalization
Addition of fixed assets and intangible assets through advance and payables
Addition of fixed assets through consumer financing liabilities (Note 22)

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Marga Metro Nusantara (Marga)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Marga Metro Nusantara yang diaktakan dengan Akta No. 09 tanggal 22 Januari 2024 oleh Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., notaris di Jakarta Selatan, menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula berjumlah Rp62.130.000.000 atau setara dengan 62.130 saham menjadi sebesar Rp84.994.000.000, atau setara dengan 89.994 saham. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0023507 tanggal 26 Januari 2024.

42. SUBSEQUENT EVENTS

Increase of issued and paid-up capital of PT Marga Metro Nusantara (Marga)

Based on the Decision of the Shareholders of PT Marga Metro Nusantara which was notarized by Deed No.09 dated January 22, 2024, by Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., a notary in South Jakarta, approved the increased of issued and paid-up capital from Rp62,130,000,000 or equivalent to 62,130 shares and to Rp84,994,000,000 or equivalent to 89,994 shares. The deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU.AH.01.03-0023507 dated January 26, 2024.

Laporan Tahunan
Annual Report

2023

**Mengoptimalkan Peluang,
Memaksimalkan Pertumbuhan**

Optimizing Opportunities, Maximizing Growth

PT Nusantara Infrastructure Tbk

Equity Tower 38th Floor
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 9
Jakarta 12190 - Indonesia
P. + 62 21 515 0100
F. + 62 21 515 1221
www.nusantarainfrastructure.com